

TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)
STUDI
KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA
SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DITINJAU DARI ASPEK FISIK



Disusun oleh :

Nama : HALIM MANSYUR

Nim : 04.24.040

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
(TEKNIK PLANOLOGI)
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

2012

THE UNIVERSITY OF

(CERTIFICATE)

1958

IN THE DEPARTMENT OF

PHYSICS

THE UNIVERSITY OF

PHYSICS



1958

PHYSICS

1958

THE UNIVERSITY OF

(CERTIFICATE)

IN THE DEPARTMENT OF

PHYSICS

1958

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)

STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI PUSAT
PEMERINTAHAN NKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Disusun oleh :

Nama : HALIM MANSYUR
NIM. : 04.24.040

Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jenjang Strata Satu (S1)

Di

Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota
Jurusan Teknik Planologi
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

Dinyatakan Lulus Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Hari : Senin, 30 Januari, 2012

Anggota Penguji :

Penguji I



(Dr.Ir.Ibnu Sasongko,MT)

Penguji II



(Arief Setiyawan,ST,MTP)

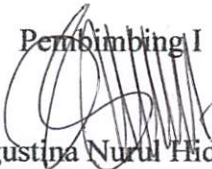
Penguji III



(Maria Cristhina E,ST,MIEUM)

Menyetujui,

Pembimbing I



(Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP)

Pembimbing II



(Ir. Wahyu Hidayat, MM, MBA)

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

(Ir. A. Agus Santosa, MT)

Ketua Jurusan
Teknik Planologi
FTSP-ITN Malang



(Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT)



LEMBAR PENGESAHAN

BUKA AKHIR
(SKRIPSI)

STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI PUSAT
BEMBERTAHAN NKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Dikumpulkan oleh:

Nama : HALIM ALANSYUR

NIM : 0464040

Dipertanggungjawabkan Disiapkan Tim Pengajar (Jawa Tengah)

Jombang Sains (S)

Di

Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota

Jurusan Teknik Perencanaan

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Politeknik Teknologi Nasional Malang

Disetujui oleh Tim Pembina Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Guna Menerima Gelar Sarjana Teknik

Pada Hari : Senin, 30 Januari, 2012

Anggota Pengajar

Pengajar I

Pengajar II

Pengajar III

(Dr. Ir. H. Agus Supriyanto, M.T., NIP. 195401011980031001) (Dosen Pembina I, ST, MURUM)

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Agus Supriyanto, M.T., NIP. 195401011980031001) (Dosen Pembina I, ST, MURUM)

Mengetahui

Ketua Jurusan
Teknik Perencanaan
11254111 Malang

Ketua Jurusan
Teknik Sipil dan Perencanaan
11254111 Malang

(Dr. Ir. H. Agus Supriyanto, M.T.)

(Dr. Ir. H. Agus Supriyanto, M.T.)

BERITA ACARA SEMINAR KOMPREHENSIF



Nama : Halim Mansyur

Nim : 04. 24. 040

Judul : Studi Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

NO	PENGUJI	PERTANYAAN/MASUKAN	TTD
1	DR.IR. Ibnu Sasongko, MT	<ol style="list-style-type: none">1. Tata tulis2. <i>Ketepatan materi dan penulisan</i>3. Urutan laporan4. Perbandingan wilayah dan kebutuhan ruang5. Kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan analisa	
2	Arief Setiyawan , ST, MTP	<ol style="list-style-type: none">1. Standar vs migrasi vs sumber daya eksisting %2. Argumen ibukota Negara lain3. Bencana alam4. Redaksional	
3	Maria Cristhina E, ST, MIUEM	<ol style="list-style-type: none">1. Aspek fisik : Fisik apa jelaskan terlebih dahulu Kurangi data-data yang tidak diperlukan Gunakan data yang mendukung analisa fisik2. Kebutuhan ruang3. Jarak tempuh mewakili yang terluar saja4. Ibukota jika dipindahkan, apa yang dipindahkan	

TTD Pembimbing I

(Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP)

TTD Pembimbing II

(Ir. Wahyu Hidayat, MM)

Studi

Kelayakan Kota Palangka Raya Sebagai Pusat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau Dari Aspek Fisik

Pusat pemerintahan merupakan miniatur yang menjadi cermin dari kondisi sebuah negara, ini dapat dilihat dari berbagai masalah dan polemik yang terjadi pada negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat banyak wacana tentang pemindahan pusat pemerintahan NKRI, suara-suara yang mengangkat wacana ke tataran rencana pusat pemerintahana NKRI yang baru mulai terdengar lagi, sedikit meresahkan rakyat Indonesia yang bertanya apa, siapa, kenapa, dimana, dan bagaimanan pemindahan pusat pemerintahan NKRI itu dilakukan, sehingga rakyat seharusnya tanggap terhadap apa yang terjadi sebenarnya tentang polemik, isu, wacana dan rencana pusat pemerintahan tersebut. Dalam wacana pusat pemerintahan NKRI yang bergulir, banyak kota-kota di Indonesia yang dijagokan menjadi pusat pemerintahan NKRI yang baru yaitu, Jonggol, Malang, Palembang, Makasar dan Palangka Raya.

Alasan-alasan yang terkait wacana pemindahan pusat pemerintahan diatas menggelitik peneliti untuk mengkaji lebih dalam kota yang akan menjadi pusat pemerintahan NKRI, khususnya Kota Palangka Raya yang dijadikan lokasi studi peneliti. Untuk mempersempit studi yang dilakukan peneliti menfokuskan kajiannya pada aspek fisik khususnya bencana alam, daya dukung lahan, dan daya tampung lahan yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, setelah itu didapatkan rumusan kelayakan fisik Kota Palangka Raya menjadi pusat pemerintahan NKRI.

Berdasarkan tahapan proses analisis yang telah dilakukan, maka dapat dinyatakan Kota Palangka Raya layak sebagai pusat pemerintahan NKRI jika ditinjau dari aspek fisik karena memenuhi kriteria dari rumusan kelayakan pusat pemerintahan NKRI yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Kata kunci : Kelayakan, Pusat Pemerintahan, aspek Fisik

Feasibility Study The City of Palangka Raya as Indonesia Government Centre Viewed From Physical Aspects

Government centre is a miniature that becomes a mirror of the conditions of a country, it can be seen from a variety of problems and polemics that occurred in that country. In recent years there is much discourse about displacement of government centre, voices that raised the discourse to level-plan about the new government center began again, a little disturbing to the people of Indonesia who are asking what, who, why, where, and how displacement process of government center it done, so peoples must be responsive to the polemic, issues, discourse and plan about government center. In a discourse of government centre that revolving, many cities in Indonesia who championed as the new government center, such as Jonggol, Malang, Palembang, Makassar and Palangka Raya.

Reasons related to the discourse of displacement of government center above tickling the researcher to examine more deeply the city that would become the central of Indonesian government, especially Palangkaraya used as study site by researcher. To narrow the study, researcher focused studies on the physical aspects especially natural disasters, carrying capacity of land, and capacity of land uses quantitative and qualitative methods, after that, obtained the formulation of the physical feasibility of Palangkaraya as central-government of Indonesia

Based on the stage of the process analysis has been done, it can be stated that Palangkaraya is viable as a government center of Indonesia when viewed from the physical aspect because they meet the feasibility formula of the government center has been set by researcher.

Key words: Feasibility, Government Center, Physical aspects

KATA PENGANTAR

Terimakasihku pada Tuhan Seru Sekalian Alam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terhormat kepada Panglima Besar Revolusi Indonesia yang menjadi imam dalam pekerjaan ini sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir tentang “Studi Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan NKRI di Tinjau Dari Aspek Fisik ” dengan sebaik-baiknya.

Kota pusat pemerintahan adalah gambaran kecil (miniatur) raga dari sebuah negara, dimana jiwa yang berkembang didalamnya termuat masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme serta mengedepankan keadilan sosial, maka dari itu perlu dikaji secara menyeluruh aspek-aspek penting yang terkait tentang pusat pemerintahan yang akan dibangun tersebut.

Melihat kondisi Ibukota Negara Republik Indonesia (DKI. Jakarta) pada saat ini mengalami degradasi fungsi dan wewenang yang diembanya, maka peneliti coba menawarkan sebuah studi tentang Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan NKRI di Tinjau Dari Aspek Fisik, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada bisa teratasi lebih dini dalam menyikapi kondisi Nasional ini.

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian mengenai Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan NKRI di Tinjau Dari aspek Fisik adalah untuk mengetahui kemampuan fisik Kota Palangkaraya dalam mengemban tugas Sebagai Pusat Pemerintahan NKRI.

Dengan selesainya laporan penelitian ini saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak DR.Ir.Ibnu Sasongko, MTA selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota di ITN Malang
2. Arief Setyawan, ST,MTP selaku koordinator pembimbing mata kuliah Tugas Akhir (TA)
3. Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP selaku Dosen pembimbing TA

4. Ir. Wahyu Hidayat, MM selaku Dosen pembimbing TA
5. Pemerintah Kota Palangkaraya khususnya BAPPEDA Kota Palangkaraya
6. Rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan penelitian

Selain untuk mengetahui kelayakan fisik Kota Palangkaraya, Penelitian ini juga ingin menjawab keresahan pribadi yang mungkin juga menjadi keresahan masyarakat Indonesia, mengapa pada tahun 1957 Kota Palangka Raya diwacanakan, bahkan direncanakan menjadi Pusat Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu. Beberapa alasan tersebut membuat peneliti mencoba melakukan kajian untuk menjawab segala keresahan yang dialami peneliti atau juga masyarakat Indonesia pada umumnya, tetapi kajian penelitian ini dibatasi hanya pada kajian aspek fisik saja.

Pada akhirnya saya ucapkan terimakasih pada semua pembaca laporan penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, bimbingan, petunjuk serta kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Terimakasih.

Malang, 30-01-2012

Halim Mansyur

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Abstraksi	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Peta	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	xii
Daftar Diagram	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Sasaran	5
1.3.1. Tujuan	5
1.3.2. Sasaran	6
1.4. Ruang Lingkup Studi	6
1.4.1. Ruang Lingkup Lokasi	6
1.4.2. Ruang Lingkup Materi	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Fungsi Ibukota Negara	9
2.2. Ibukota Negara – Negara Yang Baru	12
2.3. Gambaran Ibukota Negara – Negara Besar di Dunia.....	15
2.3.1 Beijing	15
2.3.2 Washington D.C	20
2.3.3 Jakarta	24
2.3.4 Berlin	26
2.3.5 Canberra	28
2.4. Landasan Penelitian	29

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data	41
3.2 Metode Analisa Kelayakan Pusat Pemerintahan	42
3.3 Sistematika Penulisan	57

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PALANGKARAYA

4.1. Luas Wilayah dan Batas Administrasi	60
4.2. Kondisi Fisik Dasar	61
4.2.1. Fisik Dasar	61
4.2.1.1 Topografi.....	61
4.2.1.2 Jenis Tanah.....	62
4.2.1.3 Klimatologi	63
4.2.1.4 Hidrologi	63
4.3. Kependudukan.....	72
4.3.1 Jumlah Penduduk	72
4.3.2 Kepadatan Penduduk	72
4.4. Fisik Binaan	73
4.4.1 Penggunaan Lahan.....	73
4.4.2 Fasilitas.....	73
4.4.3 Utilitas.....	82
4.4.4 Sarana Prasarana Transportasi	91

BAB V ANALISA KOTA PALANGKARAYA

5.3. Kajian Regional	99
5.1.1 Kajian Rentang Kendali	99
5.1.2 Kajian Bencana Alam	101
5.2. Analisa Fisik Dasar	126
5.2.1 Analisa Daya Dukung Lahan	126
5.2.2 Analisa Kelerengan Optimum.....	129
5.2.3 Analisa Daya Tampung Maksimum	130
5.3. Analisa Kependudukan.....	137
5.3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk.....	137
5.3.2 Kepadatan Penduduk	138
5.3.3 Analisa Migrasi Penduduk.....	141
5.4. Analisa Fisik Binaan	155
5.4.1 Analisa Penggunaan Lahan	155
5.4.2 Analisa Fasilitas	156
5.4.3 Analisa Utilitas	173
5.4.4 Analisa Transportasi	178
5.5. Rumusan Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan NKRI Ditinjau Dari Aspek Fisik	185

BAB VI PENUTUP

6.5. Kesimpulan	193
6.6. Rekomendasi.....	195

DAFTAR PETA

Peta 1.1.	Peta Administrasi Kota Palangkaraya	8
Peta 4.1.	Peta Orientasi Wilayah Kota Palangkaraya	67
Peta 4.2.	Peta Topografi Kota Palangkaraya	68
Peta 4.3.	Peta Jenis Tanah Kota Palangkaraya	69
Peta 4.4.	Peta Curah Hujan Kota Palangkaraya	70
Peta 4.5.	Peta Hidrologi Kota Palangkaraya	71
Peta 4.6.	Peta Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Palangkaraya	74
Peta 4.7.	Peta Penggunaan Lahan Kota Palangkaraya	76
Peta 4.8.	Peta Jaringan Air Bersih Kota Palangkaraya	87
Peta 4.9.	Peta Jaringan Listrik Bersih Kota Palangkaraya	88
Peta 4.10.	Peta Jaringan Telekomunikasi Kota Palangkaraya	89
Peta 4.11.	Peta Jaringan Persampahan Kota Palangkaraya	90
Peta 4.12.	Peta Sistem Transportasi Kota Palangkaraya	98
Peta 5.1.	Peta Daya Dukung Lahan Kota Palangkaraya	135
Peta 5.2.	Peta Daya Tampung Lahan Kota Palangkaraya	136
Peta 5.3.	Peta Kepadatan Penduduk Kota Palangkaraya	140
Peta 5.4.	Peta Kecenderungan Penggunaan Lahan Kota Palangkaraya	158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kriteria Komperatif Ibukota Negara /Pusat Pemerintahan	32
Tabel 2.2.	Kriteria Pusat Pemerintahan Berdasarkan UU 29 Tahun 2007, PP 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN dan Teoritis.....	33
Tabel 2.3.	Rumusan Variabel Penelitian Pusat Pemerintahan NKRI.....	34
Tabel 3.1.	Kisaran Lereng Optimum.....	51
Tabel 3.2.	Standar Luas Rumah Negara Berdasarkan Tipe Peruntukanya.....	55
Tabel 3.3.	Syarat Kebutuhan Luas Terminal	56
Tabel 4.1.	Luas wilayah Kota Palangkaraya.....	64
Tabel 4.2.	Ketinggian Dari Permukaan Laut Kota Palangkaraya	65
Tabel 4.3.	Jenis Tanah Perkecamatan Kota Palangkaraya.....	65
Tabel 4.4.	Data Curah Hujan di wilayah Kota Palangkaraya Tahun 1997- 2006.....	66
Tabel 4.5.	Jumlah Penduduk Kota Palangkaraya Tahun 2004-2008.....	72
Tabel 4.6.	Kepadatan Penduduk Kota Palangkaraya Tahun 2004-2008.....	73
Tabel 4.7.	Luas Wilayah Menurut Penggunaanya Kota Palangkaraya Tahun2008.....	75
Tabel 4.8.	Fasilitas Pemerintah Kelurahan Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	78
Tabel 4.9.	Jumlah Fasilitas Perjas Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	79
Tabel 4.10.	Jumlah Fasilitas Sekolah Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	79
Tabel 4.11.	Jumlah Fasilitas Perguruan Tinggi Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	80
Tabel 4.12.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	81
Tabel 4.13.	Jumlah Fasilitas Peribadatan Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	81
Tabel 4.14.	Jumlah Fasilitas Rekreasi, Olahraga dan Ruang Terbuka Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	82
Tabel 4.15.	Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Bersih Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	84
Tabel 4.16.	Jumlah Perkembangan Penggunaan Air Bersih Kota Palangkaraya Tahun 2005-2008.....	84
Tabel 4.17.	Jumlah Pelanggan Listrik Perkecamatan Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	85

Tabel 4.18.	Jumlah Sambungan Telepon Kota Palangkaraya Tahun 2004-2008.....	86
Tabel 4.19.	Sarana Persampahan Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	86
Tabel 4.20.	Panjang Jalan Menurut Kondisi Kota Palangkaraya Tahun 2004-2008.....	93
Tabel 4.19.	Jenis Permukaan Jalan Kota Palangkaraya Tahun 2004-2008.....	94
Tabel 4.21.	Kondisi Jalan Perkecamatan Kota Palangkaraya Tahun 2004-2008.....	94
Tabel 4.22.	Lalu Lintas Penerbangan Dalam Negeri Melalui Bandar Udara Tjilik Riwut Kota Palangkaraya Tahun 2004-2008.....	97
Tabel 5.1.	Jarak dan Waktu Tempuh Kota-Kota di Indonesia Ke Kota Palangkaraya	100
Tabel 5.2.	Daya Dukung Lahan Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	128
Tabel 5.3.	Kisaran Lereng optimum Pembangunan.....	129
Tabel 5.4.	Luas Kelerengan Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	130
Tabel 5.5.	Daya Tampung Maksimum Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	134
Tabel 5.6.	Pertumbuhan Penduduk Kota Palangkaraya.....	137
Tabel 5.7.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Palangkaraya.....	138
Tabel 5.8.	Proyeksi Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Palangkaraya.....	139
Tabel 5.9.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM MPR.....	141
Tabel 5.10.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM DPR.....	142
Tabel 5.11.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM DPD.....	142
Tabel 5.12.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM BPK.....	143
Tabel 5.13.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM Presiden.....	143
Tabel 5.14.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM MA.....	143
Tabel 5.15.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM MK.....	144
Tabel 5.16.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM Kementerian.....	145
Tabel 5.17.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM Mabes TNI	147
Tabel 5.18.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM Mabes POLRI	148
Tabel 5.19.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM Mabes KEJAGUNG	148
Tabel 5.20.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM Lembaga Non Departemen.....	149
Tabel 5.21.	Jumlah Pegawai/SDM Lembaga Negara.....	150
Tabel 5.22.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM Partai Politik.....	151
Tabel 5.23.	Proyeksi Jumlah Pegawai/SDM Lembaga Asing	

	dan Lembaga Internasional.....	153
Tabel 5.24.	Proyeksi Jumlah Penduduk Migrasi Kota Palangkaraya.....	153
Tabel 5.25.	Presentase Penggunaan Lahan Kota Palangkaraya Tahun 2008.....	126
Tabel 5.26.	Tipe Gedung Negara Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Golongan Kepangkatan	159
Tabel 5.27	Standar Luas Rumah Negara Berdasarkan Tipe Peruntukanya.....	159
Tabel 5.28.	Asumsi Luas Bangunan Gedung dan Lahan Gedung Negara	159
Tabel 5.29	Luas Bangunan dan Luas Lahan Bangunan Negara Yang Dibutuhkan Kota Palangkaraya	160
Tabel 5.30.	Luas Bangunan dan Luas Lahan Partai Politik Nasional Yang Dibutuhkan Kota Palangkaraya	161
Tabel 5.31.	Luas Bangunan dan Luas Lahan Lembaga Asing Yang Dibutuhkan Kota Palangkaraya	162
Tabel 5.32.	Luas Bangunan dan Luas Lahan Fasilitas Perkantoran Yang Dibutuhkan Kota Palangkaraya	163
Tabel 5.33.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Perkantoran Kota Palangkaraya Tahun 2008	164
Tabel 5.34.	Kebutuhan Unit Dan Lahan Fasilitas Perumahan Berdasarkan Penduduk Kota Palangkaraya.....	168
Tabel 5.35.	Proyeksi Kebutuhan Unit Dan Lahan Fasilitas Perjas Kota Palangkaraya	168
Tabel 5.36.	Proyeksi Kebutuhan Unit dan Lahan Fasilitas Pendidikan Kota Palangkaraya	169
Tabel 5.37.	Proyeksi Kebutuhan Unit dan Lahan Fasilitas Kesehatan Kota Palangkaraya	169
Tabel 5.38.	Kebutuhan Unit dan Lahan Fasilitas Peribadatan Berdasarkan Penduduk Kota Palangkaraya	170
Tabel 5.39.	Kebutuhan Unit dan Lahan Fasilitas rekreasi, Olahraga dan Ruang Terbuka Berdasarkan Penduduk Kota Palangkaraya	171
Tabel 5.40.	Kebutuhan Luas Lahan Fasilitas Kegiatan Pusat Pemerintahan NKRI di Kota Palangkaraya	171
Tabel 5.41.	Perhitungan Kebutuhan Air Bersih Kota Palangkaraya.....	179
Tabel 5.42.	Perhitungan Kebutuhan Energi Listrik Kota Palangkaraya.....	179
Tabel 5.43.	Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telepon Kota Palangkaraya	180
Tabel 5.44.	Proyeksi Jumlah Unit dan Lahan TPS dan TPA Kota Palangkaraya	180
Tabel 5.45.	Analisa Kondisi Perkerasan Jalan Kota Palangkaraya Tahun 2005-2008.....	181
Tabel 5.46.	Tipe dan Ukuran Terminal Kota Palangkaraya	182

Tabel 5.47.	Syarat Kebutuhan Luas Terminal Kota Palangkaraya	182
Tabel 5.48.	Spesifikasi Bandar Udara Tjilik Riwut.....	184
Tabel 5.49.	Standar Komperasi Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.....	184
Tabel 5.50.	Perbandingan Kota Palangkaraya dengan Ibukota Negara Lainya diDunia.....	186
Tabel 5.51.	Rumusan Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Kota Pusat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	187



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Kondisi Fasilitas Permukiman.....	75
Gambar 4.2.	Kondisi Fasilitas Perjas.....	77
Gambar 4.3.	Kondisi Fasilitas Pendidikan.....	78
Gambar 4.4.	Kondisi Fasilitas Peribadatan.....	81
Gambar 4.5.	Kondisi Permukaan Jalan.....	94
Gambar 4.6.	Kondisi Terminal.....	95
Gambar 4.7.	Kondisi Bandar Udara Tjilik Riwut	97
Gambar 5.1.	Peta Kajian Rentang Kendali.....	107
Gambar 5.2.	Peta Ancaman Bencana Gunung Berapi Indonesia.....	108
Gambar 5.3.	Peta Zonasi Ancaman Bencana Gempabumi Indonesia.....	109
Gambar 5.4.	Peta Zona Bencana Gempabumi Indonesia Tahun 1990	110
Gambar 5.5.	Peta Zona Bencana Gempabumi Indonesia Tahun 1993	111
Gambar 5.6.	Peta Zonasi Ancaman Bencana Tsunami Indonesia.....	112
Gambar 5.7.	Peta Indeks Ancaman Bencana Tsunami Indonesia.....	113
Gambar 5.8.	Peta Zonasi Bencana Tsunami Indonesia Periode Ulang 100 Tahun.....	114
Gambar 5.9.	Peta Sebaran Titik Panas Indonesia.....	115
Gambar 5.10.	Peta Jumlah Titik (Hot Spot) di Indonesia.....	116
Gambar 5.11.	Peta Kejadian Banjir di Indonesia Tahun 1979 – 2009.....	117
Gambar 5.12.	Peta Ancaman Banjir di Indonesia	118
Gambar 5.13.	Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir di Propinsi Kalimantan Tengah.....	119
Gambar 5.14.	Peta Ancaman Bencana Gerakan Tanah di Indonesia.....	120
Gambar 5.15.	Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah Pada Bulan Mei 2011 Propinsi Kalimantan Tengah.....	121
Gambar 5.16.	Peta Kejadian Bencana di Indonesia 1979-2009.....	122
Gambar 5.17.	Peta Kejadian Bencana di Indonesia 2010.....	123
Gambar 5.18.	Peta Kejadian Bencana di Indonesia 2011.....	124

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1. Analisa Daya Dukung Lahan Berdasarkan SK. MENTAN dan KEPRES NO. 32 TAHUN 1990 Tentang Kriteria Kawasan Lindung	51
Diagram 5.1. Analisa Daya Dukung Lahan Berdasarkan SK. MENTAN dan KEPRES NO. 32 TAHUN 1990 Tentang Kriteria Kawasan Lindung	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah negara memiliki susunan lembaga – lembaga yang mengatur semua aspek kehidupan rakyatnya di suatu ibukota negara yang lebih tegasnya berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara, dimana segala urusan pemerintahan diletakan ditempat tersebut, maka dari itu dalam perencanaan pusat pemerintahan harus mempertimbangkan asas teknis, etika, estetika dan esensial dari sebuah ideologi negara yang diwujudkan dalam pusat pemerintahan yang memiliki makna historis dan filosofis.

Menurut UU No.29 Tahun 2007, tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota NKRI pada pasal 5 menyatakan fungsi dan peran Kota Jakarta adalah sebagai Ibukota Negara yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan Negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.¹

Sebagian besar padangan rakyat Indonesia tentang fungsi dan peran ibukota negara dipahami sebagai kota pemerintahan, bisnis, juga sebagai pusat ekonomi. Hal ini yang menyebabkan berbagai permasalahan timbul dalam kancah kemajuan pusat pemerintahan negara yang akan berpengaruh terhadap kemajuan nasional, dimana sentralisasi kegiatan (penumpukan) disebuah wilayah yang akan menjauhi prinsip keseimbangan pembangunan secara nasional.

Menurut Sutikno, Ibu kota (a capital; capital city; political capital) adalah kota utama yang diasosiasikan dengan pemerintahan suatu negara; secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan dari pimpinan pemerintahan dan ditentukan berdasarkan hukum. Asal katanya dari bahasa Latin

¹ UU No.29 Tahun 2007 tentang pemerintah propinsi daerah khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota NKRI

caput yang berarti kepala (head) dan terkait dengan kata capitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.²

Keadaan Kota Jakarta yang semakin rumit dalam hal pembangunan disebabkan oleh keterbatasan lahan serta tingkat urbanisasi penduduk dari daerah – daerah di Indonesia yang mencari pekerjaan menyebabkan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi serta menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial antarlain, timbulnya pemukiman kumuh, kemiskinan kota, macet, serta bencana banjir yang juga disebabkan sistem sarana prasarana fasilitas, utilitas serta transportasi yang semakin membengkak.

Melihat Kondisi Jakarta yang semakin sulit dalam pembangunan maka, perencanaan pusat pemerintahan negara kedepan harus melihat lebih luas dari pusat pemerintahan negara tersebut, dimana peletakan harus dilakukan analisis keruangan yang melihat ruang secara nasional maupun secara mendunia. Pandangan tersebut bukan hanya sekedar mimpi belaka, dalam Buku Sukarno dan Design Ibukota RI di Palangka Raya, impian tersebut pernah diwujudkan oleh sang arsitek negara RI yaitu Bapak Presiden kita pertama yaitu Bapak Dr.Ir Soekarno dalam perencanaan ibukota Negara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tahun 1957.

Perencanaan Kota Palangkaraya pada waktu itu diharapkan sebagai semangat kerja BERDIKARI. Sebuah kota yang dibuat tangan anak – anak Indonesia sendiri yang pada saat itu mengalami kemerdekaan dalam perjuangan selama ratusan tahun. Ini adalah taktik pembentuk mental nasional setelah depresi selama zaman penjajahan asing. Ir.Sukarno juga menyatakan bahwa Kota Palangkaraya adalah kota pemerintahan sedangkan Jakarta sebagai kota ekonomi yang dijadikan dua kutub pembangunan Indonesia.

Beberapa alasan - alasan yang mendasar tidak dapat direalisasikan pembangunan Kota Palangkaraya secara maksimal hal itu antarlain dilakukan karena akan diadakanya Ivent GANEFO dan ASEAN Games dimana Republik Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Dalam hal ini dikeluarkan Penetapan

² www.wikipedia.com Sutikno Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Bencana

Presiden tahun 1959 yang diikuti oleh UU.No.10 tahun 1964 yang menetapkan Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia dan lambat laun pembangunan kota Palanga Raya mulai berjalan kurang maksimal.

Perkembangan Kota Jakarta yang dari tahun ke tahun semakin tidak teratur juga pembangunan yang sentralistik menimbulkan ketimpangan – ketimpangan sosial yang jauh dari cita – cita negara ini, bencana alam yang melanda, teror persoalan politik, kemiskinan dan kemerosotan sosial selalu mewarnai dimedia – media nasional saat ini.

Dari permasalahan – permasalahan urgen yang ada di Kota Jakarta pada saat ini maka diharapkan solusi tepat perencanaan pusat pemerintahan negara baru yang diwujudkan dalam sebuah pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh generasi Indonesi yang berdiri, berderap tegak di atas bumi pertiwi yang memandang jauh keseluruh dunia menggunakan kaca mata Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Seperti dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada pembangunan Monument nasional (MONAS) di Jakarta (ejaan lama) :³

“Saudara – saudara mengenai tugu nasional ini, Monumen Nasional saja perintahkan untuk membuat djalan silang. Kenapa kok djalan silang ? Kenapa tidak satu jalan yang menuju tugu, kemudian ketimur ? Atau dua djalan, satu dari selatan ketugu, dari tugu ke utara . kenapa apa saja perintahkan untuk membuat djalan silang, dari empat penjuru ?”

“Nah, saudara – saudara sadja hal itu adalah satu hal technis praktis, satu soal jang praktek meminta agar supaya lalu lintas bisa berdjalan dengan baik melewati lapangan merdeka ini, tetapi keinginan saja untuk mengadakan djalan silang itu dalah mengandung pula satu simbolik. Simbolik bahwa pertama, Indonesia terletak pada djalan silang djuga daripada dunia ini. Djalan silang – silang empat. Dari benua asia ke benua Australia, dari lautan teduh kelautan Indonesia, - lautan hindia di namakan dahulu. Diperempat djalan inilah dari Asia ke Australia, laksana sabuk Zamrut mengelilingi chatulistiwa.”

“Kita dalah satu bangsa jang menempati djalan silang. Bukan bangsa yang tersisih, misalnya dekat kutub utara, atau satu bangsa jang tersisih djauh daripada lalu lintas dunia, tidak. Kita adalah satu bangsa jang menguasai tempat perempatan djalan silang.”

“Maka oleh karena kita Indonesi hanjalah bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang dihormati oleh seluruh bangsa didunia, bisa mendirikan satu satu masyarakat jang

³ Wijanarka, Sukarno dan Design Rencana Ibukota RI di Palangkarya (Yogyakarta : Ombak, 2006) hal. 84-85

adil dan makmur di Indonesia itu, djikalau kita benar – benar satu bangsa yang dinamik. Bangsa jang tidak dinamis, bangsa jang jiwa yang kecil, bangsa jang djiwanya mengekeret, bangsa yang djiwanya selalu pelan –pelan, bangsa jang selalu takut – takutan, tidak bsa menduduki djalan silang.”

Dari pidato diatas dapat disimpulkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan dapat direalisasikan dalam perencanaan fisik sebuah pusat pemerintahan negara yang kuat, tegas dan indah. Dengan kondisi Dimana kota – kota di Indonesia yang semakin larut dalam materialisme mengedepankan pembangunan ekonomi kapitalis, disitu ibukota negara baru hadir sebagai kota yang berbasis pada alam dan keadilan sosial masyarakatnya menjadi teladan bagi kota – kota di negeri Indonesia.

Salah satu aspek yang terpenting dalam pembangunan negara adalah pusat pemerintahan negara, maka dalam perencanaan ada beberapa syarat dasar yang menjadi perencanaan pusat pemerintahan negara antarlain, memiliki fungsi dan peran yang ideal yaitu sebagai kota pemerintahan, letak proporisional digugusan kepulauan Indonesia, seni arsitektur dan perencanaan fisik kota yang mencerminkan adat istiadat dan kebudayaan nasional, kebersihan dan keindahan alam demi menjaga kesucian kota, perencanaan sosial, kehidupan, keramah tamahan, keakraban warga kota.

Dilihat beberapa aspek diatas, maka penulis mencoba mengkaji “Studi Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan NKRI di Tinjau Dari Aspek Fisik”, dengan harapan dapat mengetahui kelayakan Kota Palangkaraya dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai pusat pemerintahan negara dalam pembangunan nasional.

1.2. Perumusan Masalah

Pusat pemerintahan negara memiliki fungsi dan peran yang sangat besar bagi suatu negara, maka dari itu perlu analisis yang dilakukan secara mendalam. Salah satu aspek penting terkait syarat dan fungsi suatu kota sebagai pusat pemerintahan negara yaitu aspek fisik.

Alasan – alasan terkait studi kelayakan Kota Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan Negara RI dikarenakan Ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta) mengalami berbagai macam masalah dalam pengembangan kota antaralain adalah jumlah penduduk yang meningkat, berkurangnya lahan untuk pembangunan, banjir, kemacetan lalu lintas, dan menumpuknya berbagai kegiatan sosial ekonomi dan politik. Terkait dengan beberapa wacana pemindahan ibukota negara/pusat pemerintahan negara dari Kota Jakarta ke Kota Palangkaraya maka dibutuhkan analisis kelayakan aspek fisik Kota Palangkaraya Sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu adanya rumusan masalah untuk mengkaji lebih dalam studi yang akan dilakukan. Adapun rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tinjau dari Aspek Fisik”.

1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1.3.1. Tujuan

Tujuan dari studi yang dilakukan adalah mengetahui kelayakan Kota Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia dari aspek fisik.

1.3.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya, perlunya sasaran yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun sasaran tersebut antara lain:

1. Mengidentifikasi kelayakan aspek fisik di Kota Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintahan NKRI
2. Mengkaji atau menganalisa Kelayakan Kota Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintahan NKRI dari aspek fisik?

1.4. Ruang Lingkup

Setiap kegiatan studi penelitian yang dilakukan perlu adanya pembatasan ruang lingkup studi agar berada pada jalur bahasan studi yang konsistensi. Ruang lingkup studi dalam hal ini terbagi dalam dua bagian yaitu ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi.

1.4.1. Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi studi berada di Kota Palangkaraya yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis Kota Palangkaraya terletak pada $6^{\circ}40'$ - 7° Bujur Timur dan $1^{\circ} 31'$ - $2^{\circ} 30'$ Lintang Selatan, Luas lahan Kota Palangkaraya yaitu $2.678,5 \text{ Km}^2$, Dengan batas administratif sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Gunung Mas
- Timur : Kabupaten Gunung Mas
- Barat : Kabupaten Katingan
- Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Untuk mengetahui lokasi studi yaitu Kota Palangkaraya dapat dilihat pada Peta 1.1.

1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan pada studi ini, maka pembahasan materi lebih dititik beratkan pada kelayakan pusat pemerintahan negara dari aspek fisik. Berdasarkan masalah yang diangkat dan sasaran yang dicapai maka batasan materi yang akan menjadi pembahasan lebih fokus dalam studi tentang kelayakan Kota Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Tinjau dari Aspek Fisik antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek fisik Kota Palangkaraya.

a. Kajian regional :

- Rentang kendali merupakan analisa pendukung, rentang kendali internal disini dilihat pada jarak dan waktu tempuh dengan kota pelabuhan terdekat (transportasi darat) dan jarak dan waktu tempuh

eksternal (transportasi udara) di beberapa Kota di Indonesia antaralain, Banda Aceh, Jakarta, Surabaya, Makasar, Mataram, Manado, Merauke, Nunukan dan Kupang hal ini dimaksudkan untuk mengetahui rentang kendali dari beberapa kota penting di Indonesia sehingga dapat dilihat tingkat pencapaian antara pusat pemerintahan dan daerah. Kota terjauh dimaksudkan oleh peneliti adalah kota yang memiliki jarak dan waktu tempuh terjauh, kota ekonomi adalah kota yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cukup besar, sedangkan kota pelabuhan yaitu kota terdekat dari Kota Palangkaraya khususnya di Pulau Kalimantan yang memiliki pelabuhan yang berukuran cukup besar.

- Daerah rawan bencana antara lain gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan lahan, gerakan tanah serta periode bencana Indonesia.

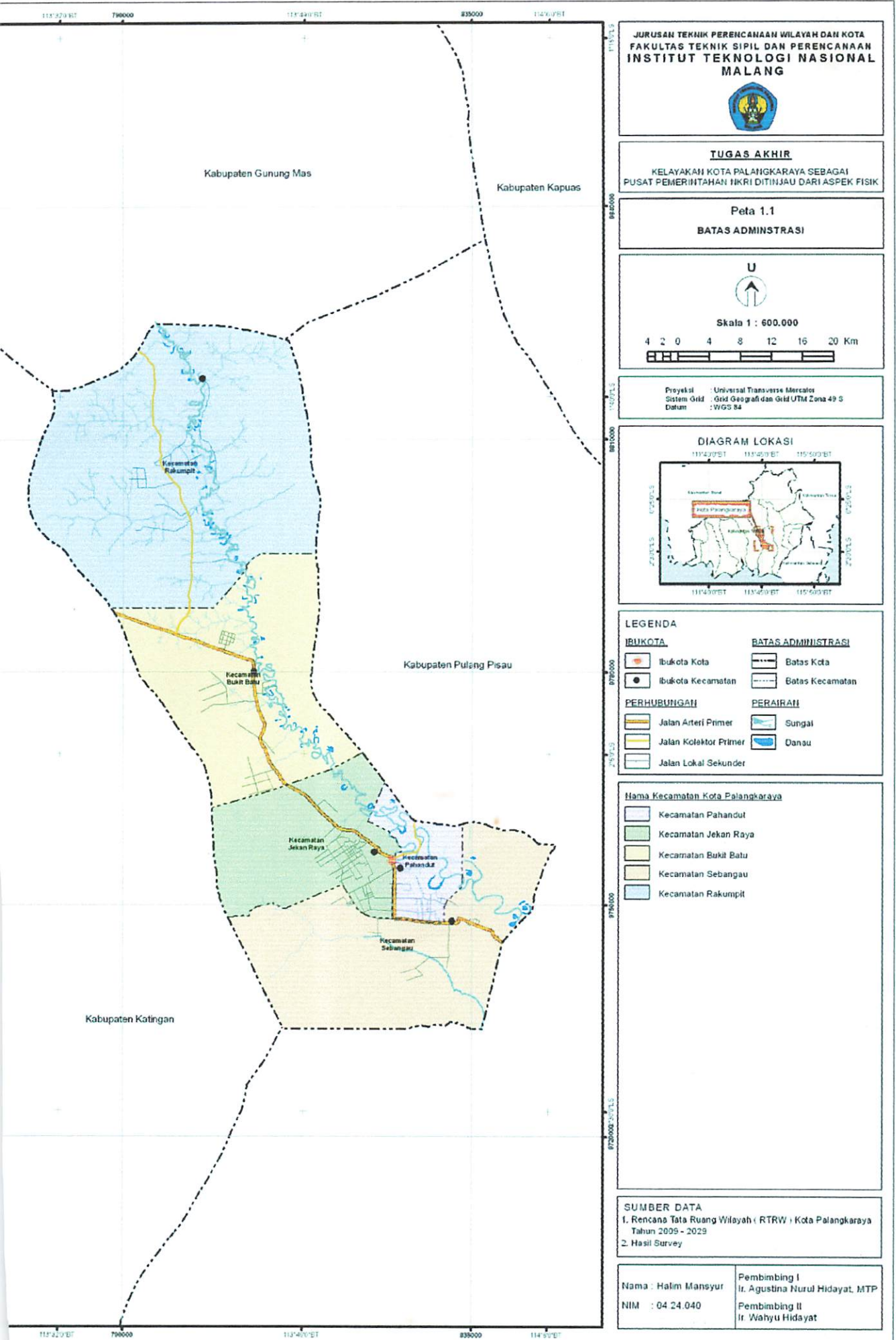
b. Aspek fisik dasar : topografi, curah hujan, jenis tanah, hidrologi.

c. Aspek fisik binaan : pola ruang antara lain penggunaan lahan, fasilitas (perkantoran, perumahan, pendidikan, perjas, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga serta intensitas bangunan), utilitas (air bersih, listrik, telepon dan sampah) serta sarana dan prasarana transportasi (darat dan udara).

2. Aspek kependudukan :

a. Penduduk Kota Palangkaraya dimana berfungsi untuk mengetahui pertumbuhan, jumlah serta kepadatan penduduk.

b. Penduduk migrasi yang menggunakan pembandingan pegawai lembaga negara yang di sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah NKRI kemudiakan dikalikan dengan jumlah keluarga sehingga didapatkan jumlah proyeksi migrasi yang terjadi dari Kota Jakarta ke Kota Palangkaraya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kumpulan pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam merumuskan hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan tema yang diambil, tinjauan pustaka disini membahas tentang arti dan fungsi ibu kota negara, gambaran ibukota negara di beberapa negara besar dari aspek fisik, sosial, transportasi yang memiliki kemiripan.

2.1. Pengertian dan Fungsi Ibu kota Negara

Menurut Sutikno, Ibu kota (a capital; capital city; political capital) adalah kota utama yang diasosiasikan dengan pemerintahan suatu negara; secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan dari pimpinan pemerintahan dan ditentukan berdasarkan hukum. Asal katanya dari bahasa Latin caput yang berarti kepala (head) dan terkait dengan kata capitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.¹

Sejarahnya, ibu kota sebagai pusat ekonomi utama dari suatu wilayah sering menjadi titik pusat dari kekuatan politik, dan menjadi suatu ibu kota melalui suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu kota secara alamiah mempunyai daya tarik politik dan kepiwaan yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis, peneliti kebijakan publik. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya atau pusat intelektual. Ibu kota menjadi simbol bagi negara dan pemerintahannya, dan sebagai tempat berkembangnya muatan politik.

Sedangkan kriteria ibukota negara dalam Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Kota Jakarta) adalah wilayah yang merupakan wilayah strategi nasional dan Pusat Pengembangan Nasional (PKN). Dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi

¹ www.wikipedia.com Sutikno Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Bencana

Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 4 dan pasal 5 menyatakan bahwa Propinsi Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat propinsi yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.²

Sesuai Penjelasan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, tentang RTRK Jabodatabek - Punjur untuk masukan RUU pemerintahan provinsi daerah khusus Ibukota Negara Republik Indonesia fungsi ibukota negara adalah :³

- Sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
- Sebagai pusat kegiatan kehidupan berpolitik
- Sebagai pusat perdagangan dan jasa
- Sebagai lokasi kegiatan kenegaraan baik berskala nasional maupun internasional
- Sebagai lokasi kedudukan perwakilan negara sahabat dan perwakilan lembaga internasional

Sedangkan menurut Sutikno Ibu kota mempunyai fungsi strategi, ibu kota selalu menjadi target utama dalam peperangan, karena dengan menguasai ibu kota biasanya menjadi jaminan menguasai sebagian besar musuh atau penentang, paling tidak memerosotkan moral untuk mengalahkan musuh (militer).

Ibukota negara merupakan pusat pengendalian teritorial dan keutuhannya sebagai sebuah negara bangsa. Hampir semua negara mengalami periode separatisme dan/atau pemberontakan dan perang saudara dalam perjalanannya integrasi. Seiring dengan penyusunannya aparat pemerintah untuk pengendalian teritorial negara, ternyata tradisi mempercepat pula integrasi kultural. Fokus kedua proses ini adalah negara, yang dikembangkan menjadi “pusat pemujaan

² UUD RI, tahun 2007, tentang pemerintahan Propinsi khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 4 dan pasal 5

³ Penjelasan Menteri Pu Mengenai RTRK JABODETABEK - PUNJUR sebagai masukan untuk RUU Pemerintahan Propinsi DKI RI

nasionalisme” (McGee) yang diperlengkapi dengan monumen nasional, masjid negara, museum nasional, parade nasional dan sebagainya.³

Kedudukan ibukota negara menjadi semakin kuat dengan terkonsentrasinya elite ekonomi, politik, dan budaya di sana. Argumen Ginsburg (1976) bahwa kota utama memonopoli lembaga-lembaga yang amat penting bagi modernisasi tepat sekali untuk ibukota negara-negara di Asia Tenggara. Terkonsentrasinya lembaga-lembaga tersebut di dalam proses perubahan sosial, menunjukkan semakin kuatnya kedudukan ibukota negara sebagai pusat serta kedudukan para elit di sana. Jadi derajat keutamaan (primacy) ibukota tidak berkurang oleh adanya proses pembentukan bangsa, malah meningkat. Keadaan ini lalu mencegah munculnya pusat-pusat lain, atau bahkan mencegah muncul kota-kota yang lebih besar, sebab dapat membahayakan posisi para elit yang berkepentingan dengan keberadaan ibukota.

Menurut Wertheim (1980), ada dua pola utama pembentukan negara : negara pedalaman dan negara pesisir bentuk-bentuk urbanisasi berkaitan erat dengan pola-pola pembentukan negara ini.⁴

1. Kota sebagai Pusat pengendalian teritorial dalam konteks negara pedalaman
Pada pola ini ibukota negara adalah pusat, yang dikelilingi oleh ibukota-ibukota propinsi sebagai tempat persinggahan para pejabat pusat.
2. Kota sebagai pusat jaringan perdagangan
Pada pola ini, kota sering berperan sebagai kota dagang yang independen atau kota enterpot-merupakan titik simpul jalur perdagangan. Fungsi utama kota adalah mengendalikan perdagangan (regional dan jarak jauh) melalui kontrol terhadap simpul-simpul jalur perdagangan. Kelemahannya ialah adanya ancaman dari negara-negara teritorial atau dari perubahan-perubahan dalam hubungan perdagangan.

³ Urbanisme di Asia Tenggara, makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial, Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff, Yayasan Ober Indonesia, Jakarta 2002 Hal 4-5

⁴ Urbanisme di Asia Tenggara, makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial, Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff, Yayasan Ober Indonesia, Jakarta 2002 Hal 46-47

Dilihat dari beberapa penjelasan terkait arti dan fungsi serta kriteria ibukota negara maka, dapat disimpulkan bahwa ibukota negara adalah kota utama yang diartikan dengan kota administrasi pemerintahan, politik dan ekonomi (perdagangan dan jasa) yang menjadi simbol suatu negara serta merupakan wilayah pusat kegiatan nasional (PKN) yang strategis.

2.2. Ibukota – Ibukota Negara Yang Baru

Dalam buku Pengantar Perancangan Kota oleh Arthur B. Gallion, Fafa Simon Eisner, APA, AICP memberikan contoh Ibukota – ibukota negara yang baru antarlain Kota Brazilia, Kota Chandrigarh, dan kota Islamabad.⁵

A. Brazilia

Konstitusi Republik Brazilia pada tahun 1889 menetapkan ibukota baru bagi negara itu. Lokasinya tidak ditentukan sampai tahun 1955, ketika suatu lokasi di pertemuan 2 sungai sejauh 600 mil dari Rio de Janeiro dipilih. Sebuah perusahaan pembangunan yang ditunjuk oleh presiden, memegang tanggung jawab untuk pembangunan kota baru itu, oleh arsitek Brazilia, Lusio Costa. Keahlian kreatif dari Oscar Niemeyer adalah salah satu yang dimanfaatkan untuk menciptakan bentuk arsitektur yang dramatis diseluruh kota.

Konsepnya tegas dua poros besar membentuk tanda silang. Jalan utama bertingkat melalui poros-poros ini. Pusat-pusat pemerintahan, komersial, dan hiburan yang terpisah, ditempatkan sepanjang salah satu poros, kawasan perumahan disebarkan di poros yang lain. Pembangunan kota itu telah berlangsung secepat tersedianya dana. Blok-blok besar bangunan apartemen mendominasi wilayah perumahan dan seluruh tema kota adalah ekspresi monumental beton dan kaca.

Pendirian yang positif, keberanian yang tidak bisa ditawar dan bentuk-bentuk berani yang diwakili dalam kota baru ini memberi inspirasi. Mungkin pertanyaan kabur yang dapat didengar melalui dorongan yang kuat dari tempat yang dinamis

⁵ Arthur B. Gallion, Fafa Simon Eisner, APA, AICP, Pengantar Perancangan Kota (Surabaya, Erlangga, 1994) hal 270-271

ini adalah : 'apakah kota ini memang untuk manusia?' Para pengunjung brazilia pada tahun 1980, melontarkan komentar mengenai kondisi bangunan dan melihat bahwa banyak diantaranya yang kondisinya memburuk. Kota yang cerah dan menarik ini telah kehilangan kecemerlangannya. Harapan bahwa favella tidak akan berkembang di pinggiran telah lama hilang. Para pekerja dan kaum miskin berduyun-duyun datang ketika kota itu sedang dibangun dan tetap tinggal sebagai bukti dari kesengsaraan ekonomi dari banyak orang dari negara yang indah ini.

B. Chandrigarh

Ibukota negara bagian Punjab zaman kuno di India adalah Lahore. Ketika India dan Pakistan dipisahkan, Lahore termasuk di wilayah Pakistan. Lokasi Chandrigarh, didataran dekat kaki Himalaya, dipilih untuk ibukota baru negara bagian Punjab. Perdana menteri Nehru menunjuk Le Corbusier sebagai penasehat pemerintah untuk merencanakan kota baru itu. Bekerja sama dengan Maxwell Fry dan Jane Drew dari Inggris dan P.L Varma, insinyur kepala negara bagian itu, disusun rencana induk pada tahun 1951.

Jumlah penduduk masa depan direncanakan sebesar 500.000 jiwa, namun tahap awal disediakan penampungan bagi 150.000 penduduk pada lokasi seluas 9000. Rencana tersebut berpola jalan utam grid-iron besar sekali yang bersimpangan dengan jarak setengah mil pada satu dan tiga perempat mil pada arah yang lain. Jalan-jalan ini menentukan sektot-sektor lingkungan, yang masing-masing 250 acre dan menampung 15.000 penduduk. Pusat komersial dan pemerintahan menempati jantung lapangan besar ini.

Kompleks ibukota dipisahkan sepanjang satu sisi batas kota pada lokasi seluas 220 acre, terdiri dari istana menteri-menteri atau sekretariat, istana dewan perwakilan, istana pengadilan tinggi dan istana gubernur, yang didesain oleh Le Corbusier yang menambahkan untuk simbolis pada kelompok itu-tangan terbuka (menggambarkan telapak tangan Budha yang terbuka keatas). Rencana ini tidak lebih tegas ketimbang dengan apa yang akan diberikan pemikiran kreatif Le Corbusier. Karena terletak pada dataran luas di wilayah yang panas dan kering, kota ini merangsang kesan positif dai mereka yang melihatnya. Keteraturan yang

sangat berdisiplin dan skala besar dari seluruh konsep sekaligus impresif. Dalam kaitan ini, kota ini mengikuti tradisi Kekaisaran Mogul yang dalam masa dominasi Islam di India telah melaksanakan perencanaan dan pembangunan kota yang tegas. Namun ada perbedaan mendasar antara kelompok monumental dari ibukota baru ini dengan tradisi Mogul yang lama. Bahkan dalam kota Mogul yang sudah mati seperti Fatepur-sikri, skala manusia tampak masih meresapi lapangan yang diperkeras dan berbagai bangunan di dalam dan disekitarnya. Kota ini hidup hanya selama 50 tahun namun, meskipun saat ini gelap dan kosong, hubungan antara bangunan dan ruang, cahaya dan bayangan lorong-lorong dan kawasan tertutup, menyampaikan suatu impresi nyata bahwa tempat ini dimaksudkan untuk manusia. Kualitas ini tidak ada di Chandrigarh.

Di Chandrigarh, istana meteri-menteri, sebuah bangunan beton besar sekali sepanjang 800 kaki setinggi 9 lantai, berjarak seperempat mil dari istana pengadilan tinggi. Mungkin pepohonan nanti akan memberikan suatu bayangan selamat datang di dalam ruang luas ini, namun suatu lansekap yang kaya untuk menutupi dimensi ruang terbuka dalam kompleks ini tidaklah asli wilayah ini dan juga tidak mengingatkan pada taman-taman indah yang pernah menghiasi negara ini. Bangunan-bangunan besar tersebut merupakan ekspresi yang kuat dari pola abstrak dan ruang di antara bangunan-bangunan itu terlalu besar. Akan tetapi, kota ini seperti menyampaikan undangan bagi seseorang agar ikut menikmati pengalaman ini dan tidak melindungi kita dari matahari yang menyengat. Jadi, kita bisa berpikir tentang seni perencanaan dan menunggu munculnya Chandrigarh agung yang diwakilinya.

C. Islamabad

Ketika negara baru Pakistan dibentuk, agar status yang semula propinsi India menjadi negara otonom, maka diperlukan pemilihan sebuah ibukota. Ibukota di kota lama Lahore dipindahkan ke Rawalpindi, yang terletak sepanjang kaki Himalaya di Pakistan Barat. Fasilitas-fasilitas di Rawalpindi terbukti tidak memenuhi kebutuhan negara baru, dan pada tahun 1959 sebuah otoritas pembangunan ibukota ditunjuk untuk membangun ibukota baru didekatnya, yaitu

Islamabad. Rencana geometris, dibagi menjadi sektor-sektor perumahan atau unit lingkungan seluas 800 acre. Masing-masing sektor dilayani oleh fasilitas pemerintahan, sekolah, pelayanan kesehatan, fasilitas rekreasi dan mesjid. Pusat pemerintahan pada persimpangan dua jalan raya utama mencakup rumah presiden, sekretariat, dengan sebuah kantong untung perwakilan asing. Dengan sebuah taman nasional yang besar dan bangunan-bangunan umum monumental yang mewah dalam tradisi Islam, kota Islamabad harus mencerminkan ambisi baru tersebut.

2.3. Gambaran Ibukota Negara – Negara Besar Didunia

Gambaran Ibukota Negara besar dimaksudkan untuk menggambarkan perbandingan ibukota negara-negara besar didunia, antarlain Beijing, Whashington DC, Jakarta, Berlin dan Canberra, yang memuat beberapa aspek penting yaitu : geografis, demografi, dan transportasi.⁶

2.3.1. Beijing

Beijing dibangun pada abad kedelapan S.M. pada lokasi yang kira – kira sama dengan sekarang. Ibukota Republik Rakyat Cina ini terletak dibagian utara dataran cina utara luasnya 16.801,05 kilometer persegi. Secara geografis Beijing menempati posisi di Cina seperti New York di Amerika utara, dimana keduanya dekat dengan garis lintang 40° derajat dan mempunyai kondisi iklim yang sama pada musim semi dan gugur. Namun berlainan dengan New York, Beijing tidak mempunyai akses langsung ke sungai penting atau pantai. Pola kota yang sekarang berasal dari abad kesebelas. Kanal besar yang dulu pernah merupakan akses kelaut, tidak lagi mempunyai fungsi itu.

Beijing dewasa ini tetap mempunyai pola dasar pada zaman Dinasti Ming (1368 – 1644), persegi dan simetris. Di pusat kota terletak kelompok istana yang disebut kota terlarang – disebut demikian karena rakyat jelata dilarang memasukinya. Di sebelah selatan kota terlarang terletak istana imperial, Tien An Men, dengan panjang keliling sembilan kilometer. Suatu bujur sangkar seluas 20

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/_in_Beijing

kilometer diluar kota imperial adalah “kota dalam” dibangun pada tahun 139. Bagian empat persegi panjang disebelah selatan kota adalah kota luar (atau cina).

Kota dalam terbagi – bagi oleh jalan – jalan utama yang berpotongan dengan lorong – lorong yang disebut hutong. Hutong ini secara tradisional merupakan tempat tinggal para seniman dan tukang ahli, serta merupakan lokasi toko – toko yang melayani kebutuhan sehari – hari penduduk setempat.

Rencana induk untuk Beijing lebih maju daripada untuk kota – kota lainnya. Rencana ini telah diajukan kepada pemerintah untuk disahkan. Rencana tersebut mengusulkan perkembangan baru di kota – kota satelit yang ada pada lahan – lahan yang paling tidak produktif di daerah pertanian. Bangunan – bangunan pabrik diusulkan di satelit – satelit ini, yang lokasinya ditentukan dengan melihat arah anginnya supaya mengurangi pencemaran diwilayah setempat maupun di seluruh wilayah kota. Perumahan bagi para pekerja baru itu akan diletakan dekat industri itu namun dipisahkan oleh sebuah jalur hijau. Kebutuhan transportasi dikurangi dengan menganjurkan para pekerja berjalan kaki atau naik sepeda ke tempat – tempat kerja. Jalur jalan utama menghindari kota – kota untuk mengurangi jumlah arus lalu lintas dan kemacetan yang sering terjadi.

Kota dalam (inner city) dibelah oleh jalan – jalan utama yang diselingi oleh jalur – jalur (hutong) seperti sebuah papan catur.

Sejak pembebasan pada tahun 1949, Beijing telah mengalami banyak perubahan. Pekerjaan pelebaran jalan sekitar kota terlarang dimulai pada 1950-an. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, tembok – tembok timur, barat, dan utara kotapraja dibongkar, serta gapura – gapura di Tien An Men, Xisi, Dianmen, dan Dongsi dihancurkan. Dalam tahun - tahun belakangan ini sebuah jalan raya cepat, jalan lingkaran kedua, dibangun pada bekas tembok tersebut untuk menghubungkan kota itu dengan pinggiran kota. Terdapat Sembilan simpang layang - dua buah yang tiga susun dan tujuh buah susun – sepanjang jalan raya cepat itu. Selain jalur untuk kendaraan bermotor, jalan raya cepat itu juga mempunyai jalur khusus sepeda bagi sebanyak 3 juta sepeda yang ada di Beijing.

Di bawah jalan lingkaran kedua itu terdapat kereta bawah tanah Cina yang pertama, yang dibangun dengan bahan - bahan dan teknologi Cina sendiri. Sejak

diselesaikan tahap pertamanya, kereta - kereta bawah tanah telah mengangkut sebanyak 160.000 penumpang sehari. Tahap kedua proyek itu selesai pada awal 1980an; penumpang dewasa ini berjumlah lebih dari 500.000 sehari. Sistem kereta bawah tanah melingkar dan jalan besar di atas tanah secara bersama - sama membentuk suatu jaringan komunikasi kota yang lebih nyaman.

Program perumahan dikaitkan secara terpadu dengan sistem kereta api bawah tanah yang baru. Bila selesai bangunan - bangunan bertingkat yang sedang dibangun akan membentuk sejenis tembok kota yang lain. Bangunan -bangunan yang akan menggantikan rumah - rumah substandar ini akan memberi dampak visual kepada kota, sama seperti yang diakibatkan oleh lapangan Tien An Men sekarang ini; keduanya menunjang monumentalitas.

Lapangan Tien An Men yang terletak di jantung kota Beijing mempunyai ruang terbuka yang sangat luas, hampir 125 acre, yang dengan mudah menampung ratusan ribu orang yang berkumpul disini untuk festival, liburan, dan untuk perayaan lain.

A. Geografis

Beijing adalah kota metropolitan di wilayah utara Republik Rakyat Cina yang merupakan ibu kota Republik Rakyat Cina. Beijing termasuk satu dari empat kotamadya di Republik Rakyat Cina, yang sebanding dengan provinsi dalam struktur administrasi pemerintahan Cina. Berbatasan dengan provinsi Hebei di utara, barat, selatan dan beberapa bagian di timur, dan dengan Tianjin di wilayah tenggara. Luas wilayah Kota Beijing sekitar 16.801,05 Km², dengan Kota terdekat yaitu Kota Nanjing yang berjarak sekitar 897 Km dari Kota Beijing berdasarkan city distance tool (software menghitung jarak antar kota) .

B. Demografi

Penduduk kota Beijing terbagi dalam dua tipe yaitu orang-orang yang memegang *izin hukou* (tinggal permanen), dan izin tinggal sementara. Pada Februari 2010, penduduk gabungan permanen dan non-permanen telah melebihi 22 juta dengan tingkat kepadatan penduduk 1.309 Km/jiwa. Di samping itu, ada

sejumlah besar pekerja migran (*min gong*) yang tinggal di Beijing tanpa ijin tinggal resmi. Pada tahun 2006, jumlah penduduk perkotaan inti Beijing mencapai 13,33 juta, 84,3 persen dari yang total populasi kotamadya.

Setelah Chongqing dan Shanghai, Beijing merupakan kota terbesar kedua dari empat kota yang dikuasai langsung oleh pemerintah Republik Rakyat Cina. Pengertian sebuah kota yang dikontrol langsung adalah sebuah kota dengan status yang sama setingkat provinsi .

C. Transportasi

Dengan pertumbuhan kota setelah reformasi ekonomi, Beijing telah berkembang sebagai pusat transportasi paling penting di Republik Rakyat Cina, dan di kawasan Asia Timur yang lebih besar. Jalur transportasi mengelilingi kota adalah jalan cincin lima, satu jalur cincin luar, sembilan jalan bebas hambatan, sebelas jalan tol nasional Cina, beberapa rute kereta api, dan sebuah bandara internasional.

1. Transportasi Darat

Transportasi darat yang akan dibahas merupakan transportasi masal antarlain bis Kota dan Kereta api.

a) Bis Kota

Beijing terhubung melalui ruas jalan yang sebagian besar dari jaringan jalan nasional serta sembilan jalan bebas hambatan. Beijing Subway dibuka pada tahun 1971, hanya dengan dua jalur sampai pembukaan Line 13 pada tahun 2002. Tarif subway adalah 2 yuan dengan transfer tak terbatas kecuali untuk saluran Airport Express yang biayanya 25 yuan per trip. Ada hampir 700 bus dan bis listrik di Beijing, termasuk tiga bus rapid transit rute. Semua angkutan umum dapat diakses dengan kartu *Yikatong*, menggunakan frekuensi radio yang akan dipindai di stasiun kereta bawah tanah dan bus angkutan umum.

b) Kereta api

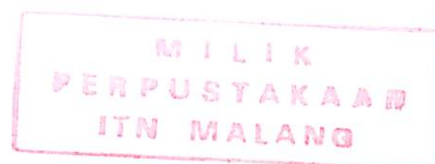
Beijing telah lama menjadi pusat kereta api terbesar di Cina. Ada jalur kereta api dari Beijing ke Shanghai, Guangzhou, Kowloon, Harbin, Qinhuangdao, Baotou, Yuanping, Chengde, and Tianjin. Pada tahun 2010, Stasiun Kereta Api Di Kota Beijing memiliki 173 kereta api yang beroperasi setiap hari, sedangkan Stasiun Kereta Api Beijing Barat memiliki 232 kereta api, Beijing Selatan memiliki 163 kereta api, Beijing Utara memiliki 22 kereta api. Beijing South Railway Station (Stasiun Kereta Api) kembali dibuka pada bulan Agustus 2008, dan berfungsi sebagai terminal untuk kereta berkecepatan tinggi yang beroperasi dengan rute Beijing-Tianjin, yang merupakan salah satu jasa penumpang kereta api reguler tercepat di dunia, serta semua berkecepatan tinggi lainnya CRH kereta. Kereta ke kota-kota di Mongolia, Rusia, Vietnam dan Korea Utara, semua dijalankan melalui Beijing.

Beberapa stasiun kereta api lainnya di perkotaan Beijing menangani lalu lintas penumpang reguler antarlain Beijing Timur dan Qinghuayuan. Ada juga sejumlah stasiun lainnya melayani daerah pinggiran kota. Tujuan Penumpang kereta api di Cina diberi nomor sesuai dengan arah mereka dalam hubungannya dengan kota Beijing.

2. Transportasi Udara

Bandara utama Beijing adalah Bandar Udara Internasional Ibukota Beijing, yang berjarak sekitar 20 km timur laut dari pusat kota. Dengan adanya renovasi untuk Olimpiade 2008, bandara sekarang memiliki tiga terminal, yang menjadi salah satu Bandar udara yang terbesar di dunia. Sebagian besar penerbangan domestik dan penerbangan internasional tiba di dan berangkat dari Bandara Modal. Capital Airport juga merupakan pusat utama lalu lintas penerbangan di Cina.

Bandar udara lain di kota Beijing antarlain yaitu Bandar udara Liangxiang, Nanyuan, Xijiao, Kwetiau dan Badaling. Bandar udara Nanyuan berfungsi hanya untuk satu maskapai penumpang, dan bandara ini digunakan untuk kegiatan militer dan kurang dikenal oleh masyarakat.



2.3.2. Washington D.C

Setelah dilakukan banyak pertimbangan yang mendalam mengenai lokasi yang sesuai untuk ibukota negara baru ini, maka diputuskan untuk menghindari pusat – pusat perkotaan yang sudah ada seperti New York dan Philadelphia. Para pendiri yang ambisius akan masa depan negara ini memilih lokasi sepanjang tepi Sungai Potomac, jauh dari lingkungan perdagangan dari kota – kota yang ada. L’Efant, seorang perancang muda Perancis, ditugasi untuk menyusun rencana ibukota yang baru itu. Dengan latar belakang suasana baroknya di Paris dan dengan inspirasi semangat yang ditimbulkan oleh orang – orang Amerika, maka ia membayangkan kota ini dengan suatu skala yang besar yang dijalin ke dalam pola aturan Geometris. Rencana itu sangat menarik bagi orang – orang dengan selera aristokratik seperti Washington dan Jefferson, dan rencana tersebut disahkan oleh mereka pada tahun 1791.

Pemerintah Federal berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rencana semula. Pada tahun 1901 Panitia MacMillan ditunjuk untuk mengembalikan ciri asli dari rencana L’Efant. Selanjutnya jalan kereta api yang memotong Mall dibongkar, dan tapak untuk union station yang sekarang dibentuk. Untuk melestarikan ini dan prestasi – prestasi yang lain maka pada tahun 1910 ditunjuk panitia seni Nasional oleh Presiden Theodore Roosevelt, yang diikuti dengan pembentukan panitia perencanaan dan Taman Ibukota Nasional pada tahun 1926. Washington, District of Columbia adalah ibu kota Amerika Serikat. Kota ini tidak termasuk sebuah negara bagian, tetapi merupakan wilayah federal yang berada di bawah pemerintahan Amerika Serikat secara langsung.

Pusat pemerintahan Amerika Serikat berada di Distrik Columbia. Kota Washington dibangun di tengah-tengah Distrik tersebut, namun Distrik tersebut juga memiliki kota-kota lain, seperti Georgetown dan Alexandria. Kongres AS pada tahun 1846 kemudian mengembalikan Alexandria ke negara bagian Virginia. Sebuah Undang-Undang kemudian menghilangkan batas kota Washington dan Georgetown sehingga pada akhirnya kota Washington tidak lagi ada; namun,

nama kota tersebut tetap digunakan dan kotanya seringkali disebut sebagai Washington, D.C.⁷

A. Geografis

Washington, DC, AS, terletak di 38 ° 53'42 "N 77 ° 02'11" W 38,895 ° N 77,03639 ° W (koordinat dari Milestone Zero, di Ellipse). Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, kota ini memiliki wilayah geografis seluas 68,3 mil persegi (177 km²), 61.4 mil persegi (159,0 km²) di antaranya adalah tanah, dan sisanya 6,9 mil persegi (17.9 km²) (10,16 %) diantaranya adalah air.

Washington dikelilingi oleh negara-negara dari Virginia (di sisi barat dayanya) dan Maryland (di tenggaranya, timur laut, dan barat laut sisi); menyela perbatasan negara-negara tersebut, yaitu Sungai Potomac baik hulu dan hilir dari kabupaten (Distric). Sungai Potomac melewati hampir seluruh perbatasan distrik Washington. Kota terdekat dengan kota Whashington DC adalah Kota Olympia berdasarkan city distance tool jaraknya berkisar 592 Km dari wahashington DC.

B. Demografi

Pada tahun 2009, Biro Sensus Amerika Serikat memperkirakan penduduk Washington berjumlah 599.657 jiwa, dengan tren pertumbuhan penduduk di kota sejak sensus tahun 2000, yang yaitu tercatat 572.059 jiwa. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Wahashington DC bertambah menjadi 601.723 jiwa dengan tingkat kepadatan 3.784,4 Km/jiwa.

C. Transportasi

Washington, DC memiliki sejumlah mode transportasi yang berbeda tersedia untuk digunakan. Commuters memiliki pengaruh besar terhadap pola perjalanan, dengan hanya 28% dari orang yang bekerja di Washington, DC perjalanan dari dalam kota, sedangkan 33,5% bepergian dari dekat Maryland pinggiran kota, 22,7% dari Northern Virginia, dan sisanya dari Washington, DC terpencil pinggiran kota.

⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/_in_Washington_Dc

1. Transportasi Darat

Transportasi darat yang akan dibahas yaitu, metrobus, bis antar kota dan kereta api komuter.

a) Metrobus

Metrobus adalah layanan bus yang dioperasikan oleh Metro, terdiri dari 176 jalur bus yang berhenti beroperasi pada pukul 12.30, termasuk 3.133 tempat penampungan bus dan hampir setiap stasiun Metrorail. Pada tahun fiskal 2006, Metrobus disediakan bagi 131 juta perjalanan, 39% dari semua perjalanan Metro Washington DC. Ini berfungsi sebagai cincin kepinggiran kota kabupaten. Departemen Perhubungan Maryland dan beberapa perusahaan swasta menyediakan layanan bis selama jam-jam sibuk hari kerja antara Washington DC dan kabupaten yang lebih jauh seperti Anne Arundel, Calvert, Charles, Frederick, Howard, dan St Mary di Maryland, dan Fredericksburg, Loudoun, Pangeran William, dan Stafford di Virginia.

b) Bus Antar Kota

Stasiun bus Washington DC berada dua blok dari Washington Greyhound Lines stasiun, yang juga dilayani oleh Peter Pan Bus Lines. Sebuah halte bus untuk jalur bus Pecinan dekat Gallery Place-Chinatown dan Pusat Verizon. Stasiun Metro Greenbelt juga memiliki jalur bus ke Baltimore-Washington International Airport Thurgood Marshall, yang menghubungkan Metro ke daerah Baltimore MTA bus dan sistem kereta api ringan. MTA Commuter Bus juga melayani bagian terbatas dan Montgomery County Prince George's di Maryland.

c) Kereta Api Komuter

Kereta api yang ada di Whashington DC, MARC menyediakan layanan dari Union Station ke Baltimore dan Perryville, baik di Camden dan Penn Lines. MARC's line Brunswick menyediakan layanan antara Martinsburg, West Virginia dengan berhenti, di Union Station. Memacu dari garis Brunswick

juga ke Frederick, Maryland. Tiga baris Maryland MARC sistem kereta mulai dari Union Station di Washington di mana penumpang bisa ditransfer ke Metrorail DC Red Line, 9 Metrorail layanan juga disediakan untuk New Carrollton (Orange Line) dan, College Park - University of Maryland dan Greenbelt (Green Line), dan Silver Spring dan Rockville stasiun di Montgomery County (Red Line).

2. Transportasi Udara

Washington, DC dilayani oleh tiga besar bandar udara, dua terletak di pinggiran kota Virginia dan satu di Maryland. Ronald Reagan Washington National Airport adalah yang paling dekat yang terletak di Arlington County, Virginia, tepat di seberang Sungai Potomac dan dapat diakses melalui Washington Metro. Bandara yang berlokasi dekat dengan pusat kota, namun penerbangan terbatas pada bandara di Amerika Serikat karena masalah kebisingan dan keamanan. Sebagian besar penerbangan internasional datang dan berangkat dari Washington Dulles International Airport, yang terletak 26,3 mil (42,3 km) sebelah barat kota di Fairfax dan Loudoun dikabupaten Virginia. Dulles adalah gerbang internasional tersibuk kedua di pesisir Timur. Ini adalah bandara tersibuk di wilayah Washington dalam hal pelayanan penumpang. Dulles menawarkan layanan dari penerbangan murah antara lain Jet Blue, meskipun biaya seleksi rendah sangat menurun ketika Freedom Air (yang berpusat di Dulles) berlipat pada bulan Januari 2006. Baltimore-Washington International Airport Thurgood Marshall, terletak 31.7 mil (51,0 km) timur laut kota di Anne Arundel County, Maryland, selatan Baltimore. BWI adalah bandara penting. biaya carrier rendah, seperti Southwest Airlines, dan beberapa penerbangan internasional, pada operator seperti Air Canada dan British Airways.

Bandar Udara Nasional Reagan dan Dulles International Airport dioperasikan oleh Otoritas Bandar Udara Metropolitan Washington. Penerbangan Umum tambahan tersedia di lapangan terbang kecil, termasuk Montgomery County Airpark (Gaithersburg, Maryland), College Park Airport (College Park, Maryland), Potomac Airfield (Friendly CDP dari Prince George's County,

Maryland), dan Manassas Regional Airport (Manassas, Virginia). Sejak tahun 2003, bandara penerbangan umum terdekat di Washington, DC telah memiliki akses yang sangat dibatasi oleh pelaksanaan Pertahanan Udara Identifikasi Zona Amerika Serikat (ADIZ).

2.3.3. Jakarta

Daerah khusus Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota yang memiliki status setingkat propinsi. Jakarta terletak di bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum tahun 1527), Jayakarta (Tahun 1527-1619), Batavia, jacatra (tahun 1619-1942), Djakarta (tahun 1942-1972).⁸

A. Geografis

Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km²/740 km² (lautan : 6.977,5 km²). Jakarta berlokasi di sebelah utara Pulau Jawa, di muara Sungai Ci Liwung, Teluk Jakarta. Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Hal ini mengakibatkan Jakarta sering dilanda banjir. Sebelah selatan Jakarta merupakan daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi. Jakarta dilewati oleh 13 sungai yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta. Sungai yang terpenting ialah Ci Liwung, yang membelah kota menjadi dua. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Berdasarkan City tools jarak kota terdekat dari Jakarta adalah Kota Bekasi dengan jarak 21 Km.

B. Demografi

Penduduk Kota Jakarta berjumlah 7.552.444 jiwa (2007) dan pada tahun 2010 bertambah menjadi 9.558.198 jiwa dengan tingkat kepadatan 14. 464 jiwa/Km. Namun pada siang hari, angka tersebut akan bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok. Wilayah

⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/in_Jakarta

metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 23 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia. Kota/kabupaten yang paling padat penduduknya adalah Jakarta Timur dengan penduduk 2.131.341 jiwa, sementara Kepulauan Seribu adalah kabupaten dengan paling sedikit penduduk, yaitu 19.545 jiwa.

C. Transportasi

Transportasi di Kota Jakarta terbilang memiliki banya permasalahan antaralain kemacetan lalu lintas, ambruknya jalan, hingga kerusakan – kerusakan jalan akibat bencana alam.

1. Transportasi Darat

Transportasi darat yang akan dibahas yaitu, trans Jakarta dan kereta api.

a) Trans Jakarta

Sejak tahun 2004, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah menghadirkan layanan transportasi umum yang dikenal dengan Trans Jakarta. Layanan ini menggunakan bus AC dan halte yang berada di jalur khusus yang pada Saat ini ada delapan koridor Transjakarta yang telah beroperasi.

b) Kereta Api

Selain bus kota, angkutan kota, dan bus Transjakarta, sarana transportasi andalan masyarakat Jakarta adalah kereta listrik atau yang biasa dikenal dengan KRL Jabotabek. Kereta listrik ini beroperasi dari pagi hari hingga malam hari, melayani masyarakat penglaju yang bertempat tinggal di seputaran Jabotabek. Selain itu juga tersedia layanan kereta api yang berangkat dari enam stasiun pemberangkatan di Jakarta. Untuk ke pulau Sumatera, tersedia ruas jalan tol Jakarta-Merak yang kemudian dilanjutkan dengan layanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni.

2. Transportasi Udara

Bandara yang terdapat di Jakarta adalah Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng Banten yang berfungsi sebagai pintu masuk utama ke

Indonesia. Dari/ke bandara Soekarno Hatta, tersedia bus Damri yang mengantarkan penumpang dari/ke Gambir, Rawamangun, Blok M, Pasar Minggu, dan Kampung Rambutan. Bandara Halim Perdanakusuma yang banyak berfungsi untuk melayani penerbangan kenegaraan.

2.3.4. Berlin

Berlin adalah ibu kota negara Jerman dan merupakan salah satu dari 16 negara bagian dari Jerman. Dengan populasi 3,4 juta orang, Berlin merupakan kota terbesar di Jerman. Kota Berlin Merupakan Kota Kedua Paling Padat Penduduknya dan yang kedelapan wilayah urban terpadat di Uni Eropa. Terletak di timur laut Jerman, merupakan pusat Berlin-Brandenburg Metropolitan Area, yang terdiri dari 5 juta orang dari lebih dari 190 negara. Secara geografis berada dalam Plains Eropa, Berlin dipengaruhi oleh iklim musiman. Sekitar sepertiga dari wilayah kota terdiri dari hutan, taman, kebun, sungai-sungai dan danau.

Berlin adalah pusat utama kebudayaan, politik, media, dan ilmu pengetahuan di Eropa. Sektor ekonomi utama didasarkan pada sektor jasa, yang mencakup beragam industri kreatif, media korporasi, kongres dan tempat konvensi. Berlin berfungsi sebagai penghubung transportasi udara dan transportasi kereta api, serta merupakan salah satu tujuan wisata paling sering dikunjungi di Uni Eropa.⁹

A. Geografis

Berlin adalah kota yang terletak di bagian timur Jerman, sekitar 70 kilometer (44 mil) bagian barat yang berbatasan dengan Polandia (daerah dengan dataran berawa-rawa). Berlin-Warsawa *Urstromtal* (zaman es mencair aliran air), antara Barnim dataran rendah di utara dan Teltow dataran tinggi di selatan, dibentuk oleh air yang mengalir dari pencairan es pada terakhir zaman es. Berlin dikelilingi lembah Foya, rantai danau dan Sungai Havel. ketinggian tertinggi Kota Berlin terletak pada Bukit Teufelsberg dan Bukit Müggelberge yang memiliki ketinggian sekitar 115 meter dpl (380 kaki). Luas wilayah Kota Berlin adalah 891,85 Km²,

⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/in_Berlin

sedangkan kota terdekat dengan Kota Berlin adalah Kota Frangkfrut dengan jarak sekitar 80 Km berdasarkan city distance tools.

B. Demografi

Pada desember 2008, Kota Berlin memiliki jumlah penduduk 3.431.700 jiwa (meningkat dari 15.400 dari bulan Desember 2007) dengan tingkat Kepadatan penduduk 3.848 jiwa per km² (9.966 / sq mi). Di daerah perkotaan Berlin terdiri sekitar 3,7 juta orang, sedangkan kawasan metropolitan Berlin-Brandenburg berpenduduk sekitar 4,3 juta di area seluas 5.370 kilometer persegi (2.073 mil²). Pada tahun 2010 penduduk Kota Berlin berjumlah 3,450,889 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 3.869/ km².

C. Transportasi

Transportasi yang akan dibahas dalam hal ini adalah transportasi darat dan transportasi udara.

1. Transportasi Darat

Transportasi darat yang dibahas antara lain kereta api. Jalur kereta api jarak jauh terhubung Berlin dengan semua kota besar di Jerman serta dengan banyak kota di negara tetangga (negara-negara Eropa). Baltic Sea Jalur rel yang menyediakan akses ke daerah sekitarnya Brandenburg dan ke Laut Baltik. Berlin Hauptbahnhof adalah stasiun persimpangan terbesar di Eropa. Deutsche Bahn kereta untuk tujuan domestik seperti Nuremberg, Hamburg, Freiburg dan banyak lagi tujuan lainnya.

2. Transportasi Udara

Berlin memiliki dua bandara komersial. Tegel International Airport (TXL) dan Bandar Udara Internasional Schönefeld (SXF) menangani lebih dari 21 juta penumpang pada tahun 2008. Bersama-sama melayani 155 tujuan di 48 negara (musim panas 2009). Tegel terletak dalam batas kota, sedangkan Schönefeld

menangani penerbangan dengan biaya rendah dan terletak tepat di luar kota, bagian selatan Berlin-timur dekat perbatasan di negara bagian Brandenburg.

Otoritas bandara Berlin akan mengalihkan seluruh lalu lintas udara Berlin pada bulan Juni 2012, untuk dibangun bandara baru di Schönefeld, yang berganti namanya menjadi Brandenburg Berlin Airport.

2.3.5. Canberra

Canberra adalah ibu kota negara dari Australia. Terletak di pedalaman benua Australia dan merupakan kota terbesar kedelapan di Australia. Kota Canberra dipilih sebagai lokasi ibukota negara pada tahun 1908 atas dasar kompromi antara kota Sydney dan Melbourne, dua kota terbesar di Australia, yang pada waktu itu rata-rata kota di Australia tidak terencana dengan baik. Setelah kontes internasional untuk desain kota, terpilih Chicago arsitek Walter Burley Griffin dan Marion Mahony Griffin sebagai designer kota dan pembangunan konstruksi dimulai pada tahun 1913.

Desain kota ini sangat dipengaruhi oleh gerakan kota taman dan mencakup wilayah vegetasi alam yang telah mendapatkan gelar Canberra "ibukota semak". Meskipun pertumbuhan dan perkembangan Canberra itu terhambat oleh Perang Dunia dan depresi besar, tetapi Canberra muncul sebagai kota yang berkembang setelah Perang Dunia II.¹⁰

A. Geografis

Kota Canberra berada di tepi Sungai Molonglo, dengan luas wilayah 814,2 kilometer persegi (314,3 mil persegi) dan terletak di dekat Brindabella Ranges (Brendy Beruang Ranges), sekitar 150 kilometer (93 mil) daratan dari pantai timur Australia. Terletak pada ketinggian yang berkisar dari 550 meter sampai 700 meter (1.800 ke 2.300 kaki). Kota yang berdekatan dengan Kota Canberra adalah Kota Sydney dengan jarak sekitar 240 Km berdasarkan city distance tools.

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/_in_Canberra

B. Demografi

Pada tahun 2006, penduduk Canberra adalah 323.056 orang dan kota ini memiliki kepadatan penduduk 1,005.0 orang per kilometer persegi (2,602.9 / sq mi), yang padat berkenaan dengan kota-kota Australia lainnya. Pada Tahun 2009 jumlah penduduk Kota Canberra yaitu 351.868 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk berkisar 428,6/km².

C. Transportasi

Canberra memiliki perusahaan Bus Deane yaitu sebuah bus perusahaan swasta yang beroperasi melalui Queanbeyan, Jerrabomberra dan Canberra. Memiliki lebih dari 10 rute yang berbeda dan sekarang menjalankan layanan untuk Bungendore. Selain bus kota, Canberra juga memiliki Stasiun kereta api Canberra yang terletak di Kingston, Australian Capital Territory. Stasiun ini merupakan terminal untuk jaringan layanan kereta api dari Sydney Dan merupakan stasiun kereta api yang hanya beroperasi di ACT.

2.4. Landasan Penelitian

Pada sub bab ini dijelaskan beberapa konsep-konsep penelitian yang dipakai sebagai landasan dan merupakan acuan pokok untuk perumusan variabel penelitian sebagai dasar analisa untuk menghasilkan output sesuai dengan tujuan studi. Landasan peneltian yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Penjelasan Judul

Berdasarkan judul “Studi kelayakan Kota Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintahan NKRI ditinjau dari Aspek Fisik” dapat dipaparkan asumsi yang digunakan yaitu :

- Studi : Proses ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang ingin diketahui dari obyek penelitian.
- Kelayakan : Kelayakan yang dilihat dari aspek fisik, fisik dasar dan binaan.

- Pusat Pemerintahan Negara : kota utama yang diartikan dengan kota administrasi pemerintahan, politik, tempat perwakilan asing (lembaga internasional), yang menjadi simbol suatu Negara.

B. Kajian Kriteria Pusat Pemerintahan Negara

Kriteria ibukota negara (Kota Jakarta) dalam Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional adalah wilayah yang merupakan wilayah strategis nasional dan pusat kegiatan nasional (PKN).

Dibawah ini merupakan kriteria Kota yang dapat ditetapkan sebagai PKN berdasarkan lampiran PP.No.26 Tahun 2008 yaitu :

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau.
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Sedangkan kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kriteria ibukota Negara (pusat pemerintahan) dapat dikaji dari ibukota negara didunia yang dipilih menjadi contoh antarlain Beijing, Whashington DC, Jakarta, Berlin dan Canberra. kajian ini dilakukan untuk membanding ibukota negara – negara di dunia yang dijadikan sebagai salah satu kriteria ibukota Negara RI selain berdasarkan PP No.26 tahun 2008. Aspek – aspek penting yang dijadikan kriteria ibukota negara antarlain aspek fisik dan transportasi serta aspek kependudukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Table 2.1, Tabel 2.2 dan Table 2.3.

C. Kajian Fungsi Pusat Pemerintahan (Ibukota Negara)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 2007 tentang pemerintahan Propinsi khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 4 dan pasal 5 menyatakan bahwa Propinsi Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat propinsi yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Dilihat dari beberapa penjelasan terkait arti dan fungsi serta kriteria pusat Pemerintahan (ibukota Negara) maka, dapat disimpulkan bahwa Pusat Pemerintahan (ibukota Negara) dalam penelitian ini adalah kota utama yang diartikan dengan kota administrasi pemerintahan, politik, tempat perwakilan asing lembaga internasional yang menjadi simbol suatu Negara.

Beberapa aspek yang akan dijadikan landasan penelitian tentang Pusat Pemerintahan (ibukota negara) merupakan hasil komperasi awal antara kajian normatif (PP No.26 tahun 2008), teoritis (Teori Ibukota Negara) dan empiris (Komparasi antar Ibukota Negara) aspek yang akan dikaji antarlain adalah aspek fisik yang mengkaji kelayakan fisik dasar dan fisik binaan yang menghasilkan daya dukung fisik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumusan variabel-variabel penelitian/studi di tabel 2.3.

Kriteria Komperatif Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan)

NO	VARIABEL	SUB VARIABEL	KRITERIA IBUKOTA NEGARA (PERBANDINGAN)					
			RRC	USA	INDONESIA	JERMAN	AUSTRALIA	Tolok Ukur
			Beijing	Washington D.C.	Jakarta	Berlin	Canberra	Pusat Pemerintahan
1	Aspek Fisik	Geografis <ul style="list-style-type: none"> Lokasi / letak Ketersediaan lahan luas kota Jarak Dengan Kota Terdekat 	Kawasan Pesisir Pantai	Tepi Sungai Potomach	Tepi Sungai Ciliwung	Tepi Sungai Rhine	Tepi Sungai Molonglo	Diwilayah Tepi Sugai
			1.680 KM ²	177 KM ²	740 KM ²	892KM ²	814 KM ²	1.163,2 KM ² (1.200 KM ²)
			897 - Nanjing	592 - Kentucky	21 - Bekasi	70 - Poland	286 - Sydney	150 Km
2	Aspek Kependudukan	Demografi Populasi penduduk Kepadatan Penduduk	22 juta Jiwa (Tahun 2010)	601.723 Jiwa (Tahun 2010)	9.588.198 Jiwa (Tahun 2010)	3.450,889 Jiwa (Tahun 2010)	358.222 jiwa (31 Maret 2011)	Maksimal 2 juta jiwa
			13.100 km ²	3.784.4 / km ²	12.951,8/km ²	3,869.4 / km ²	428.6/km ²	Maksimal 1.500 jiwa/Km ²
3	Aspek Transportasi	Transportasi Darat : <ul style="list-style-type: none"> Kereta Api Bus Kota Transportasi Udara: <ul style="list-style-type: none"> Bandar Udara Skala Internasional 	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada	Memiliki transportasi darat yang baik dengan kualitas A
			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Memiliki transportasi udara (Bandar Udara) yang baik dengan kualitas A/internasional

Tabel 2.2
Kriteria Pusat Pemerintahan Berdasarkan UU 29 Tahun 2007, PP 26 Thn 2008 Tentang RTRWN dan Teoritis

Kriteria Ibukota Negara (Pusat Pemerintahan)		
Kriteria Menurut UU 29 Thn 2007	Kriteria Menurut PP 26 Tahun 2008 RTRWN	Teoritis
Kota Jakarta berfungsi sebagai Ibukota Negara Tugas dan Wewenang :	Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategis Nasional kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.	Teori Menurut Sutikno kota utama yang diasosiasikan dengan pemerintahan suatu negara secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuandari pimpinan pemerintahan dan ditentukan berdasarkan hukum
1. Penyelenggaraan Pemerintahan	Kriteria Kawasan Pusat Kegiatan Nasional : 1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional	Teori Menurut Wertheim (1980) Ibukota negara merupakan pusat pengendalian teritorial dan keutuhanya sebagai sebuah negara bangsa
2. Tempat Kedudukan Perwakilan Asing	2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi	
3. Pusat/Perwakilan Lembaga Internasional	3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi	

Sumber : Hasil Kajian Normatif dan Teoritis

Rumusan Variabel Penelitian Pusat Pemerintahan NKRI

NO	ASPEK	DASAR TEORI/NORMATIF/EMPIRIS	VARIABEL	TOLOK UKUR
1	<p>ASPEK FISIK</p> <p>A.FISIK DASAR</p>	<p>Daerah Rawan Bencana Prioritas Rawan Bencana Dalam Hal Ini Adalah Bencana Alam Dengan Stadium Yang Menyebabkan Kerusakan Fisik Yang Tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gunung Berapi Ada/Tidak Adanya • Gempa Bumi Ada/Tidak Adanya • Tsunami Ada/Tidak Adanya • Banjir Ada/Tidak Adanya • Gerakan tanah Ada/Tidak Adanya • Kebakaran Hutan Ada/Tidak Adanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan merupakan wilayah gunung berapi atau aman dari jangkauan efek radius gunung berapi • Bukan merupakan wilayah gempa bumi/episentrum gunung berapi • Bukan merupakan wilayah jangkauan tsunami atau efek radius pencapaian bahaya tsunami • Bukan merupakan wilayah banjir dalam skala besar/banjir bandan yang bias merusak dalam skala besar • Memiliki gerakan tanah yang rendah sehingga meminimalisasi bencana longsor • Bukan merupakan wilayah titik api/hot spot sehingga sedikit mengalami bencana kebakaran huta

	<p>B. FISIK BINAAN</p>	<p>Kriteria UU 29 Tahun 2007 Tentang Ibukota Negara RI</p> <p>Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 4 Dan Pasal 5 Menyatakan Bahwa Propinsi Jakarta Adalah Daerah Khusus Yang Berfungsi Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Sekaligus Sebagai Daerah Otonom Pada Tingkat Propinsi Yang Memiliki Kekhususan Tugas, Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Sebagai Tempat Kedudukan Perwakilan Asing, Serta Pusat/ Perwakilan Lembaga Internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fisik Binaan • Pola Ruang <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fasilitas <li style="padding-left: 40px;">Fasilitas Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fisik Binaan <li style="padding-left: 20px;">Fisik Binaan Dalam Hal Ini Ingin Melihat Keberadaan Fasilitas Dan Utilitas Serta Melihat Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas dan Utilitas. • Pola Ruang <ul style="list-style-type: none"> ❖ Fasilitas <li style="padding-left: 40px;">Fasilitas Perkantoran : <li style="padding-left: 40px;">Fasilitas Perkantoran Pemerintahan : 	
--	-------------------------------	--	---	--

			<p>Gedung Negara Dan Sekerteriatan Negara</p> <p>Gedung Kementerian (34) Gedung Badan Negara Setingkat Menteri (10)</p> <p>Gedung DPR/MPR/DPD</p> <p>Gedung Mahkamah Agung Gedung Komisi Yudisial Mahkama Konstitusi Badan Pemeriksa Keuangan Gedung Mabes TNI Gedung Mabes POLRI Gedung Jaksa Agung</p> <p>Fasilitas Perkantoran Partai -- Partai Jumlah Partai Dikondisikan</p> <p>Fasilitas Perkantoran Asing Gedung Perwakilan Asing (Duta Besar) Gedung Lembaga Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan standar komperatif fasilitas perkantoran Istana negara di Kota Jakarta 68.000 M² (6,8 Ha) • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU untuk Gedung Negara No.45 Tahun 2007 • Sesuai dengan standar komperatif fasilitas perkantoran parlemen di Kota Jakarta 600.000 M² (60 Ha) • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU untuk Gedung Negara Negara No.45 Tahun 2007 • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU untuk Gedung Negara No.45 Tahun 2007 • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU untuk Gedung Negara No.45 Tahun 200
--	--	--	--	---

		<p>Fasilitas Permukiman</p> <p>Fasilitas Pendidikan</p> <p>Fasilitas Perdagangan Dan Jasa</p> <p>Fasilitas Kesehatan</p> <p>Fasilitas Media Masa Pemerintah</p>	<p>Fasilitas Permukiman Fasilitas Permukiman Pemerintah</p> <p>Fasilitas Pendidikan Perguruan Tinggi Nasional SMU SMP SD</p> <p>Fasilitas Perdagangan Dan Jasa Pusat Perbelanjaan Kota</p> <p>Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Nasional</p> <p>Fasilitas Media Masa Pemerintah Gedung TVRI Gedung RRI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU Standar Rumah Sehat Kaplin Ideal : 200 m² : 1 Kapling sedang : 100 m² : 3 Kapling Kecil : 70 m² : 6 • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk. • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk. • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk. • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU untuk Gedung Negara No.45 Tahun 2007
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ Utilitas Air Bersih Listrik (Energi) Telepon (Telekomunikasi) Sampah • Sarana Prasarana Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ❖ Transportasi Darat Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Utilitas Air Bersih Kualitas Kwantitas Air Bersih Listrik (Energi) Kapasitas Energi Listrik Jaringan Listrik Telekomunikasi Kapasitas Telekomunikasi Jaringan Telekomunikasi Sampah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) • Sarana Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ❖ Transportasi Darat Jalan Kondisi Perkerasan Jalan (Baik, Sedang, Buruk) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk. • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk. • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk. • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk. • Kondisi jaringan jalan, perkerasan Sesuai dengan kebutuhan standar Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk.
--	--	--	---	--

2	ASPEK KEPENDUDUKAN	<p style="text-align: center;">Terminal</p> <p style="text-align: center;">❖ Transportasi Udara</p> <p style="text-align: center;">❖ Kependudukan</p>	<p style="text-align: center;">Terminal Tipe Terminal (A, B) Kondisi Terminal</p> <p style="text-align: center;">❖ Transportasi Udara Bandar Udara Fasilits Bandar Udara Kelas Bandar Udara (A,B)</p> <p>Jumlah Penduduk Pertumbuhan penduduk Kepadatan Penduduk Migrasi Penduduk Jika direncanakan Menjadi Pusatt Pemerintahan Negara Berdasarkan Kebutuhan Pemerintah dilihat dari fungsi dan perannya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Terminal Tipe A Memiliki Terminal Tipe B Kondisi Terminal Layak • Status Bandara Udar aInternasional Kelas : 1 A Tipe Pesawat Yang Didarati minimal : B-739 dan B-747 • Jumlah Penduduk Maksimal 2 juta jiwa Kepadatan penduduk Maksimal 1500 jiwa/ Km²
---	-----------------------	--	--	---

Sumber : Kajian dan Asumsi Peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada pembahasan ini menguraikan metodologi penelitian yang berkenaan dengan cara dan metode yang digunakan pada penyusunan laporan penelitian ini.

3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dibagi dalam beberapa tahap yaitu tahap persiapan, survey primer dan survey sekunder.

A. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan-persiapan berupa penyediaan alat-alat yang akan diperlukan dalam survey. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah:

- a. Kerangka studi sebagai usulan teknik survey. Serta penyiapan daftar mengenai keadaan wilayah studi, kegiatan masyarakat dan lain-lain yang diperlukan sebagai bahan penyusunan studi dan peta dasar.
- b. Telaah pustaka berupa pemahaman awal terhadap kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat di lokasi penelitian dengan membaca dan memahami buku-buku, penelitian-penelitian dan informasi terutama yang relevan dengan kebutuhan studi untuk keperluan dalam penyusunan landasan teori dan sebagai bahan acuan mengenai kondisi wilayah studi pada masa lampau dan sekarang.

B. Pencarian Data Survey Primer

Pencarian data survey primer yang dimaksud adalah pengambilan data langsung dari sumber aslinya/lapangan, adapun teknisnya menggunakan pendekatan observasi lapangan dimana teknik ini digunakan untuk mensurvey karakteristik kegiatan suatu kawasan serta mengetahui titik-titik penting yang menjadi pusat orientasi kegiatan Kota Palangkaraya. Adapun detail teknisnya

menggunakan foto-foto lewat kamera digital, pemetaan serta lain – lainnya.

C. Pencaharian Data Survey Sekunder

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yang intinya lebih menekankan pada pencarian data yang sudah siap pakai, baik itu yang berasal dari instansi pemerintah, dari kajian buku-literatur, maupun isu terbaru serta pembanding dari website di internet. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Survey Sekunder Instansional

Survey ini antara lain dilaksanakan di beberapa instansi, di Kota Palangkaraya adapun beberapa instansi yang dihubungi antara lain adalah Bappeda, BPS, BPN, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan. Adapun beberapa data atau kumpulan data yang dicari dari beberapa instansi tadi antara lain adalah RPJP, RPJM, serta RTRW Kota Palangkaraya, produk-produk perencanaan parsial yang ada sebelumnya, data dan kebijakan untuk masing-masing instansi.

2. Survey Sekunder Internet

Pendekatan ini bertujuan untuk bisa mengikuti issue terbaru terkait dengan perencanaan Kota Pusat Pemerintahan, terutama pada pengkajian konsep-konsep pengembangan kota. Dengan melihat kebutuhan-kebutuhan data yang dipakai untuk pusat pemerintahan yang tidak ada pada data primer sehingga dibutuhkan literatur tambahan dari internet.

3.2. Metode Analisa Kelayakan Pusat Pemerintahan

Tahapan analisa merupakan metodologi untuk mengambil kesimpulan dari suatu kajian. Tahap analisa ini dilakukan dengan cara mengolah semua data yang sudah ada sebelumnya. Tahap analisa dalam studi ini dibagi menjadi :

A. Kajian regional

Kajian regional terbagi dalam dua bagian yaitu kajian rentang kendali dan kajian rawan bencana.

a. Kajian Rentang Kendali

Kajian rentang kendali (Kajian Pendukung) dilakukan dengan melihat jarak dan waktu tempuh wilayah internal menggunakan transportasi darat khususnya kota pelabuhan yang berdekatan dengan Kota Palangkaraya dan eksternal melalui transportasi udara di beberapa Kota di Indonesia antarlain, Banda Aceh, Jakarta, Surabaya, Makasar, Medan, Mataram, Manado, Merauke, Manokwari, Nunukan dan Kupang, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui rentang kendali dari beberapa kota penting dan kota terjauh serta kota terluar di Indonesia sehingga dapat dilihat tingkat pencapaian antara pusat pemerintahan dan daerah.

Kajian rentang kendali merupakan kajian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui lokasi kota dengan asumsi jika semakin jauh jarak kota (khususnya kota pelabuhan) semakin baik guna menghambat perkembangan kota sedangkan untuk transportasi udara diasumsikan waktu tempuh maksimum 5 jam perjalanan.

b. Kajian Bencana Alam

Kajian bencana alam dilakukan untuk mengetahui pemilihan lokasi yang terhindar dari kemungkinan ancaman bencana alam yang berbahaya antarlain gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan lahan serta gerakan tanah dan kejadian bencana Indonesia tahun 2011 yang bersumber dari BNPB. Setiap wilayah memiliki kelebihan dan kelemahan dalam hal geografis, khususnya bencana alam bila disuatu lokasi yang memiliki hambatan kecil bencana/sedikit memiliki daerah rawan bencana maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tersebut menjadi prioritas pertama.

B. Analisa Fisik

Dalam menganalisa kesesuaian fisik wilayah yang dilakukan dalam pelaksanaan review disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang ada di lapangan dan mengacu pada Rencana Tata Ruang wilayah Kota terdahulu agar

rencana-rencana tersebut bersifat dinamis terhadap perkembangan yang terjadi tetapi memiliki prinsip dasar, serta berfungsi sebagai penunjang dan pengendali program-program pembangunan secara keseluruhan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan analisa kesesuaian fisik wilayah adalah sebagai berikut :

1. Analisa Fisik Dasar

Analisa fisik dasar terbagi dalam analisa kelayakan lahan kota, analisa ketererangan optimum dan daya tampung maksimum.

a. Analisa Studi Kelayakan Lahan Kota

Analisa fisik dasar menggunakan analisa SKLK berdasarkan SK Mentan No.837 Tahun 1980 dan KEPRES NO.32 Tahun 1990 Tentang Kriteria Kawasan Lindung, meliputi analisa ketererangan, jenis tanah, curah hujan, hidrologi, rawan bencana dan konservasi. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui kondisi penggunaan lahan dan daya dukung lahan apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, serta mendukung pelaksanaan dan penerapan UU.N0.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yaitu Pasal 29 Ayat 2 dan 3 yaitu proporsi RTH pada wilayah kota paling minim 30 % dari total luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota jadi total keseluruhan (50% dari Wilayah Kota).

b. Proses Analisis

Analisa yang dilakukan pada proses pertama dioverlay menggunakan peta ketererangan, jenis tanah dan curah hujan kemudian dioverlay lagi menggunakan peta hidrologi, konservasi dan rawan bencana yang berdasarkan kriteria kawasan lindung KEPRES NO. 32 Tahun 1990.

Kriteria Penggunaan lahan dibagi menjadi 5 kawasan peruntukan, yaitu :

1. Kawasan Lindung;
2. Kawasan Penyangga;
3. Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan;

4. Kawasan Budidaya Tanaman Semusim; dan

5. Kawasan Permukiman

Untuk lebih jelas melihat proses analisa kelayakan lahan yang dilakukan dapat dilihat pada Diagram 1.1. Kriteria Penggunaan Lahan Berdasarkan SK.MENTAN dan KEPRES dibawah ini memuat beberapa elemen dari fisik dasar guna melengkapi analisa fisik yang mendukung perencanaan sebuah kota.

1) Kriteria penggunaan lahan Berdasarkan SK.Mentan No.837 Tahun 1980

Maksud kesesuaian lahan adalah kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan skor yang telah ditentukan/standar untuk mengetahui bentang alam yang digunakan sebagai kawasan budidaya maupun kawasan non budidaya.

Berdasarkan SK.Mentan No.837 Tahun 1980 tersebut, penggunaan lahan dibagi menjadi 5 kawasan peruntukan, yaitu :

1. Kawasan Lindung;
2. Kawasan Penyangga;
3. Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan;
4. Kawasan Budidaya Tanaman Semusim; dan
5. Kawasan Permukiman

Faktor pembatas yang digunakan untuk klasifikasi ini adalah :

a. Kemiringan Lereng (dinyatakan dalam satuan persen) :

- Kelas I = 0 – 8 % (Datar) Nilai Skor 20
- Kelas II = 8 – 15 % (Landai) Nilai Skor 40
- Kelas III = 15 – 25 % (Agak Curam) Nilai Skor 60
- Kelas IV = 25 – 45 % (Curam) Nilai Skor 80
- Kelas V = > 45 % (Sangat curam) Nilai Skor 100

b. Faktor jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi :

- Kelas I = Aluvial, tanah Glei, Nilai Skor 15
Planosol, Hidromorf Kelabu,
Laterik Air Tanah (Tidak peka)

- Kelas II = Latosol (Agak peka) Nilai Skor 30
- Kelas III = Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Mediteran (Agak peka). Nilai Skor 45
- Kelas IV = Andosol Laterek, Grumosol, Podsol, Podsollic (Peka) Nilai Skor 60
- Kelas V = Regosol, Litosol, Atnogosol, Organosol, Renzine (Sangat Peka) Nilai Skor 75

c. *Faktor Intensitas Hujan Harian :*

- Kelas I = $0 \leq 13,6 \text{ mm/hari}$ (sangatrendah) Nilai Skor 10
- Kelas II = $13,6 - 20,7 \text{ mm/hari}$ (rendah) Nilai Skor 20
- Kelas III = $20,7 - 27,7 \text{ mm/hari}$ (sedang) Nilai Skor 30
- Kelas IV = $27,7 - 34,8 \text{ mm/hari}$ (tinggi) Nilai Skor 40
- Kelas V = $> 34,8 \text{ mm/hari}$ (sangat tinggi) Nilai Skor 50

Dengan menjumlahkan skor ketiga faktor tersebut maka dapat ditetapkan penggunaan lahan pada setiap kawasan adalah sebagai berikut :

1. *Kawasan Lindung*

Areal dengan jumlah nilai skor untuk kemampuan lahan sama dengan atau lebih dari 175. atau memenuhi salah satu atau beberapa syarat berikut :

- Mempunyai lereng lapang $>45 \%$;
- Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah Regosol, Litosol, Organosol, dan Renzine dengan lereng $>45 \%$;
- Merupakan jalur pengaman aliran sungai/air sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai/aliran air tersebut;
- Mempunyai ketinggian 2000 meter di atas permukaan air laut;
- Guna keperluan/kepentingan khusus dan diterapkan oleh pemerintah sebagai kawasan lindung.

2. *Kawasan Penyangga*

Areal dengan jumlah nilai skor untuk kemampuan lahannya 124 – 174 dan atau memnuhi beberap kriteria umum, sebagai berikut :

- Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budidaya secara ekonomis;
- Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga;
- Tidak merugikan segi-segi ekologi lingkungan.

3. *Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan*

Areal dengan jumlah nilai skor untuk kemampuan lahannya 124 ke bawah serta cocok atau seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman tahunan (kayu-kayuan, tanaman perkebunan dan tanaman industri). Disamping itu areal tersebut harus memenuhi kriteria umum untuk kawasan penyangga.

4. *Kawasan Budidaya Tanaman Semusim Setahun*

Areal dengan kriteria seperti dalam penetapan kawasan budidaya tanaman tahunan akan tetapi areal tersebut cocok atau seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman semusim/setahun.

5. *Kawasan Permukiman*

Areal yang memenuhi kriteria budidaya cocok untuk areal permukiman serta secara mikro mempunyai kelerengan 0 – 8 %.

Untuk klasifikasi sifat-sifat daerah aliran yang mempengaruhi limpasan permukaan dengan hubungan dengan kerengan dikutip dari engineering Hand Book for farm Planners (dalam hudson,1981) menyatakan bahwa :

- Kelerengan rata-rata diatas 30 %, untuk daerah sifat aliran permukaannya sangat tinggi.
- Kelerengan rata-rata 10-30 % (berbukit), untuk daerah sifat aliran permukaannya tinggi.
- Kelerengan rata-rata 5-10 % (bergelombang), untuk daerah sifat aliran permukaannya normal.
- Untuk lereng tang relatif datar (0-5%), pada daerah ini sifat aliran permukaannya rendah.

2) Kriteria kawasan Lindung Berdasarkan Kepres No.32 Tahun 1990

Kawasan lindung meliputi :

1. *Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya :*
 - a. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
 - b. Kawasan Hutan Lindung, dengan kriteria :
 - Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi skor 175 dan/atau;
 - Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih;
 - Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih.
 - c. Kawasan Bergambut, dengan kriteria yaitu tanah bergambut yang memiliki ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa;
 - d. Kawasan Resapan Air, dengan kriteria yaitu curah hujan tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.
2. *Kawasan Perlindungan Setempat*
 - a. Kriteria sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. Kriteria sempadan sungai yaitu :
 - Sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai yang berada di luar permukiman;
 - Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
 - c. Kriteria kawasan sekitar danau atau waduk yaitu daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.



- d. Kriteria kawasan sekitar mata air yaitu sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.
3. *Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya*
 - a. Kriteria Cagar Alam adalah :
 - Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya;
 - Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusun;
 - Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
 - Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar mempunyai pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;
 - Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.
 - b. Kriteria Suaka Margasatwa, yaitu :
 - Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
 - Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
 - Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
 - Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
 - c. Kriteria Hutan Wisata
 - Kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;
 - Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat permukiman penduduk;
 - Mengandung satwa baru yang dapat dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;
 - Mempunyai luas yang cukup dan lapangan yang tidak membahayakan.
 - d. Kriteria Daerah Perlindungan Plasma Nutfah

- Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;
- Mempunyai luas yang cukup dan lapangan yang tidak membahayakan

e. **Kriteria Daerah Pengungsian Satwa**

- Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
- Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.

f. **Kawasan Rawan Bencana**

Adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi dan tanah longsor.

c. Analisa Kisaran Lereng Optimum

Dalam analisis kemiringan lereng digunakan standar ketentuan skala Maberry (1972) yang dapat menentukan kisaran lereng optimum untuk penempatan berbagai kegiatan pembangunan di suatu wilayah perencanaan. Kegiatan yang ada dapat diklasifikasikan dalam 10 kegiatan, yang meliputi : rekreasi umum, bangunan terhitung dengan persyaratan teknis, kegiatan perkotaan, perumahan konvensional, pusat-pusat perdagangan serta sarana dan prasarana pelayanan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

d. Analisa Daya Tampung Maksimum

Analisa daya tampung penduduk maksimum bertujuan untuk mengetahui daya tampung maksimum suatu wilayah perencanaan terhadap jumlah penduduk. Metode yang digunakan dalam menganalisa daya tampung ini dengan perbandingan unit untuk rumah kecil, sedang dan besar adalah 6 : 3 : 1. Didalam menganalisa daya tampung wilayah terhadap penduduk beberapa asumsi yang harus diketahui yaitu 30 % untuk kawasan RTH, 70% untuk kawasan prasarana

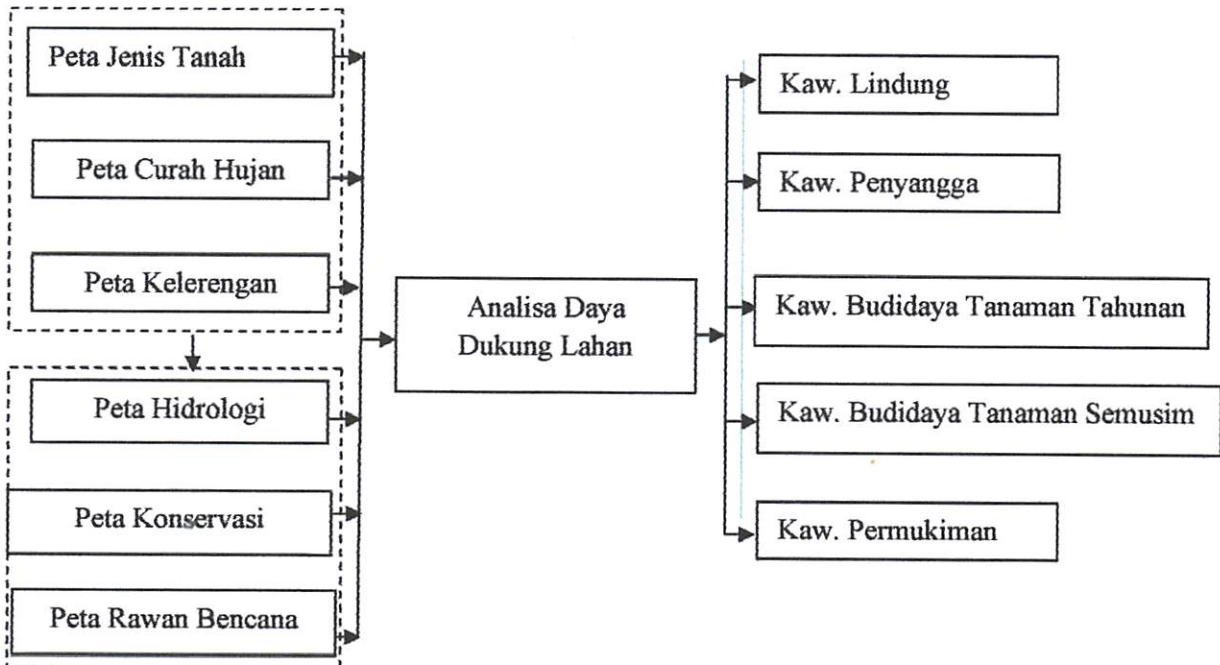
dan sarana, kemudian dari 70% luasan prasarana dan sarana dibagi 60% untuk kawasan perumahan.

Tabel 3.1
Kisaran Lereng Optimum Kegiatan Pembangunan

No	Peruntukan	Kelas Sudut Lereng (%)						
		0-3	03-10	5-10	10-15	15-30	30-70	>70
1.	Rekreasi Umum	X	X	X	X	X	X	X
2.	Bangunan Terhitung	X	X	X	X	X		
3.	Penggunaan Kota Umum	X	X	X				
4.	Jalan Kota	X	X	X				
5.	Sistem Septik	X	X					
6.	Perumahan Konvensional	X	X	X	X			
7.	Pusat-pusat Perdagangan	X	X					
8.	Jalan Raya	X	X					
9.	Lapangan Terbang	X						
10.	Jalan Lain	X	X	X	X			

Sumber : Skala Maberry (1972)

Diagram 3.1
Analisa Daya Dukung Lahan Berdasarkan
SK. MENTAN dan KEPRES NO. 32 Thn 1990 Tentang Kriteria Kawasan Lindung



C. Analisa Kependudukan

Analisa kependudukan terbagi dalam analisa pertumbuhan, proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk serta analisa proyeksi migrasi penduduk.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Sebelum melakukan proyeksi penduduk hal yang pertama kita lakukan adalah mencari presentase pertumbuhan penduduk dengan menggunakan rumus dibawah ini.

Rumus Pertumbuhan Penduduk :

$$R = \frac{\text{Jumlah penduduk tahun akhir} - \text{Jumlah penduduk tahun awal}}{\text{Jumlah penduduk tahun awal}} \times 100$$

Kemudian perhitungan proyeksi jumlah penduduk Kota Palangkaraya digunakan *Metode Eksponensial*. Adapun rumusnya sebagai berikut :

Rumus Eksponensial:

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

Dimana :

P_n : Jumlah Penduduk yang dicari

P_o : Jumlah Penduduk awal

r : Pertumbuhan

n : Interval tahun

Dari proyeksi penduduk yang ada kemudian dicari kepadatan penduduk dengan menggunakan Rumus kepadatan penduduk.

$$(Kp) = Jp : La$$

Keterangan :

Kp : Kepadatan penduduk (jiwa)

Jp : Jumlah penduduk (Km)

La : Luas lahan

2. Analisa Proyeksi Migrasi

Analisa ini dilakukan dengan cara melihat struktur lembaga-lembaga dan jumlah pegawai dalam suatu lembaga yang akan bermigrasi ke Pusat Pemerintahan NKRI, kemudian dikalikan dengan standar 1 keluarga (4 orang.

D. Analisa Fisik Binaan

Analisis fisik binaan terbagi dua yaitu analisa pola ruang dan sarana prasarana transportasi.

1. Pola Ruang :

Analisa Pola Ruang terbagi dalam dua bagian yaitu analisa fasilitas dan utilitas.

a) Analisa Penggunaan Lahan

Analisa dilakukan dengan cara mengetahui presentase tata guna lahan yang ada serta mengetahui kecenderungan penggunaan lahan yang berguna untuk melihat arah perkembangan Kota Palangkaraya.

b) Fasilitas

Analisa fasilitas menggunakan pendekatan analisa standar PU yang sesuai dengan tingkat kebutuhan akan fasilitas di suatu kota dan jumlah penduduk pendukung yang menjadi asumsi dasar dalam penentuan jumlah fasilitas yang dibutuhkan. Jumlah penduduk yang berada pada satuan-satuan administrasi pemerintahan akan menjadi dasar pendekatan untuk sarana-sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Adapun rumus yang digunakan dalam mengetahui proyeksi dan kebutuhan fasilitas yaitu :

$\text{Proyeksi Fasilitas} = \frac{\text{Jumlah penduduk tahun proyeksi}}{\text{Jumlah penduduk pendukung}}$
$\text{Kebutuhan Fasilitas} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah penduduk pendukung}}$
$\text{Kebutuhan Lahan} = \frac{\text{Lahan berdasar Standar PU}}{\text{Lahan Layak Bangun}}$

Setelah mengetahui kebutuhan fasilitas kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan penilaian potensi pelayanan dilakukan menggunakan cara membandingkan eksisting dengan standar kebutuhan. Adapun ketentuannya, bila sesuai standar kebutuhan maka dikatakan cukup melayani kebutuhan masyarakat,

jika kurang dari standar kebutuhan maka dikatakan kurang cukup untuk melayani masyarakat.

Selain itu analisa fasilitas diarahkan untuk mengetahui kebutuhan lahan yang disesuaikan dengan standar PU dan komparasi fasilitas pemerintahan (Kota Jakarta).

Dalam penelitian ini analisa yang digunakan untuk fasilitas perkantoran pemerintah pusat adalah analisa berdasarkan Peraturan Menteri PU No.45 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara. Untuk bangunan rumah negara, klasifikasinya berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan kemudian dikalikan 20 % lahan tambahan diwilah DKI Jakarta (Ibukota Negara). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2.

c) Utilitas

Analisa utilitas bertujuan untuk mengetahui kebutuhan jumlah utilitas bagi masyarakat serta potensi pelayanannya. Analisa utilitas di Kota Palangkaraya dihitung menggunakan standar PU. Adapun rumus yang digunakan dalam mengetahui proyeksi dan kebutuhan fasilitas yaitu :

$$\text{Proyeksi Utilitas} = \frac{\text{Jumlah penduduk tahun proyeksi}}{\text{Jumlah penduduk pendukung}}$$

$$\text{Kebutuhan Utilitas} = \frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah penduduk pendukung}}$$

Setelah mengetahui kebutuhan utilitas kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan penilaian potensi pelayanan dilakukan menggunakan cara membandingkan eksisting dengan standar kebutuhan. Adapun ketentuannya, bila sesuai standar kebutuhan maka dikatakan cukup melayani kebutuhan masyarakat, jika kurang dari standar kebutuhan maka dikatakan kurang cukup untuk melayani masyarakat.

Tabel 3.2
Standar Luas Rumah Negara Berdasarkan Tipe Peruntukannya

Tipe	Luas Bangunan	Luas Lahan
Khusus	400 m ²	1.000 m ²
A	250 m ²	600 m ²
B	120 m ²	350 m ²
C	70 m ²	200 m ²
D	50 m ²	120 m ²
E	36 m ²	100 m ²

Sumber : Permen Pu No.45 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara

d) Sarana dan Prasarana Transportasi

Analisa sarana transportasi terdiri dari analisa transportasi darat dan udara.

1. Transportasi Darat

Untuk analisa transportasi darat bertujuan untuk mengetahui potensi pelayanan serta kondisi sarana prasarana transportasi darat khususnya jalan dan terminal di Kota Palangkaraya.

a) Analisa Jalan :

Analisa Presentase Kondisi Perkerasan Jalan

Analisa presentase perkerasan jalan bertujuan untuk mengetahui kondisi perkerasan jalan di Kota Palangkaraya.

b) Analisa Terminal :

Analisa terminal dilakukan untuk mengetahui tipe dan ukuran terminal serta potensi pelayanannya. Pengembangan terminal penumpang diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal pada sistem trayek angkutan umum yang telah direncanakan. Terminal adalah simpul pergerakan dalam sistem transportasi yang merupakan prasarana pendukung system transportasi darat. Berdasarkan Kepmen Perhubungan No. 31/1995 tentang terminal transportasi jalan, terminal penumpang dibagi menjadi tiga, yaitu:

➤ Kelas A

Untuk pelayanan AKAP dan/atau angkutan lintas batas Negara, AKDP, angkutan kota dan angkutan perdesaan. Luas lahan minimal

terminal kelas A adalah 5 ha dengan jarak antar terminal kelas A lainnya 50 Km dan yang dihubungkan dengan jalan arteri primer serta akses minimal 50 meter.

➤ Kelas B

Untuk pelayanan AKDP, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan, dengan luas lahan minimal 3 ha dan dihubungkan dengan jalan kolektor primer serta akses minimal 30 meter.

➤ Kelas C

Untuk pelayanan angkot/angdes, dengan luas lahan sesuai dengan kebutuhan angkutan, yang dihubungkan dengan jalan kolektor sekunder atau jalan lokal serta akses sesuai dengan kebutuhan setempat.

Kemudian analisa yang digunakan adalah analisa tipe terminal berdasarkan syarat kebutuhan luas terminal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Syarat Kebutuhan Luas Terminal (M²)

No	Ruang	Luasan (M ²)		
		Tipe A	Tipe B	Tipe C
1	Kendaraan	10.065	7.510	3.800
2	Pemakaian Jasa	5394	4.620	1.038
3	Operasional	321	235	90
4	Ruang Luar	6.653	4.890	1.554
Total	Terminal	23.494	17.255	5.463

Sumber : Tartalok Kota Palangkaraya Tahun 2005-2010

2. Transportasi Udara

Analisa tipe, kelas pelayanan sarana prasarana bandar udara berdasarkan standar Kementerian Perhubungan tentang kriteria klasifikasi bandar udara dan tatanan Bandar udara serta melakukan komperasi dengan Bandar udara-bandar udara internasional yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui potensi pelayanan Bandar Udara Tjilik Riwut.

3.3. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup studi yang terdiri dari lingkup lokasi dan lingkup materi.

Bab II Tinjauan Pusataka

Pada bab ini menguraikan tentang literatur, refrensi, normatif yang memuat penjelasan tentang ibukota negara/pusat pemerintahan.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menguraikan tahapan – tahapan penelitian, antarlain metode pengumpulan data, metode analisa kajian kelayakan fisik pusat pemerintahan serta sistematika pembahasan laporan penelitian.

Bab IV Gambaran Umum

Pada bab ini berisikan gambaran umum Kota Palangkaraya yang terbagi dalam aspek fisik dan non fisik. Untuk aspek fisik terdapat dua bagian yaitu fisik dasar dan fisik binaan dan termasuk didalamnya aspek sarana prsarana transportasi, untuk non fisik yaitu aspek kependudukan.

Bab V Analisa

Pada bab ini berisikan analisa - analisa dari fakta dan data yang diperoleh dilapangan, antarlain memuat analisa aspek fisik dan aspek kependudukan yang terbagi dalam analisa fisik dan non fisik sehingga dapat diketahui kelayakan Kota Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan NKRI.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil yang dilakukan pada tahap analisa dan selanjutnya diberikan beberapa rekomendasi mengenai Kelayakan Kota Palangkaraya menjadi pusat pemerintahan NKRI.

KERANGKA PIKIR
STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN
NKRI DITINJAU ADRI ASPEK FISIK

LATAR BELAKANG

Kondisi Ibukota Negara RI (Jakarta) yang memiliki banyak persoalan yang cukup sulit (banjir, efek bencana gempa bumi, kemacetan lalu lintas, dan ledakan penduduk) yang menyebabkan timbulnya wacana pemindahan ibukota negara, dan yang merupakan salah satu calon ibukota negara adalah Kota Palangka Raya, selain itu Kota Palangka Raya pernah direncanakan mejadi ibu kota negara, maka dari itu peneliti ingin melakukan Studi Kelayakan Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Negara RI.

TUGAS DAN FUNGSI IBUKOTA NEGARA RI :

Dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 2007 tentang pemerintahan Propinsi khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 4 dan pasal 5 menyatakan bahwa Propinsi Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah etonom pada tingkat propinsi yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan asing, serta pusat/ perwakilan lembaga internasional.

TEORITIS IBUKOTA NEGARA RI :

menurut Sutikno Ibu kota mempunyai fungsi kota selalu menjadi target utama dalam , karena dengan menguasai ibu kota biasanya inan menguasai sebagian besar musuh atau naling tidak memerosotkan moral lebihkan musuh (militer). ara merupakan pusat pengendalian teritorial nya sebagai sebuah negara bangsa. Hampir ra mengalami periode separatisme dan/atau kan dan perang saudara dalam perjalannya iring dengan penyusunan aparat mnik pengendalian teritorial negara, ternyata percepat pula integrasi kultural. Fokus kedua alah negara, yang dikembangkan menjadi jaan nasionalisme" (McGee) yang is degan monumen nasional, masjid negara, ional, parade nasional dan sebagainya

KRITERIA NORMATIF IBUKOTA NEGARA RI :

Kriteria ibukota negara dalam Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional adalah wilayah yang merupakan wilayah strategi nasional dan pusat pengembangan nasional (PKN).

KRITERIA KOMPERATIF IBUKOTA NEGARA RI :

Kriteria ibukota negara dapat dikaji dari ibukota negara didunia yang dipilih menjadi contoh anteralain Beijing, Whashington DC, Jakarta, Berlin dan Canberra.

KELAYAKAN IBUKOTA NEGARA RI DI KOTA PALANGKA RAYA

Kelayakan Pusat Pemerintahan NKRI dari Kajian Aspek Fisik

KELAYAKAN PUSAT PEMERINTAHAN RI
DI KOTA PALANGKA RAYA DARI ASPEK FISIK

BAB IV

GAMBARAN UMUM

KOTA PALANGKARAYA

Gambaran umum merupakan bagian penting untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang terdapat di wilayah studi. Gambaran umum nantinya akan digunakan untuk membuat suatu analisa dan kesimpulan akhir yang diinginkan. Pembahasan gambaran umum Studi Kelayakan Kota Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintahan NKRI ditinjau Dari Aspek Fisik terdiri dari pembahasan, luas wilayah dan batas administrasi, aspek fisik serta aspek kependudukan.

4.1. Luas Wilayah Dan Batas Administrasi

Kota Palangkaraya terletak di Pulau Kalimantan dan merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelas dapat melihat peta orientasi Kota Palangkaraya pada peta 4.1.

Kota Palangkaraya mempunyai luas wilayah 2.678,51 km² (267.851Ha) yang terbagi dalam 5 kecamatan dengan luas antarlain yaitu Kecamatan Pahandut 117,25 km², Kecamatan Sebangau 583,50 km², Kecamatan Jekan Raya 352,62 Km², Kecamatan Bukit Batu 572,00 Km², dan Kecamatan Rakumpit 1.053,14 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Letak geografis Kota Palangkaraya terletak pada : 113°30" - 114 °07" Bujur Timur dan 1°35 - 2°24' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangkaraya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan dan 30 Kelurahan dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Timur : kabupaten Gunung Mas
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

4.2. Kondisi Fisik

Kondisi fisik dalam sebuah perencanaan kota di bagi dalam 2 (dua) bagian yaitu fisik dasar dan fisik Binaan.

4.2.1. Fisik Dasar

Pembahasan aspek fisik dasar ini meliputi topografi, jenis tanah, klimatologi, hidrologi dan daerah rawan bencana.

4.2.1.1. Topografi

Topografi adalah keadaan suatu daerah/bentuk dasar permukaan tanah yang dinyatakan dengan garis kontur. Suatu perencanaan memerlukan pengetahuan dasar tentang topografi daerah perencanaan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh faktor alam.

Kondisi kemiringan lereng Kota Palangkaraya sebagian besar relatif datar (0-8%), sedangkan di wilayah Bukit Tangkiling, kecamatan Bukit Batu terdapat bukit berbatu dengan kemiringan lahan 45%, sedangkan disekitar wilayah Kecamatan Rakumpit kemiringan lereng berkisar 15-40%. yang dimaksud dengan lereng adalah perbedaan ketinggian antara dua tempat yang berbeda yang dinyatakan dalam presentase. Artinya berupa meter beda tinggi antar dua tempat dibagi dengan jarak kedua tempat tersebut.

Berdasarkan peta Topografi skala 1 : 250.000, morfologi wilayah Kota Palangkaraya merupakan daerah dataran rendah, dengan ketinggian rata – rata kurang dari 60 m dari muka laut. Daerah morfologi pegunungan rendah dengan ketinggian antara 30 m hingga sekitar 60 m membentang dengan arah utara – selatan dan membagi lembah aliran Sungai Kahayan dan Sungai Rungan dibagian barat, dan lembah Sungai Mangkutup dibagian timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Peta 4.2.

4.2.1.2. Jenis Tanah

Tanah merupakan batuan yang sudah lapuk bercampur dengan sisa makhluk hidup, air, dan udara. Adapun jenis tanah yang terdapat di Kota Palangkaraya antarlain jenis tanah pedosol, regosol, organosol, litosol dan podsolik merah kuning. Dibawah ini terkait beberapa penjelasan jenis tanah yang ada di Kota Palangkaraya :

1. Tanah podsolik adalah jenis tanah yang telah mengalami perkembangan profil, susunan horizon terdiri dari horizon albic (A2) dan spodic (B2H) yang jelas, tekstur lempung hingga pasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, kandungan pasir kuarsanya tinggi, sangat masam, kesuburan rendah, kapasitas pertukaran kation sangat rendah, peka terhadap erosi, batuan induk batuan pasir dengan kandungan kuarsanya tinggi, batuan lempung dan tuf vulkanmasam.
2. Tanah Regosol atau aluvial atau litosol tanah tersebut tidak memiliki tingkat kesuburan yang baik, karena didominasi oleh tekstur pasir dengan solum tanah yang relatif dangkal. Tanah regosol banyak ditumbuhi tanaman kelapa. Salah satu terobosan teknologi yang dapat diterapkan untuk pemanfaatan tanah jenis ini adalah dengan pemberian bahan organik.
3. Litosol Tanah mineral tanpa atau sedikit perkembangan profil, batuan induknya batuan beku atau batuan sedimen keras, kedalaman tanah dangkal (< 30 cm) bahkan kadang-kadang merupakan singkapan batuan induk (outerop). Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya berpasir, umumnya tidak berstruktur, terdapat kandungan batu, kerikil dan kesuburannya bervariasi. Tanah litosol dapat dijumpai pada segala iklim, umumnya di topografi berbukit, pegunungan, lereng miring sampai curam. Jenis tanah litosol, memiliki kesuburan rendah, karena memiliki solum dangkal dan kandungan unsur hara.
4. Tanah Organosol atau tanah histosol atau lebih populer dengan istilah tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik seperti sisa-sisa jaringan tumbuhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Tanah gambut selalu jenuh air atau terendam sepanjang tahun kecuali dikeringkan dengan membuat drainase.

5. Tanah Aluvial adalah tanah yang belum mengalami perkembangan profil. Tanahnya selalu jenuh air, terbentuk dari bahan endapan muda, seperti endapan lumpur. Proses pembentukan tanahnya merupakan hasil aktivitas air sungai atau laut. Pada daerah berdekatan dengan kawasan pasang surut bisa berbentuk tanah aluvial bersulfat (masam aktual) dan bersulfida (masam potensial). Dan karakteristik tanah aluvial yang ada di wilayah Kota Palangkaraya memiliki ciri tanah aluvial non sulfat masam.
6. Tanah Podsolik Merah Kuning adalah tanah mineral yang telah berkembang, solum (kedalaman) dalam, tekstur lempung hingga berpasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, bersifat agak asam (pH kurang dari 5.5), kesuburan rendah hingga sedang, warna merah hingga kuning, kejenuhan basa rendah, peka erosi. Tanah ini berasal dari batuan pasir kuarsa, tuf vulkanik, bersifat asam.

Untuk melihat lebih jelas jenis tanah yang ada di Kota Palangkaraya, dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Peta 4.3.

4.2.1.3. Klimatologi

Klimatologi atau iklim adalah keseluruhan dari rata-rata gejala atmosfer dalam suatu wilayah, yang dihitung dalam jangka waktu tiga puluh tahun dan memiliki unsur-unsur seperti : cuaca, hujan, tekanan angin, dan lain sebagainya. Kecepatan angin rata-rata tahunan sebesar 3 Knot dan temperatur rata-rata adalah 28,05 °C, maksimum 32,52 dan minimum 32,56 °C.

Secara umum curah hujan tahunan di wilayah Kota Palangkaraya 6,66 mm/hari. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Peta 4.4.

4.2.1.4. Hidrologi

Hidrologi adalah gambaran umum tentang siklus air. Hidrologi dapat dibagi tiga, yaitu : mata air, air permukaan (sungai, waduk) dan air hujan. Pemantauan terhadap aspek ini sangat penting dalam perencanaan karena dapat mengetahui efisiensi penggunaan air bagi kepentingan kehidupan masyarakat.

Aliran air permukaan yang mengalir di wilayah Kota Palangkaraya adalah Sungai Kahayan, Sungai Rungan dan Sungai Sebangau. Secara umum pola aliran sungai tersebut memperlihatkan pola aliran meranting dengan stadium aliran dewasa hingga tua, yang ditandai oleh pola meander yang sangat kuat hingga membentuk danau – danau kecil sebagai akibat meander terpotong. Daya dukung air merupakan salah satu parameter yang sangat penting dalam perencanaan tata ruang. Untuk itu, perlu adanya suatu tinjauan keadaan potensi sumber – sumber air.

Sebagian besar penduduk Kota Palangkaraya memanfaatkan air permukaan dangkal (sumur) sebagai air untuk kebutuhan hidupnya (minum, memasak dan mencuci), dan sebagian lagi memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih, untuk debit air Sungai Kahayan dalam 20 tahun terakhir (durasi 7 hari) mencapai sekitar 68 m³/detik (1 hari), 100 m³/detik (7 hari) dan 117 m³/detik (30hari) dengan kondisi yang ada masih memiliki kualitas yang baik. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya air di Kota Palangkaraya mempunyai potensi yang besar, oleh karena itu perlu ada perlindungan pada sumber daya air tersebut, yaitu menetapkan wilayah - wilayah perlindungan sesuai aturan, seperti sempadan sungai sekitar 100 meter kiri-kanan untuk sungai besar, untuk perlindungan disekitar waduk/danau adalah 50-100 meter, sedangkan perlindungan di sekitar mata air dengan radius ±200 meter. Untuk lebih jelas melihat kondisi hidrologi dapat dilihat pada Peta 4.5.

Tabel 4.1
Luas wilayah Kota Palangkaraya

Kecamatan	Luas area (Km ²)	% Terhadap kota	Kelurahan	Luas Area (Km ²)	% Terhadap Kota
Pahandut	117,25	4,38	1. Pahandut	9,50	0,35
			2. Panarung	23,50	0,88
			3. Langkai	10,00	0,37
			4. Tumbang Ruangan	23,00	0,86
			5. Tanjung Pinang	44,00	1,64
			6. Pahandut Seberang	7,25	0,27
Sebangau	583,5	21,78	1. Kereng Bengkirai	270,50	10,10
			2. Sabaru	152,25	5,68
			3. Kalampangan	46,25	1,73
			4. Kameloh Baru	53,50	2,00
			5. Bereng Bengkel	18,50	0,69

Bersambung . . .

Sambungan . . .

Kecamatan	Luas area (Km ²)	% Terhadap kota	Kelurahan	Luas Area (Km ²)	% Terhadap Kota
			6. Danau Tundai	42,50	1,59
Jekan Raya	352,62	13,16	1. Menteng	31,00	1,16
			2. Palangka	24,75	0,92
			3. Bukit Tunggai	237,12	8,85
			4. Petuk Katimpun	59,75	2,23
Bukit Batu	572	21,36	1. Marang	124,00	4,63
			2. Tumbal Tahai	48,00	1,79
			3. Banturung	72,00	2,69
			4. Tangkiling	62,00	2,31
			5. Sei Gohong	89,00	3,32
			6. Kanarakan	105,50	3,94
			7. Habaring Hurung	71,50	2,67
Rakumpit	1.053,14	39,32	1. Petuk Bukit	283,67	10,59
			2. Pager	193,35	7,22
			3. Panjehang	309,43	1,47
			4. Gaung Baru	59,08	2,21
			5. Petuk Berunai	147,10	5,49
			6. Mungku Baru	87,25	6,99
			7. Bukit Sua	143,26	5,35
Kota Palangkaraya	2.678,51	100,00	Kota Palangkaraya	2678,51	100,00

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008

Tabel 4.2
Ketinggian Dari Permukaan Laut (Meter)
Kota Palangkaraya Tahun 2008

Nama Kecamatan	Kisaran Ketinggian (M)
Pahandut	20-25
Sebangau	16-19
Jekan Raya	20-25
Bukit Batu	40-60
Rakumpit	± 75

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008

Tabel 4.3
Jenis Tanah dan Luasnya Perkecamatan
Kota Palangkaraya Tahun 2008

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)							Jumlah
		Pedsol	Regosol	Organosol	Aluvial	Litosol	Podsolik Kuning	Sungai/ Danau	
1	Pahandut	158	2,078	3,721	4,092	-	-	866	11,725
2	Sebangau	955	-	53,030	3,625	-	-	745	58,355
3	Jekan Raya	1,498	2,215	29,276	1,953	-	-	329	35,262
4	Bukit Batu	3,364	2,406	43,045	6,968	180	179	1,053	57,195
5	Rakumpit	1,562	83,256	12,016	7,187	-	-	1,293	105,314
Total		7,528	89,955	141,088	24,635	180,000	179,000	4,286	267,851

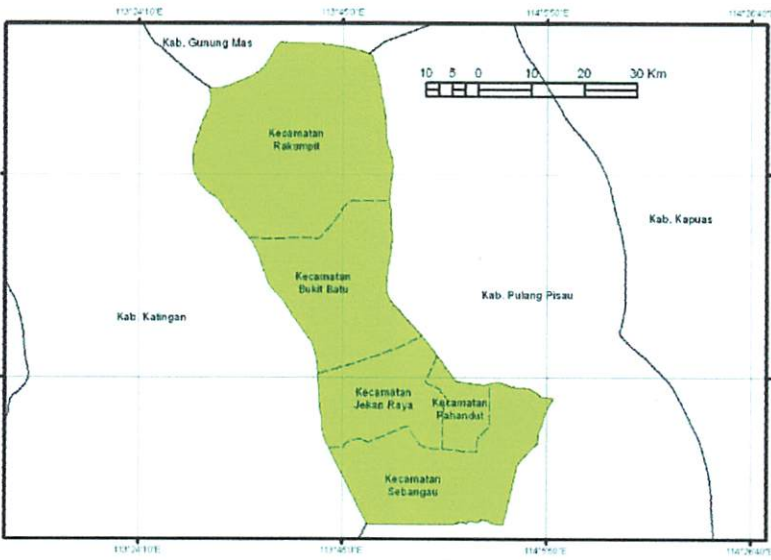
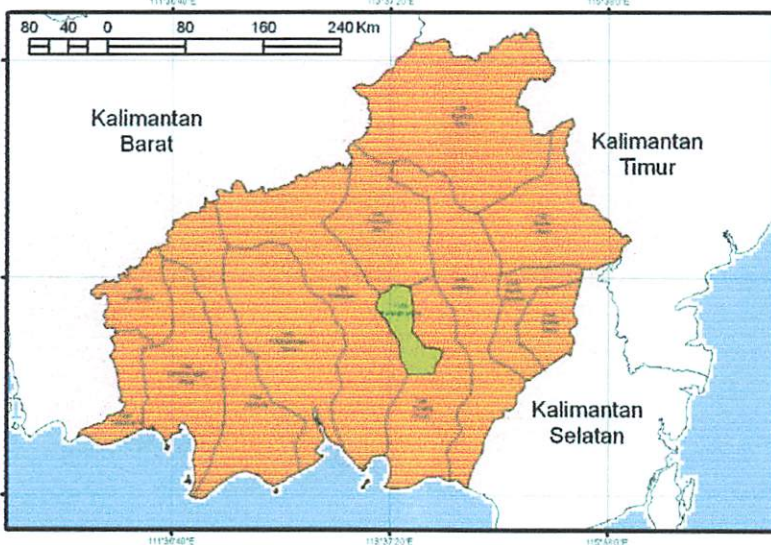
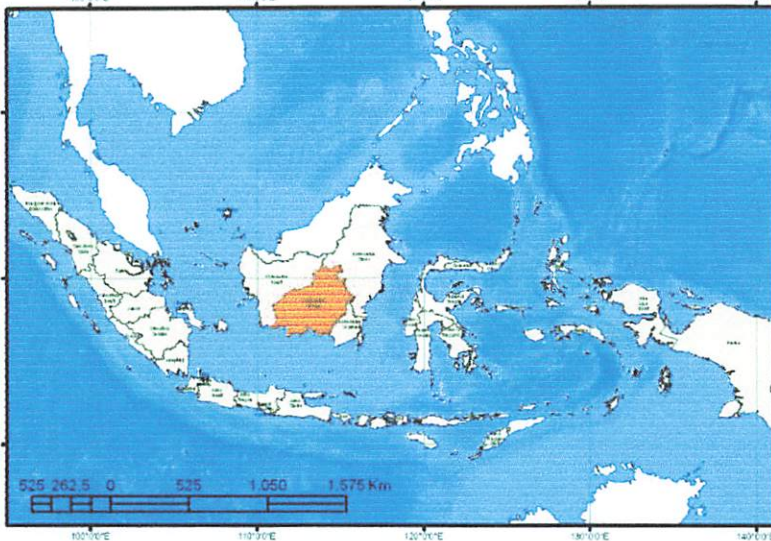
Sumber : RPIJM Kota Palangkaraya Tahun 2008

Tabel 4.4

Data Curah Hujan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 1997 - 2006

Tahun	Bulan												Jumlah
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1997	133	138	289	130	189	0	88	0	0	13	219	305	1.504
1998	258	163	88	193	31	283	240	158	244	347	169	309	2.482
1999	157	225	213	241	221	99	67	171	172	294	370	107	2.337
2000	214	182	116	364	82	254	83	53	58	356	301	154	2.219
2001	300	297	242	290	150	274	62,1	35	160	230	344	204	2.525
2002	344	134	309	247	64	197	11	10	3	94	360	322	2.095
2003	266	172	538	407	229	113	9	90	65	265	333	176	2.663
2004	365	266	283	351	317	72	228	8	69	26	581	522	3.088
2005	362	245	278	358	345	85	212	60	56	39	458	487	2.985
2006	177	253	312	337	132	189	91	6	27	13	94	417	2.048
Jumlah	2.575,9	2.074,2	2.668,2	2.918,7	1.769,3	1.666,0	1.029,1	591,0	863,5	1.677,4	3.229,1	3.002,6	23.945

Sumber : RPIJM Kota Palangka Raya 2009-2013



JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG



TUGAS AKHIR

KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI
PUSAT PEMERINTAHAN NKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Peta 4.1

ORIENTASI WILAYAH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : WGS 84

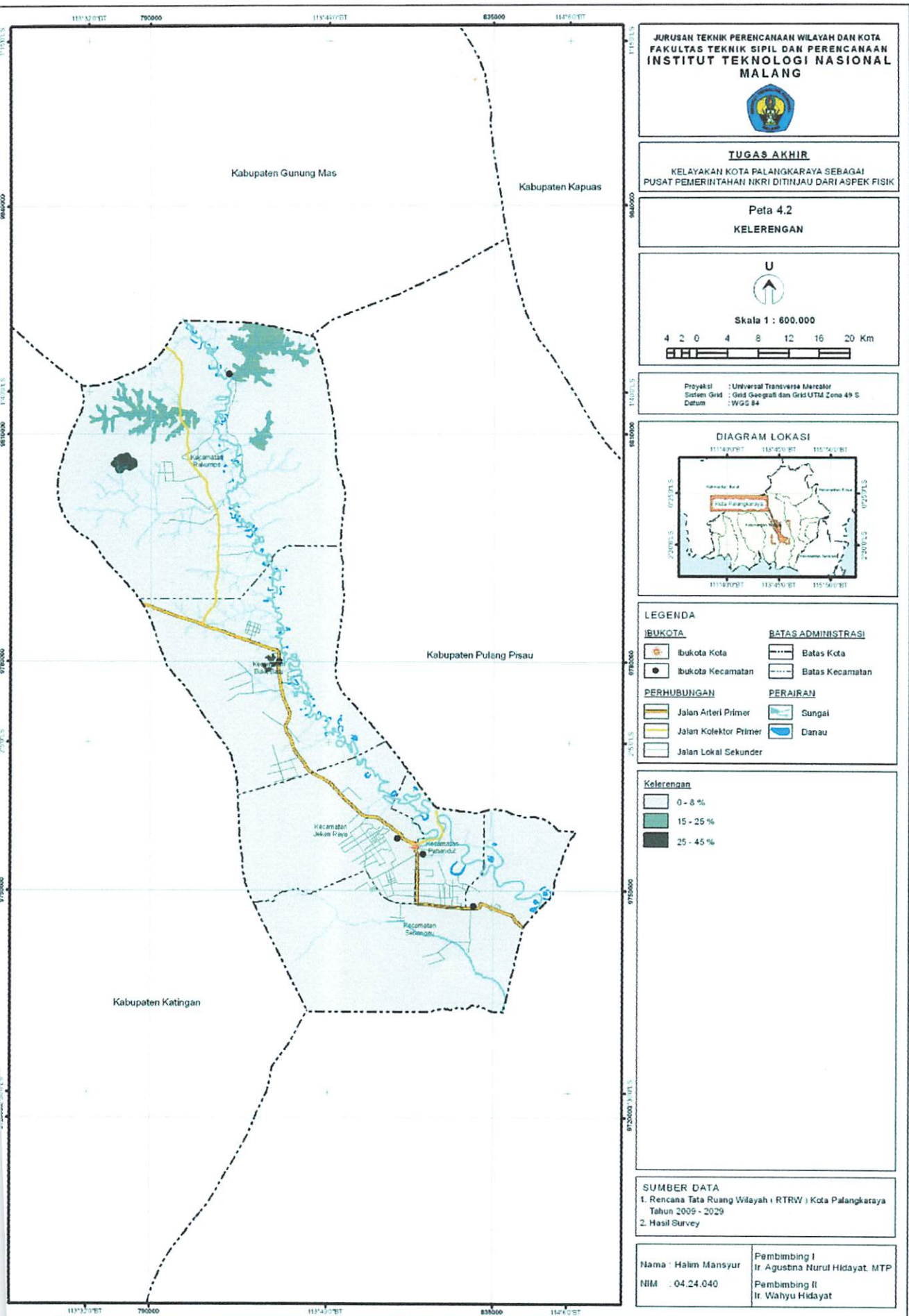
LEGENDA

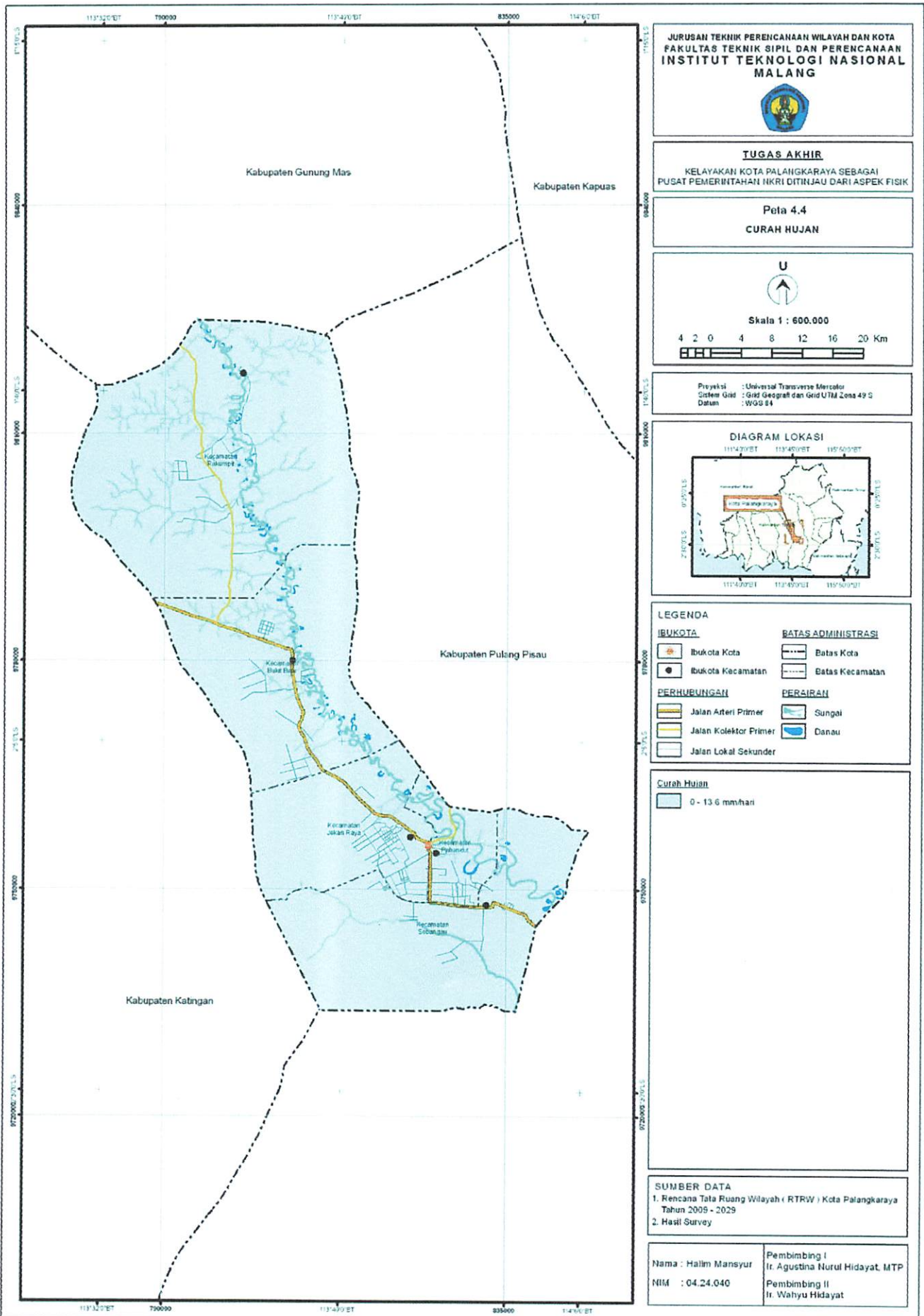
- Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
- Wilayah Kota Palangkaraya
- Laut

SUMBER DATA

1. Peta Dasar Indonesia Skala 1 : 20 000 000
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangkaraya Tahun 2009 - 2029

Nama : Halm Mansyur	Pembimbing I Ir. Agustina Nurul Hidayat, MTP
NIM : 04.24.040	Pembimbing II Ir. Wahyu Hidayat





JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG



TUGAS AKHIR

KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI
PUSAT PEMERINTAHAN NKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Peta 4.4

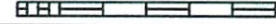
CURAH HUJAN

U



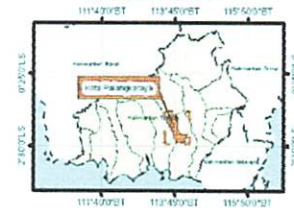
Skala 1 : 600.000

4 2 0 4 8 12 16 20 Km



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografik dan Grid UTM Zona 49 S
Datum : WGS 84

DIAGRAM LOKASI



LEGENDA

IBUKOTA

Ibukota Kota

Ibukota Kecamatan

Jalan Arteri Primer

Jalan Kolektor Primer

Jalan Lokal Sekunder

BATAS ADMINISTRASI

Batas Kota

Batas Kecamatan

Sungai

Danau

Curah Hujan

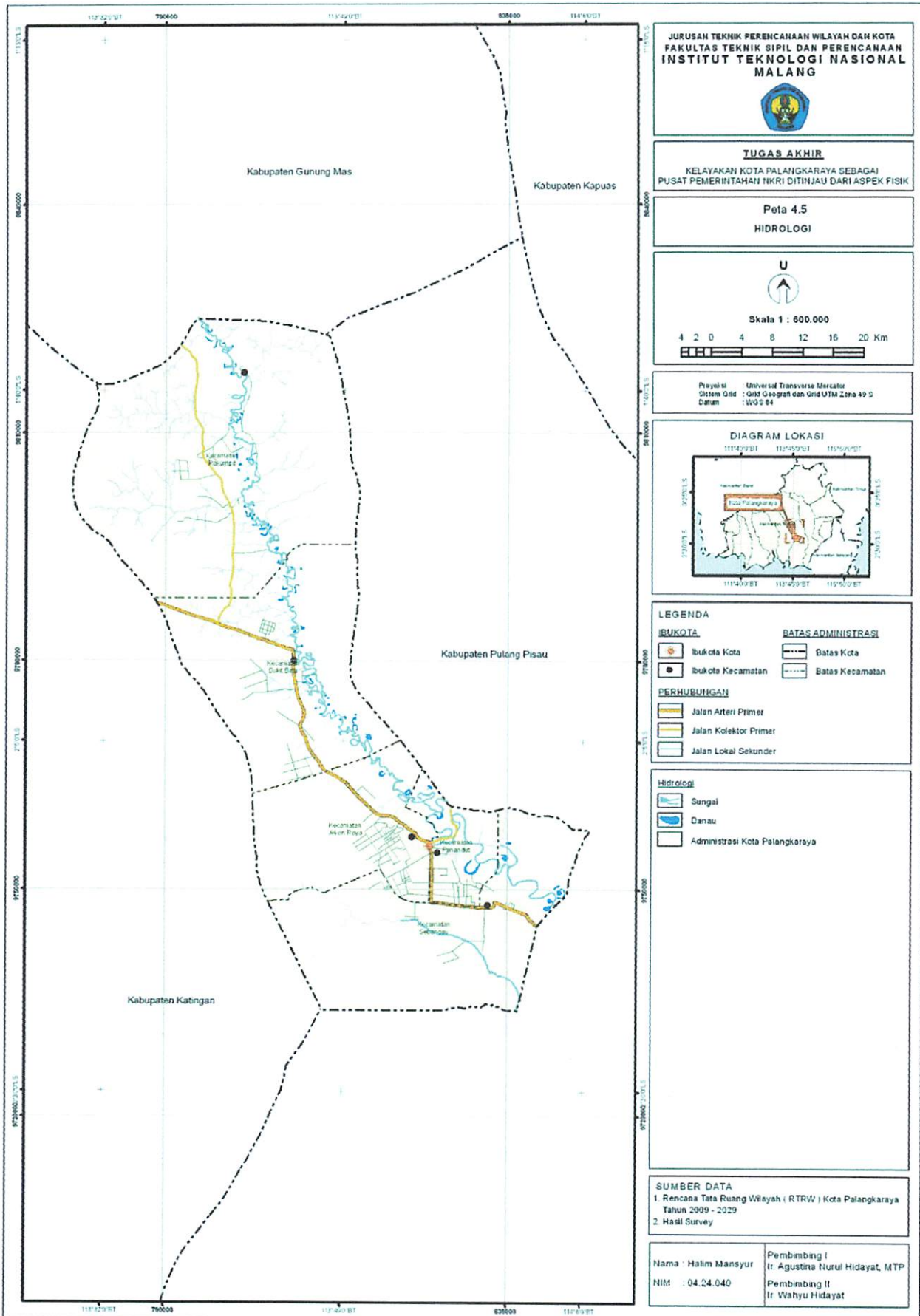
0 - 13.6 mm/hari

SUMBER DATA

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangkaraya Tahun 2009 - 2029
- Hasil Survey

Nama : Halim Mansyur
NIM : 04.24.040

Pembimbing I
Ir. Agustina Nurul Hidayat, MTP
Pembimbing II
Ir. Wahyu Hidayat



4.3 Kependudukan

Pembahasan tentang kependudukan sangat penting dalam sebuah perencanaan kota. Beberapa hal yang akan di bahas antaralain, jumlah dan kepadatan penduduk. Untuk lebih jelas mengetahui tentang kependudukan di Kota Palangkaraya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.

4.3.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data tahun 2008 penduduk Kota Palangkaraya berjumlah 191.014 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya dengan jumlah penduduk 97.411 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah terletak diwilayah Kecamatan Rakumpit dengan jumlah penduduk 2.900 jiwa.

4.3.2 Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data tahun 2008 penduduk Kota Palangkaraya berjumlah 191.014 jiwa dengan tingkat kepadatan 71,31/Km². Kepadatan tertinggi terletak wilayah kecamatan Pahandut yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk 565,59/Km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terendah terletak diwilayah Kecamatan Rakumpit dengan tingkat kepadatan penduduk 2,75/Km². Untuk lebih jelas melihat jumlah dan kepadatan penduduk di Kota Palangkaraya dapat dilihat pada Tabel 4.5, 4.6 dan peta 4.6.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk
Kota Palangkaraya Tahun 2004 - 2008

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Pahandut	63530	66748	63717	65572	66316
2	Sebangau	10761	11477	10793	11107	12709
3	Jekan Raya	93324	91139	93600	96324	97411
4	Bukit Batu	11793	11306	11828	12172	11678
5	Rakumpit	2856	2581	2865	2948	2900
Total		182264	183251	182803	188123	191014

Sumber : Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2008

Tabel 4.6
Kepadatan Penduduk
Kota Palangkaraya Tahun 2004 - 2008

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk Km ²				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Pahandut	542	569	543	559	566
2	Sebangau	18	20	19	19	22
3	Jekan Raya	265	258	265	273	276
4	Bukit Batu	21	20	21	21	20
5	Rakumpit	3	2	3	3	3
Total		68	68	68	70	71

Sumber : Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2008

4.4 Fisik Binaan

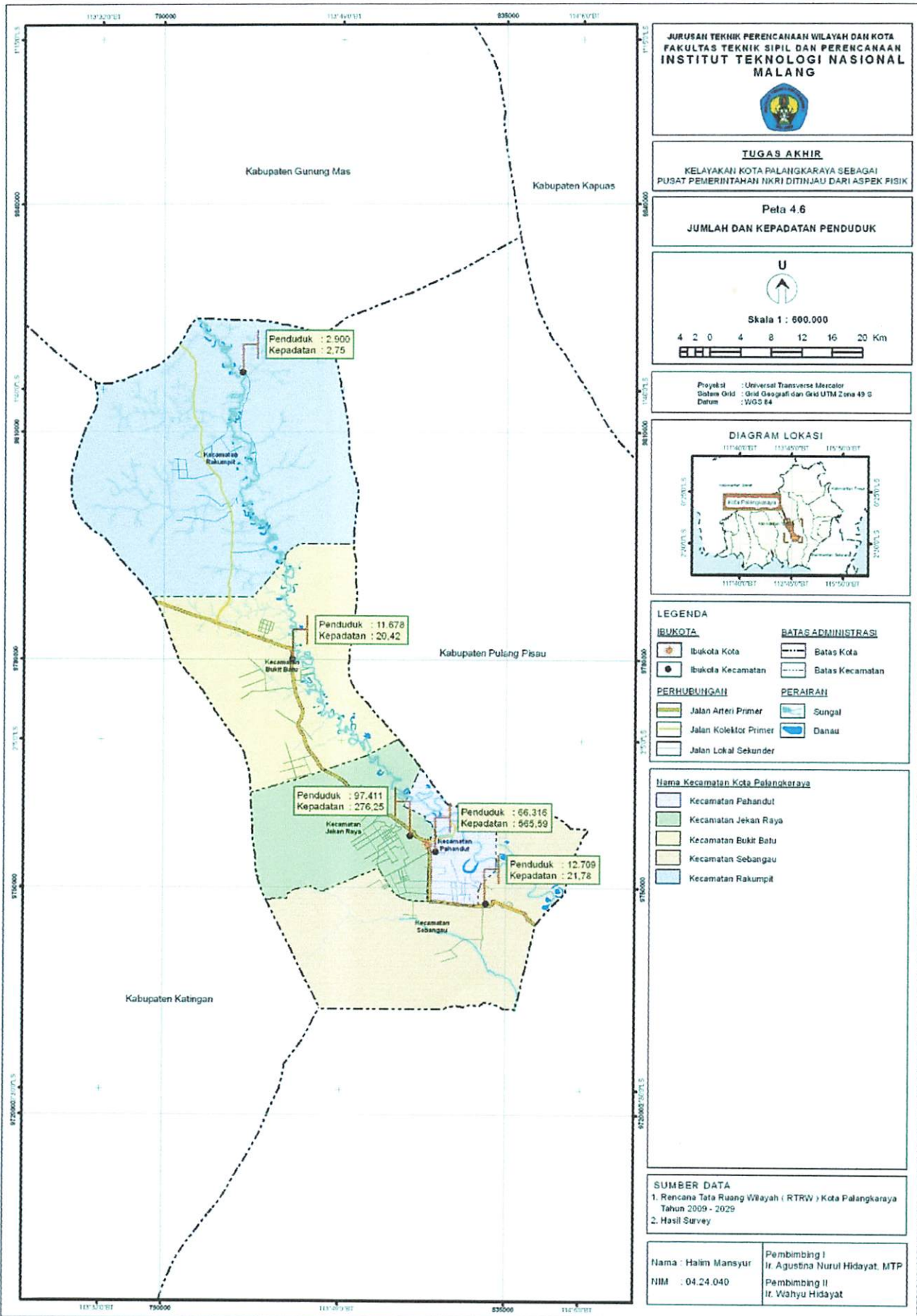
Dalam pembahasan tentang fisik binaan materi yang akan dibahas antaralain pola penggunaan lahan, fasilitas dan utilitas serta transportasi.

4.4.1 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Palangkaraya didominasi oleh hutan basah sekunder dengan luas lahan 1100,72 Km², hutan lahan basah primer 286,72 Km², sedangkan permukiman hanya menempati luas lahan 136,33 Km², perkebunan 6,92 Km², tanah terbuka 178,26 Km², pertanian lahan kering 353,25 Km², rawa 149, 44 Km², belukar rawa 421,41 Km², semak belukar 43,19 Km², dan batu gunung 2,26 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan peta 4.7.

4.4.3 Fasilitas

Fasilitas merupakan hal penting yang menunjang berbagai kegiatan pembangunan Kota Palangkaraya. Dalam hal ini fasilitas yang akan dibahas adalah fasilitas permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan.



Tabel 4.7
Luas Wilayah Menurut Penggunaanya Kota Palangkaraya Tahun 2008

No.	Penggunaan Lahan	Kecamatan (Km ²)					Jumlah
		Pahandut	Jekan Raya	Bukit Batu	Sebangau	Rakukmpit	
1	Permukiman	29,01	72,01	12,43	1,32	21,56	136,33
2	Tanah Terbuka	0,00	43,21	22,87	22,66	89,51	178,26
3	Perkebunan	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	6,92
4	Pertanian Lahan Kering	14,32	65,66	148,49	32,34	92,44	353,25
5	Rawa	0,00	7,67	3,12	0,00	138,66	149,44
6	Belukar Rawa	54,37	17,90	118,84	67,22	163,08	421,41
7	Semak Belukar	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00	43,19
8	Batu Gunung	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	2,26
9	Hutan Lahan Basah Primer	0,00	0,00	14,48	0,00	272,24	286,72
10	Hutan Lahan Basah Sekunder	19,55	146,17	242,59	416,77	275,64	1100,72
Jumlah		117,25	352,62	572,00	583,50	1053,14	2678,51

Sumber : RTRW Kota Palangkaraya 2009-2029

A. Fasilitas Permukiman

Fasilitas perumahan yang ada di Kota Palangkaraya terbagi beberapa tipe perumahan antaralain perumahan tipe temporer berada di wilayah luar pusat kota seperti Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu dan Sebangau yang konstruksi rumahnya terbuat dari kayu sedangkan tipe perumahan permanen terletak di pusat kota seperti di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya yang konstruksinya rata-rata terbuat dari bahan beton dengan luas kapling rata-rata, besar 200 m², sedang 100 m² dan kecil 70 m². Pola permukiman yang ada di Kota Palangkaraya cenderung menyebar dan rata-rata mengikuti pola jalan.



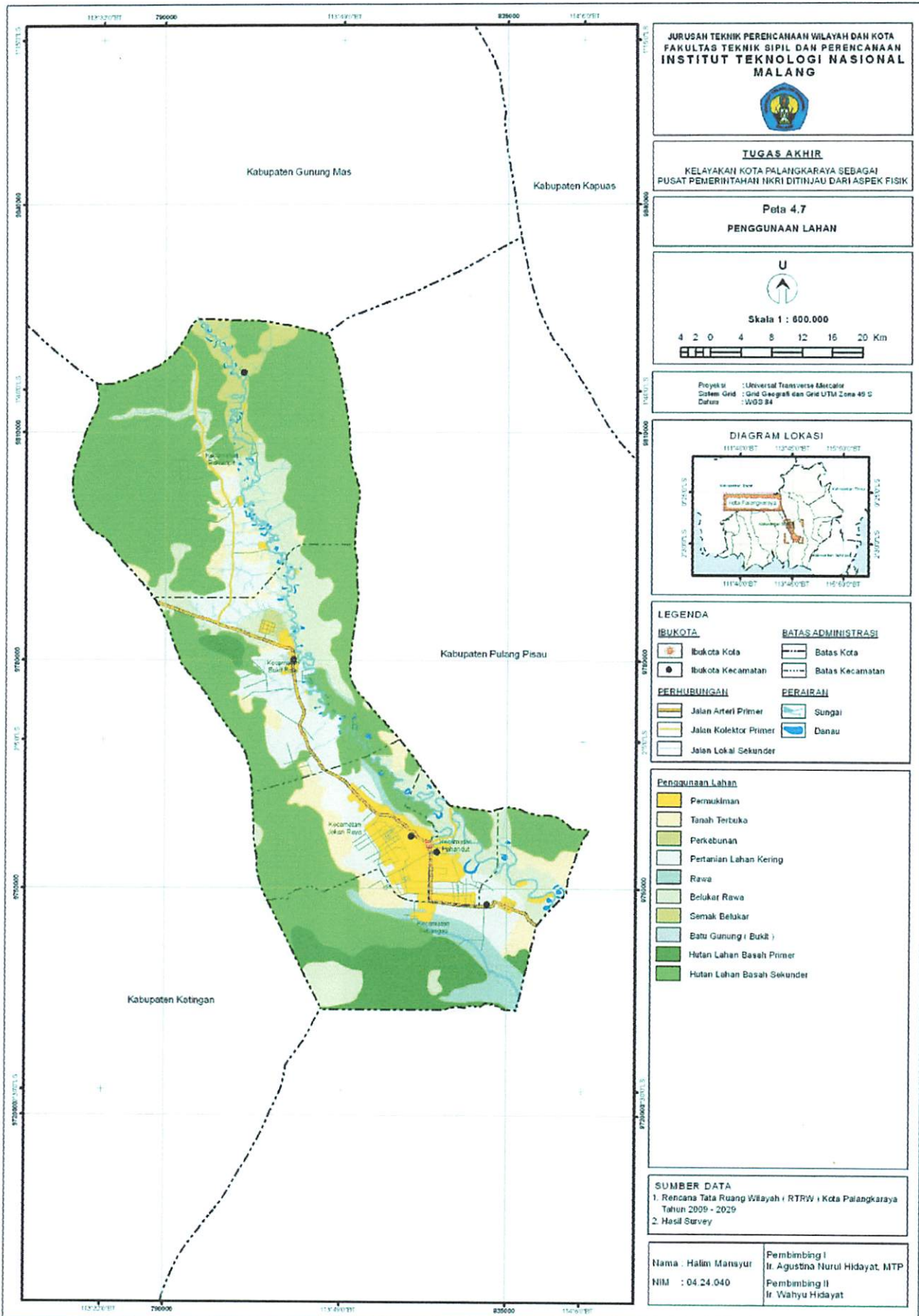
Jenis Perumahan Permanen



Jenis Perumahan Temporer

Gambar 4.1 Kondisi Fasilitas Permukiman

Sumber : Hasil Survey



B. Fasilitas Perkantoran

Fasilitas perkantoran terbagi dalam dua tipe, yaitu perkantoran milik pemerintah yaitu gedung pemerintah dan kantor-kantor swasta yang ada di Kota Palangkaraya. Kondisi rata-rata gedung perkantoran bersifat permanen dengan konstruksi beton, pola pembangunan kantor terletak pada jalan-jalan poros dan jalan protokol di Kota Palangkaraya. Untuk melihat jumlah fasilitas perkantoran Kelurahan setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.8.

C. Fasilitas Perdagangan Dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa yang ada di Kota Palangkaraya terdiri dari perdagangan bentuk modern seperti Mall Palangka Raya, Barata dan rumah toko yang terletak di jalan poros kota, juga ada beberapa jenis pasar antara lain : pasar tradisional dan pasar malam yang berada di di luar pusat kota seperti di Kecamatan Sebangau Desa Kereng Bengkirai. Untuk jasa sendiri Kota Palangkaraya memiliki hotel yang berjumlah 38 unit, serta 1 hotel berbintang 5 yaitu Hotel Aquarius.

Seiring perkembangan pembangunan ekonomi di Kota Palangkaraya fasilitas-fasilitas perjas modern semakin bertumbuh dan secara umum masih mengelompok wilayah pusat kota seperti di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9.



Jasa Hotel



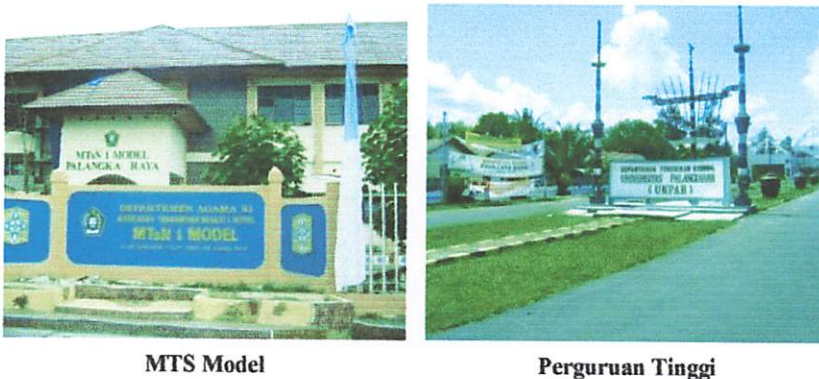
Pedagang Tradisional

Gambar 4.2 Kondisi Fasilitas Perjas

Sumber : Hasil Survey

D. Fasilitas Pendidikan

kondisi perkembangan dunia pendidikan di Kota Palangkaraya cukup meningkat. Untuk melihat perkembangan dunia pendidikan dapat dipergunakan beberapa indikator diantaranya jumlah peningkatan dan penambahan sarana fisik sekolah, jumlah murid mulai, SD, SLTP, SMU/SMK serta berbagai perguruan tinggi dan kampus - kampus yang menunjang kegiatan pendidikan di Kota Palangkaraya. Jumlah keseluruhan fasilitas pendidikan perguruan tinggi berjumlah 21 Kampus, SD berjumlah 103 unit, SMP berjumlah 39 unit, SMU/SMK berjumlah 32 unit. Untuk lebih lengkapnya dapat disimak pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11.



MTsN Model

Perguruan Tinggi

Gambar 4.3 Kondisi Fasilitas Pendidikan

Sumber : Hasil Survey

Tabel 4.8
Fasilitas Pemerintahan Kelurahan
Kota Palangkaraya Tahun 2008

Fasilitas Pemerintahan Kelurahan	Kecamatan					Jumlah
	Pahandut	Sebangau	Jekan Raya	Bukit Batu	Rakumpit	
Kantor Kelurahan	6	6	4	7	7	30
Balai Desa	6	6	4	7	7	30
Sekretaris	7	7	5	8	8	35
Kasi Pemerintah	7	7	5	8	8	35
Kasi Kesra	7	7	5	8	8	35
Kasi Ketertiban Umum	7	7	5	8	8	35
LKK	7	7	5	8	8	35

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008



Tabel 4.9
Jenis dan Jumlah Fasilitas Perjas
Kota Palangkaraya Tahun 2008

No	Jenis Fasilitas	Tahun
		2008
I	Kec. Pahandut	
1	Pasar Kecamatan	2
2	Toko/Swalayan	2
3	Kios/Warung	11
II	Kec. Sebangau	
1	Pasar Kecamatan	1
2	Toko/Swalayan	0
3	Kios/Warung	9
III	Kecamatan Jekan Raya	
	Pasar Kecamatan	3
2	Toko/Swalayan	9
3	Kios/Warung	33
IV	Kec. Bukit Batu	
1	Pasar Kecamatan	2
2	Toko/Swalayan	0
3	Kios/Warung	13
V	Kec. Rakumpit	
1	Pasar Kecamatan	0
2	Toko/Swalayan	3
3	Kios/Warung	11

Sumber : RTRW Kota Palangkaraya Tahun 2009

Tabel 4.10
Jumlah Fasilitas Sekolah
Kota Palangkaraya Tahun 2008

Kecamatan	SD		SMP		SMU		SMK	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Pahandut	32	3	5	8	2	7	4	2
Sebangau	8	0	4	0	0	1	1	0
Jekan Raya	34	2	5	7	3	4	0	5
Bukit Batu	14	1	5	0	1	1	1	0
Rakumpit	9	0	5	0	0	0	0	0
Jumlah	97	6	24	15	6	13	6	7

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008

Tabel 4.11
Jumlah Perguruan Tinggi
Kota Palangkaraya Tahun 2008

No	Nama Perguruan Tinggi	Status
1	Universitas Palangka Raya (UNPAR)	Negri
2	STAIN Palangka Raya	Negri
3	STHN Palangka Raya	Negri
4	STAKN Palangka Raya	Negri
5	Universitas Muhamadya	Disamakan
6	UNKRIP Palangka Raya	Terdaftar
7	Universitas PGRI Palangka Raya	Terdaftar
8	AAP Palangka Raya	Terdaftar
9	STMIK Palangka Raya	Terdaftar
10	STIH Tambun Bunga Palangka Raya	Terdaftar
11	STIBA Palangka Raya	Terdaftar
12	STIP Palangka Raya	Terdaftar
13	ASMI Palangka Raya	Terdaftar
14	STAHK -PH Palangka Raya	Ijin penyelenggaraan
15	AMIK PPKIA	Ijin penyelenggaraan
16	AKOM Palangka Raya	Ijin penyelenggaraan
17	Akademis Gizi Depkes Palangka Raya	-
18	Politeknik Batang Garing Palangka Raya	Ijin penyelenggaraan
19	Politeknik Kesehatan	-
20	Sekolah Tinggi Pastoral Palangka Raya	Terdaftar
21	STIE Palangka Raya	Terdaftar

Sumber : RPJIM Kota Palangkaraya Tahun 2008

E. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya bervariasi antaralain Rumah sakit berjumlah 3 unit, Puskesmas berjumlah 9 unit dan Puskesmas pembantu berjumlah 46 unit yang menyebar di seluruh Kota Palangkaraya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Secara keseluruhan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya masih berpusat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya.

F. Fasilitas Peribadatan

Untuk fasilitas peribadatan yang ada di Kota Palangkaraya bervariasi sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat pada umumnya antara lain, Islam,

Kristen, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan gambar 4.4.

Tabel 4.12
Jumlah Fasilitas Kesehatan
Kota Palangkaraya Tahun 2008

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Pahandut	3	2	12
Sebangau	0	1	3
Jekan Raya	0	4	17
Bukit Batu	0	1	9
Rakumpit	0	1	5
Total	3	9	46

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008

Tabel 4.13
Jumlah fasilitas Peribadatan
Kota Palangkaraya Tahun 2008

Kecamatan	Islam		Katolik	Protestan	kuil/ Pura	Vihara/ Cetia
	Masjid	Langgar	Gereja			
Pahandut	47	127	4	33	0	0
Sebangau	10	20	1	8	1	1
Jekan Raya	60	102	4	61	2	2
Bukit Batu	16	23	1	8	1	1
Rakumpit	4	5	1	4	0	0
Total	137	277	11	114	4	4

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008



Fasilitas Peribadatan Umat Islam



Fasilitas Peribadatan Umat Kristiani

Gambar 4.4 Kondisi Fasilitas Peribadatan

Sumber : Hasil Survey

G. Fasilitas Rekreasi dan Olahraga

Sarana rekreasi dan olahraga merupakan faktor yang penting untuk sebuah kota terutama bila dihubungkan dengan masalah kesehatan fisik dan jiwa penduduk. Kota Palangkaraya memiliki Sarana rekreasi yaitu bioskop berjumlah 4 unit dengan kapasitas 600 orang, taman kota yang sering dipergunakan masyarakat untuk bersantai, sedangkan untuk fasilitas olahraga di Kota Palangkaraya antarlain lapangan bola, voli, basket dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.14. Secara umum fasilitas rekreasi dan olahraga di Kota Palangkaraya masih berpusat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya.

Tabel 4.14
Jumlah Fasilitas Rekreasi dan Olahraga
Kota Palangkaraya Tahun 2008

Kecamatan	GOR	L. Sepak Bola	L. Basket	L. Tennis	L. Bulu Tangkis	L. Bola Voli	Kolam Renang	Gedung Tinju	L. Base Ball	L. Takraw
Pahandut	3	13	10	13	4	4	0	0	0	0
Sebangau	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Jekan Raya	1	2	5	13	1	6	1	1	1	5
Bukit Batu	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Rakumpit	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Total	7	17	16	26	6	13	1	1	1	8

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008

4.4.3 Utilitas

Utilitas merupakan faktor penunjang yang sangat dibutuhkan bagi kegiatan masyarakat. Utilitas yang akan dibahas dalam hal ini antarlain, air bersih, listrik, telepon, sampah dan drainase.

A. Air Bersih

Air bersih merupakan komponen penting dalam kehidupan, untuk Kota Palangkaraya permintaan kebutuhan air bersih terus meningkat seiring perkembangan kota yang terus maju. Selain air dari PDAM masyarakat juga mengkonsumsi air sungai dan air sumur.

Untuk air permukaan, saat ini sumber baku air bersih Kota Palangkaraya diolah dari aliran Sungai Kahayan, debit andalan dengan periode 1 dalam 20 tahun (durasi 7 hari) Sungai Kahayan mencapai sekitar dalam 20 tahun (durasi 7 hari) Sungai Kahayan mencapai sekitar 68 m³/detik (1 hari), 100 m³/detik (7 hari) dan 117 m³/detik (30 hari), dengan kondisi tersebut maka kebutuhan bahan baku air dari Sungai Kahayan masih belum menjadi kendala secara fisik, namun yang perlu mendapatkan perhatian menyangkut tingkat kualitas akibat munculnya pencemaran yang terjadi di wilayah hulu. Sedangkan kondisi air tanah dalam memiliki potensi sebesar 60 liter/detik–125 liter/detik, dan memperlihatkan kondisi kualitas sebagai berikut :

1. Nilai pH umumnya rendah berkisar antara 5,4 hingga 6,5.
2. Kandungan khlor berkisar antara 8,9 hingga 102 mg/liter.
3. Kandungan besi relatif rendah hingga baik sekitar 0,05 hingga 1,0 mg/liter.
4. Kandungan mineral cukup rendah.

Kemudian untuk kondisi air tanah dangkal saat ini telah banyak digunakan oleh penduduk Kota Palangkaraya, berdasarkan data maka potensinya berkisar antara 50 liter/detik – 75 liter/detik, kondisi kualitasnya adalah sebagai berikut :

1. Nilai pH umumnya rendah berkisar antara 4,1 hingga 5,7
2. Kandungan khlor berkisar antara 2,3 hingga 23,6 mg/liter.
3. Kandungan besi relatif rendah hingga baik sekitar 0,03 hingga 0,34 mg/liter.

Dengan kondisi kandungan diatas, maka untuk air tanah dangkal secara fisik tidak cocok untuk penyediaan air minum oleh karena nilai pH yang sangat rendah. Hal itu terjadi karena tingginya kandungan humus tanah dalam alluvium.

Untuk masa mendatang diharapkan adanya peningkatan pelayanan khususnya cakupan wilayah pelayanan sehingga pada akhirnya semua penduduk atau rumah tangga di Kota Palangkaraya akan dapat terlayani. Untuk melihat peningkatan kebutuhan air bersih di Kota Palangkaraya dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan 4.16 serta Peta 4.8.

Tabel 4.15
Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Air Bersih
Kota Palangkaraya Tahun 2008

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Disalurkan (M ³)
Perumahan	14.044	2850633
Ekonomi	945	193554
Sosial	280	248357
Kantor Pemerintahan	169	310431
Kebocoran	0	0
Total	15.438	3.602.975

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008

Tabel 4.16
Perkembangan Penggunaan air Bersih
Tahun 2005-2008

No	Tahun	Jumlah Pelanggan	Disalurkan (m ³)
1	2005	11.927	6.397.228.230
2	2006	13.385	7.889.552.080
3	2007	14.375	8.383.431.425
4	2008	15.437	9.593.772.670

Sumber : Kota Palangkaraya Dalam Angka Tahun 2008

B. Listrik

Kota Palangkaraya yang terus berkembang membutuhkan energi listrik yang sesuai dengan kebutuhannya, di Kota Palangkaraya sering terjadi pemadaman listrik bergilir, karena belum memiliki pembangkit listrik skala besar dan masih bergantung pada jaringan listrik jaringan Kota Banjarmasin. Khususnya di daerah kecamatan Rakumpit dan Sebangau jaringan listrik belum menyeluruh masuk ke daerah tersebut, masih ada masyarakat yang memakai penerangan tradisional (lampu pelita) pada malam hari. Untuk melihat produksi dan distribusi listrik di Kota Palangkaraya dapat dilihat pada Tabel 4.17 dan Peta 4.9.

C. Telepon

Untuk jaringan telepon masih berada di daerah pusat kota seperti di kecamatan Pahandut dan Jekan Raya. Sedangkan Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu dan Sebangau masih berada di daerah jalan utama.

Saat ini pengembangan jaringan telekomunikasi telepon, sudah memasuki sistem jaringan nir kabel atau sistem telepon bergerak. Dimana hampir seluruh

wilayah Kecamatan di Kota Palangkaraya telah terjangkau dalam radius cakupan beberapa operator telepon selular.

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2007, di Kota Palangkaraya terdapat sebanyak 59 tower BTS yang dikelola oleh 4 operator, yaitu Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, dan Telkom Flexi. Kapasitas pelayanan setiap tower adalah sebanyak 2.000 pelanggan dengan grade of service 2 %. Dengan kondisi tersebut daya pelayanan telepon selular saat ini adalah sebanyak 118.000 pelanggan. Untuk melihat kapasitas dan jumlah sambungan telepon dapat dilihat pada Tabel 4.18 serta Peta 4.10.

D. Sampah

Masyarakat Kota Palangkaraya cenderung masih banyak menggunakan cara tradisional dalam pengolahan sampah, seperti dengan cara menimbun, membakar dan ada sebagian kecil yang membuang sampah di tempat sampah yang disediakan dilingkungan rumahnya. Untuk masyarakat didaerah pusat kota telah memiliki bak sampah disetiap lingkungan permukiman. Pemerintah telah menyediakan tempat sampah, antarlain tempat pembuangan sampah sementara, dan tempat pembuangan akhir serta sarana pengangkutan seperti gerobak sampah hingga mobil pengangkut sampah yang beroperasi hampir setiap harinya. Untuk melihat sarana persampahan dapat dilihat pada Tabel 4.19 dan Peta 4.10.

Tabel 4.17
Jumlah Pelanggan Listrik Perkecamatan Kota Palangkaraya Tahun 2004 - 2008

Tahun	Produksi	Dijual	Dipakai sendiri	Dikirim ke unit lain	Susut/Hilang
2004	91.387.918	229.628.215	5.906.330	0	24.965.468
2005	118.863.879	93.986.161	1.333.632	0	9.114.783
2006	126.568.713	113.708.461	927.054	0	11.933.198
2007	145.247.232	115.664.950	1.076.747	18.361.800	10.143.735
2008	161.270.909	125.459.155	1.061.244	23.485.578	11.264.933

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008

Tabel 4.18
Jumlah Sambungan Telepon Kota Palangkaraya Tahun 2004 - 2008

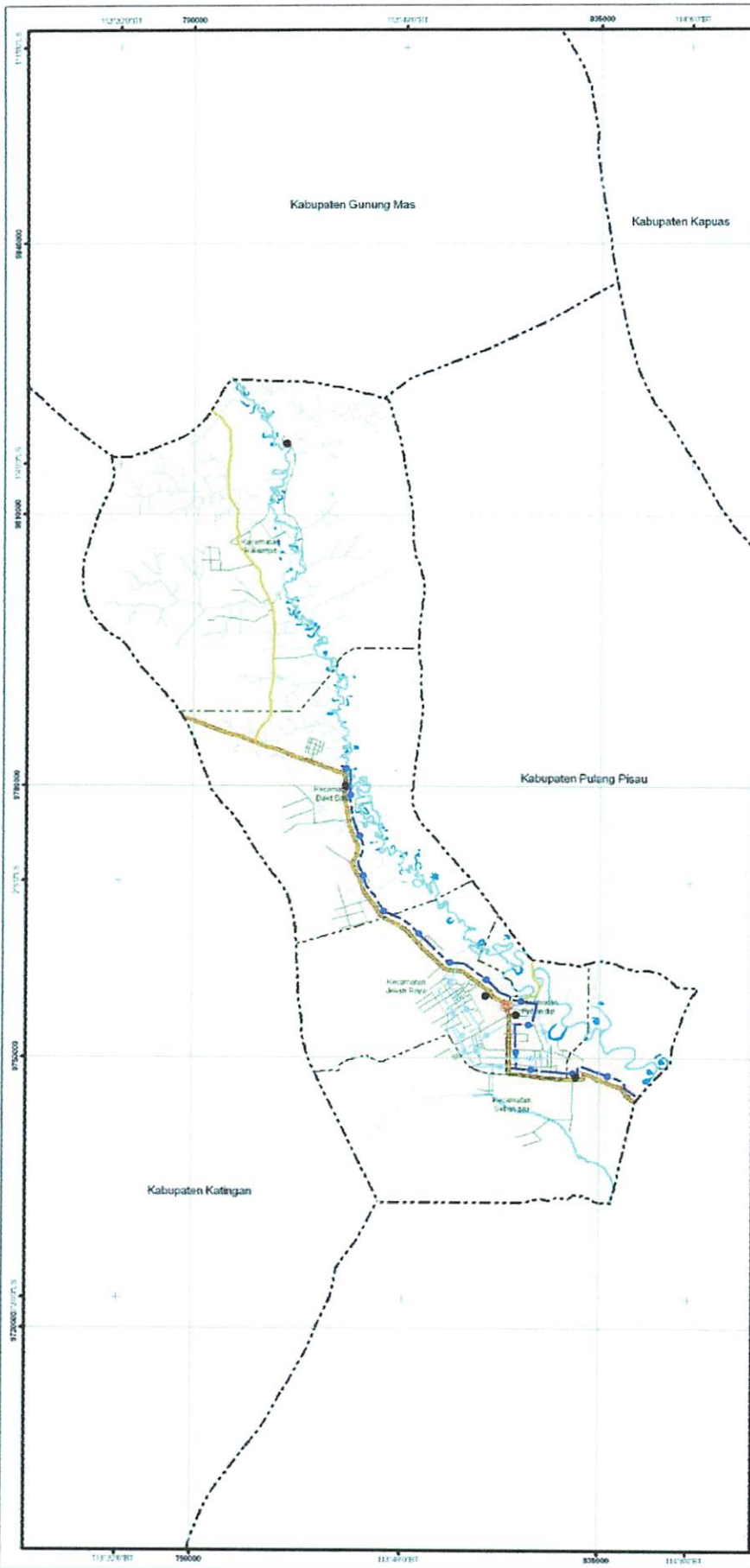
No	Tahun	Kapasitas Sentral	Sambungan		
			Induk	Cabang	Jumlah
1	2004	20.036	16.230	-	16.230
2	2005	17.005	16.299	-	16.299
3	2006	18.500	17.841	-	17.841
4	2007	22.970	16521	-	16.521
5	2008	22.250	16695	-	16.695

Sumber : KDA Kota Palangkaraya Tahun 2008

Tabel 4.19
Sarana Persampahan
Kota Palangkaraya Tahun 2008

No	Jenis	Jumlah (buah)	Kapasitas
1	Dump Truck Sampah	10	180m ³ /hari
	Arm roll truck	4	120m ³ /hari
2	Gerobak Sampah	20	25m ³ /hari
3	TPS	177	597m ³ /hari
4	TPA	1	10 Ha

Sumber : RTRW Kota Palangkaraya Tahun 2009

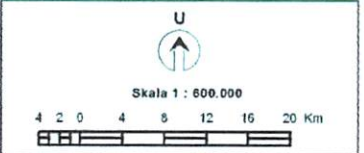


JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
 MALANG



TUGAS AKHIR
 KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI
 PUSAT PEMERINTAHAN NKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Peta 4.8
JARINGAN AIR BERSIH



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum : WGS 84



LEGENDA

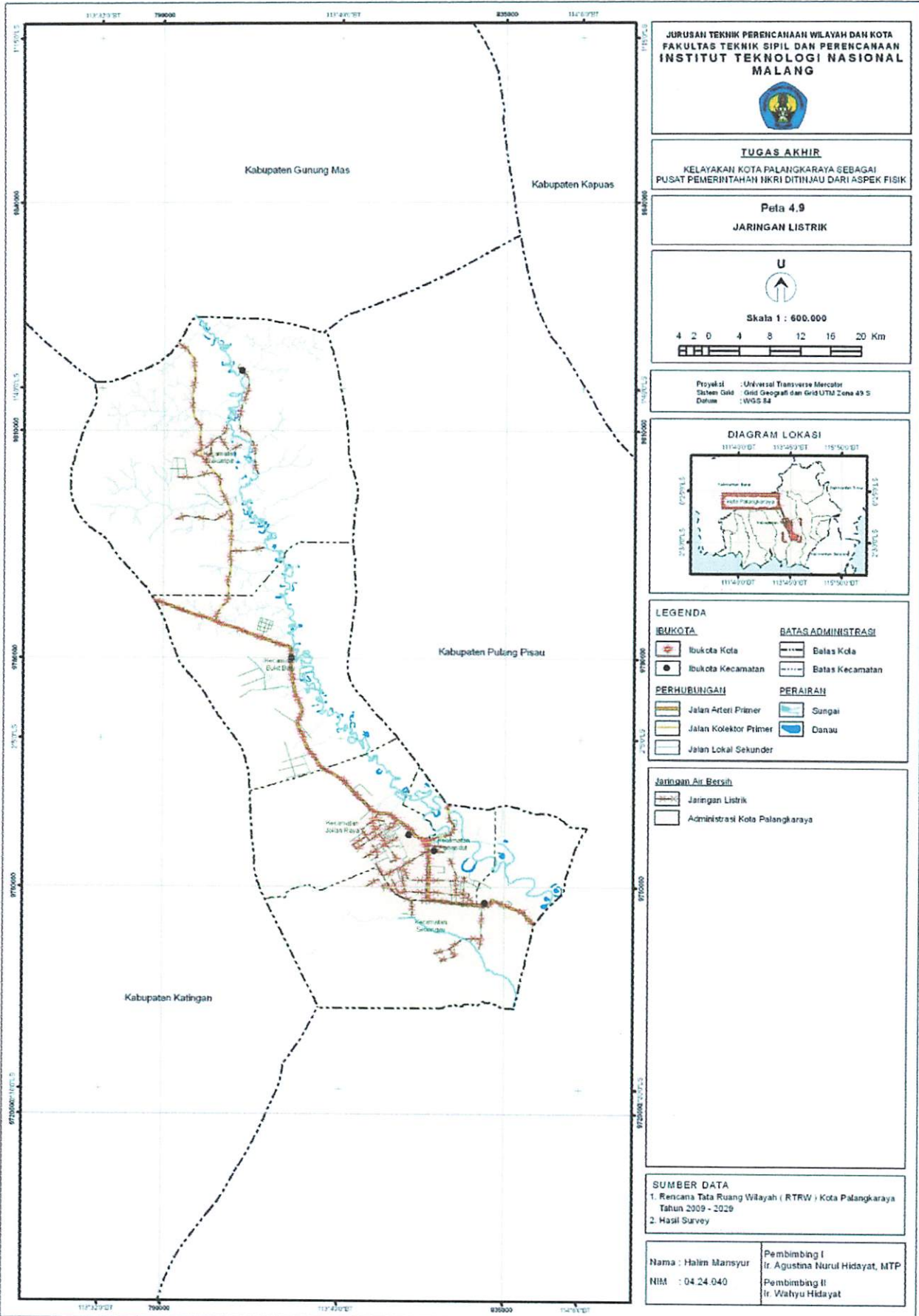
IBUKOTA	BATAS ADMINISTRASI
Ibukota Kota	Batas Kota
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan
PERHUBUNGAN	PERAIRAN
Jalan Arteri Primer	Sungai
Jalan Kolektor Primer	Danau
Jalan Lokal Sekunder	

Jaringan Air Bersih

Jaringan Pipa Primer
Jaringan Pipa Sekunder
Administrasi Kota Palangkaraya

SUMBER DATA
 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangkaraya Tahun 2009 - 2029
 2. Hasil Survey

Nama : Halim Mansyur	Pembimbing I Ir. Agustina Nurul Hidayat, MTP
NIM : 04.24.040	Pembimbing II Ir. Wahyu Hidayat

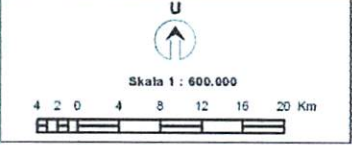


JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
 MALANG



TUGAS AKHIR
 KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI
 PUSAT PEMERINTAHAN HKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Peta 4.9
JARINGAN LISTRIK



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49 S
 Datum : WGS 84



LEGENDA

IBUKOTA	BATAS ADMINISTRASI
Ibukota Kota	Batas Kota
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan
PERHUBUNGAN	PERAIRAN
Jalan Arteri Primer	Sungai
Jalan Kolektor Primer	Danau
Jalan Lokal Sekunder	

Jaringan Air Bersih

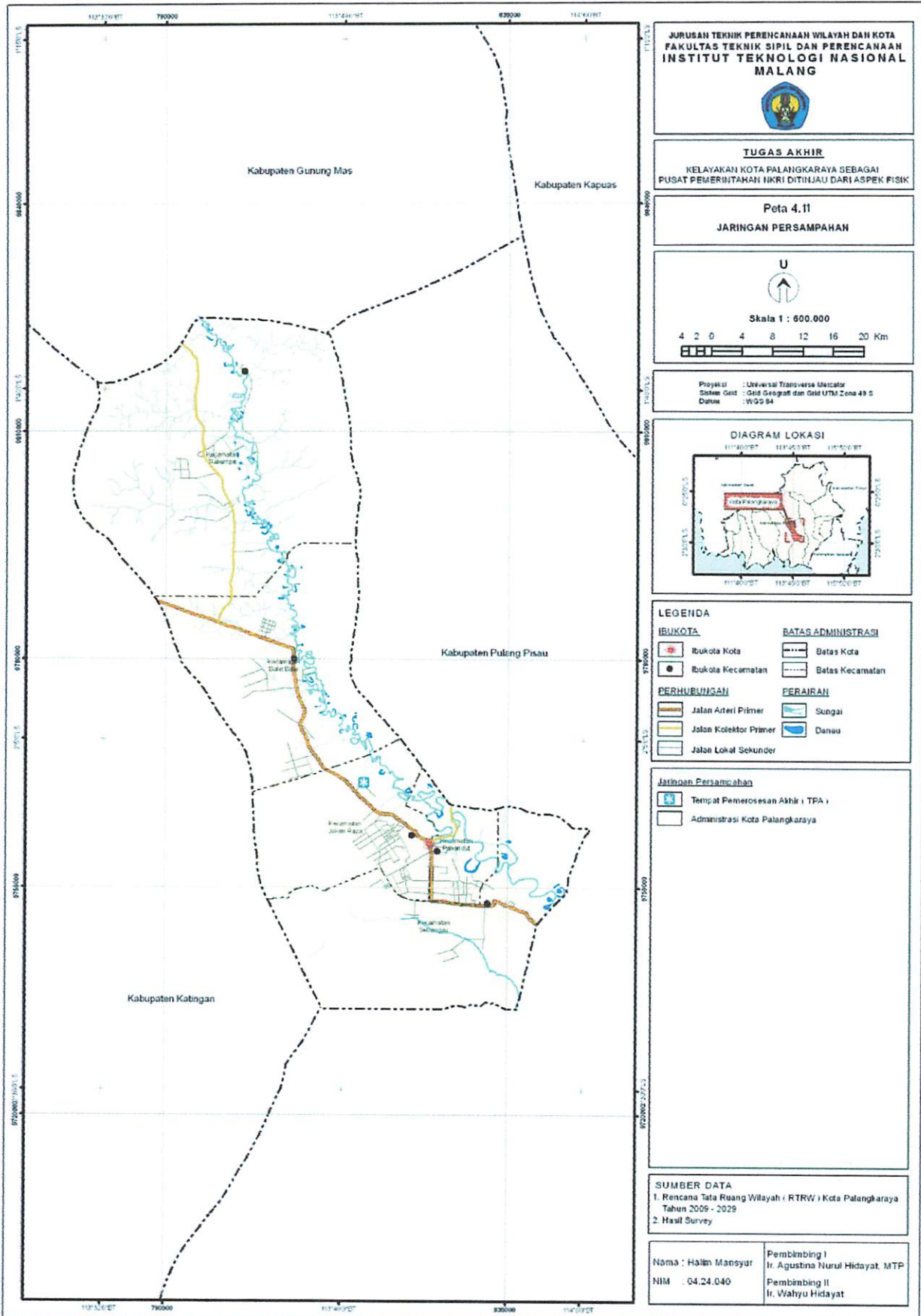
Jaringan Listrik

Administrasi Kota Palangkaraya

SUMBER DATA

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangkaraya Tahun 2009 - 2026
- Hasil Survey

Nama : Halim Mansyur	Pembimbing I Ir. Agustina Nurul Hidayat, MTP
NIM : 04.24.040	Pembimbing II Ir. Wahyu Hidayat

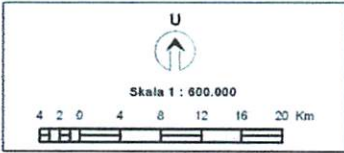


JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
 MALANG

TUGAS AKHIR

KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI
 PUSAT PEMERINTAHAN IKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Peta 4.11
JARINGAN PERSAMPAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Geod : Geod Geografis dan Geod UTM Zone 49 S
 Datum : WGS 84



LEGENDA

IBUKOTA	BATAS ADMINISTRASI
Ibukota Kota	Batas Kota
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan
PERHUBUNGAN	PERAIRAN
Jalan Arteri Primer	Sungai
Jalan Kolektor Primer	Danau
Jalan Lokal Sekunder	

Jaringan Persampahan

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Administrasi Kota Palangkaraya

SUMBER DATA

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangkaraya Tahun 2009 - 2029
- Hasil Survey

Nama : Halm Mansyur	Pembimbing I Ir. Agustina Nurul Hidayat, MTP
NIM : 04.24.040	Pembimbing II Ir. Wahyu Hidayat

4.4.4 Transportasi

Kota tidak akan berkembang lebih baik lagi bila tidak didukung oleh pengembangan sistem transportasi yang memadai, begitu juga dengan Kota Palangkaraya, agar terus berkembang maka perlu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Pembahasan transportasi di bagi dalam dua bagian yaitu transportasi darat dan udara.

A. Transportasi Darat

Transportasi darat yang dibahas dalam hal ini dibagi dua yaitu transportasi darat yang menggunakan jalan raya dan transportasi sungai.

1. Transportasi Darat Jalan Raya

Pengertian transportasi jalan darat dalam penelitian ini adalah transportasi yang meliputi sarana prasarana jalan raya, antarlain yang dibahas dalam hal ini jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, konstruksi dan kondisi jalan serta terminal angkutan.

a. Jaringan Jalan

Kondisi umum sistem transportasi jalan raya berdasarkan hasil survey pengamatan lapangan dan data-data mengenai sistem jaringan jalan di Kota Palangkaraya terdiri dari jaringan jalan regional di Kalimantan Tengah yang menunjukkan ruas-ruas utama yang menghubungkan Kota Palangkaraya dengan kota-kota regional ke barat dan selatan. Jalur utama dari pusat kota adalah:

- Barat : arah Sampit sampai ke Pangkalan Bun
- Selatan : arah Kuala Kapuas sampai ke Kalimantan Selatan

Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Kota Palangkaraya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal tetapi juga lintas eksternal. Lalu lintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk/keluar Kota Palangkaraya sedangkan lalu lintas internal adalah lalu lintas dalam Kota Palangkaraya.

b. Fungsi Jalan

Pengklasifikasian jalan pada dasarnya dilakukan dengan menentukan fungsi jalan apakah untuk mengakomodasi pergerakan ataukah untuk akses ke suatu kawasan. Semakin besar fungsi mobilitas jalan fungsi aksesnya akan semakin kecil. Fungsi ini akan menentukan apakah jalan dikategorikan sebagai jalan arteri, kolektor atau jalan lokal.

Menurut UU No. 13 tentang Jalan disebutkan pengklasifikasian jalan menurut fungsinya sebagai berikut :

- **Jalan Arteri** : Yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
- **Jalan Kolektor** : Yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul, dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- **Jalan Lokal** : Melayani angkutan setempat, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Selain itu pengklasifikasian ini selanjutnya dibedakan lagi kedalam sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

- Sistem jaringan jalan primer diturunkan dari keterkaitan antar kota dalam suatu wilayah tertentu, dalam hal ini perlu dilihat kedudukan kota terhadap wilayah yang lebih luas, dan sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kota ini.
- Sistem jaringan jalan sekunder dilihat dari kegiatan kota secara internal. Dalam hal ini perlu dilihat bagaimana sistem aktivitas kota, skala pelayanan-kegiatan, serta pusat-pusat kegiatan yang ada.

c. Status Jalan

Jaringan jalan Kota Palangkaraya yang terdiri dari 489 ruas dan terbagi pada 4 (empat) klasifikasi fungsi, secara status (kewenangan) ditangani oleh Pusat, Propinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Status (kewenangan) jalan Kota Palangkaraya dari data yang terkompilasi dapat dirinci sebagai berikut :

- Jalan arteri dan kolektor yang termasuk Jalan Nasional dan Jalan Propinsi kewenangan oleh Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- Jalan lokal dan lingkungan yang secara keseluruhan merupakan jalan kota kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya.

Dari hasil kompilasi data sekunder yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kota Palangkaraya, dapat diinventarisir jumlah jalan berdasarkan status jalan, sebagai berikut :

- Status Jalan Nasional : 103,650 km
- Status Jalan Propinsi : 57,000 km
- Status Jalan Kota : 362,575 km.

d. Konstruksi dan Kondisi Jalan

Secara umum konstruksi jaringan jalan di Kota Palangkaraya khususnya jalan arteri dan kolektor kondisinya cukup baik, demikian halnya kondisi bahu, trotoar dan drainasenya. Konstruksi jalan daerah pusat Kota rata - rata dalam kondisi baik, kondisi buruk hanya pada daerah pinggiran kota yang menggunakan tanah dan kerikil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.20 Tabel dan 4.21.

Kondisi jalan seperti di Kecamatan Sebangau ada yang memiliki beberapa kerusakan sedangkan didaerah pedalaman kondisi jalan masih berupa jalan tanah dan kerikil. Secara keseluruhan kondisi perkerasan jalan yang ada di Kota Palangkaraya dalam kondisi baik. Untuk melihat kondisi jalan dan tipe perkerasan jalan perkecamatan di Kota Palangkaraya dapat dilihat dalam Tabel 4.22 serta gambar 4.5.

Tabel 4.20
Panjang Jalan Menurut Kondisi (Km)
Kota Palangkaraya 2004 – 2008

Tahun	Kondisi Jalan (Km)				
	Baik	sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
2004	73.28	168.91	375.02	211.22	828.43
2005	83.87	178.971	299.154	266.434	744559
2006	105,67	188,24	289,89	244,63	828,43
2007	167,81	211,52	333,67	115,43	828,43
2008	224,74	1677,56	227,24	239,43	858,97

Sumber : RPJIM Kota Palangkaraya Tahun 2008

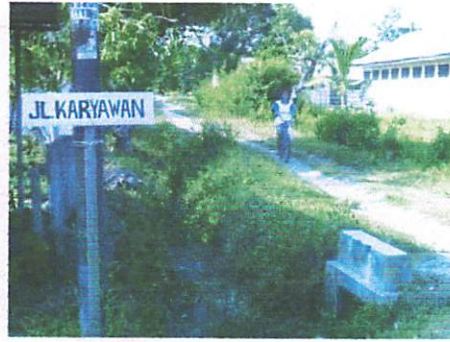
Tabel 4.21
Jenis Permukaan Jalan
Kota Palangkaraya Tahun 2004 – 2008

Tahun	Jenis Permukaan				Jumlah
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainya	
2004	296.83	6.06	525.54	0	828.43
2005	431.24	18.18	378.79	0	828.42
2006	45.324	27.46	347.73	0	828.43
2007	502,47	85,09	230,87	0	828,43
2008	444,96	7,24	406,77	0	858,97

Sumber : RPJM Kota Palangkaraya 2008



Kondisi Perkerasan Baik



Kondisi Jalan tanah

Gambar 4.5 Kondisi Permukaan Jalan

Sumber : Hasil Survey

Tabel 4.21
Kondisi Jalan Pada Setiap Kecamatan Kota Palangkaraya Tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Ruas	Panjang Ruas	Tipe Permukaan (Km)				Kondisi (Km)			
				Aspal atb/Hrs	Aspal Lapen	Kerikil	Tanah	Baik	sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Bukit Batu	51	100.825	1.700	52.545	1.300	45.280	1.700	30.170	60.295	8.660
2	Jekan Raya	613	328.158	39.765	126.363	5.060	156.970	30.440	73.737	95.701	128.280
3	Pahandut	222	111.506	30.410	50.565	-	30.531	21.875	41.525	21.341	26.765
4	Sabangau	158	178.777	2.370	23.520	-	152.887	16.920	22.667	114.440	24.750
5	Rakumpit	13	155.250	-	8.650	-	146.600	-	5.150	111.250	38.850
Total		1057	874516	74245	261643	6360	532268	70935	173249	403027	227305

Sumber : RPJM Kota Palangkaraya Tahun 2008

e. Terminal

Terminal Kota Palangkaraya terbagi dalam tipe terminal perintis dan terminal regional, terminal perintis berlokasi di Desa Tarakas dengan jurusan Takaras - Palangka Raya dan Takaras - Tumbang Jutuh. Juga terdapat 3 terminal perintis/mini lainnya yaitu terminal Mihing Mahasa di JL.Darmo Sugondo untuk angkutan kota, terminal Data Manuah di Jl. Yos Sudarso untuk arah Pulang Pisau. Sedangkan Terminal Regional terletak di JL.Tjilik Riwut Km.8 dan Bundaran Burung JL.Milono Km.5. Di tahun 2007 juga mulai dibangun terminal Tipe A di Jl.Mahir Mahar Km.14,5 yang akan melayani angkutan antara kota dan antar Propinsi. Secara umum Kota Palangkaraya memiliki 5 terminal dan 1 dalam tahap pembangunan.



Gambar 4.6 Kondisi Terminal di Kota Palangkaraya

Sumber : Hasil Survey

Secara umum terminal yang ada di Kota Palangkaraya dalam kondisi baik, sedangkan untuk skala pelayanannya masih dalam lingkup lokal dan regional yang dapat dilihat dari tipe terminal yang ada.

2. Transportasi Udara

Kota Palangkaraya memiliki satu bandara yaitu Bandar udara Tjilik Riwut yang merupakan Bandar udara terbesar di Kalimantan Tengah yang beroperasi hampir setiap hari dengan penerbangan skala regional I dan skala nasional.

Bandara Tjilik Riwut saat ini sudah disinggahi oleh enam maskapai penerbangan nasional yaitu Merpati Nusantara Airlines dengan rute (Jakarta-Palangkaraya dan Surabaya- Palangka Raya yang untuk sementara menghentikan operasinya). Lalu ada Sriwijaya Air dengan rute (Jakarta-Palangkaraya), Batavia Air (Jakarta, Palangka Raya dan Surabaya) serta Kal-Star Trigana Air dengan rute (menghubungkan kota-kota di Kalimantan dengan kota di Pulau Jawa. Pesawat jenis Boeing 737 seri 200 sudah dapat mendarat di Bandara Tjilik Riwut. Hal ini dikarenakan adanya perpanjangan runway ke arah (R/W) 34. Yang semula hanya 1.550 x 30 m menjadi 2.100 x 30 m. Bandara Tjilik Riwut dengan elevasi 82 kaki dan dengan koordinat 02°33'25"S - 112°19'00" adalah bandara dengan klasifikasi kelas II. Bandara ini telah dilengkapi berbagai fasilitas operasional yang sudah memadai. Dalam hal Sumber daya manusia, pengelola bandara pun secara periodik mengirimkan petugas sesuai bidang tugasnya masing- masing untuk mengikuti pelatihan agar profesionalisme kerja tetap tinggi.

Bandara Tjilik Riwut juga memiliki fasilitas Over Run 60 x 30 m, Apron seluas 200 x 80 m dan Taxiway 112,5 x 22 m. Kedepan pengelola bandara merencanakan perluasan *shoulder* kiri dan kanan *runway* dari 30 m menjadi 45 m. Dari segi keamanan bandara, tersedia peralatan yang memadai seperti mesin x-ray (penumpang/bagasi) dan metal detector. Untuk pelayanan keselamatan penerbangan (*Air Traffic Service*) berupa Aerodrome Control Service dengan panggilan "Tjilik Riwut Tower" pada frekuensi 122.4 MHZ serta AFTN dan SSB (*Single Side Band*). Selain itu tersedia pula alat bantu navigasi yang cukup lengkap seperti NDB (*Non Directional Beacon*), DVOR (*Doppler Very High Omni Range*) dan ILS (*Instrument Landing System*). Untuk alat bantu pendaratan visual, tersedia Runway light, Taxiway Light, Vasi Pals, Reil, Flood light, Signal Area, Rotating Beacon dan SQFL (*Sequence Flasher*). Saat ini jam operasional Bandara Tjilik Riwut dari pukul 06.00 hingga pukul 17.00 WIB. Pihak pengelola bandara menyatakan siap memperpanjang jam operasi apabila ada permintaan dari maskapai. Selain fasilitas penyediaan bahan bakar yang dipasok oleh Pertamina, di Bandara Tjilik Riwut tersedia pula fasilitas PKP-PK yang cukup memadai yaitu sebuah *Rescue Car*, sebuah ambulance, dan tiga unit *Foam Tender*

dengan kemampuan kategori 6. Di bandara juga terdapat stasiun Meteorologi yang secara periodik memberikan informasi cuaca bagi penerbangan dengan metode QAM (*Meteorologi Report For Take Off Landing*). Sementara dalam hal penyediaan listrik, dipasok dari *Main Supply* PLN serta tersedia pula standby genset sebagai cadangan apabila terjadi pemadaman listrik.

Untuk melihat volume lalu lintas penerbangan dalam negeri Di Bandar Udara Tjilik Riwut dan persebaran fasilitas transportasi dapat dilihat pada Tabel 4.22 dan peta 4.11.

Tabel 4.22
Lalu Lintas Angkutan Udara Dalam Negeri Melalui
Bandar Udara Tjilik Riwut Kota Palangkaraya Tahun 2004 – 2008

Tahun	Pesawat Terbang		Penumpang		Transit
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	
2008	1.811	1.811	138.467	137.994	173
2007	1.814	1.816	126.309	128.356	288
2006	1.971	1.968	107.820	109.191	0
2005	1.734	1.734	86.966	85.923	64
2004	2.269	2249	85.009	83.567	153

Sumber : Kota Palangkaraya Dalam Angka 2008



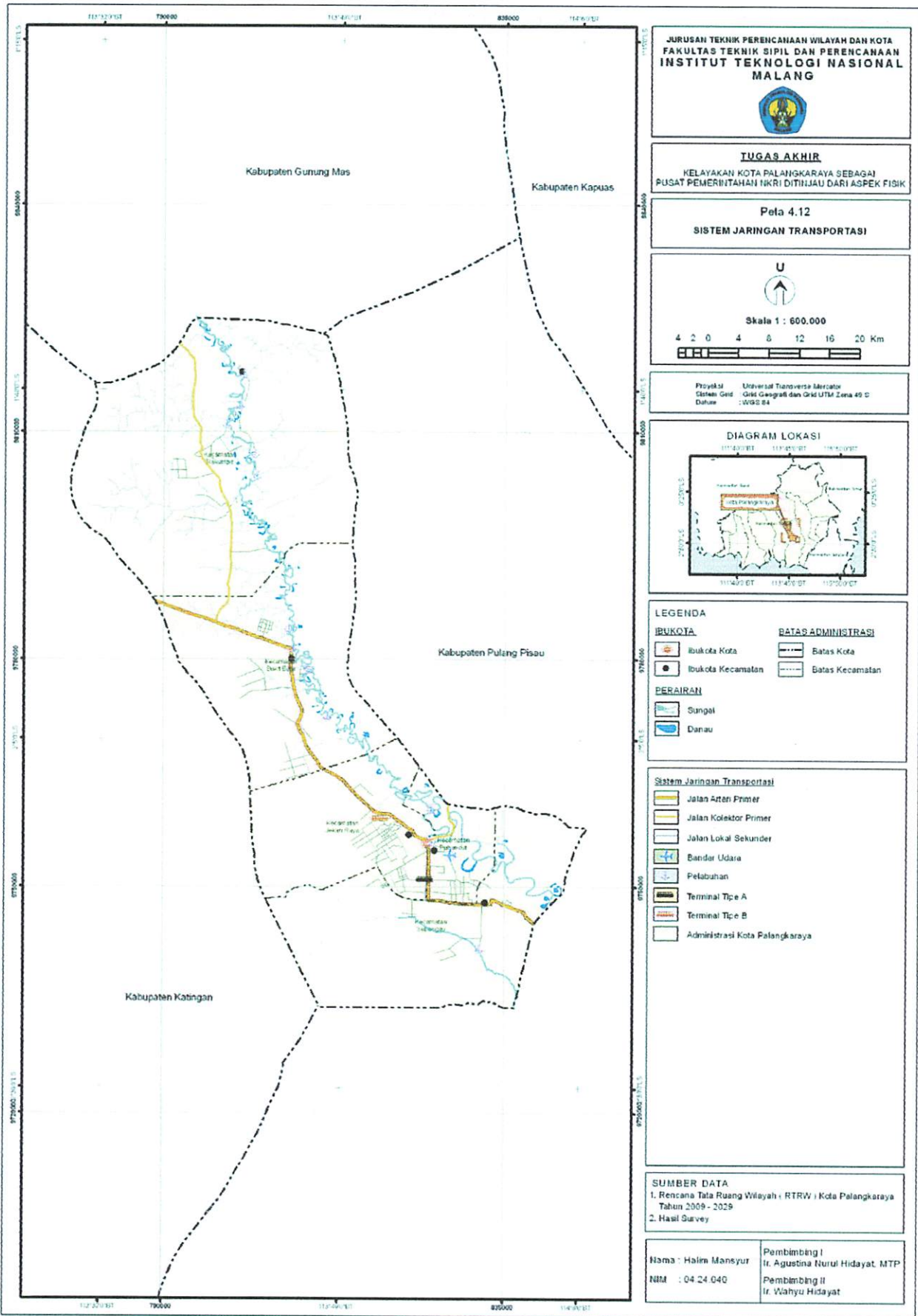
Kondisi jalan menuju Bandar udara Tjilik Riwut



Bandar udara Tjilik Riwut

Gambar 4.7 Kondisi Bandar Udara

Sumber : Hasil Survey

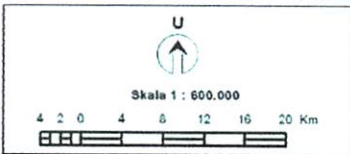


JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
 MALANG



TUGAS AKHIR
 KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI
 PUSAT PEMERINTAHAN IKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Peta 4.12
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Geod : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 C
 Datum : WGS 84



LEGENDA

IBUKOTA	BATAS ADMINISTRASI
Ibukota Kota	Batas Kota
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan
PERAIRAN	
Sungai	
Danau	

Sistem Jaringan Transportasi

Jalan Arteri Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Sekunder
Bandar Udara
Pelabuhan
Terminal Tipe A
Terminal Tipe B
Administrasi Kota Palangkaraya

SUMBER DATA
 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangkaraya Tahun 2009 - 2029
 2. Hasil Survey

Nama : Halim Mansyur	Pembimbing I Ir. Agustina Nurul Hidayat, MTP
NIM : 04 24 040	Pembimbing II Ir. Wahyu Hidayat

BAB V
ANALISA
KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI PUSAT
PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Analisa yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui Kelayakan Kota Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintahan NKRI ditinjau dari aspek fisik yang selanjutnya dijadikan sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini.

5.1. Kajian Regional

Kajian regional dibagi dalam dua bagian yaitu, kajian rentang kendali dan kajian bencana alam yang bertujuan mengetahui letak geografis (posisi strategis dan jangkauan) Kota Palangkaraya dari beberapa wilayah Indonesia, mengetahui kota pelabuhan terdekat, serta melihat daerah rawan bencana dalam penentuan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Kota Palangkaraya.

5.1.1. Kajian Rentang Kendali

Kajian rentang kendali merupakan kajian pendukung yang dimaksudkan oleh peneliti adalah kajian tentang kemampuan pencapaian aksesibilitas (jangkauan) dari wilayah-wilayah yang menuju Kota Palangkaraya sehingga dapat diketahui kecepatan (waktu/jam) untuk mencapai pusat pemerintahan kedepan, sedangkan jarak dan waktu tempuh dari kota pelabuhan dimaksudkan peneliti untuk memastikan Kota Pusat Pemerintahan kedepan tidak mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Untuk analisa rentang kendali yang menjadi sampel penelitian terdiri dari transportasi darat dan transportasi udara.

Untuk transportasi darat jarak untuk dua kota pelabuhan berdasarkan sumber BKPM Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2011, yaitu Kota Banjarmasin 191Km (3 jam) dan Sampit 225/227 Km (Kisaran waktu tempuh 4 jam). Untuk transportasi udara yang menjadi acuan yaitu menggunakan waktu tempuh

pesawat Batavia Air dari beberapa rute antarlain Jakarta–Palangka Raya dengan waktu tempuh 1,4 Jam, kemudian rute Surabaya–Palangka Raya dengan waktu tempuh 1,05 Jam. Untuk mengetahui rata-rata jarak dan waktu tempuh transportasi darat dan udara dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Jarak dan Waktu Tempuh
Kota-Kota di Indonesia ke Kota Palangkaraya

No	Kota	Jarak Tempuh (Km)	Waktu Tempuh (Jam)
1	Banjarmasin (Kota Pelabuhan)	191	3 (Darat)
2	Sampit (Kota Pelabuhan)	227	4 (Darat)
3	Jakarta (Kota Ekonomi)	904	1.4
4	Surabaya (Kota Ekonomi)	575	1.1
5	Denpasar (Kota Ekonomi)	731	2.4
6	Makasar (Kota Ekonomi)	689	1.3
7	Manado (Kota Ekonomi)	1,284	3.7
8	Medan (Kota Ekonomi)	1,814	3.5
9	Manokwari	2,284	5.1
10	Mataram	750	2.3
11	Merauke (Kota Terjauh)	3,007	5.5
12	Banda Aceh	1,644	3.4
13	Nunukan	813	4,5
14	Kupang	1,384	3,3
Jarak dan Waktu Tempuh Maksimum		3,007	5.5
Jarak dan Waktu Tempuh Minimum		227	1.1
Rata-Rata Jarak dan Waktu Tempuh		1,323	3

Sumber : Distance City Tools, www.Batavia Air.com 2010, www.Kal Star.com 2012, Hasil Analisa Jarak Kota-Kota Pusat Ekonomi Indonesia dan Jarak Kota Terjauh

Berdasarkan Analisa rentang kendali, Kota Palangkaraya cukup jauh dari kota pelabuhan yaitu Kota Banjarmasin dan Sampit dengan jarak tempuh berkisar diatas 150 Km, ini sangat menguntungkan menghambat perkembangan ekonomi akibat pencapaian penduduk yang cukup sulit, sedangkan untuk transportasi udara waktu tempuh dari Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta dan Surabaya berkisar 1 jam sehingga jangkauan dengan daerah maju (ekonomi) masih sangat efektif mendukung kegiatan pusat pemerintahan kedepan. Sedangkan jarak tempuh dan waktu tempuh maksimum terletak di Kota Merauke yaitu dengan jarak tempuh 3.007 Km (5,5 Jam), serta rata-rata jarak dan waktu tempuh menggunakan

pesawat antar kota-kota di Indonesia dengan Kota Palangkaraya berkisar 1.323 Km (3 jam).

Dari penjelasan analisa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa posisi Kota Palangkaraya sangat ideal dikembangkan menjadi Kota Pusat Pemerintahan NKRI karena berada pada titik sentral Indonesia yang memberikan kemudahan jangkauan taransportasi dari berbagai kota. Jarak dari kota pelabuhan yang cukup jauh sehingga dapat menghambat laju perkembangan kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1.

5.1.2. Kajian Bencana Alam

Kajian regional tentang bencana alam terbagi dalam beberapa jenis bencana alam antarlain bencana gunung berapi, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, banjir, bencana gerakan tanah, serta kejadian bencana alam Indonesia pada tahun 2011.

A. Bencana Gunung Berapi

Berdasarkan informasi geologi dan tingkat risiko letusan gunung berapi, tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe sebagai berikut :

1. Tipe A

- a. Kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar.
- b. Kawasan yang memiliki tingkat risiko rendah (berjarak cukup jauh dari sumber letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, pada saat terjadi bencana letusan, masih memungkinkan manusia untuk menyelamatkan diri, sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari).

2. Tipe B

- a. Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun.
- b. Kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang (berjarak cukup dekat dengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan diri pada saat letusan cukup sulit, kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar)

3. Tipe C

- a. Kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. Hanya diperuntukkan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus.
- b. Kawasan yang memiliki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan. Pada saat terjadi aktivitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk hidup yang ada di sekitarnya tidak mungkin untuk menyelamatkan diri).

Untuk Pulau Kalimantan secara umum dan Kota Palangkaraya secara khusus tidak memiliki kawasan daerah rawan gunung berapi dari tipologi dan kriteria bencana gunung berapi menurut standar PU No.21 Tahun 2007 PU diatas. Berdasarkan peta zona ancaman gunung berapi BNPB, Kota Palangkaraya tidak memiliki gunung berapi sehingga kemungkinan terjadinya bencana gunung berapi sangat kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.2.

B. Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi atau runtuhnya batuan. Dalam pedoman ini lebih mengatur untuk gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Tipe kawasan rawan gempa bumi ditentukan berdasarkan tingkat risiko gempa yang didasarkan pada informasi geologi dan penilaian kestabilan (cara perhitungan terlampir). Berdasarkan hal tersebut, maka

kawasan rawan gempa bumi dapat dibedakan menjadi (6) enam tipe kawasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tipe A

Kawasan ini berlokasi jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran gempa. Kawasan ini juga dicirikan dengan adanya kombinasi saling melemahkan dari faktor dominan yang berpotensi untuk merusak. Bila intensitas gempa tinggi (Modified Mercalli Intensity / MMI VIII) maka efek merusaknya diredam oleh sifat fisik batuan yang kompak dan kuat.

2. Tipe B

- a. Faktor yang menyebabkan tingkat kerawanan bencana gempa pada tipe ini tidak disebabkan oleh satu faktor dominan, tetapi disebabkan oleh lebih dari satu faktor yang saling mempengaruhi, yaitu intensitas gempa tinggi (MMI VIII) dan sifat fisik batuan menengah.
- b. Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama untuk bangunan dengan konstruksi sederhana.

3. Tipe C

- a. Terdapat paling tidak dua faktor dominan yang menyebabkan kerawanan tinggi pada kawasan ini. Kombinasi yang ada antara lain adalah intensitas gempa tinggi dan sifat fisik batuan lemah; atau kombinasi dari sifat fisik batuan lemah dan berada dekat zona sesar cukup merusak.
- b. Kawasan ini mengalami kerusakan cukup parah dan kerusakan bangunan dengan konstruksi beton terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar.

4. Tipe D

- a. Kerawanan gempa diakibatkan oleh akumulasi dua atau tiga faktor yang saling melemahkan. Sebagai contoh gempa pada kawasan dengan kemiringan lereng curam, intensitas gempa tinggi dan berada sepanjang zona sesar merusak; atau

berada pada kawasan dimana sifat fisik batuan lemah, intensitas gempa tinggi, di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami cukup merusak.

- b. Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan parah untuk segala bangunan dan terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar.

5. Tipe E

- a. Kawasan ini merupakan jalur sesar yang dekat dengan episentrum yang dicerminkan dengan intensitas gempa yang tinggi, serta di beberapa tempat berada pada potensi landaan tsunami merusak. Sifat fisik batuan dan kelerengan lahan juga pada kondisi yang rentan terhadap guncangan gempa.
- b. Kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa.

6. Tipe F

- a. Kawasan ini berada pada kawasan landaan tsunami sangat merusak dan di sepanjang zona sesar sangat merusak, serta pada daerah dekat dengan episentrum dimana intensitas gempa tinggi. Kondisi ini diperparah dengan sifat fisik batuan lunak yang terletak pada kawasan morfologi curam sampai dengan sangat curam yang tidak kuat terhadap guncangan gempa.
- b. Kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa.

Untuk Pulau Kalimantan secara umum dan Kota Palangkaraya secara khusus memiliki kawasan daerah rawan gempa bumi sangat kecil dari tipologi dan kriteria bencana gempa bumi menurut standar PU No.21 Tahun 2007 PU diatas. Berdasarkan peta BNPB tentang zona ancaman gempa bumi (respon spektra percepatan 1 detik batuan dasar sb, untuk probalitas terlampau 2 % dalam 50 tahun, redaman 5 %) Kota Palangkaraya terbilang terendah yaitu kurang dari 0,05. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.3, 5.4, 5.5.

C. Bencana Tsunami

Menurut buku data bencana strategis BNPB, tsunami adalah rangkaian gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan implusif dari dasar laut, tsunami dapat disebabkan oleh :

- Gempa bumi dan dislokasi/perpindahan massa tanah/batuan yang sangat besar dibawah air (laut/danau)
- Tanah longsor didalam laut
- Letusan gunung api dibawah laut atau gunung api pulau.

Berdasarkan peta indeks bencana tsunami Indonesia dan peta zonasi ancaman tsunami Indonesia menyatakan bahwa Propinsi Kalimantan tengah secara umum dan Kota Palangkaraya secara khusus bukan merupakan wilayah potensi terjadi bencana tsunami. Kota Palangkaraya sendiri terletak diwilayah pedalam Pulau Kalimantan sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi bencana tsunami. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.6, 5.7 dan 5.8.

D. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan Menurut BNPB adalah suatu keadaan di manan hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan itu nilai lingkungan. Kebakaran hutan seringkali menyebabkan bencana asap yang mengganggu masyarakat sekitar.

Berdasarkan peta sebaran titik panas Indonesia tahun 2009 menyatakan bahwa Propinsi Kalimantan Tengah memiliki 243 titik sebaran api, kemudian berdasarkan peta bencana kebakaran hutan BNPB tahun 2009, Pulau Kalimantan banyak memiliki titik Hot Spot/titik sebaran api, khususnya di Propinsi Kalimantan Barat yang berjumlah lebih dari 2.500 titik api, sedangkan untuk Propinsi Kalimantan Tengah (zona sedang) berjumlah 321-1500 titik api.

Dari gambaran diatas menyatakan bahwa Propinsi Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya masih cukup banyak memiliki titik kebakaran pada tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.9 dan 5.10.

E. Bencana Banjir

Pengertian banjir menurut BNPB terbagi dalam dua bagian yaitu :

- Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi

sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air.

- Gelombang banjir berjalan kearahhilir system sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air dimuara akibat badai.

Berdasarkan peta potensi perkiraan daerah potensi banjir Indonesia menyatakan bahwa Kota Palangkaraya merupakan wilayah potensi terjadinya banjir yang cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.11, 5.12 dan 5.13.

F. Bencana Gerakan Tanah

Gerakan tanah adalah perpindahan material pembentuk lereng, berupa batuan, bahan timbunan, tanah atau material campuran tersebut, bergerak kearah bawah dan keluar lereng (Varnes, D.J, 1978). Gerakan tanah adalah suatu massa tanah yang bergerak dari atas ke bawah di sepanjang lereng. Gerakan tanah terjadi apabila gaya yang menahan (Resisting Forces) massa tanah di lereng tersebut lebih kecil dari pada gaya yang mendorong/ meluncurkan tanah di sepanjang lereng. Menurut BNPB tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng

Berdasarkan peta zona ancaman gerakan tanah BNPB dan peta perkiraan wilayah potensi bencana gerakan tanah Propinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa Propinsi Kalimantan Tengah secara umum dan Kota Palangkaraya masih sangat aman dari bencana gerakan tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.14 dan 5.15.

Secara umum Pulau Kalimantan dan Kota Palangkaraya masih aman dari bencana alam, ini dilihat berdasarkan peta potensi kejadian bencana di Indonesia periode february 2011 yang dikeluarkan oleh BNPB. Bencana yang sering terjadi adalah bencana kebakaran lahan yang ditimbulkan oleh beberapa sebab ataralain faktor iklim (panas/kemarau berkepanjangan) dan manusia seperti pembakaran lahan untuk perluasan lahan pertanian. Untuk lebih lengkapnya anda dapat melihat pada Gambar 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 dan gambar 5.20.





Gambar 5.2

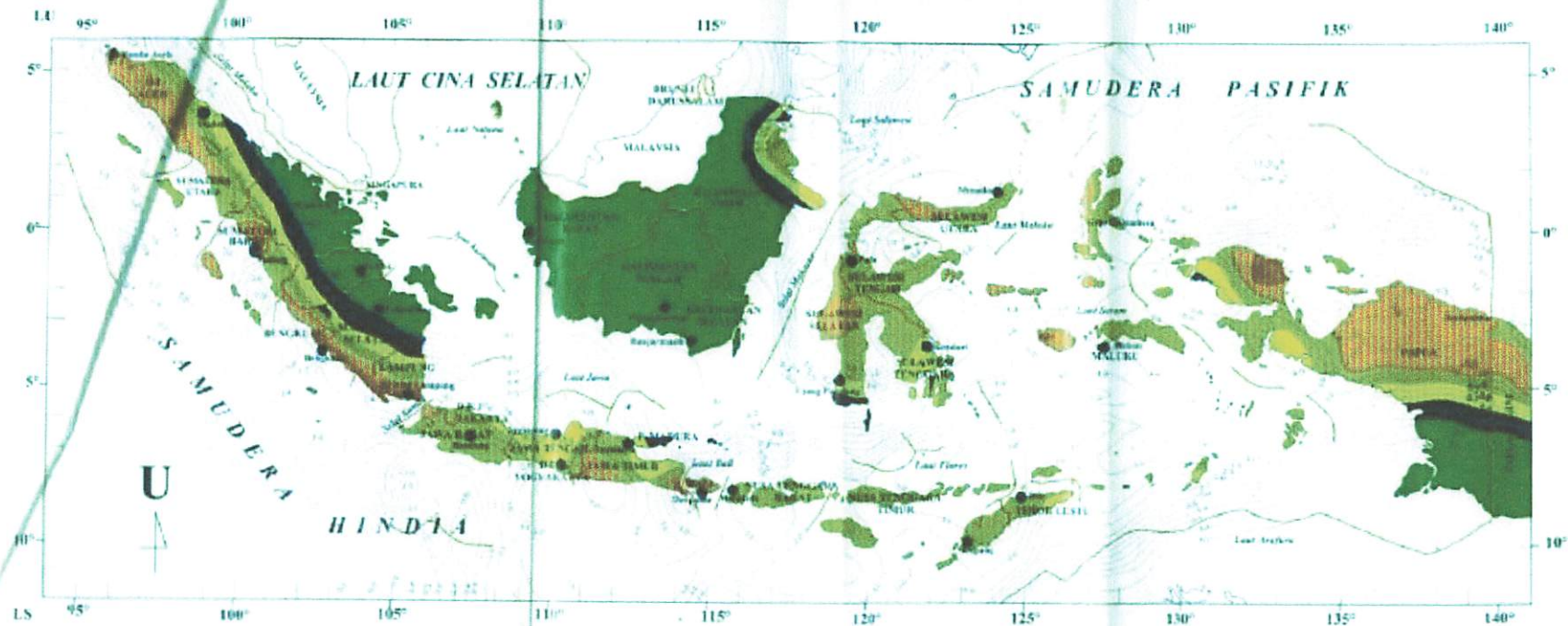
Peta Ancaman Bencana Gunung Berapi Indonesia



Gambar 5.3

Peta Zonasi Ancaman Bencana Gempabumi Indonesia

PERSAMAAN RAYAPAN GELOMBANG GEMPA FUKUSHIMA dan TANAKA (1990)



PERIODE ULANG DAN PERCEPATAN GEMPA DASAR

Periode Ulang T (tahun)	a_c (g)
10	0.127
20	0.155
50	0.196
100	0.227
200	0.255
500	0.289
1000	0.313
5000	0.364
10000	0.385

FAKTOR KOREKSI PENGARUH JENIS TANAH / BATUAN

Jenis Batuan Dasar	Periode Predominan T_s (detik)	Faktor Koreksi (v)
Batuan	$T_s < 0.25$	0.80
Diluvium	$0.25 < T_s < 0.50$	1.00
Alluvium	$0.50 < T_s < 0.75$	1.10
Alluvium Lunak	$T_s > 0.75$	1.20

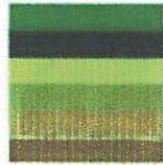
RUMUS

$k = ad / g$
 $ad = Z \cdot ac \cdot v$
 k = Koefisien Gempa
 Z = Koefisien Zona Gempa
 ac = Percepatan Gempa Dasar (g)
 g = Percepatan Gravitasi (cm/det²)
 v = Faktor Koreksi Pengaruh Jenis Tanah Setempat
 ad = Percepatan Permukaan Tanah Terkoreksi (cm/det²)

PUSAT LITRANG SUMBER DAYA AIR, 2004

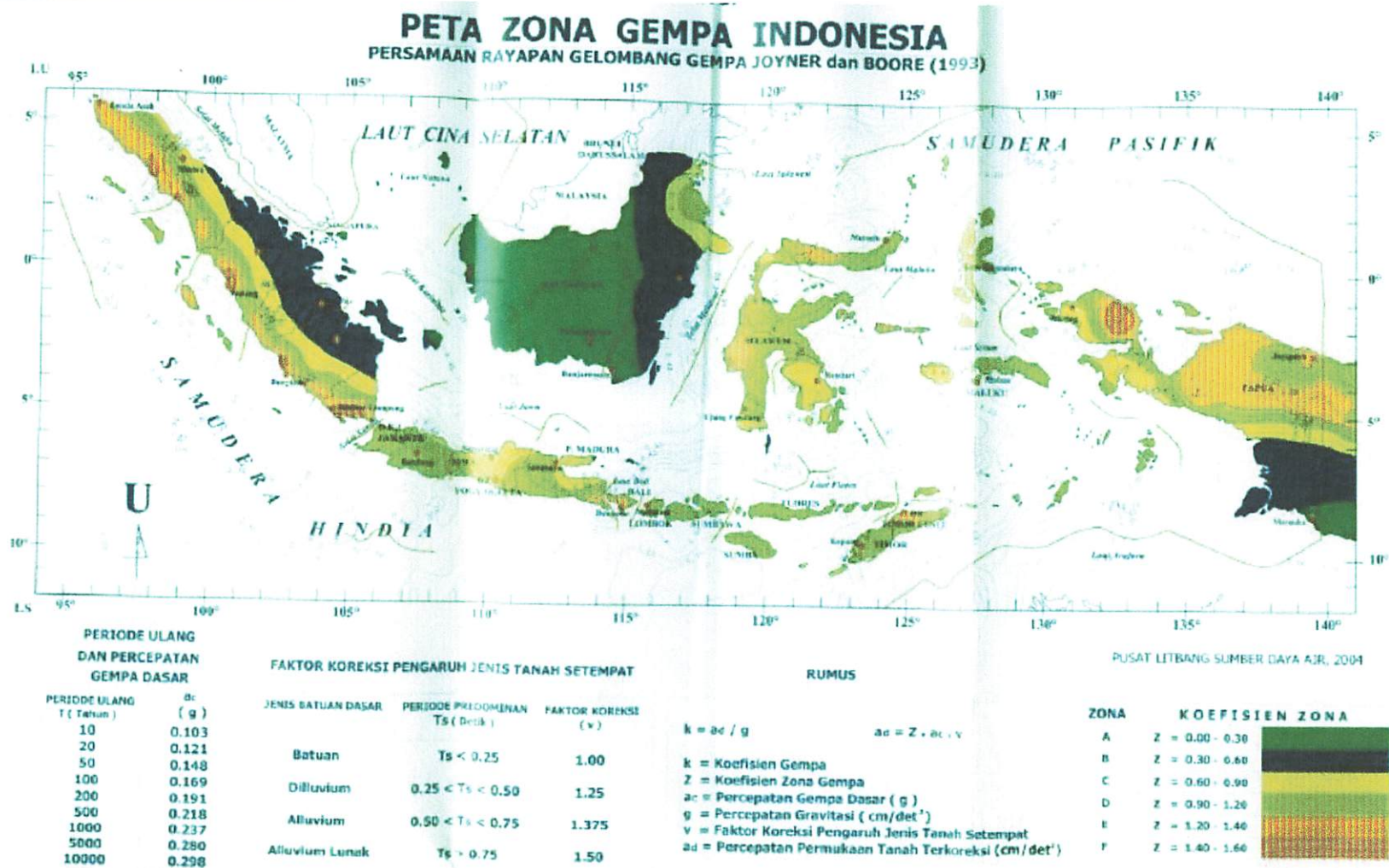
ZONA KOEFSISIEN ZONA

ZONA	KOEFSISIEN ZONA
A	$Z = 0.00 - 0.30$
B	$Z = 0.30 - 0.60$
C	$Z = 0.60 - 0.90$
D	$Z = 0.90 - 1.20$
E	$Z = 1.20 - 1.40$
F	$Z = 1.40 - 1.60$



Gambar 5.4

Peta Zona Bencana Gempabumi Indonesia Tahun 1990 (Departemen PU)



Gambar 5.5

Peta Zona Bencana Gempabumi Indonesia Tahun 1993 (Departemen PU)



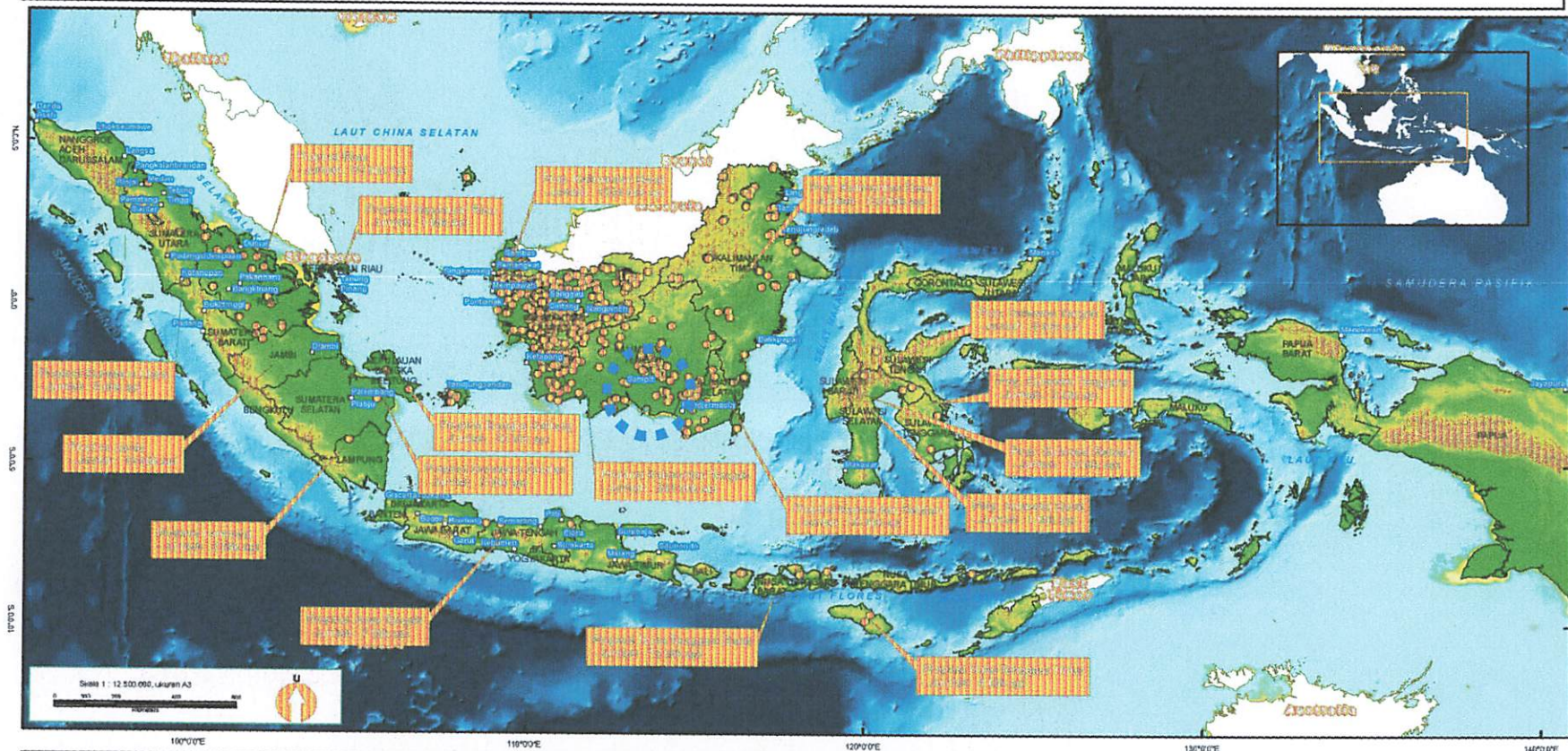
Gambar 5.7

Peta Indeks Ancaman Bencana Tsunami di Indonesia



Gambar 5.8

Peta Zonasi Bencana Tsunami Indonesia Periode Ulang 100 Tahun (Departemen PU)



Provinsi	Jumlah Titik Panas					Total
	13 Agustus	14 Agustus	15 Agustus	16 Agustus	17 Agustus	
SUMATERA UTARA				2	6	8
RIAU				25	41	66
KEPULAUAN RIAU	1					1
JAMBI				18		18
SUMATERA SELATAN	2					2
BANGKA-BELITUNG	20	9	2		6	36
LAMPUNG	2					2
JAWA TENGAH	2	3			2	7
KALIMANTAN BARAT	593	371	7	35	18	1024
KALIMANTAN TENGAH	100	101	26	2	14	243

Sumber : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Departemen Kehutanan (Satelit NOAA 18)

Provinsi	Jumlah Titik Panas					Total
	13 Agustus	14 Agustus	15 Agustus	16 Agustus	17 Agustus	
KALIMANTAN SELATAN	7	22	19	3	4	55
KALIMANTAN TIMUR	11	36	31	3	73	154
SULAWESI TENGAH			4	2		6
SULAWESI SELATAN	6	8	2			16
SULAWESI BARAT					1	1
NTB	5	8	1			14
NTT	1	1	2			4
SULAWESI TENGGARA				3		3

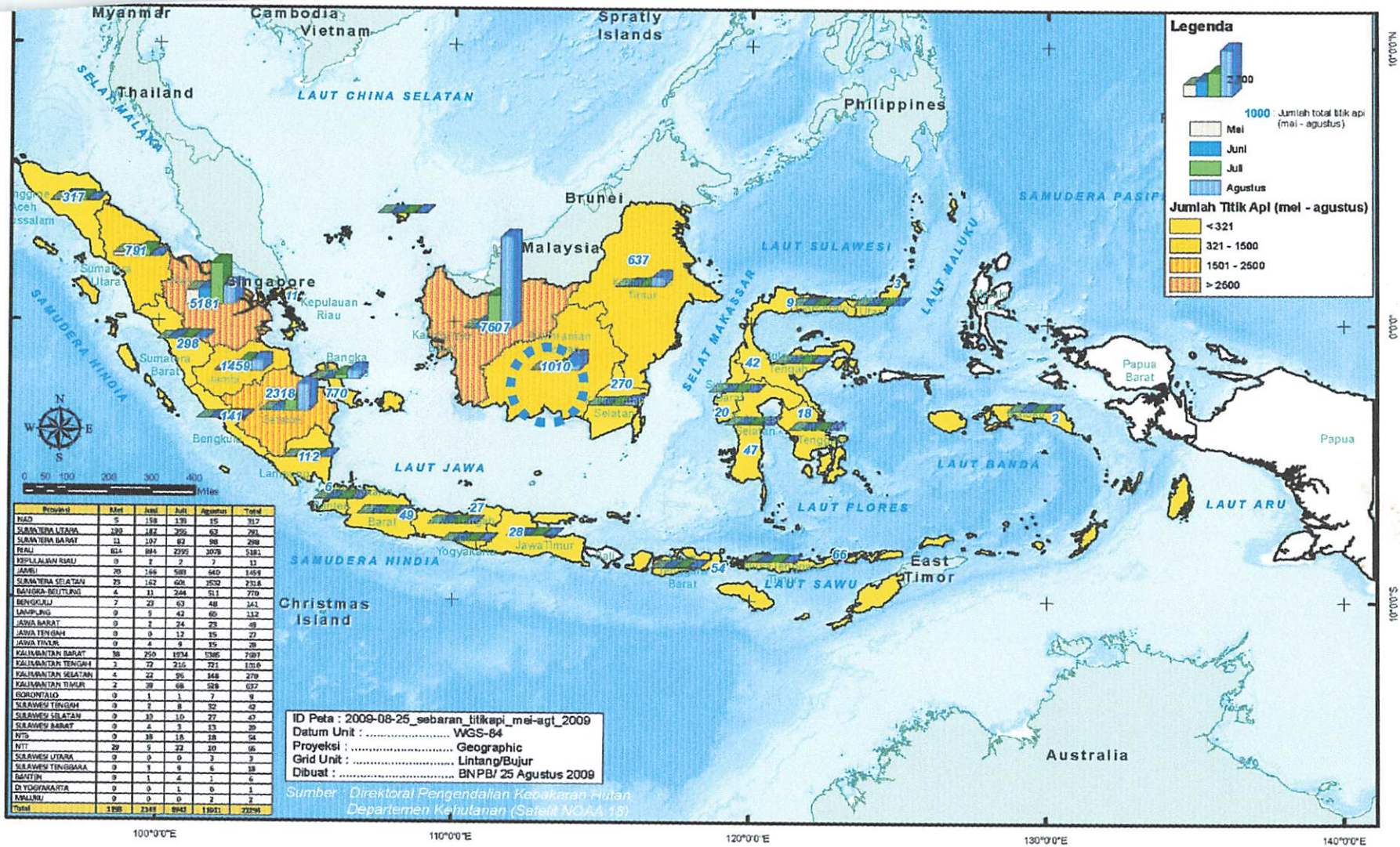
- Legenda**
- Titik Panas Agustus 2009
 - Kota Besar
 - ▭ Batas Propinsi

ID Peta : 2009-09-18_Kebakaran_Hutan_BHPB
 Datum Unit : WGS-84
 Proyeksi : Geographic
 Grid Unit : Listang/Bujur
 Dibuat : BHPB/ 18 Agustus 2009

Sumber :
 1. Titik Api : Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, Departemen Kehutanan (Satelit NOAA 18)
 2. Batas Administrasi : BPS, 2007
 3. SRTM Image : UNDP, 2002

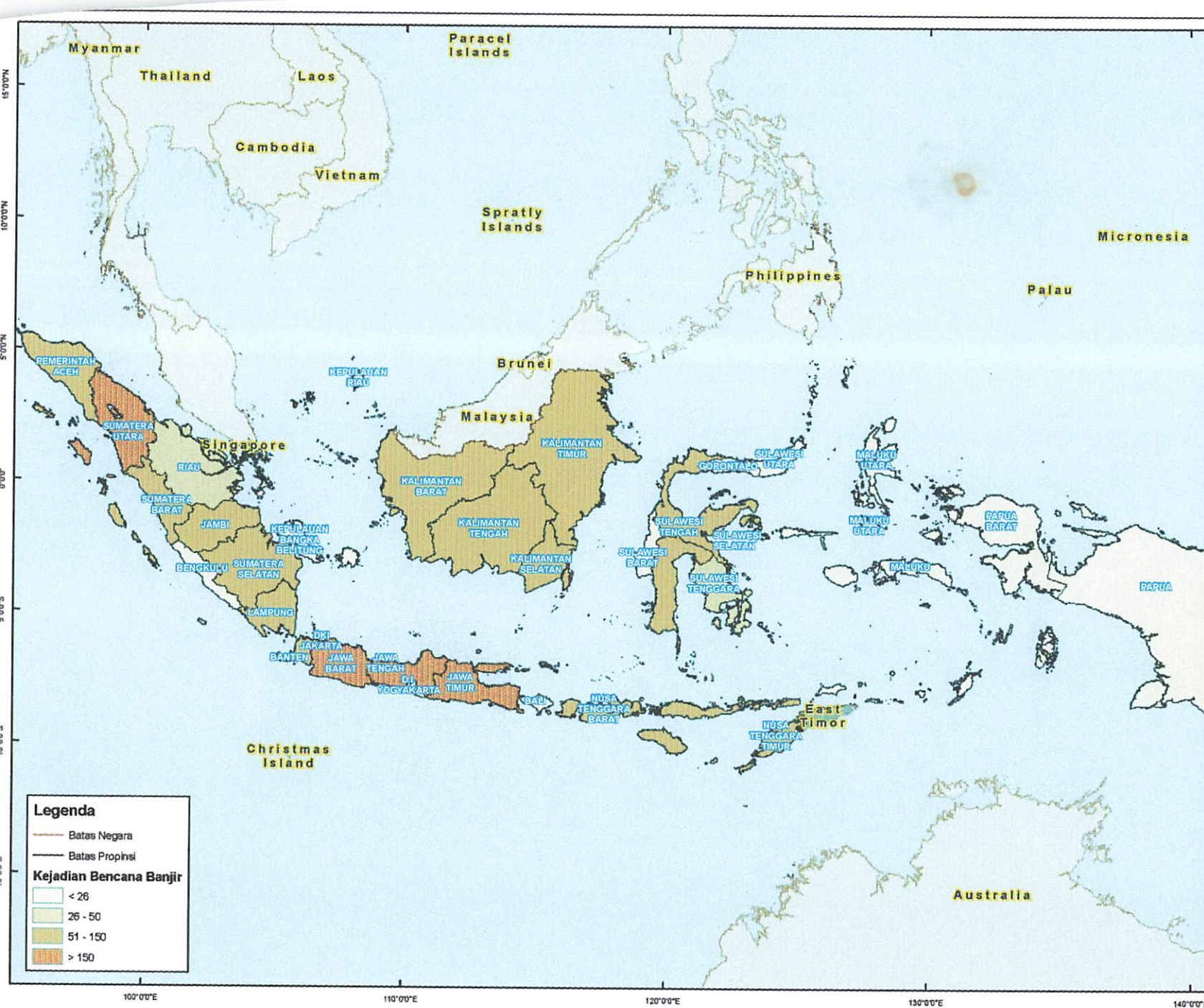
Gambar 5.9

Peta Sebaran Titik Panas Indonesia



Gambar 5.10

Peta Jumlah Titik (Hot Spot) di Indonesia



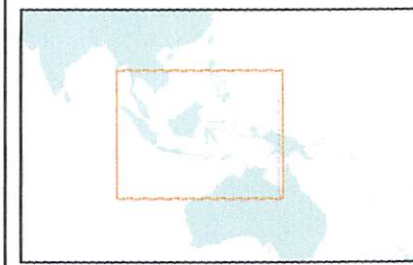
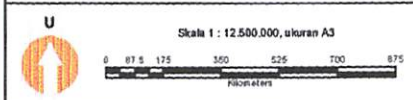
Kode Provinsi	Nama Provinsi	Jumlah Kejadian
51	BALI	16
36	BANTEN	66
17	BENGKULU	19
34	DI YOGYAKARTA	18
31	DKI JAKARTA	62
75	GORONTALO	25
15	JAMBI	84
32	JAWA BARAT	248
33	JAWA TENGAH	337
35	JAWA TIMUR	278
61	KALIMANTAN BARAT	73
63	KALIMANTAN SELATAN	132
62	KALIMANTAN TENGAH	53
64	KALIMANTAN TIMUR	63
19	KEP. BANGKA BELITUNG	6
21	KEPULAUAN RIAU	2
18	LAMPUNG	72
81	MALUKU	6
82	MALUKU UTARA	7
52	NUSA TENGGARA BARAT	53
53	NUSA TENGGARA TIMUR	99
91	PAPUA	23
92	PAPUA BARAT	0
11	PEMERINTAH ACEH	138
14	RIAU	46
76	SULAWESI BARAT	13
73	SULAWESI SELATAN	130
72	SULAWESI TENGAH	55
74	SULAWESI TENGGARA	41
71	SULAWESI UTARA	20
13	SUMATERA BARAT	96
16	SUMATERA SELATAN	53
12	SUMATERA UTARA	175

Sumber : Data Kejadian Bencana Banjir 1979 - 2009, BNPB

ID Peta : 2010-09-22_Indonesia_kejadian_bencana_banjir_BNPB

Datum Unit : WGS-84
 Proyeksi : Geographic
 Grid Unit : Lintang/Bujur
 Dibuat : BNPB/22 September 2010
 Contact : www.bnppb.go.id

Sumber :
 1. Batas Administrasi : BPS, 2007
 2. Data Kejadian Bencana Banjir Tahun 1979 - 2009 : BNPB



Legenda

— Batas Negara
 — Batas Propinsi

Kejadian Bencana Banjir

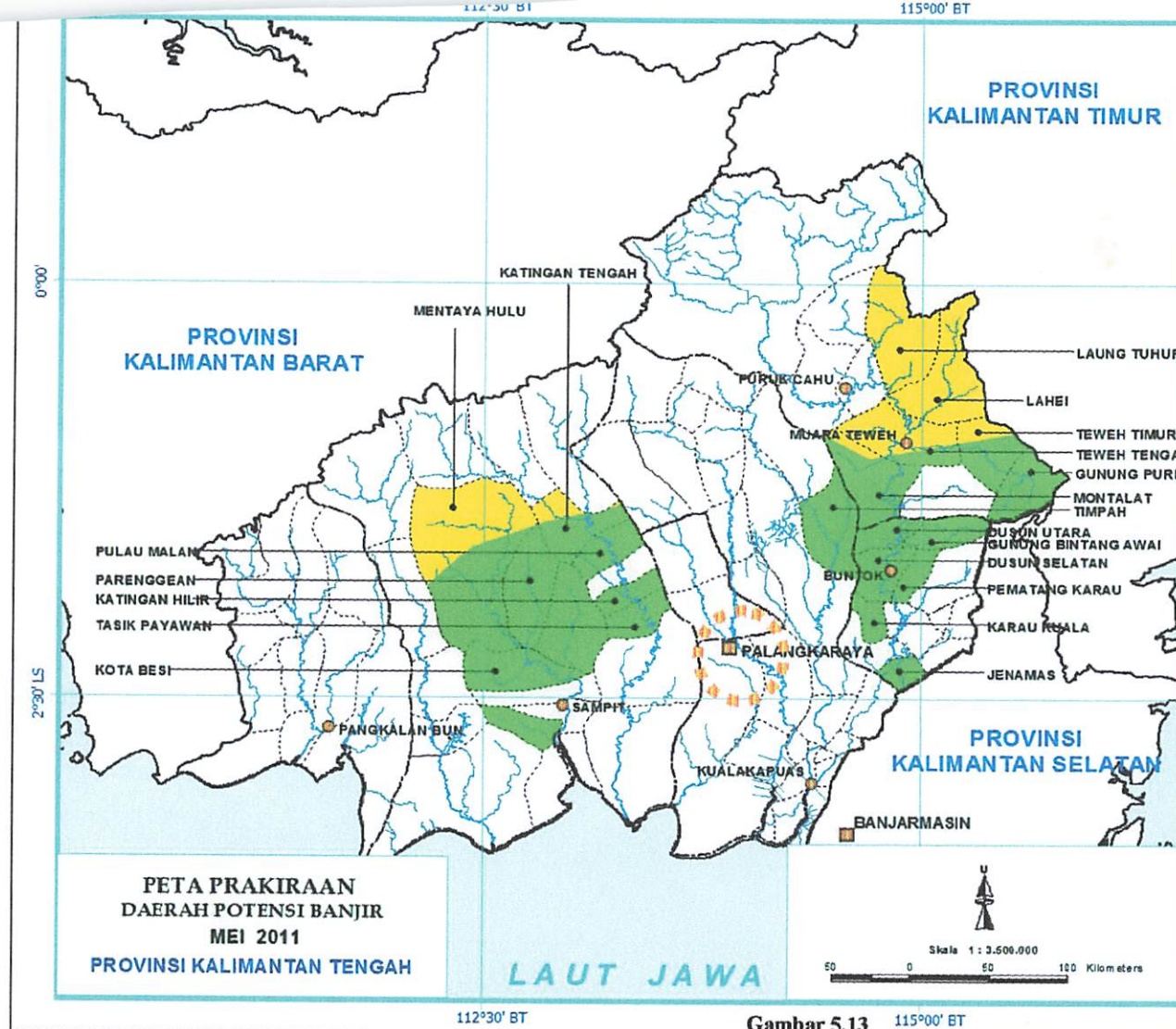
[Light Green]	< 26
[Medium Green]	26 - 50
[Dark Green]	51 - 150
[Orange]	> 150

100°0'0"E 110°0'0"E 120°0'0"E 130°0'0"E 140°0'0"E



Gambar 5.12

Peta Zonasi Ancaman Bencana Banjir di Indonesia



LEGENDA

Kenampakan Topografi

- Kota Provinsi
- Kota Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Sungai, Danau

Potensi Rawan Banjir

 Tinggi	 Rendah
 Menengah	 Aman

Kecamatan Berpotensi Banjir

TINGGI :

MENENGAH :
 LAHEI, LAUNG TUHUP, MONTALAT, TEWEH TENGAH, TEWEH TIMUR, KATINGAN TENGAH, MENTAYA HULU, PARENGGEAN

RENDAH :
 DUSUN SELATAN, DUSUN UTARA, GUNUNG BINTANG AWAI, JENAMAS, KARAU KUALA, PEMATANG KARAU, GUNUNG PUREI, MONTALAT, TEWEH TENGAH, TEWEH TIMUR, TIMPAH, CAMPAGA, KATINGAN HILIR, KATINGAN TENGAH, KOTA BESI, MENTAYA HILIR UTARA, MENTAYA HULU, PARENGGEAN, PULAU MALAN, TASIK PAYAWAN



Updating : 01 Maret 2011

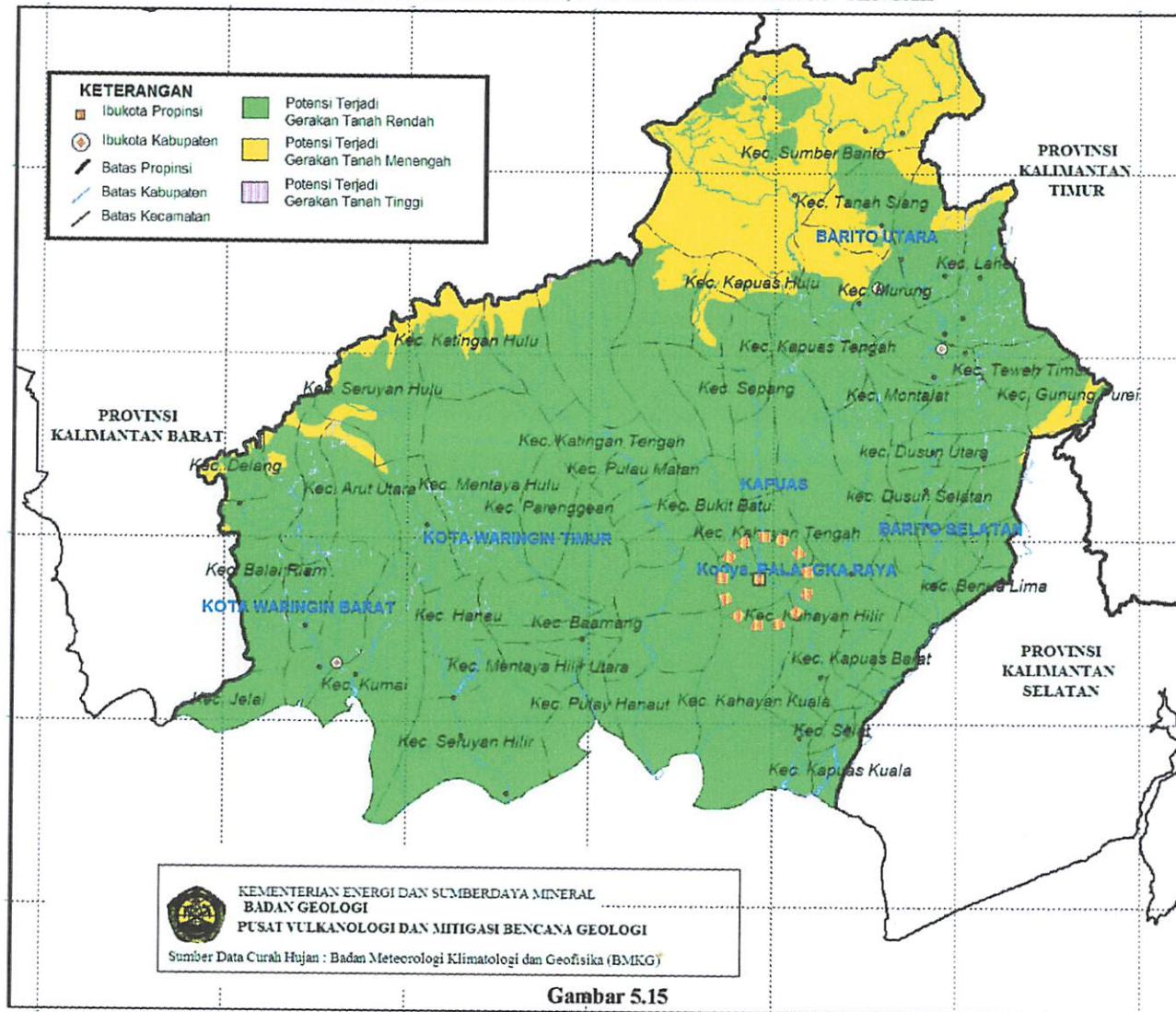
Gambar 5.13

Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir di Propinsi Kalimantan Tengah



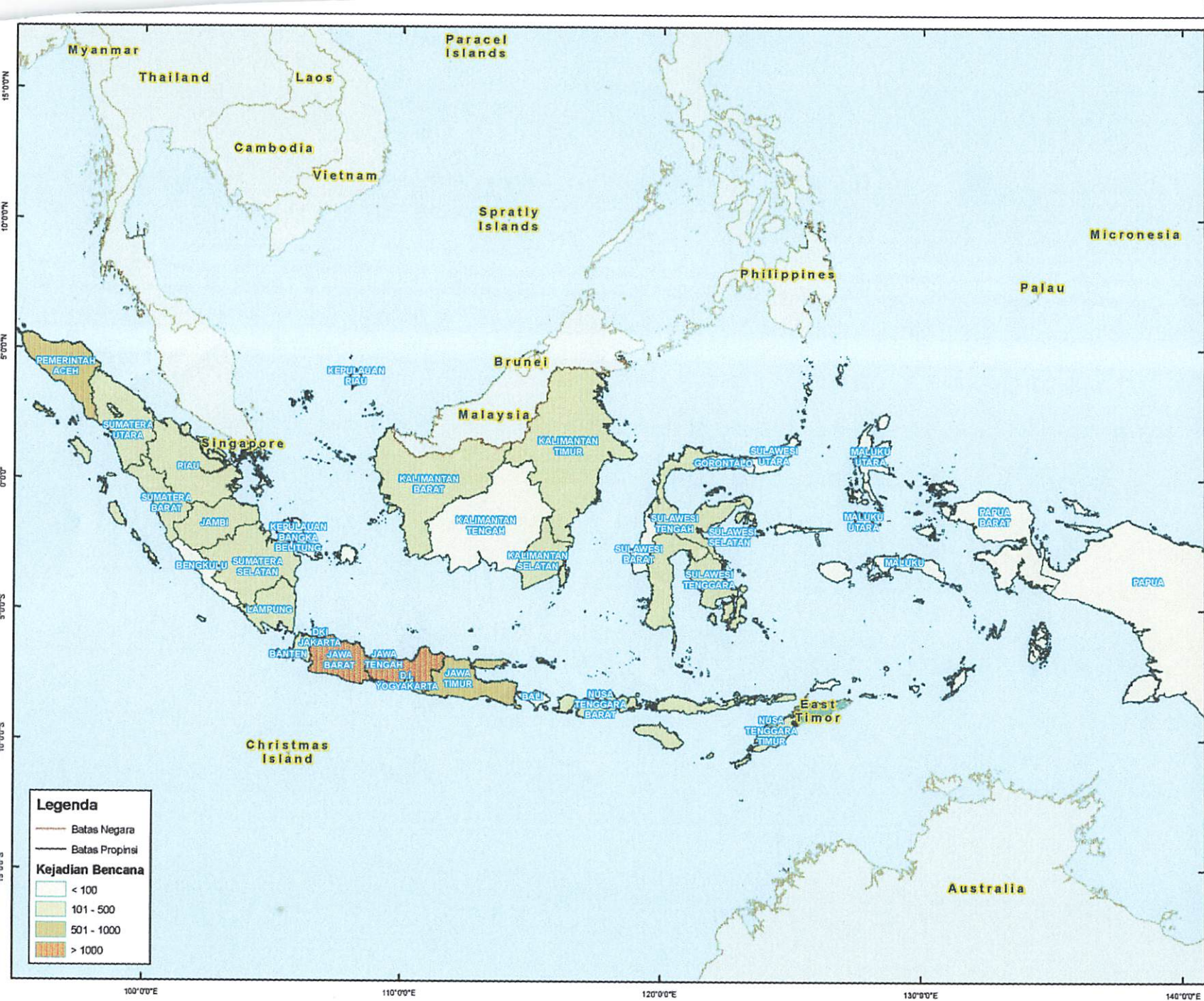
Gambar 5.14

Peta Ancaman Bencana Gerakan Tanah di Indonesia



Gambar 5.15

Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah pada Bulan Mei 2011, Propinsi Kalimantan Tengah



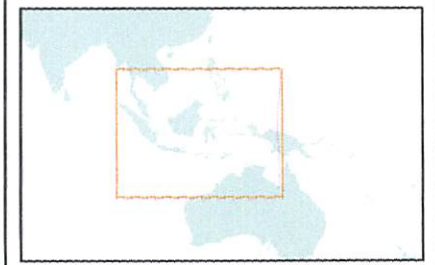
Kode Provinsi	Nama Provinsi	Jumlah Kejadian
51	BAU	77
36	BANTEN	158
17	BENGKULU	49
34	DI YOGYAKARTA	176
31	DKI JAKARTA	191
75	GORONTALO	41
15	JAMBI	148
32	JAWA BARAT	1,046
33	JAWA TENGAH	1,417
35	JAWA TIMUR	630
61	KALIMANTAN BARAT	114
63	KALIMANTAN SELATAN	410
62	KALIMANTAN TENGAH	84
64	KALIMANTAN TIMUR	257
19	KEP. BANGKA BELITUNG	50
21	KEPULAUAN RIAU	5
18	LAMPUNG	183
81	MALUKU	53
82	MALUKU UTARA	40
52	NUSA TENGGARA BARAT	195
53	NUSA TENGGARA TIMUR	395
91	PAPUA	54
92	PAPUA BARAT	6
11	PEMERINTAH ACEH	506
14	RIAU	127
76	SULAWESI BARAT	38
73	SULAWESI SELATAN	394
72	SULAWESI TENGAH	132
74	SULAWESI TENGGARA	193
71	SULAWESI UTARA	96
13	SUMATERA BARAT	216
16	SUMATERA SELATAN	132
12	SUMATERA UTARA	297

Sumber : Data Kejadian Bencana 1979 - 2009, BNBP

ID Peta : 2010-09-21_Indonesia_kejadian_bencana_1979_2009_BNBP

Datum Unit : WGS-84
 Proyeksi : Geographic
 Grid Unit : Lintang/Bujur
 Dibuat : BNBP/ 21 September 2010
 Contact : www.bnpt.go.id

Sumber :
 1. Batas Administrasi : BPS, 2007
 2. Data Kejadian Bencana 1979 - 2009 : BNBP



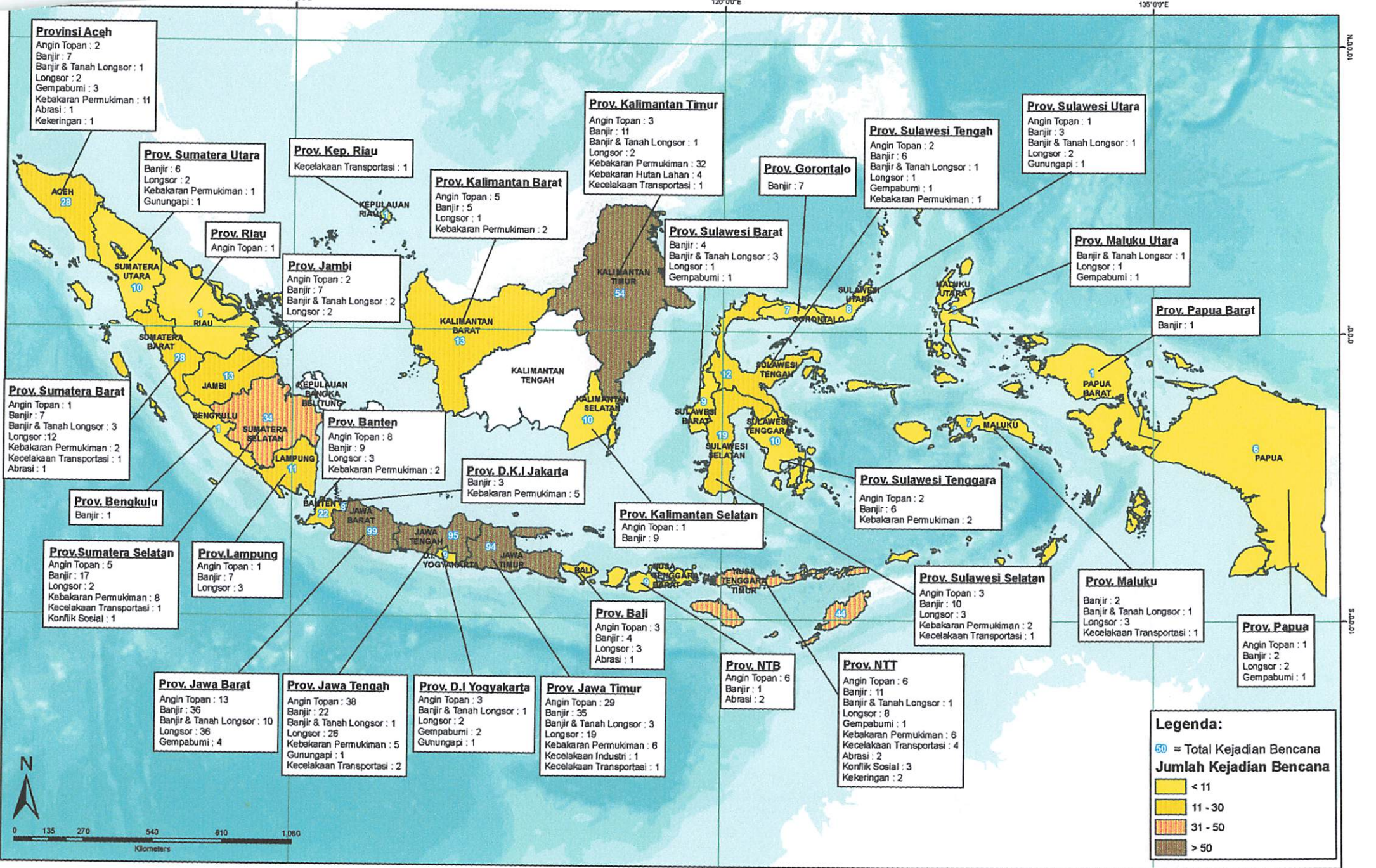
Legenda

- Batas Negara
- Batas Propinsi

Kejadian Bencana

- < 100
- 101 - 500
- 501 - 1000
- > 1000

100°0'0"E 110°0'0"E 120°0'0"E 130°0'0"E 140°0'0"E



Provinsi Aceh
 Angin Topan : 2
 Banjir : 7
 Banjir & Tanah Longsor : 1
 Longsor : 2
 Gempabumi : 3
 Kebakaran Permukiman : 11
 Abrasi : 1
 Kekeringan : 1

Prov. Sumatera Utara
 Banjir : 6
 Longsor : 2
 Kebakaran Permukiman : 1
 Gunungapi : 1

Prov. Kep. Riau
 Kecelakaan Transportasi : 1

Prov. Riau
 Angin Topan : 1

Prov. Kalimantan Barat
 Angin Topan : 5
 Banjir : 5
 Longsor : 1
 Kebakaran Permukiman : 2

Prov. Kalimantan Timur
 Angin Topan : 3
 Banjir : 11
 Banjir & Tanah Longsor : 1
 Longsor : 2
 Kebakaran Permukiman : 32
 Kebakaran Hutan Lahan : 4
 Kecelakaan Transportasi : 1

Prov. Sulawesi Tengah
 Angin Topan : 2
 Banjir : 6
 Banjir & Tanah Longsor : 1
 Longsor : 1
 Gempabumi : 1
 Kebakaran Permukiman : 1

Prov. Sulawesi Utara
 Angin Topan : 1
 Banjir : 3
 Banjir & Tanah Longsor : 1
 Longsor : 2
 Gunungapi : 1

Prov. Gorontalo
 Banjir : 7

Prov. Sulawesi Barat
 Banjir : 4
 Banjir & Tanah Longsor : 3
 Longsor : 1
 Gempabumi : 1

Prov. Maluku Utara
 Banjir & Tanah Longsor : 1
 Longsor : 1
 Gempabumi : 1

Prov. Jambi
 Angin Topan : 2
 Banjir : 7
 Banjir & Tanah Longsor : 2
 Longsor : 2

Prov. Papua Barat
 Banjir : 1

Prov. Sumatera Barat
 Angin Topan : 1
 Banjir : 7
 Banjir & Tanah Longsor : 3
 Longsor : 12
 Kebakaran Permukiman : 2
 Kecelakaan Transportasi : 1
 Abrasi : 1

Prov. Banten
 Angin Topan : 8
 Banjir : 9
 Longsor : 3
 Kebakaran Permukiman : 2

Prov. D.K.I Jakarta
 Banjir : 3
 Kebakaran Permukiman : 5

Prov. Kalimantan Selatan
 Angin Topan : 1
 Banjir : 9

Prov. Sulawesi Tenggara
 Angin Topan : 2
 Banjir : 6
 Kebakaran Permukiman : 2

Prov. Bengkulu
 Banjir : 1

Prov. Sumatera Selatan
 Angin Topan : 5
 Banjir : 17
 Longsor : 2
 Kebakaran Permukiman : 8
 Kecelakaan Transportasi : 1
 Konflik Sosial : 1

Prov. Lampung
 Angin Topan : 1
 Banjir : 7
 Longsor : 3

Prov. Maluku
 Banjir : 2
 Banjir & Tanah Longsor : 1
 Longsor : 3
 Kecelakaan Transportasi : 1

Prov. Papua
 Angin Topan : 1
 Banjir : 2
 Longsor : 2
 Gempabumi : 1

Prov. Jawa Barat
 Angin Topan : 13
 Banjir : 36
 Banjir & Tanah Longsor : 10
 Longsor : 36
 Gempabumi : 4

Prov. Jawa Tengah
 Angin Topan : 38
 Banjir : 22
 Banjir & Tanah Longsor : 1
 Longsor : 26
 Kebakaran Permukiman : 5
 Gunungapi : 1
 Kecelakaan Transportasi : 2

Prov. D.I Yogyakarta
 Angin Topan : 3
 Banjir & Tanah Longsor : 1
 Longsor : 2
 Gempabumi : 2
 Gunungapi : 1

Prov. Jawa Timur
 Angin Topan : 29
 Banjir : 35
 Banjir & Tanah Longsor : 3
 Longsor : 19
 Kebakaran Permukiman : 6
 Kecelakaan Industri : 1
 Kecelakaan Transportasi : 1

Prov. Bali
 Angin Topan : 3
 Banjir : 4
 Longsor : 3
 Abrasi : 1

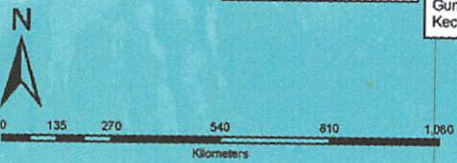
Prov. NTB
 Angin Topan : 6
 Banjir : 1
 Abrasi : 2

Prov. NTT
 Angin Topan : 6
 Banjir : 11
 Banjir & Tanah Longsor : 1
 Longsor : 8
 Gempabumi : 1
 Kebakaran Permukiman : 6
 Kecelakaan Transportasi : 4
 Abrasi : 2
 Konflik Sosial : 3
 Kekeringan : 2

Legenda:

50 = Total Kejadian Bencana
Jumlah Kejadian Bencana

- < 11
- 11 - 30
- 31 - 50
- > 50



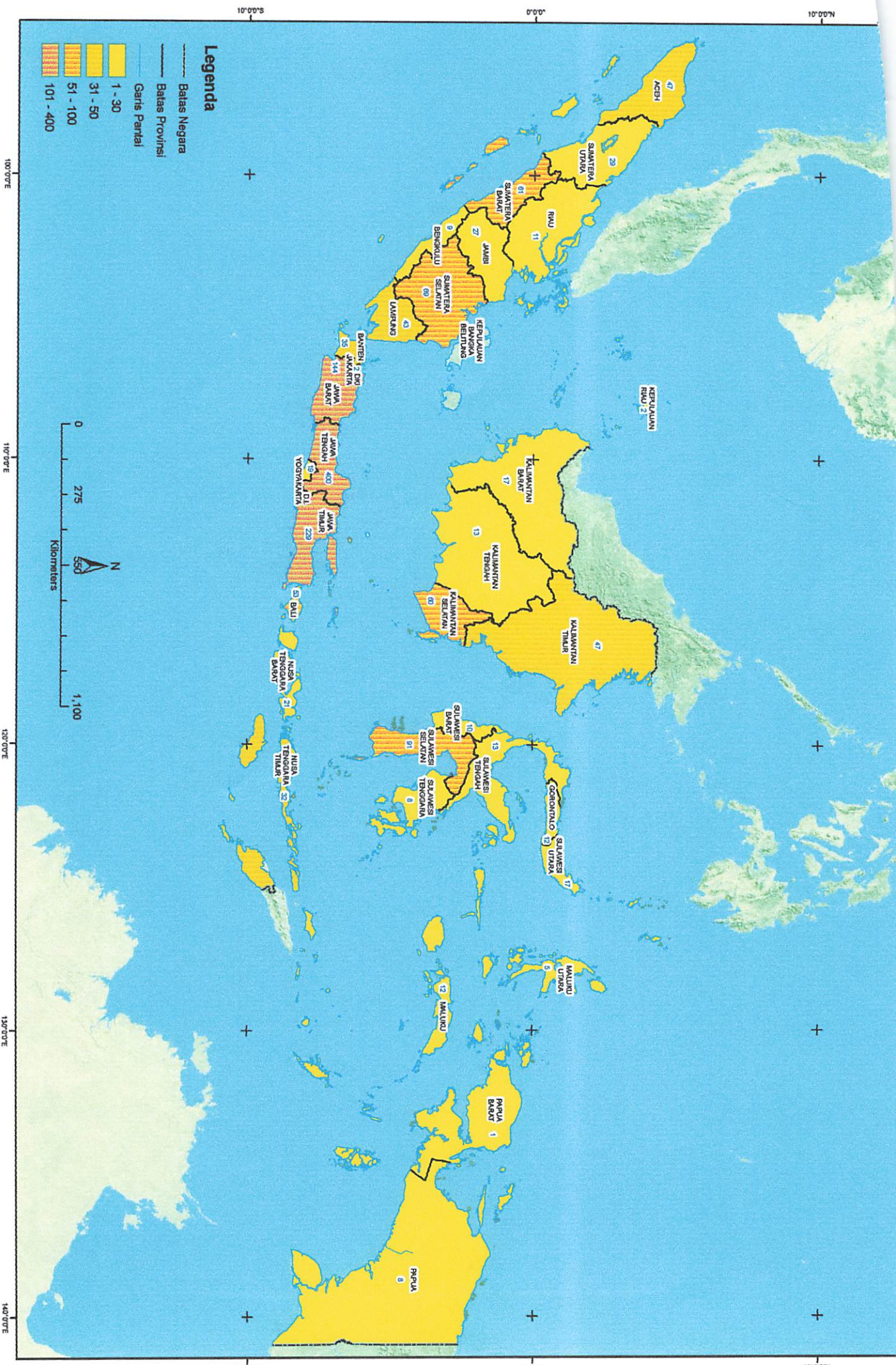
Legenda

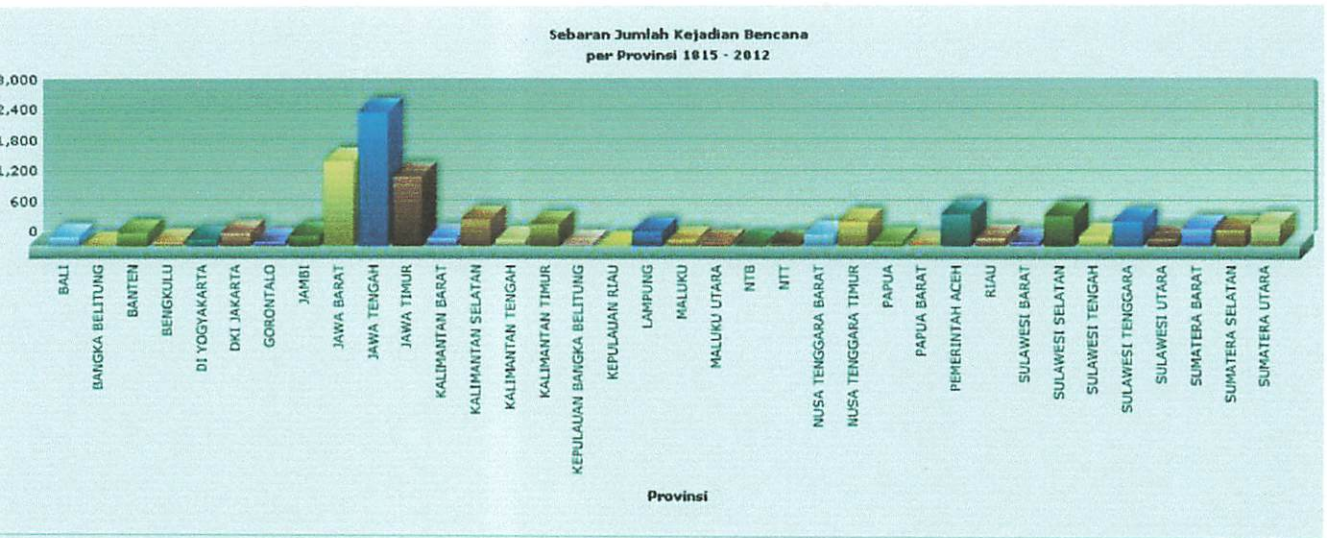
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Garis Pantai
- 1 - 30
- 31 - 50
- 51 - 100
- 101 - 400

100°0'0"E 110°0'0"E 120°0'0"E 130°0'0"E 140°0'0"E

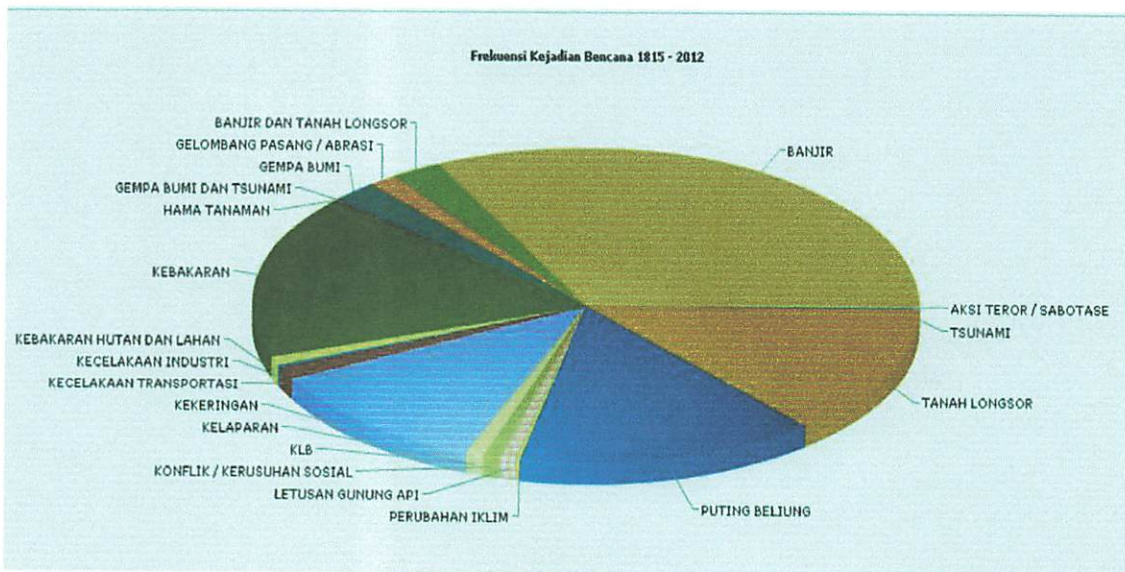
0°0'0"N

0°0'0"N





Gambar 5.19
Diagram Sebaran Kejadian Bencana Perpropinsi
Tahun 1815 – 2012 (DIBI.BNPNB)



Gambar 5.20
Diagram Frekuensi Kejadian Bencana Perpropinsi
Tahun 1815 – 2012 (DIBI.BNPNB)

Maka dapat disimpulkan bahwa dari kajian regional tentang daerah rawan bencana dari enam kategori bencana alam yang ditentukan oleh peneliti, Kota Palangkaraya terbilang masih aman sehingga layak dikembangkan menjadi Kota Pusat Pemerintahan NKRI.



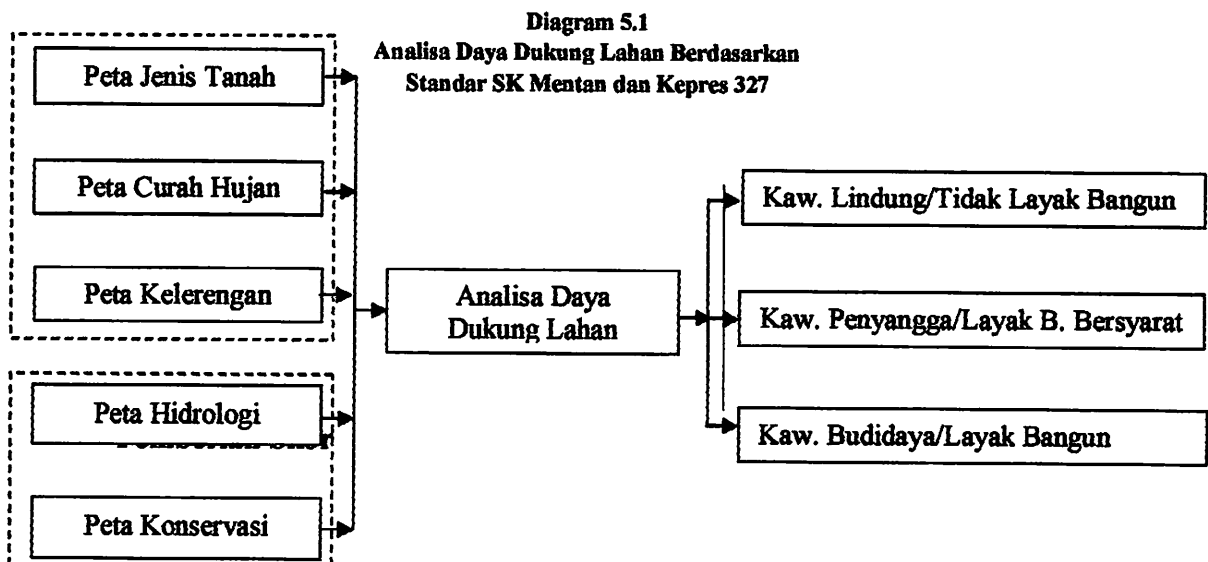
5.2. Analisa Fisik Dasar

Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan yang dapat menghasilkan sesuatu yang berguna sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah serta dapat dipertanggung jawabkan oleh perencana itu sendiri.

Analisa fisik dasar merupakan salah satu faktor paling penting dalam menentukan kelanjutan pengembangan daerah tersebut. Analisa fisik dasar yang akan dibahas terdiri dari analisa daya dukung lahan, kelerengan optimum, daya tampung maksimum. Data-data yang digunakan dalam menganalisa fisik dasar antarlain topografi, curah hujan, jenis tanah, hidrologi dan pola penggunaan lahan eksisting.

5.2.1. Analisa Daya Dukung Lahan

Dalam menganalisa daya dukung lahan standar yang digunakan adalah SK Mentan No.837 Tahun 1980 dan Kepres Tahun 1990. Analisa daya dukung lahan yang dilakukan menghasilkan 3 fungsi kawasan antarlain yaitu kawasan lindung/lahan tidak layak bangun, kawasan penyangga/lahan layak bangun bersyarat dan kawasan budidaya/lahan layak bangun. Data yang dibutuhkan untuk menganalisis daya dukung lahan ini diperoleh dari hasil survey primer maupun sekunder yang telah dilakukan. Dengan menggunakan standar diatas tersebut akan dapat diketahui daerah yang layak untuk dikembangkan sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Dibawah ini adalah diagram alur proses analisis daya dukung lahan.



Skor nilai dilakukan untuk menentukan klasifikasi pada peta, pemberian skor nilai pada ke tiga peta fisik dasar (Topografi, Curah Hujan dan Jenis Tanah). Dilakukan dengan mengacu pada standar SK Mentan No.837, adapun skor nilai pada ketiga peta fisik dasar adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Skor Nilai untuk Topografi / Kelerengan

Topografi merupakan kondisi fisik permukaan tanah baik bentuk maupun karakteristik. Topografi merupakan faktor yang paling penting, karena dapat menentukan jenis tanah, dan daerah yang termasuk dalam kawasan konservasi. Sesuai dengan standar SK Mentan No.837 Tahun 1980 untuk skor nilai topografi yang ada di Kota Palangkaraya yaitu sebagai berikut :

- Datar : 0 – 8 % Nilai Skor 20
- Landai : 15 – 25 % Nilai Skor 60
- Agak Curam : 25 – 45 % Nilai Skor 80

b. Pemberian Skor Nilai untuk Curah Hujan

Curah hujan merupakan gambaran mengenai kondisi air hujan yang terjadi dalam setiap musimnya. Dari curah hujan ini dapat menentukan tingkat kesuburan tanah jika curah hujan lebih tinggi dalam seharusnya maka tingkat kesuburan tanahnya semakin tinggi. Sesuai dengan standar SK Mentan No.837 Tahun 1980 untuk skor nilai curah hujan yang ada di Kota Palangkaraya yaitu sebagai berikut :

- Sangat Rendah : 0 - 13,06 ^{mm}/hari Nilai Skor 10

c. Pemberian Skor Nilai untuk Jenis Tanah

Jenis tanah merupakan gambaran mengenai jenis atau keadaan tanah suatu wilayah dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu ketersediaan air tanah, jenis kesuburan tanah, serta kekuatan tanah dalam menanggung bangunan yang berada di atasnya. Sesuai dengan SK Mentan No.837, untuk skor nilai jenis tanah yang ada di Kota Palangkaraya yaitu sebagai berikut :

- Regosol : Nilai Skor 75
- Orgonosol : Nilai Skor 75
- Aluvial : Nilai Skor 15

- Podsoil : Nilai Skor 60
- Podsolik Kuning : Nilai Skor 60
- Litosol : Nilai Skor 75

Setelah diketahui skor nilai pada masing-masing peta, selanjutnya menjumlahkan ketiga skor nilai pada peta tersebut sehingga dapat ditetapkan daya dukung lahan sementara, selanjutnya hasil analisa sementara dioverlay kembali dengan peta hidrologi dan peta konservasi, yang didalamnya berisikan tentang sempadan sungai dan konservasi, dengan jarak 50 meter kiri kanan sungai untuk sungai kecil dan 100 meter untuk sungai besar.

Dari hasil overlay tersebut dapat ditetapkan kawasan berdasarkan SK Mentan No.837 Tahun 1980 dan Kepres Tahun 1990 yang dibagi dalam 3 kriteria yaitu kawasan lindung/lahan tidak layak bangun seluas 264,85 Km², kawasan penyangga/lahan layak bangun bersyarat seluas 82,06 Km² dan kawasan budidaya/lahan layak bangun seluas 2.331,61 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2 dan peta 5.1.

Tabel 5.2
Daya Dukung Lahan Perkecamatan/Km² Kota Palangkaraya
Tahun 2008

No.	Kecamatan	Lindung	Penyangga	Budidaya	Jumlah
1	Pahandut	9,38	0,00	107,87	117,25
2	Jekan Raya	4,72	0,00	347,90	352,62
3	Bukit Batu	38,88	2,19	530,93	572,00
4	Sebangau	160,64	0,00	422,86	583,50
5	Rakukmpit	51,22	79,87	922,05	1.053,14
Jumlah		264,85	82,06	2.331,61	2.678,51

Sumber : Hasil Analisa

5.2.2. Analisa Kelerengan Optimum

Analisa kelerengan optimum dilakukan untuk mengetahui kondisi kelerengan yang cocok untuk pembangunan dengan cara mengetahui tingkat kelerengan yang sesuai dengan standar skala Mabryy (1972).

Lereng adalah perbedaan ketinggian antara dua tempat yang berbeda yang dinyatakan dalam persentase. Artinya berupa meter beda tinggi antar dua tempat dibagi dengan jarak kedua tempat tersebut. Lereng merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan tanah untuk menjaga kelestarian tanah. Sehingga dalam pengelolaan akan memerlukan syarat-syarat tertentu pada kisaran lereng tertentu pula, agar tanah tersebut dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

Dalam analisis kemiringan lereng digunakan standar ketentuan skala Maberry (1972) yang dapat menentukan kisaran lereng optimum untuk penempatan berbagai kegiatan pengembangan di suatu wilayah perencanaan. Kegiatan yang ada dapat diklasifikasikan dalam 10 kegiatan, yang meliputi ; rekreasi umum, bangunan terhitung dengan persyaratan teknis, kegiatan perkotaan, perumahan konvensional, pusat-pusat perdagangan serta sarana dan prasarana pelayanan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Kisaran Lereng Optimum Kegiatan Pembangunan

No	Peruntukan	Kelas Sudut Lereng (%)						
		0-3	3-8	5-10	10-15	15-30	30-70	>70
1.	Rekreasi Umum	X	X	X	X	X	X	X
2.	Bangunan Terhitung	X	X	X	X	X		
3.	Penggunaan Kota Umum	X	X	X				
4.	Jalan Kota	X	X	X				
5.	Sistem Septik	X	X					
6.	Perumahan Konvensional	X	X	X	X			
7.	Pusat-pusat Perdagangan	X	X					
8.	Jalan Raya	X	X					
9.	Lapangan Terbang	X						
10.	Jalan Lain	X	X	X	X			

Sumber : Skala Maberry (1972)

Kawasan potensi pengembangan perkotaan yang terdapat di wilayah penelitian meliputi sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, sedangkan kawasan kendala atau limitasi sangat minim hanya terdapat dalam skala kecil di Kecamatan Bukit Batu dengan luas 2,21 Km² yang terdiri dari daerah perbukitan dan pergunungan serta Kecamatan Rakumpit dengan luas 6,37 Km². Dari hasil analisa kelerengan optimum menyatakan bahwa sebagian besar luas lahan di Kota Palangkaraya layak untuk dikembangkan sebagai daerah perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Luas Kelerengan Kota Palangkaraya/Km² Tahun 2008

No.	Kecamatan	0-8 % (Km ²)	15 - 25 % (Km ²)	25 - 45 % (Km ²)	Jumlah (Km ²)
1	Pahandut	117,25	0,00	0,00	117,25
2	Jekan Raya	352,62	0,00	0,00	352,62
3	Bukit Batu	569,79	0,00	2,21	572,00
4	Sebangau	583,50	0,00	0,00	583,50
5	Rakumpit	959,83	86,94	6,37	1.053,14
Jumlah		2.582,99	86,94	8,58	2.678,51

Sumber : Hasil Analisa

5.2.3 Analisa Daya Tampung Maksimum

Analisa daya tampung maksimum penduduk bertujuan untuk mengetahui daya tampung maksimum suatu wilayah perencanaan terhadap jumlah penduduk. Metode yang digunakan dalam menganalisa daya tampung ini dengan perbandingan unit untuk rumah kecil, sedang dan besar adalah 6 : 3 : 1, RTH dan Saprass. Adapun asumsi yang digunakan dalam menganalisa daya tampung adalah sebagai berikut :

- Luas kapling eksisting tipe besar 200 m², tipe sedang 100 m², dan tipe kecil 70 m², maka totalnya 370 m². Asumsi 1 keluarga (5 orang)
- Lahan yang dibutuhkan untuk fungsi RTH berdasarkan standar PU dan UUD 26 Pasal 29 Ayat 2 yaitu proporsi RTH pada wilayah kota paling minim 30 % dari total luas wilayah Kota.
- Luas lahan yang dibutuhkan untuk fungsi prasarana dan sarana 70 %. Yang dibagi lagi untuk fungsi sarana khususnya permukiman/perumahan 60 %,

maka yang tersisa adalah 40 % untuk sarana dan prasarana diluar fungsi permukiman/perumahan.

Adapun analisa daya tampung pada masing-masing Kecamatan di Kota Palangkaraya adalah sebagai berikut :

a) Kecamatan Pahandut

- Ruang Terbuka Hijau = $30 \% \times 10.787 \text{ ha}$ = 3.236,02 ha
- Sarana Prasarana = $10.787 \text{ ha} - 3.236,02 \text{ ha}$ = 7.550,72 ha
= $40 \% \times 7.550,72 \text{ ha}$ = 3.020,29 ha
- Perumahan = $7.550,72 \text{ ha} - 3.020,29 \text{ ha}$ = 4.530,43 ha
= 4.530,43 ha (45.304.320 m²)
= $45.304.320 \text{ m}^2 : 370$
= 122.444 m²
- Daya Tampung = $(122.444 \times 0.6) \times 5$ = 367.332 jiwa
= $(122.444 \times 0.3) \times 5$ = 183.666 jiwa
= $(122.444 \times 0.1) \times 5$ = 61.222 jiwa

Berdasarkan hasil analisa daya tampung Kecamatan Pahandut, dengan luas wilayah layak bangun 10.787 ha penduduk yang dapat ditampung sebesar 612.221 jiwa, untuk kapling besar 61.222 jiwa, kapling sedang 183.666 jiwa dan kapling kecil 367.332 jiwa.

b) Kecamatan Jekan Raya

- Ruang Terbuka Hijau = $30 \% \times 34.790 \text{ ha}$ = 10.437,12 ha
- Sarana Prasarana = $34.790 \text{ ha} - 10.437,12 \text{ ha}$ = 24.353,28 ha
= $40 \% \times 24.353,28 \text{ ha}$ = 9.741,31 ha
- Perumahan = $24.353,28 \text{ ha} - 9.741,31 \text{ ha}$ = 14.611,97 ha
= 14.611,97 ha (146.119.701 m²)
= $146.119.701 \text{ m}^2 : 370$
= 394.918 m²
- Daya Tampung = $(394.918 \times 0.6) \times 5$ = 1.184.754 jiwa

$$= (394.918 \times 0.3) \times 5 = 592.377 \text{ jiwa}$$

$$= (394.918 \times 0.1) \times 5 = 197.459 \text{ jiwa}$$

Berdasarkan hasil analisa daya tampung Kecamatan Jekan Raya, dengan luas wilayah layak bangun 34.790 ha penduduk yang dapat ditampung sebesar 1.974.591 jiwa, untuk kapling besar 197.459 jiwa, kapling sedang 592.377 jiwa dan kapling kecil 1.184.754 jiwa.

c) Kecamatan Sebangau

- Ruang Terbuka Hijau = $30 \% \times 42.285 \text{ ha}$ = 12.685,70 ha

- Sarana Prasarana = $42.285 - 12.685 \text{ ha}$ = 29.559,97 ha

$$= 40 \% \times 29.559,97 \text{ ha} = 11.839,99 \text{ ha}$$

- Perumahan = $29.559,97 - 11.839,99 \text{ ha}$ = 17.759,98 ha

$$= 17.759,98 \text{ ha} (177.559.984 \text{ m}^2)$$

$$= 177.559.984 \text{ m}^2 : 370$$

$$= 480.000 \text{ m}^2$$

- Daya Tampung = $(480.000 \times 0.6) \times 5 = 1.439.999 \text{ jiwa}$

$$= (480.000 \times 0.3) \times 5 = 719.999 \text{ jiwa}$$

$$= (480.000 \times 0.1) \times 5 = 240.000 \text{ jiwa}$$

Berdasarkan hasil analisa daya tampung Kecamatan Sebangau, dengan luas wilayah layak bangun 42.285 ha penduduk yang dapat ditampung sebesar 2.399.998 jiwa, untuk kapling besar 240.000 jiwa, kapling sedang 719.999 jiwa dan kapling kecil 1.439.999 jiwa.

d) Kecamatan Bukit Batu

- Ruang Terbuka Hijau = $30 \% \times 53.093,72 \text{ ha}$ = 15.927,82 ha

- Sarana Prasarana = $53.093,72 - 15.927,82 \text{ ha}$ = 37.164,90 ha

$$= 40 \% \times 37.164,90 \text{ ha} = 14.865,96 \text{ ha}$$

- Perumahan = $37.164,90 - 14.865,96 \text{ ha}$ = 22.298,03 ha

$$= 22.298,03 \text{ ha} (222.989.415 \text{ m}^2)$$

$$= 222.989.415 \text{ m}^2 : 370$$

$$= 602.674 \text{ m}^2$$

- Daya Tampung = $(602.674 \times 0.6) \times 5 = 1.808.022$ jiwa
- = $(602.674 \times 0.3) \times 5 = 904.011$ jiwa
- = $(602.674 \times 0.1) \times 5 = 301.337$ jiwa

Berdasarkan hasil analisa daya tampung Kecamatan Bukit Batu, dengan luas wilayah layak bangun 53.093,72 ha penduduk yang dapat ditampung sebesar 3.013.370 jiwa, untuk kapling besar 301.337 jiwa, kapling sedang 904.011 jiwa dan kapling kecil 1.808.022 jiwa.

e) Kecamatan Rakumpit

- Ruang Terbuka Hijau = $30 \% \times 92.205,16 \text{ ha} = 27.661.55 \text{ ha}$
- Sarana Prasarana = $92.205,16 - 27.661.55 \text{ ha} = 64.543.61 \text{ ha}$
= $40 \% \times 64.543.61 \text{ ha} = 25.817.44 \text{ ha}$
- Perumahan = $64.543.61 - 25.817.44 \text{ ha} = 38.726,17 \text{ ha}$
= $38.726,17 \text{ ha} (387.261.673 \text{ m}^2)$
= $3387.261.673 \text{ m}^2 : 370$
= $1.046.653 \text{ m}^2$
- Daya Tampung = $(1.046.653 \times 0.6) \times 5 = 3.139.960$ jiwa
= $(1.046.653 \times 0.3) \times 5 = 1.569.980$ jiwa
= $(1.046.653 \times 0.1) \times 5 = 523.327$ jiwa

Berdasarkan hasil analisa daya tampung Kecamatan Rakumpit, dengan luas wilayah layak bangun 92.089,33 ha penduduk yang dapat ditampung sebesar 5.223.266 jiwa, untuk kapling besar 523.327 jiwa, kapling sedang 1.569.980 jiwa dan kapling kecil 3.139.960 jiwa.

Setelah dilakukan analisa daya tampung maksimum disetiap Kecamatan terlihat bahwa daerah yang memiliki daya tampung maksimum tertinggi terdapat pada Kecamatan Rakumpit, ini didukung adanya luas lahan yang layak bangun

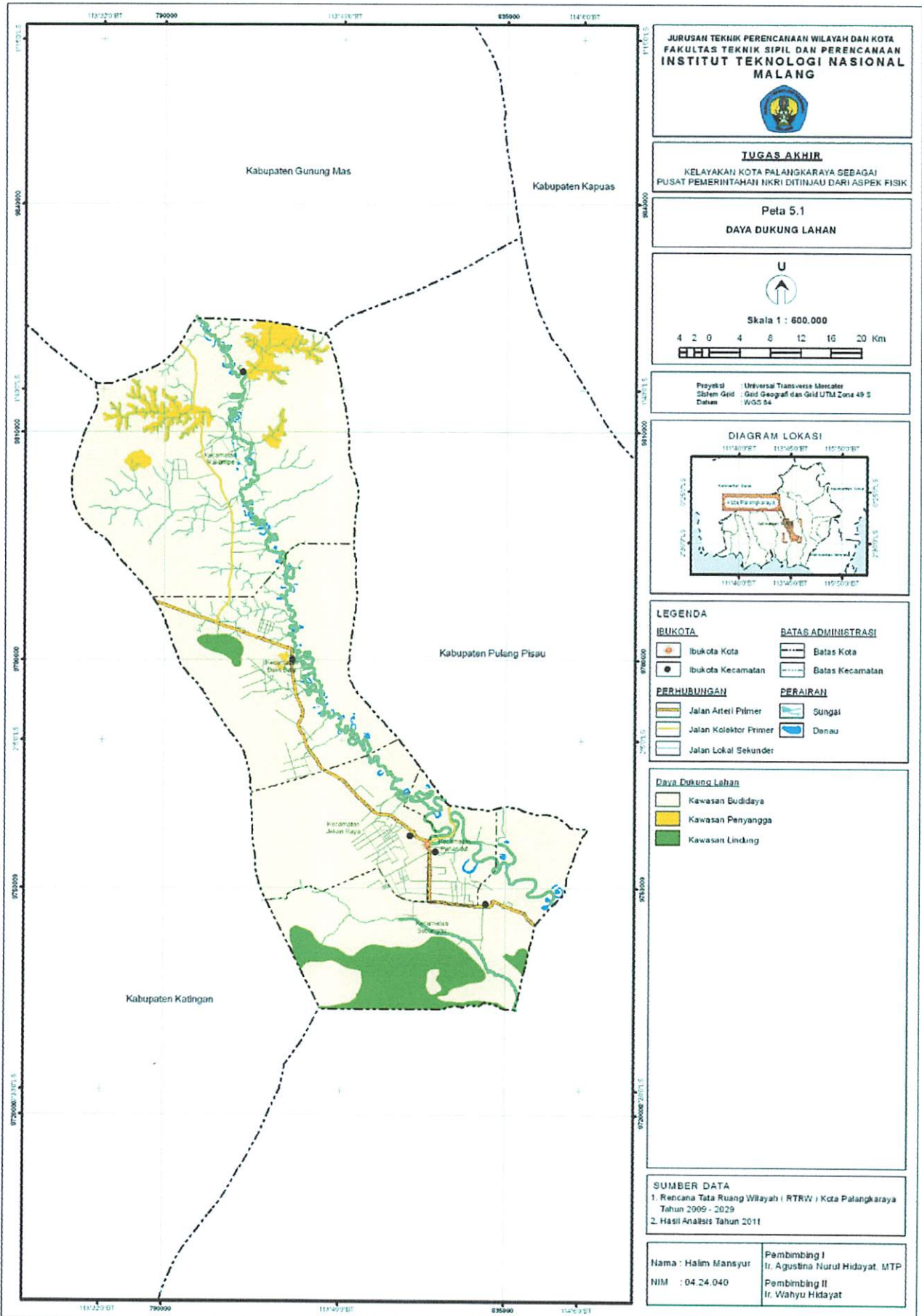
paling tinggi sedangkan untuk daya tampung maksimum terendah terdapat pada Kecamatan Pahandut karena luas lahan yang layak bangun paling rendah. Jadi hasil jumlah keseluruhan daya tampung maksimum dari tiap-tiap Kecamatan yang merupakan daya tampung maksimum Kota Palangkaraya sebesar 13.233.445 jiwa, sedangkan jumlah penduduk eksisting 197.534 jiwa, dan jumlah penduduk proyeksi migrasi untuk yang akan datang (tahun 2025) sebesar 190.160 jiwa, jadi total jumlah penduduk 387.694 jiwa. Maka dapat disimpulkan Kota Palangkaraya dapat menampung kegiatan penduduk yang sangat besar. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan Peta 5.2.

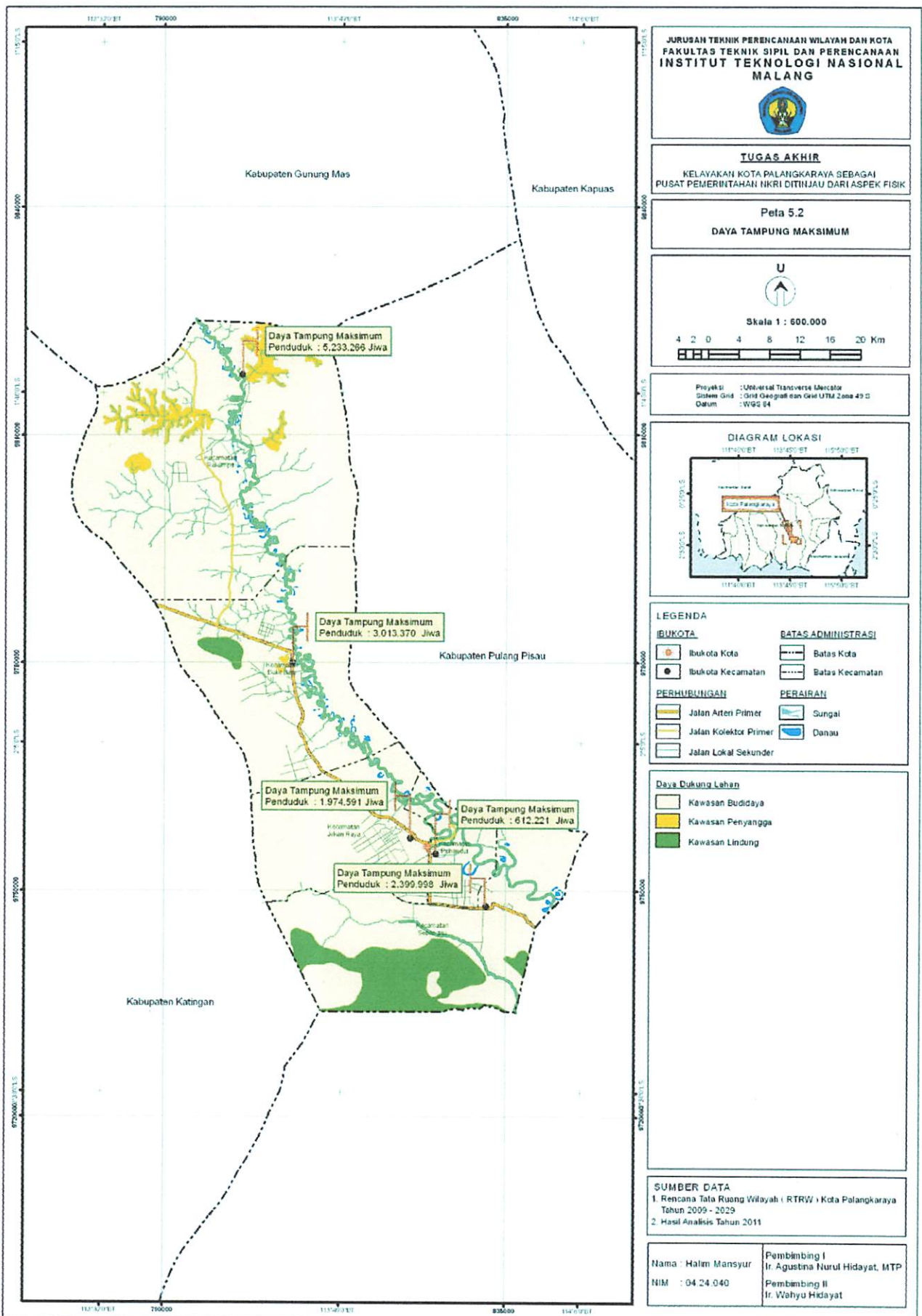
Tabel 5.5
Daya Tampung Maksimum Kota Palangkaraya Tahun 2008

No	Daya Tampung Maksimum	Kecamatan				
		Pahandut	Jekan Raya	Sebangau	Bukit Batu	Rakumpit
1	Luas Lahan layak Bangun (Ha)	10.787	34.790	42.285	53.093,72	92.205,16
2	RTH (Ha) 30 %	3.236,02	10.437,12	12.685,70	15.927,82	27.661.55
3	Sapras (Ha) 70 %	3.020,29	9.741,31	11.839,99	14.865,96	25.817.44
4	Perumahan (m ²)	122.444	394.918	480.000	602.674	1.046.653
5	Daya Tampung (Jiwa)	612.221	1.974.591	2.399.998	3.013.370	5.223.266

Sumber : Hasil Analisa

Secara umum Kota Palangkaraya memiliki daya dukung lahan khususnya kawasan budidaya yang cukup luas, kelerengan optimum pembangunan yang cocok untuk perkotaan serta daya tampung maksimum yang ideal untuk dikembangkan menjadi Kota Pusat Pemerintahan NKRI.





5.3. Analisa Kependudukan

Analisa kependudukan dilakukan untuk mengetahui kondisi kuantitas penduduk, secara umum dibagi dalam beberapa tahap analisa yaitu menganalisa pertumbuhan penduduk, proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk serta migrasi penduduk yang diprediksikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pemerintahan Negara.

Analisa yang pertama yang dilakukan adalah mengetahui pertumbuhan penduduk Kota Palangkaraya dalam 5 tahun terakhir, menggunakan rumus pertumbuhan penduduk dibawah ini.

$$r = \frac{\text{Jumlah penduduk tahun akhir} - \text{Jumlah penduduk tahun awal}}{\text{Jumlah penduduk tahun awal}} \times 100$$

Dari hasil analisa yang dilakukan pertumbuhan penduduk Kota Palangkaraya dalam 5 tahun terakhir adalah 0,012 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Pertumbuhan Penduduk Kota Palangkaraya

No	Kecamatan	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	Pertumbuhan (%)
1	Pahandut	63.530	66.748	63.717	65.572	66.316	0,010
2	Sebangau	10.761	11.477	10.793	11.107	12.709	0,038
3	Jekan Raya	93.324	91.139	93.600	96.324	97.411	0,010
4	Bukit Batu	11.793	11.306	11.828	12.172	11.678	-0,003
5	Rakumpit	2.856	2.581	2.865	2.948	2.900	0,001
Total		182.264	183.251	182.803	188.123	191.014	0,012

Sumber : Hasil Analisa

5.3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan penduduk kedepan dan digunakan untuk memproyeksikan kebutuhan- kebutuhan pembangunan seperti pembangunan fasilitas, utilitas serta sarana prasarana yang mendukung kegiatan sosial penduduk di Kota Palangkaraya.

Analisis dilakukan dengan menggunakan Metode Ekponensial.

Rumus : $P_n = P_o \times (1+r)^t$

Keterangan :

P_n : Jumlah penduduk proyeksi

P_o : Jumlah penduduk tahun akhir

r : Angka pertumbuhan rata-rata penduduk

t : Periode waktu dalam tahun

Dari hasil analisa yang dilakukan jumlah penduduk Kota Palangkaraya pada tahun 2011 berjumlah 197.534 jiwa, 2013 bertambah menjadi 202.058 Jiwa dan masing-masing pada tahun 2018, 2023, dan 2028 berjumlah 217.932 jiwa, 227.277 jiwa, 241.748 Jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 0,012 %. Untuk Jumlah peduduk terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya yang pada tahun 2028 berjumlah 119.898 jiwa sedangkan untuk jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Rakumpit dengan jumlah penduduk 2.961 Jiwa pada tahun 2028. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Palangkaraya

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk					
		2008	2011	2013	2018	2023	2028
1	Pahandut	66.316	68.333	69.712	73.281	77.034	80.978
2	Sebangau	12.709	14.227	15.339	22.344	22.344	26.968
3	Jekan Raya	97.411	100.494	10.2603	10.8071	11.3831	11.9898
4	Bukit Batu	11.678	11.565	11.490	11.304	11.122	10.943
5	Rakumpit	2.900	2.915	2.915	2.930	2.946	2.961
Total		191.014	197.534	202.058	217.932	227.277	241.748

Sumber : Hasil Analisa

5.3.2 Kepadatan Penduduk

Analisa kepadatan penduduk yang digunakan untuk mencari tingkat kepadatan penduduk perkecamatan di Kota Palangkaraya. Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}}$$

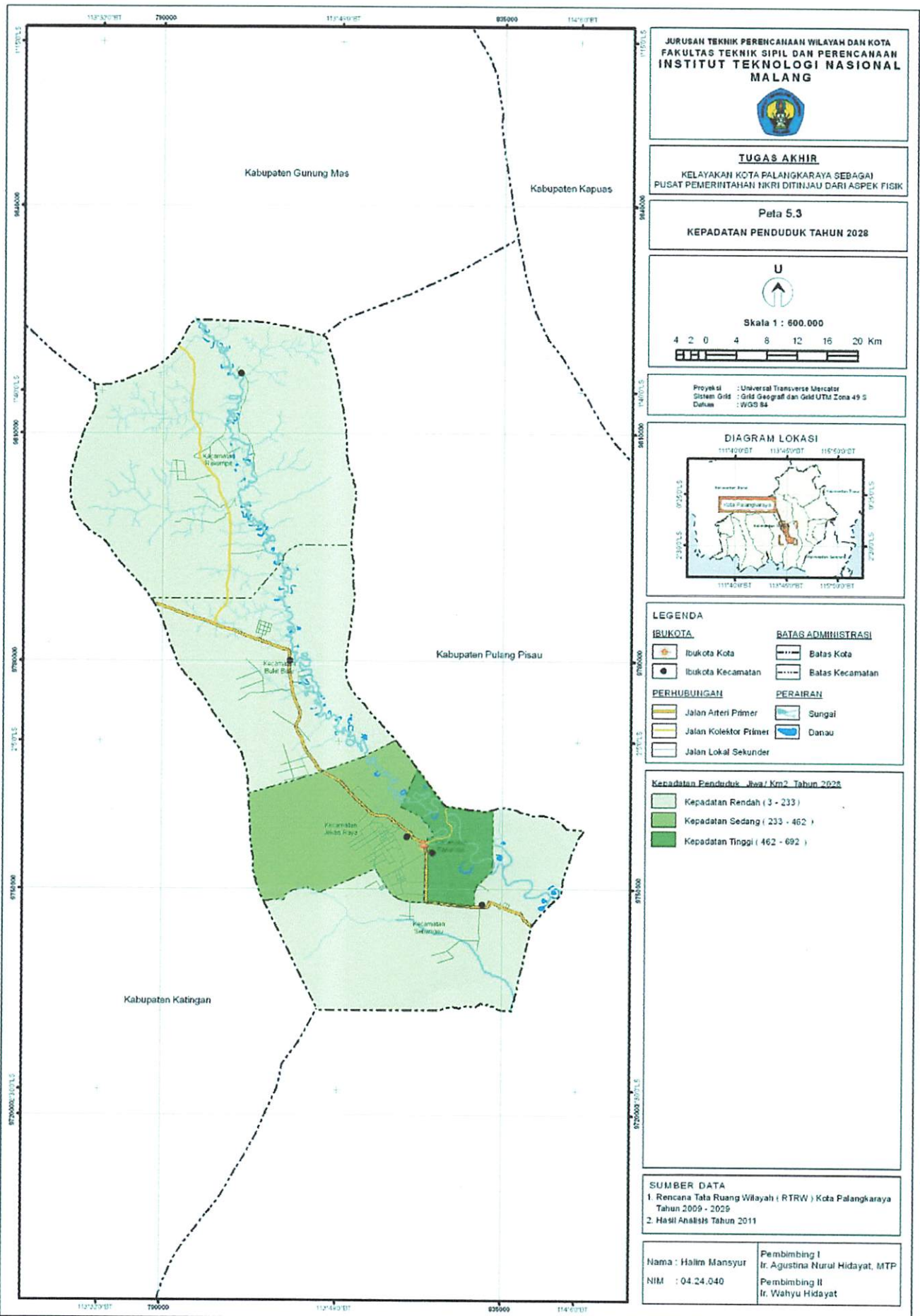
Dari hasil analisa yang dilakukan menyatakan bahwa Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pahandut yang pada tahun 2011 dengan tingkat kepadatan 583 Jiwa/km² dan kepadatan terendah berada pada Kecamatan Rakumpit dengan tingkat kepadatan 3 Jiwa/km², kemudian pada tahun 2028 Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pahandut dengan tingkat kepadatan 691 jiwa/km² dan kepadatan terendah berada pada Kecamatan Rakumpit dengan tingkat kepadatan 3 jiwa/ km² pada tahun 2028. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.8 dan Peta 5.3.

Tabel 5.8
Proyeksi Tingkat Kepadatan Penduduk Perkecamatan Kota Palangkaraya

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk					
			2008	2011	2013	2018	2023	2028
1	Pahandut	117,25	566	583	595	625	657	691
2	Sebangau	583,5	22	24	26	38	38	46
3	Jekan Raya	352,62	276	285	291	306	323	340
4	Bukit Batu	572	20	20	20	20	19	19
5	Rakumpit	1.053,14	3	3	3	3	3	3
Total		2678,51	71	74	75	81	85	90

Sumber : Hasil Analisa

Dengan pertumbuhan penduduk yang kecil sekitar 0.012 % serta kepadatan penduduk yang rendah yaitu 71 jiwa/Km (2008) maka dapat disimpulkan Kota Palangkaraya masih sangat mampu menampung penduduk dalam skala yang besar.



5.3.3 Analisa Migrasi Penduduk

Analisa ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah lembaga negara, partai politik dan lembaga asing serta jumlah sdm dan pegawainya kemudian dikalikan dengan standar keluarga (4 Orang/Keluarga).

1. Lembaga Tinggi Negara

Lembaga tinggi Negara yang dijelaskan didalam laporan ini antarlain, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, PRESIDEN. Asumsi yang digunakan yaitu satu keluarga berjumlah (4 orang). Karena keterbatasan data penulis coba menetapkan bahwa jumlah pegawai untuk biro berjumlah 55 pegawai (sumber : Biro kesekretariatan MK 55 orang). Total jumlah pegawai Lembaga Tinggi Negara berjumlah 10.812 jiwa kemudian dikalikan dengan standar jumlah keluarga menjadi 43.248 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.9, hingga Tabel 5.15.

Tabel 5.9
Proyeksi Jumlah Pegawai/ SDM Serta Penduduk MPR

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
I	MPR			
	Anggota MPR	678	4	2.712
	Sekjen	1	4	4
	Wakil sekjen	1	4	4
	Biro Administrasi	55	4	220
	Biro Persidangan	55	4	220
	Biro Rumah Tangga	55	4	220
	Biro Keuangan	55	4	220
	Biro Sekertariatan Pimpinan	55	4	220
	Biro Hubungan Masyarakat	55	4	220
	Biro Pusat Pengkaji	55	4	220
	Jumlah Total Penduduk	1.065	4	4.260

Sumber : www.MPR.RI.Go.Id Tahun 2010, Hasil Analisa

Tabel 5.10
Proyeksi Penduduk berdasarkan Jumlah Pegawai DPR

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
II	DPR			
	Anggota MPR	550	4	2.200
	Sekjen	1	4	4
	Wakil sekjen	1	4	4
	Jumlah Pegawai Sckjen	1.868	4	7.472
	Jumlah Tenaga Fungsional Sekjen	185	4	740
	Jumlah Tenaga Ahli	759	4	3.036
	Jumlah Total Penduduk	3.364	4	13.456

Sumber : Renstra DPR RI, www.DPR RI.go.id 2010-2014, Hasil Analisa

Tabel 5.11
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pegawai DPD

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
III	DPD			
	Anggota DPD	128	4	512
	Sekjen	1	4	4
	Wakil sekjen	1	4	4
	Biro Perancangan dan Keuangan	55	4	220
	Biro sekretariat Kepemimpinan	55	4	220
	Biro Persidangan II	55	4	220
	Biro Persidangan I	55	4	220
	Biro Umum	55	4	220
	Biro Administrasi	55	4	220
	Pusat Kajian Daerah	65	4	260
	Pusat data Informasi	65	4	260
	Pusat Kebijakan Hukum	65	4	260
	Jumlah Total Penduduk	655	4	1.180

Sumber : www.DPD RI.Go.id, Asumsi Peneliti, Hasil Analisa

Tabel 5.12
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pegawai BPK

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
IV	BPK			
	Anggota BPK	9	4	36
	Sekretariat	609	4	2.436
	Inspektur Utama	24	4	96
	Dirut Perencanaan	100	4	400
	Dirut Pengembangan Hukum	100	4	400
	Tenaga Ahli Badan	14	4	56
	Staf Ahli	4	4	16
	Tenaga Ahli Sekjen	3	4	12
	Auditor Keuangan	7	4	28
	Jumlah Total Penduduk	870	4	3.480

Sumber : www.BPK RI.Go.Id, Hasil Analisa

Tabel 5.13
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pegawai KePresidenan

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
V	Presiden	1	4	4
	Wakil Presiden	1	4	4
	Staf Ahli Presiden	12	4	48
	Tim Dokter Presiden	7	4	28
	Pasukan Cakrabirawa/ Paspampres	2.500	4	10.000
	Jumlah Total Penduduk	2.521	4	10.084

Sumber : Wikipedia 2010 dan www.Tempointreaktif.com Tahun 2002

Tabel 5.14
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pegawai MA

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
V	Mahkama Agung	1	4	4
	Wakil MA	1	4	4
	Laki-laki	1.091	4	4.364
	Perempuan	514	4	2.056
	Jumlah Total Penduduk	1.607	4	6.428

Sumber : Laporan Tahunan MA 2010, www.Mahkama Agung.Go.Id

Tabel 5.15
 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pegawai MK

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
V	Mahkama Konstitusi	1	4	4
	Wakil Ketua	1	4	4
	Hakim Anggota	9	4	36
	Biro Sekertariatan	55	4	220
	Panitera	1	4	4
	Biro Perencanaan dan Keuangan	99	4	396
	Biro Umum	227	4	908
	Pusata Penelitian dan Pengkajian	43	4	172
	Biro Humas dan Protokol	62	4	248
	Biro Perkara dan Peradilan	55	4	220
	Jabatan Panitera	5	4	20
Jumlah Total Penduduk		558	4	2232

Sumber : Kompilasi Setjen Mahkamah Konstitusi dan Penelitian Universitas Pembangunan Nasional 2010, Hasil Analisa

2. Lembaga Kementerian

Lembaga kementerian yang ada dilingkungan Pemerintahan Republik Indonesia berjumlah 33 kementerian. Berdasarkan hasil proyeksi yang dilakukan jumlah pegawai/sdm di 33 kementerian berjumlah 19.152 jiwa kemudian dikalikan dengan standar keluarga (4 orang) menjadi 76.608 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.16.

3. Lembaga Setingkat Menteri

Lembaga yang setingkat menteri yang dijelaskan dibawah ini antarlain, Mabes TNI, Mabes POLRI, dan Kejaksaan Agung. Asumsi untuk lembaga setingkat menteri yaitu 25 orang perbagian dalam kepala staf dan Danjen. Jumlah pegawai di lembaga setingkat menteri dari hasil perhitungan berjumlah 1.437 jiwa kemudian dikalikan dengan standar keluarga (4 orang) menjadi 5.892 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.17, 5.18, dan 5.19.

4. Lembaga Non Departemen

Lembaga non departemen yang dimaksudkan dibawah ini lembaga yang bukan dibawah Departemen atau Kementerian. Lembaga non departemen yang diarahkan ke Pusat Pemerintahan merupakan badan atau lembaga yang ditetapkan oleh peneliti merupakan lembaga yang secara langsung dibutuhkan pemerintah secara cepat antaralain, BIN, KPU, KPK , PPATK, BPS, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Indonesia, Perpustakaan Nasional Indonesia serta media massa pemerintah yaitu TVRI dan RRI (asumsi 86 Orang).

Dari hasil analisa yang dilakukan jumlah pegawai/sdm lembaga non departemen berjumlah 6.550 jiwa kemudian dikalikan dengan standar keluarga (4 orang) menjadi 26.200 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.20.

5. Jumlah Pegawai/SDM Lembaga Negara

Secara keseluruhan jumlah pegawai/sdm lembaga negara yang diproyeksikan bermigrasi ke Kota Palangkaraya bila terjadi pemindahan Pusat Pemerintahan NKRI berjumlah 37.772 jiwa kemudian dikalikan dengan standar jumlah keluarga menjadi 151.088 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.21.

Tabel 5.16
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pegawai Di Kementerian Republik Indonesia

No.	Nama Kementerian	Eselon		Eselon		Eselon		Eselon		Total
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1	Agama	10	5	46	-	152	-	445	-	658
2	Badan Usaha Milik Negara	6	5	19	-	45	-	105	-	180
3	Dalam Negeri	11	5	64	-	275	-	645	-	1.000
4	Energi Sumber Daya Mineral	9	5	46	-	181	-	417	-	658
5	Hukum dan Hak Asasi Manusia	11	5	67	-	234	-	676	-	993
6	Kebudayaan dan Pariwisata	7	4	40	-	143	-	348	-	542
7	Kehutanan	8	5	46	-	158	-	393	-	610
9	Kesehatan	8	5	52	-	189	-	457	-	711
10	Keuangan	13	5	103	-	441	-	1.569	-	2.131
11	Komunikasi dan Informatika	7	5	42	-	142	-	350	-	546

Bersambung . . .

Sambungan . . .

No.	Nama Kementerian	Eselon		Eselon		Eselon		Eselon		Total
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
12	Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah	8	5	38	-	112	-	245	-	408
13	Lingkungan Hidup	8	5	39	-	117	-	256	-	425
14	Luar Negeri	11	4	51	-	196	-	659	-	921
15	Pekerjaan Umum	9	5	50	-	197	-	471	-	732
16	Pembangunan Daerah Tertinggal	6	5	29	-	64	-	141	-	245
17	Pemberdayaan Perempuan dan PA.	6	5	29	-	66	-	145	-	251
18	Pemuda dan Olah Raga	6	4	28	-	86	-	193	-	317
19	Pendayagunaan Aparatur Negara & RB	7	5	34	-	77	-	93	-	216
20	Pendidikan Nasional	10	5	40	-	135	-	325	-	515
21	Perdagangan	10	4	49	-	180	-	439	-	682
22	Perencanaan Pembangunan Nasional	8	5	47	-	155	-	36	-	251
23	Perhubungan	9	5	46	-	166	-	403	-	629
24	Perindustrian	10	3	44	-	149	-	372	-	578
25	Pertahanan	10	-	50	-	171	-	492	-	723
26	Pertanian	13	5	69	-	244	-	592	-	923
27	Perumahan Rakyat	5	5	26	-	79	-	176	-	291
28	Riset dan Teknologi	6	5	27	-	92	-	196	-	326
29	Sosial	6	5	35	-	122	-	297	-	465
30	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	5	54	-	186	-	430	-	684
31	Kemenko Kesejahteraan Rakyat	8	7	32	-	68	-	153	-	268
32	Kemenko Perekonomian	7	6	34	-	72	-	164	-	283
33	Kemenko Polhukam	8	7	38	-	84	-	55	-	192
Subtotal		280	158	1.470	-	4.989	-	12.255	-	19.152

Sumber : www.kementerian PAN dan RB Tahun 2010, Hasil Analisa

Tabel 5.17
Proyeksi Jumlah Penduduk Mabes TNI

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
V	Mabes TNI	1	4	4
	Kasum	1	4	4
	Irjen	1	4	4
	Staf Ahli Panglima	5	4	20
	Asisten Panglima	5	4	20
	PA Sup POM	25	4	100
	Dansatkomlek	25	4	100
	Kapusdalops	25	4	100
	Kasetum	25	4	100
	Dandema	25	4	100
	Dansesko	25	4	100
	Danjen Akademi	25	4	100
	Kabais	25	4	100
	Danpaspampres	25	4	100
	Kababinkum	25	4	100
	kapuspen	25	4	100
	Kapuskes	25	4	100
	Kabarek	25	4	100
	Kapus Bintal	25	4	100
	Kapusku	25	4	100
	Kapusja	25	4	100
	Kampusinfoalta	25	4	100
	ka pmpp	25	4	100
	Kapusjianstra	25	4	100
	Kapus Bangpim	25	4	100
	Dan prcpb	25	4	100
	Dan ppre	25	4	100
	Dan Gartap	25	4	100
	Kasad	25	4	100
	Kasal	25	4	100
	Kasau	25	4	100
	Danjen Kopasus	25	4	100
	Jumlah Total Penduduk	688	4	2.752

Sumber : Mabes TNI dan Asumsi Peneliti 2011

Tabel 5.18
Proyeksi Jumlah Penduduk Mabes POLRI

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
V	Mabes POLRI	1	4	4
	Wakil	1	4	4
	Istwahlum	1	4	4
	sahli	5	4	20
	Srena	25	4	100
	Sops	25	4	100
	Ssdm	25	4	100
	Ssapas	25	4	100
	Korrimpims	25	4	100
	setum	25	4	100
	Yanma	25	4	100
	Div Hubinter	25	4	100
	Pus Dokkes	25	4	100
	Pus Keu	25	4	100
	Div Humas	25	4	100
	Div Kum	25	4	100
	Div Propam	25	4	100
	Stik	25	4	100
	Sespim	25	4	100
	Akpol	25	4	100
	Lemdikpol	25	4	100
	Baintelkam	25	4	100
	Bareskrim	25	4	100
	Baharkam	25	4	100
	Korp Brimob	25	4	100
	Jumlah Total Penduduk	533	4	2.132

Sumber : Mabes POLRI dan Asumsi Peneliti 2011

Tabel 5.19
Proyeksi Jumlah Penduduk KEJAGUNG

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
V	KEJAGUNG	1	4	4
	Wakil	1	4	4
	Jaksa Agung Muda Pembinaan	25	4	100
	Jaksa agung Muda Intelejen	25	4	100

Bersambung ...

Bersambung . .

No	Lembaga Tinggi Negara	Jumlah	Standar Keluarga	Jumlah Penduduk
V	KEJAGUNG	1	4	4
	Wakil	1	4	4
	Jaksa Agung Muda Pembinaan	25	4	100
	Jaksa Agung Muda Intelejen	25	4	100
	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	25	4	100
	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	25	4	100
	Jaksa Agung Muda Perdata dan tata Usaha Negara	25	4	100
	Jaksa Agung Muda Pengawasan	25	4	100
	Pusat pendidikan dan Latihan	25	4	100
	Pusat penelitian dan Pengemabangan	25	4	100
	pusat penerangan Hukum	25	4	100
	Pusat Informasi dan Statistk	25	4	100
	Total	252	4	1008

Sumber : Kejagung RI dan Asumsi Peneliti 2011

Tabel 5.20
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pegawai Lembaga Non Departemen

I	Lembaga Non Departemen Inti	Jumlah	Jumlah Keluarga	Jumlah Migrasi
1	BIN	443	4	1.772
2	KPU	7	4	28
3	KPK	540	4	2.160
4	PPATK	257	4	1.028
5	BPS	3.123	4	12.492
6	LEMBAGA SANDI NEGARA	18	4	72
7	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	166	4	664
8	ARSIP NASIONAL INDONESIA	127	4	508
9	PERPUSTAKAAN NASIONAL INDONESIA	65	4	260
II	Bank Indonesia	1.804	4	7.216
III	Media Massa Pemerintah			
1	RRI	86	4	344
2	TVRI	86	4	344
	Total	6.550	4	26.200

Sumber : KPU,BPS,LAPTAH PPATK,TVRI,USULAN FORMASI MENPAN 2011 dan Asumsi Peneliti

Tabel 5.21
 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pegawai Lembaga Negara RI

No	Lembaga Negara	Jumlah Anggota/ Pegawai	Jumlah Keluarga	Migrasi
I	LEMBAGA TINGGI NEGARA			
1	MPR	678	4	2.712
	DPR	3.364	4	13.456
	DPD	655	4	2.620
	BPK	870	4	3.480
	MA	1.607	4	6.428
	MK	558	4	2.232
	KY	172	4	688
	PRESIDEN	2.521	4	10.084
	Total	10.425	4	41.700
II	Lembaga Kementerian (33)	19.152	4	76.608
III	Lembaga Setingkat Kementerian			
	Mabes TNI	688	4	2.752
	Mabes POLRI	533	4	2.132
	Kejagung	252	4	1.008
	Total	1.473	4	5.892
IV	Bank Indonesia	1.804	4	7.216
V	Media Massa Pemerintah	172	4	688
1	RRI	86	4	344
2	TVRI	86	4	344
VI	Lembaga Non Departemen Inti			
1	BIN	443	4	1.772
2	KPU	7	4	28
3	KPK	540	4	2.160
4	PPATK	257	4	1.028
5	BPS	3.123	4	12.492
6	LEMBAGA SANDI NEGARA	18	4	72
7	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	166	4	664
8	ARSIP NASIONAL INDONESIA	127	4	508
9	PERPUSTAKAAN NASIONAL INDONESIA	65	4	260
	Total	4.746	4	18.984
	Jumlah Keseluruhan	37.772	4	151.088

Sumber : Hasil Analisa

6. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu faktor penting perkembangan sosial politik di sebuah Negara. Partai politik yang ada di Indonesia berjumlah 38 partai (sumber : KPU tahun 2009) yang kemudian selanjutnya peneliti melakukan proyeksi migrasi penduduk partai politik, disebabkan oleh kekurangan data maka peneliti memberikan asumsi/ketetapan setiap partai politik memiliki jumlah sdm/pegawai 89 orang (Sumber : Partai Demokrat tahun 2011) yang kemudian dikalikan dengan standar keluarga (4 Orang) dan jumlah partai politik sehingga jumlah keseluruhan penduduk migrasi yaitu 13.528 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22
Proyeksi Penduduk Partai Politik

No	Partai Nasional	Jumlah Asumsi	Jumlah Keluarga	Jumlah Migrasi
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	89	4	356
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*	89	4	356
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	89	4	356
4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	89	4	356
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	89	4	356
6	Partai Barisan Nasional (Barnas)	89	4	356
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*	89	4	356
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*	89	4	356
9	Partai Amanat Nasional (PAN)*	89	4	356
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)	89	4	356
11	Partai Kedaulatan	89	4	356
12	Partai Persatuan Daerah (PPD)	89	4	356
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*	89	4	356
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	89	4	356
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)*	89	4	356
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	89	4	356
17	Partai Karya Perjuangan (PKP)	89	4	356
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	89	4	356
19	Partai Penggak Demokrasi Indonesia (PPDI)	89	4	356
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*	89	4	356
21	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	89	4	356
22	Partai Pelopor*	89	4	356
23	Partai Golongan Karya (Golkar)*	89	4	356
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*	89	4	356
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)*	89	4	356

No	Partai Nasional	Jumlah Asumsi	Jumlah Keluarga	Jumlah Migrasi
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)	89	4	356
27	Partai Bulan Bintang (PBB)*	89	4	356
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*	89	4	356
29	Partai Bintang Reformasi (PBR)*	89	4	356
30	Partai Patriot	89	4	356
31	Partai Demokrat*	89	4	356
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	89	4	356
33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	89	4	356
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	89	4	356
35	Partai Merdeka	89	4	356
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	89	4	356
37	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	89	4	356
38	Partai Buru	89	4	356
Jumlah		3.382	4	13.528

Sumber : www.Partai Demokrat.com, Tahun 2011, Asumsi Peneliti, Hasil Analisa

7. Lembaga Asing

Lembaga asing yang dimaksudkan dibawah ini adalah lembaga kedutaan besar Negara dan kantor lembaga perwakilan internasional. Disebabkan oleh keterbatasan data maka ketetapan/asumsi yang digunakan yaitu setiap lembaga asing, internasional berjumlah 31 orang disetiap lembaga, ketetapan ini berdasarkan data jumlah pegawai/sdm di Kedubes RI di Den Haag, Belanda kemudian dikalikan dengan standar keluarga (4 orang). Dari hasil analisa proyeksi yang dilakukan jumlah pegawai/sdm dilembaga asing, internasional berjumlah 6.386 jiwa kemudian dikalikan dengan standar keluarga (4 orang) menjadi 25.544 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.23.

Setelah dilakukan analisa proyeksi penduduk lembaga Negara, partai politik, lembaga asing dan internasional yang akan bermigrasi ke Kota Palangkaraya bila direncanakan menjadi Pusat Pemerintahan NKRI, maka jumlah penduduk keseluruhan dari lembaga – lembaga tersebut berjumlah 190.160 jiwa dan penduduk asli Kota Palangkaraya pada tahun 2011 berjumlah 197.534 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.24. Untuk migrasi dilakukan dalam

2 tahap yaitu tahap pertama pada tahun 2018, 95.080 jiwa dan pada tahun 2023 dengan jumlah 95.080 jiwa.

Tabel 5.23 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pegawai Lembaga Asing/Internasional

No	Lembaga Internasional	Jumlah Asumsi	Jumlah Keluarga	Jumlah Migrasi
I	Kedutaan Besar			
	192	5.952	4	23.808
	Dubes	1	4	4
	Sekretaris	1	4	4
	Fungsi Politik	4	4	16
	Fungsi Ekonomi	3	4	12
	Fungsi Pensosbud	4	4	16
	Fungsi Konsuler	3	4	12
	Petugas Komunikasi	2	4	8
	Fungsi Konsuler	2	4	8
	Bagian Komunikasi	2	4	8
	Bagian Administrasi	2	4	8
	Atase Pertahanan	3	4	12
	Atase Teknis	4	4	16
	Total	31	4	124
2	Lembaga PBB			
	13	31	4	124
	Total	403	4	1.612
3	ASEAN			
	1	31	4	124
	Jumlah	6.386	4	25.544

Sumber : Kedubes RI di Belanda 2010, www.KBRI.Go.ID

Tabel 5.24 Proyeksi Jumlah Penduduk Migrasi Kota Palangkaraya

No	Lembaga Negara	Jumlah Anggota/ Pegawai	Jumlah Keluarga	Migrasi
I	LEMBAGA TINGGI NEGARA			
1	MPR	678	4	2.712
	DPR	3.364	4	13.456
	DPD	655	4	2.620
	BPK	870	4	3.480
	MA	1.607	4	6.428
	MK	558	4	2.232
	KY	172	4	688
	PRESIDEN	2.521	4	10.084
	Total	10.425	4	41.700
II	Lembaga Kementerian (33)	19.152	4	76.608

Bersambung ...

Sambungan . . .

No	Lembaga Negara	Jumlah Anggota/ Pegawai	Jumlah Keluarga	Migrasi
III	Lembaga Setingkat Kementerian			
	Mabes TNI	688	4	2.752
	Mabes POLRI	533	4	2.132
	Kejagung	252	4	1.008
	Total	1.473	4	5.892
IV	Bank Indonesia	1.804	4	7.216
V	Media Massa Pemerintah	172	4	688
1	RRI	86	4	344
2	TVRI	86	4	344
VI	Lembaga Non Departemen Inti			
1	BIN	443	4	1.772
2	KPU	7	4	28
3	KPK	540	4	2.160
4	PPATK	257	4	1.028
5	BPS	3.123	4	12.492
6	LEMBAGA SANDI NEGARA	18	4	72
7	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	166	4	664
8	ARSIP NASIONAL INDONESIA	127	4	508
9	PERPUSTAKAAN NASIONAL INDONESIA	65	4	260
	Total Jumlah	4.746	4	18.984
VII	PARTAI POLITIK (38)	89	4	356
	Total Jumlah	38	4	13.528
	Total Jumlah Keseluruhan Lembaga Negara dan Partai Politik	41.154	4	164.616
VII	Lembaga Negara	Jumlah Anggota/Pegawai	Jumlah Keluarga	Migrasi
I	Kedutaan Besar	5.952	4	23.808
	192	31	4	124
2	Lembaga PBB	403	4	1.612
	13	31	4	124
3	ASEAN			
	1	31	4	124
	Total Jumlah Keseluruhan Lembaga Asing dan Internasional	6.386	4	25.544
	Total Lembaga Negara, Partai politik dan Internasional, Asing	47.540	4	190.160
	Penduduk Kota Palangkaraya Tahun 2011			197.534
	Jumlah Penduduk Seluruhnya			387.694

Sumber : Hasil Analisa

5.4. Analisa Fisik Binaan

Analisa fisik binaan bertujuan untuk mengetahui pola penggunaan lahan, kebutuhan, kondisi serta potensi pelayanan sarana prasarana yang ada di Kota Palangkaraya. Sarana prasarana yang dibahas dalam analisa ini adalah fasilitas, utilitas dan transportasi.

5.4.1. Analisa Penggunaan Lahan

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penggunaan lahan eksisting dan kecenderungan penggunaan lahan di Kota Palangkaraya.

1. Presentase Penggunaan Lahan

Presentase penggunaan lahan di Kota Palangkaraya didominasi oleh hutan basah sekunder dengan luas lahan 1.100,72 Km² (41,1 %), hutan lahan basah primer 286,72 Km² (10,7%), sedangkan permukiman hanya menempati luas lahan 136,33 Km² (5,1 %). Dari hasil analisa diatas menyatakan Kota Palangkaraya secara umum didominasi oleh hutan lahan basah sekunder yang kedepanya masih bisa dikembangkan untuk pembangunan perkotaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.25.

2. Kecenderungan Penggunaan Lahan

Kecendrungan penggunaan lahan (arah perkembangan kota) yang ada di Kota Palangkaraya yaitu terdapatnya tiga titik pusat dominan antarlain pusat satu terletak pada Kecamatan Pahandut yang memiliki radius pengaruh terhadap Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sebangau yang merupakan wilayah yang memiliki kegiatan ekonomi dan sosial budaya yang paling maju. Pusat dua yaitu Kecamatan Bukit Batu merupakan wilayah yang didominasi oleh kegiatan pariwisata, dan Kecamatan Rakumpit merupakan pusat tiga yang merupakan wilayah yang paling tertinggal. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Peta 5.3.

Tabel 5.25
Presentase Penggunaan Lahan Kota Palangkaraya Tahun 2008

No.	Penggunaan Lahan	Kecamatan (Km ²)					Jumlah	%
		Pahandut	Jekan Raya	Bukit Batu	Sebangau	Rakukmpit		
1	Permukiman	29,01	72,01	12,43	1,32	21,56	136,33	5,1
2	Tanah Terbuka	0,00	43,21	22,87	22,66	89,51	178,26	6,7
3	Perkebunan	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	6,92	0,3
4	Pertanian Lahan Kering	14,32	65,66	148,49	32,34	92,44	353,25	13,2
5	Rawa	0,00	7,67	3,12	0,00	138,66	149,44	5,6
6	Belukar Rawa	54,37	17,90	118,84	67,22	163,08	421,41	15,7
7	Semak Belukar	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00	43,19	1,6
8	Batu Gunung	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	2,26	0,1
9	Hutan Lahan Basah Primer	0,00	0,00	14,48	0,00	272,24	286,72	10,7
10	Hutan Lahan Basah Sekunder	19,55	146,17	242,59	416,77	275,64	1100,72	41,1
Jumlah		117,25	352,62	572,00	583,50	1.053,14	2.678,51	100,0

Sumber : RTRW Kota Palangkaraya 2009-2029

5.4.2. Analisa Fasilitas

Analisa fasilitas bertujuan untuk mengetahui potensi pelayanan serta jumlah fasilitas dan lahan yang dibutuhkan. Analisa fasilitas di Kota Palangkaraya dihitung menggunakan standar PU. Fasilitas yang akan dibahas dalam studi ini adalah fasilitas perkantoran, perumahan, perjas, pendidikan kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga serta intensitas bangunan. Adapun rumus yang digunakan dalam mengetahui kebutuhan fasilitas yaitu :

$$\text{Kebutuhan Fasilitas} = \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk Pendukung}}$$

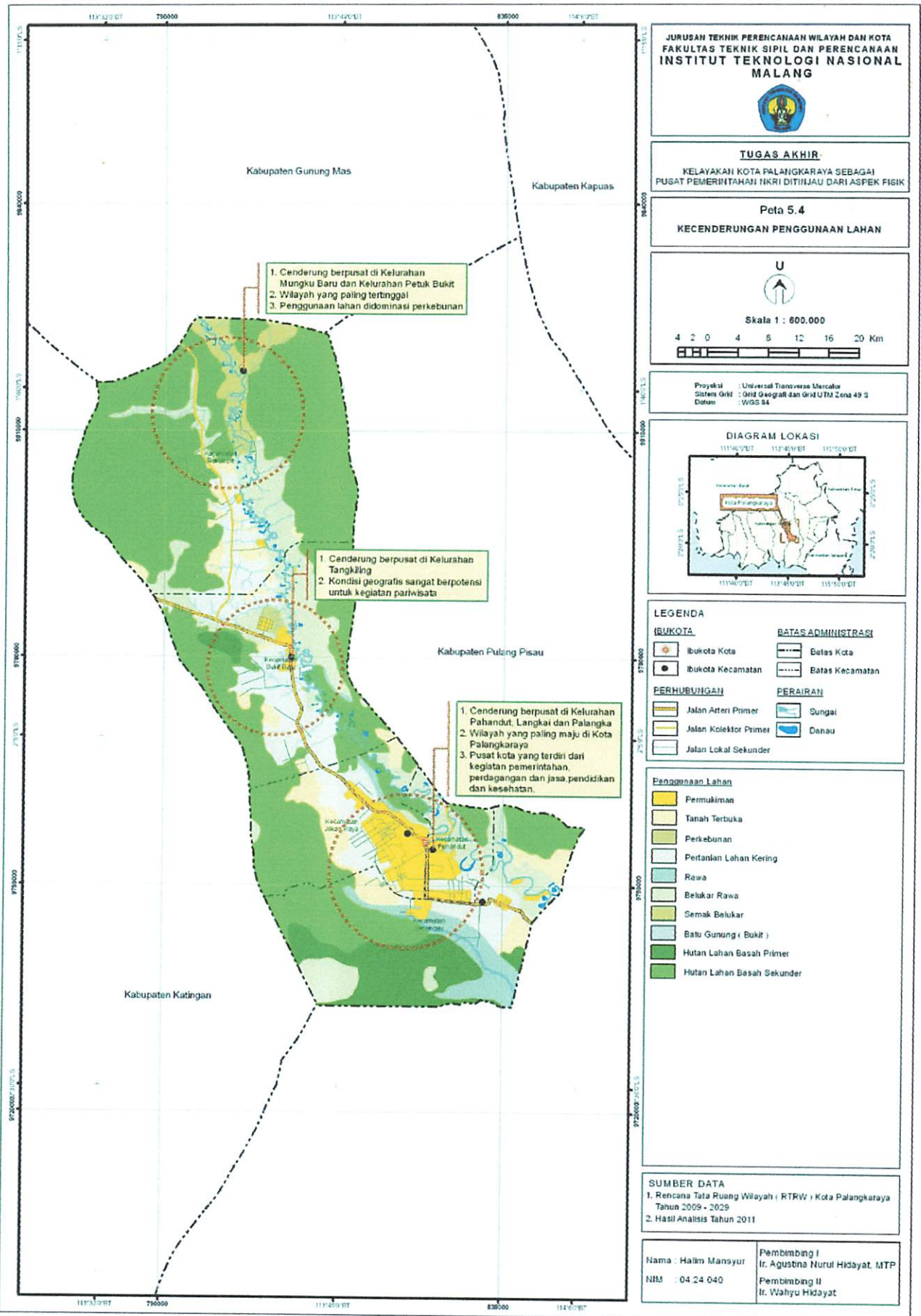
Penilaian potensi pelayanan dilakukan menggunakan cara membandingkan kondisi eksisting dengan standar kebutuhan. Adapun ketentuannya, bila sesuai standar kebutuhan maka dikatakan cukup melayani kebutuhan masyarakat, jika kurang dari standar kebutuhan maka dikatakan kurang cukup untuk melayani masyarakat.

A. Fasilitas Perkantoran

Pengertian Bangunan Gedung Negara menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/prt/m/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah, antara lain seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini analisa yang digunakan untuk fasilitas perkantoran pemerintah pusat adalah analisa berdasarkan Peraturan Menteri PU No.45 Tahun 2007, Tentang Pedoman teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara dan melihat kondisi lapangan menggunakan geogle eart pro. Untuk bangunan rumah negara, klasifikasinya berdasarkan tipe yang didasarkan pada tingkat jabatan penghuninya dan golongan kepangkatan, kemudian ditambahkan presentase lahan yang dibolehkan untuk wialayah DKI Jakarta (Ibukota Negara) berdasarkan Permen PU No.45 Tahun 2007 yaitu 20 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.26 dan 5.27, dan 5.28.

Dari hasil analisa yang dilakukan menyatakan luas lahan yang dibutuhkan berdasarkan Permen PU No.45, untuk kementerian masing-masing dihitung setiap eselon, sedangkan untuk lembaga lainnya digunakan asumsi eselon III, ini dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki oleh peneliti, untuk luas lahan gedung negara adalah 529,9 Ha ditambah 20 % lahan tambahan menjadi 635,84 Ha, sedangkan untuk partai politik nasional dengan jumlah partai berdasarkan data KPU 2009 (38 partai) luas lahanya yaitu 40,58 Ha ditambah 20 % lahan 48,70 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.29, 5.30.



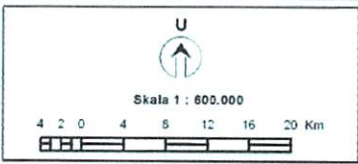
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG



TUGAS AKHIR

KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI
PUSAT PEMERINTAHAN HKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Peta 5.4
KECENDERUNGAN PENGGUNAAN LAHAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 S
Datum : WGS 84



LEGENDA

(BUKOTA)	BATAS ADMINISTRASI
● Ibukota Kota	--- Batas Kota
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan
PERHUBUNGAN	PERAIRAN
— Jalan Arteri Primer	— Sungai
— Jalan Kolektor Primer	— Danau
— Jalan Lokal Sekunder	

Penggunaan Lahan

■ Permukiman	■ Tanah Terbuka
■ Perkebunan	■ Pertanian Lahan Kering
■ Rawa	■ Belukar Rawa
■ Semak Belukar	■ Batu Gunung (Bukit)
■ Hutan Lahan Basah Primer	■ Hutan Lahan Basah Sekunder

SUMBER DATA
1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangkaraya Tahun 2009 - 2029
2. Hasil Analisis Tahun 2011

Nama : Halim Mansyur	Pembimbing I Ir. Agustina Nurul Hidayat, MTP
NIM : 04 24 040	Pembimbing II Ir. Wahyu Hidayat

**Tabel 5.26 Tipe Gedung Negara
Berdasarkan Tingkat Jabatan dan Golongan Kepangkatan**

Tipe	Untuk Keperluan Pejabat/Golongan
Khusus	1) Menteri, Kerpla Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
A	1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi, 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)
B	1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/d dan IV/e.
C	1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a s/d. IV/c.
D	1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya III/a s/d. III/d.
E	1) Kepala Sub Seksi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya II/d kebawah.

Sumber : Permen Pu No.45 Tahun 2007

**Tabel 5.27
Standar Luas Rumah Negara Berdasarkan Tipe Peruntukannya**

Tipe	Luas Bangunan	Luas Lahan
Khusus	400 m ²	1.000 m ²
A	250 m ²	600 m ²
B	120 m ²	350 m ²
C	70 m ²	200 m ²
D	50 m ²	120 m ²
E	36 m ²	100 m ²
Total	926 m²	2.370 m²

Sumber : Permen PU No.45 Tahun 2007

**Tabel 5.28
Asumsi Luas Bangunan dan Lahan Untuk Gedung Negara**

Tipe	Luas Bangunan	Luas Lahan	20%	Total
Khusus	400 m ²	1.000 m ²	200	1.2
A	250 m ²	600 m ²	120	7.2
B	120 m ²	350 m ²	70	420
C	70 m ²	200 m ²	40	240
D	50 m ²	120 m ²	24	144
E	36 m ²	100 m ²	20	120
Total	926 m²	2.370 m²	424	2.494
Total	1.852	4.74	3.94	4.618

Sumber : Permen PU No.45 Tahun 2007

Tabel 5.29
Luas Bangunan dan Luas Lahan Bangunan Negara Yang Di Butuhkan Kota Palangkaraya

No.	Lembaga Negara	Jumlah Anggota/	Luas Gedung	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan Eksisting (Ha)
		Pegawai	(Ha)		
I	LEMBAGA TINGGI NEGARA				
	MPR	678	3,4	8,1	68,0
	DPR	3.364	16,8	40,4	-
	DPD	655	3,3	7,9	-
	BPK	870	4,4	10,4	1,5
	MA	1.607	8,0	19,3	1,4
	MK	558	2,8	6,7	1,1
	KY	172	0,9	2,1	1,0
	PRESIDEN	2.521	12,6	30,3	17,2
	Total	10.425	52,1	125,1	90,2
II	Lembaga Kementerian (33)	19.152	117,6	324,1	72,0
III	Lembaga Setingkat Kementerian				
	Mabes TNI	688	3,4	8,3	3,8
	Mabes POLRI	533	2,7	6,4	7,3
	Kejagung	252	1,3	3,0	4,9
	Total	1.473	7,4	17,7	16,0
IV	Bank Indonesia	1.804	9,0	21,6	6,9
V	Media Massa Pemerintah	172	0,9	2,1	1,7
1	RRI	86	0,4	1,0	0,7
2	TVRI	86	0,4	1,0	1,0
VI	Lembaga Non Departemen Inti				
1	BIN	443	2,2	5,3	1,8
2	KPU	7	0,0	0,1	0,6
3	KPK	540	2,7	6,5	0,4
4	PPATK	257	1,3	3,1	0,4
5	BPS	3.123	15,6	37,5	1,3
6	LEMBAGA SANDI NEGARA	18	0,1	0,2	0,2
7	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	166	0,8	2,0	0,9
8	ARSIP NASIONAL INDONESIA	127	0,6	1,5	1,4
9	PERPUSTAKAAN NASIONAL INDONESIA	65	0,3	0,8	1,2
	Total Jumlah	4.746	23,7	57,0	8,2
	Jumlah Keseluruhan	37.772	203,3	529,9	195

Sumber : Hasil Analisa, Geogel Earth Pro

Tabel 5.30
Kebutuhan Luas Bangunan dan Luas Lahan Partai Politik Nasional

No	Partai Nasional	Jumlah Asumsi	Luas Gedung (Ha)	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan Eksisting (Ha)
1	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	89	0,45	1,07	0,28
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*	89	0,45	1,07	0,28
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	89	0,45	1,07	0,28
4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	89	0,45	1,07	0,28
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	89	0,45	1,07	0,28
6	Partai Barisan Nasional (Barnas)	89	0,45	1,07	0,28
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*	89	0,45	1,07	0,28
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*	89	0,45	1,07	0,28
9	Partai Amanat Nasional (PAN)*	89	0,45	1,07	0,28
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)	89	0,45	1,07	0,28
11	Partai Kedaulatan	89	0,45	1,07	0,28
12	Partai Persatuan Daerah (PPD)	89	0,45	1,07	0,28
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*	89	0,45	1,07	0,28
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	89	0,45	1,07	0,28
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)*	89	0,45	1,07	0,28
16	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)	89	0,45	1,07	0,28
17	Partai Karya Perjuangan (PKP)	89	0,45	1,07	0,28
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	89	0,45	1,07	0,28
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	89	0,45	1,07	0,28
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*	89	0,45	1,07	0,28
21	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	89	0,45	1,07	0,28
22	Partai Pelopor*	89	0,45	1,07	0,28
23	Partai Golongan Karya (Golkar)*	89	0,45	1,07	0,28
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*	89	0,45	1,07	0,28
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)*	89	0,45	1,07	0,28
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)	89	0,45	1,07	0,28
27	Partai Bulan Bintang (PBB)*	89	0,45	1,07	0,28
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*	89	0,45	1,07	0,28
29	Partai Bintang Reformasi (PBR)*	89	0,45	1,07	0,28
30	Partai Patriot	89	0,45	1,07	0,28
31	Partai Demokrat*	89	0,45	1,07	0,28
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	89	0,45	1,07	0,28
33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	89	0,45	1,07	0,28
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	89	0,45	1,07	0,28
35	Partai Merdeka	89	0,45	1,07	0,28
36	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	89	0,45	1,07	0,28
37	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)	89	0,45	1,07	0,28
38	Partai Buru	89	0,45	1,07	0,28
Jumlah		3.382	16,91	40,58	10,64

Sumber : www.KPU.go.id, www.Partai Demokrat.com 2010, Geogle art Pro, Hasil Analisa

Setelah menghitung kebutuhan lahan lembaga tinggi Negara dan partai politik, maka selanjutnya menghitung lembaga perwakilan asing dan lembaga internasional yang berada di Indonesia (Kota Jakarta).

Untuk analisa lembaga – lembaga asing dan internasional di dasarkan pada Peraturan Menteri PU No.45 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (standar luas lahan untuk eselon III). Dari hasil analisa menyatakan bahwa jumlah kebutuhan lahan untuk Kedubes (192) adalah 71,4 Ha, untuk perwakilan PBB 4,8 Ha, ASEAN 0,37 Ha. Secara keseluruhan lahan yang dibutuhkan oleh lembaga asing dan lembaga internasional adalah 76,63 Ha kemudian ditambah luas lahan 20% menjadi 92 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.31.

Setelah didapatkan luasan lahan minimum dari lembaga negara, partai politik nasional, lembaga asing dan lembaga internasional, kemudian dijumlahkan secara keseluruhan kebutuhan luas lahan yaitu 647 Ha kemudian ditambahkan luas lahan 20 % menjadi 776 Ha, sedangkan bila dilihat dengan kondisi eksisting kebutuhan gedung/lahan yang ada di Jakarta berkisar 354,4 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.32.

Tabel 5.31
Luas Bangunan Lembaga Asing

No	Lembaga	Jumlah Pegawai	Luas bangunan (Ha)	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan Eksisting (Ha)
I	Kedutaan Besar	5.952	29,8	71,4	138,2
	192	31	0,2	0,4	0,7
2	Lembaga PBB	403	2,0	4,8	9,4
	13	31	0,2	0,4	0,7
3	ASEAN				
	1	31	0,2	0,37	0,7
Total Jumlah Keseluruhan Lembaga Asing dan Internasional		6.386	31,9	76,63	148,3

Sumber : Daftar Kantor Diplomatik Negara Lain, Menlu, Google Earth Pro, Hasil Analisa

Tabel 5.32
Luas Bangunan dan Luas Lahan Bangunan Di Butuhkan Kota Palangkaraya

No	Lembaga Negara	Jumlah Anggota /Pegawai	Luas Gedung (Ha)	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan Eksisting (Ha)
I	LEMBAGA TINGGI NEGARA				
	MPR	678	3,4	8,1	68,0
	DPR	3.364	16,8	40,4	-
	DPD	655	3,3	7,9	-
	BPK	870	4,4	10,4	1,5
	MA	1.607	8,0	19,3	1,4
	MK	558	2,8	6,7	1,1
	KY	172	0,9	2,1	1,0
	PRESIDEN	2.521	12,6	30,3	17,2
	Total	10.425	52,1	125,1	90,2
II	Lembaga Kementerian (33)	19.152	117,6	324,1	72,0
III	Lembaga Setingkat Kementerian				
	Mabes TNI	688	3,4	8,3	3,8
	Mabes POLRI	533	2,7	6,4	7,3
	Kejagung	252	1,3	3,0	4,9
	Total	1.473	7,4	17,7	16,0
IV	Bank Indonesia	1.804	9,0	21,6	6,9
V	Media Massa Pemerintah	172	0,9	2,1	1,7
1	RRI	86	0,4	1,0	0,7
2	TVRI	86	0,4	1,0	1,0
VI	Lembaga Non Departemen Inti				
1	BIN	443	2,2	5,3	1,8
2	KPU	7	0,0	0,1	0,6
3	KPK	540	2,7	6,5	0,4
4	PPATK	257	1,3	3,1	0,4
5	BPS	3.123	15,6	37,5	1,3
6	LEMBAGA SANDI NEGARA	18	0,1	0,2	0,2
7	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	166	0,8	2,0	0,9
8	ARSIP NASIONAL INDONESIA	127	0,6	1,5	1,4
9	PERPUSTAKAAN NASIONAL INDONESIA	65	0,3	0,8	1,2
	Total Jumlah	4.746	23,7	57,0	8,2
VII	PARTAI POLITIK (38)	89	0,4	1,1	0,3
	Total Jumlah	38	16,9	40,6	10,6
	Total Jumlah Keseluruhan Lembaga Negara dan Partai Politik	41.154	220,2	570,4	205,6

Bersambung . . .

Sambungan . . .

VII	Lembaga Negara	Jumlah Anggota/ Pegawai	Luas Gedung (Ha)	Luas Lahan (Ha)	Luas Lahan Eksisting (Ha)
1	Lembaga Internasional				
	192,0	31	0,2	0,4	0,7
2	Lembaga PBB	403	2,0	4,8	9,4
	13,0	31	0,2	0,4	0,7
3	ASEAN				
	1,0	31	0,2	0,4	0,7
Total Jumlah Keseluruhan Lembaga Asing dan Internasional		6.386	31,9	76,6	148,3
Total Jumlah Keseluruhan		47.540	252	647	354

Sumber : Hasil Analisa

Selanjutnya mencari kebutuhan luas lahan untuk fasilitas perkantoran pemerintah kota Pusat Pemerintahan NKRI menggunakan pedoman perencanaan lingkungan permukiman kota tahun 1983. Fasilitas perkantoran internal merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh banyak orang sehingga pemeliharaannya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat setempat. Fasilitas perkantoran kota yang dianalisa menggunakan standar penduduk 1.000.000 jiwa, jadi diproyeksikan membutuhkan 1 unit perfasilitas perkantoran yang ada menjadi 8 unit kebutuhan antarlain balai kota, kantor polisi pusat, kantor PLN, kantor PAM, kantor pos pusat, parkir umum dan pemadam kebakaran. Jumlah keseluruhan luas lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas perkantoran adalah 3,1 Ha. Untuk lebih jelasnya data dilihat pada Tabel 5.33.

Tabel 5.33

Proyeksi Jumlah Fasilitas Perkantoran Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk Migrasi
Tahun 2011

No	Sarana	Standar Penduduk Pendukung	Standar Luas Lahan m ²	Kebutuhan Unit	Kebutuhan Lahan m ²
1	Balai Kota	1.000.000	5.000	1	5.000
2	Kantor Polisi Pusat	1.000.000	3.000	1	3.000
3	Kantor PLN	1.000.000	3.000	1	3.000
4	Kantor PAM	1.000.000	3.000	1	3.000
5	Kantor Pos Pusat	1.000.000	3.000	1	3.000
6	Kantor Telepon Pusat	1.000.000	3.000	1	3.000
7	Parkir Umum	1.000.000	10000	1	10.000
8	Pos Pemadam Kebakaran	1.000.000	1000	1	1.000
Luas Keseluruhan			31.000	8	31.000

Sumber : Hasil Analisa

B. Fasilitas Perumahan

Fasilitas perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang harus direncanakan dengan baik. Berdasarkan KEPMEN Permukiman dan Prasarana Wilayah No.373 Tahun 2001, Tentang Sewa Rumah Negara yaitu luas lahan dan komposisi perumahan yaitu :

T i p e	Luas Bangunan	Luas Tanah
A	250 m ²	600 m ²
B	120 m ²	350 m ²
C	70 m ²	200 m ²

Jumlah penduduk yang dijadikan sebagai analisa jumlah fasilitas adalah jumlah penduduk Kota palangkaraya yang berjumlah 197.534 jiwa ditambah dengan jumlah penduduk proyeksi migrasi yang berjumlah 190.160 jiwa dengan jumlah keseluruhan 387.694 jiwa.

Dari hasil analisa fasilitas permukiman menyatakan bahwa kebutuhan perumahan berdasarkan penduduk Kota palangkaraya (197.534 jiwa) jumlah kapling ideal 3.951 Unit dengan luas lahan 79 Ha, kapling sedang 11.852 unit dengan luas lahan 118 Ha, kapling kecil 23.7014 unit dengan luas lahan 165 Ha. Jumlah kebutuhan lahan secara keseluruhan adalah 363 Ha. Untuk kebutuhan perumahan berdasarkan penduduk yang migrasi ke Kota Palangkaraya (190.160jiwa) berjumlah, kapling ideal 3.803 unit dengan luas lahan 228,5 Ha, kapling sedang 11.410 unit dengan luas lahan 399,3 Ha, kapling kecil 22.819 unit dengan luas lahan 456,4 Ha. Jumlah kebutuhan lahan berdasarkan penduduk internal tahun 2011 adalah 363,5 Ha dan migrasi adalah 1.083,9 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.34.

C. Perdagangan dan Jasa

Kebutuhan fasilitas perjas sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk di Kota Palangkaraya. Dari hasil analisa proyeksi fasilitas berdasarkan penduduk internal (197.534 jiwa) menyatakan bahwa kebutuhan fasilitas perjas pada tahun 2011 untuk pusat perbelanjaan niaga 2 berjumlah 2 unit dengan jumlah luas lahan 5,9 Ha, pusat perbelanjaan lingkungan berjumlah 7 unit

dengan luas lahan 8,9 Ha, pasar kecamatan 7 unit dengan luas lahan 6,6 Ha, toko/swalayan 79 buah dengan luas lahan 9,5 Ha.

Peneliti juga menambahkan kebutuhan fasilitas perhotelan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa di Pusat pemerintahan dengan asumsi luas lahan Hotel Indonesia yaitu 25.083 m² yang dibangun pada tahun 1962 oleh Pemerintah Republik Indonesia, peneliti mengasumsikan bahwa dibutuhkan minimal 5 hotel yang ada di Kota Palangkaraya dengan kebutuhan luas lahan seluruhnya yaitu 125.415 m² atau dengan luas 12,5 Ha.

Secara keseluruhan hasil analisa proyeksi fasilitas perdagangan dan jasa berdasarkan penduduk internal menyatakan bahwa kebutuhan untuk luas lahan fasilitas perdagangan dan jasa adalah 30,9 Ha, sedangkan jumlah lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas perjas untuk pusat Pemerintahan NKRI berdasarkan penduduk migrasi adalah 29,7 Ha kemudian ditambahkan luas lahan perhotelan menjadi 42,2 Ha. Secara keseluruhan kajian potensi pelayanan fasilitas perjas yang ada di Kota palangkaraya masih minim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.35.

Melihat kebutuhan pelayanan yang masih minim maka diharapkan kedepan dapat dibangun pusat niaga I dengan standar penduduk 480.000 jiwa dengan luas lahan 9,6 Ha guna mengakomodasi kegiatan perjas di Pusat Pemerintahan NKRI maka lahan yang dibutuhkan yaitu 51,8 Ha.

D. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan fasilitas yang sangat penting guna membangun masyarakat yang cerdas dan maju. Berdasarkan hasil analisa fasilitas pendidikan Kota Palangkaraya, kebutuhan untuk fasilitas pendidikan pada tahun 2011 tingkat SD yaitu 123 unit dengan luas lahan 44,5 Ha, SMP 41 unit dengan luas lahan 11,11 Ha, SMA 41 unit dengan luas lahan 11,11 Ha, dan Perguruan Tinggi 8 Unit dengan 11,76 Ha. Secara keseluruhan fasilitas pendidikan di Kota Palangkaraya membutuhkan lahan seluas 78,3 Ha pada tahun 2011. Untuk kebutuhan penduduk migrasi yaitu seluas 75,5 Ha.

Untuk kajian potensi pelayanan fasilitas pendidikan di Kota Palangkaraya masih belum mencukupi kebutuhan minimum masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.36.

E. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas penting yang bertujuan untuk menyetatkan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa kebutuhan fasilitas Kota Palangkaraya menyatakan bahwa kebutuhan untuk RS 1 unit dengan luas lahan 8,64 Ha, untuk Puskesmas 2 unit dengan luas lahan 0,48 Ha, Puskesmas Pembantu 7 unit dengan luas lahan 0,84 Ha. Secara keseluruhan luas lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas kesehatan adalah 9,96 Ha pada tahun 2011.

Hasil analisa kebutuhan fasilitas kesehatan Kota Palangkaraya berdasarkan jumlah penduduk migrasi 190.160 jiwa, menyatakan bahwa kebutuhan luas lahan untuk RS 17,28 Ha, untuk luas lahan Puskesmas 0,96 Ha, luas lahan Puskesmas Pembantu 0,76 Ha. Secara keseluruhan luas lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas kesehatan penduduk migrasi adalah 9,88 Ha. Untuk kajian potensi pelayanan fasilitas kesehatan di Kota Palangkaraya sudah mencukupi kebutuhan minimum masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.37.

F. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan sarana pendukung dalam meningkatkan nilai rohani dan moral dalam menjalankan kehidupan sehari-hari warga kota. Fasilitas peribadatan diproyeksikan menggunakan penduduk migrasi ini dikarenakan keterbatasan data jumlah penduduk Kota Palangkaraya berdasarkan agama, hasil analisa yang didapatkan yaitu kebutuhan Langgar 76 unit, Masjid Lingkungan 6 unit, Masjid Kecamatan 2 unit, Masjid Kota 1 unit, Gereja Katolik 1 unit, Gereja Protestan 1 unit, Vihara 1 unit dan Pura 1 unit dengan kebutuhan lahan 14,1 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.38.

Tabel 5.34
Proyeksi Kebutuhan Unit dan Lahan Fasilitas Perumahan Kota Palangkaraya

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Rumah (Unit)			Kebutuhan Lahan (m ²)			
				Ideal	Sedang	Kecil	Ideal	Sedang	Kecil	Total
1	2008	191,014	38,203	3,820	11,461	22,922	2,292,168	4,011,294	4,584,336	10,887,798
2	2013	202,058	40,412	4,041	12,123	24,247	2,424,700	4,243,225	4,849,400	11,517,325
3	2018	217,932	43,586	4,359	13,076	26,152	2,615,180	4,576,564	5,230,359	12,422,103
4	2023	227,277	45,455	4,546	13,637	27,273	2,727,324	4,772,817	5,454,648	12,954,789
5	2028	241,748	48,350	4,835	14,505	29,010	2,900,980	5,076,715	5,801,960	13,779,656
6	Migrasi	190,160	38,032	3,803	11,410	22,819	2,281,920	3,993,360	4,563,840	10,839,120
Total				25,404	76,211	152,423	15,242,272	26,673,975	30,484,543	72,400,790

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 5.35

Proyeksi Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kota Palangkaraya

No.	Jenis Fasilitas	Standar Penduduk Pendukung (Jiwa)	Standar Lahan Pendukung (m ²)	Jumlah Eksisting 2008	Kebutuhan Unit						Kebutuhan Lahan (m ²)						Penambahan Tahun 2028	
					2008	2013	2018	2023	2028	Penduduk Migrasi	2008	2013	2018	2023	2028	Penduduk Migrasi	Unit	Lahan (m ²)
1	Pusat Perbelanjaan Niaga I (toko 2+ pasar + bank +kantor 2+industri kecil)	480.000	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pusat Perbelanjaan Niaga II (toko + pasar + bank +kantor 2+industri kecil)	120.000	36.000	-	2	2	2	2	2	2	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	2	72.000
3	Pusat Perbelanjaan Lingkungan (toko2+pasar)	30.000	13.500	8	6	7	7	8	8	6	81.000	94.500	94.500	108.000	108.000	81.000	8	108.000
4	Pasar Kecamatan	30.000	10.000	14	6	7	7	8	8	6	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	60.000	8	80.000
5	Toko/Swalayan	2.500	1.200	77	76	81	87	91	97	76	91.200	97.200	104.400	109.200	116.400	91.200	97	116.400

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 5.36

Proyeksi Jumlah Fasilitas Pendidikan Kota Palangkaraya

No	Jenis Fasilitas	Standar Penduduk Pendukung (Jiwa)	Standar Lahan Pendukung (m ²)	Jumlah Eksisting	Kebutuhan Unit						Kebutuhan Lahan (m ²)						Penambahan Tahun 2028	
					2008	2013	2018	2023	2028	Penduduk Migrasi	2008	2013	2018	2023	2028	Penduduk Migrasi	Unit	Lahan (m ²)
1	SD	1.600	3.600	103	119	126	136	142	151	119	428.400	453.600	453.600	489.600	511.200	543.600	48.000	172.800
2	SMP	4.800	2.700	39	40	42	45	47	50	40	108.000	113.400	113.400	121.500	126.900	135.000	11.000	29.700
3	SMU	4.800	2.700	32	40	42	45	47	50	40	108.000	113.400	113.400	121.500	126.900	135.000	18.000	48.600
4	PT	24.859	14.800	21	8	8	9	9	10	8	118.400	118.400	118.400	133.200	133.200	148.000	-	-

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 5.37

Proyeksi Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Palangkaraya

No	Jenis Fasilitas	Standar Penduduk Pendukung (Jiwa)	Standar Lahan Pendukung (m ²)	Jumlah Eksisting	Kebutuhan Unit						Kebutuhan Lahan (m ²)						Penambahan Tahun 2028	
					2008	2013	2018	2023	2028	Penduduk Migrasi	2008	2013	2018	2023	2028	Penduduk Migrasi	Unit	Lahan (m ²)
1	Rumah sakit	24.000	86.400	3	1	1	1	1	1	1	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	-	-
2	Puskesmas	12.000	2.400	9	2	2	2	2	2	2	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	-	-
3	Puskesmas Pembantu	30.000	1.200	46	6	7	7	8	8	6	7.200	8.400	8.400	9.600	9.600	7.200	-	-

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 5.38
Proyeksi Jumlah Fasilitas Peribadatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Migrasi
Tahun 2018

No	Saran Peribadatan	Standar Penduduk	Standar Luas Lahan m ²	Kebutuhan Unit	Luas Lahan m ²
1	Langgar	2.500	300	76	22.819
2	Mesjid Lingkungan	30.000	1.750	6	11.093
3	Mesjid Kecamatan	120.000	4.000	2	6.339
4	Mesjid Kota (Istiqal Jakarta)	1.000.000	93.500	1	93.500
5	Gereja Katolik	-	3.600	1	3.600
6	Gereja Protestan	-	3.600	1	3.600
7	Vihara	-	100	1	100
8	Pura	-	100	1	100
Jumlah Keseluruhan		1.152.500	106.950	89	141.151

Sumber : Hasil Analisa

G. Fasilitas Rekreasi, Olahraga dan Ruang Terbuka

Fasilitas rekreasi olahraga dan ruang terbuka merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh warga kota untuk melepaskan kejenuhan dan relaksasi. Untuk proyeksi kebutuhan fasilitas rekreasi, olahraga dan ruang terbuka digunakan penduduk migrasi dengan kebutuhan perpustakaan 1 unit, gedung serba guna 1 unit, gedung bioskop 1 unit, Stadion 1 unit, serta kebutuhan taman Nasional 1 unit, TMMI 1 unit, Taman olahraga 9 unit, taman main 76 unit dan pemakaman umum 2 unit dengan kebutuhan lahan 15.339 Ha dengan luas keseluruhan 531,5 Ha. Selain itu dibutuhkan juga jalur hijau yang berfungsi sebagai filter dari daerah industri dan daerah yang menimbulkan polusi dengan luas minimal 15m²/P, maka jumlah lahan jalur hijau yang dibutuhkan yaitu 285,24 Ha. Secara keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas olahraga, rekreasi dan ruang terbuka yaitu 817 Ha. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.39.

Tabel 5.39

Proyeksi Jumlah Fasilitas Rekreasi, Olahraga dan Ruang Terbuka Berdasarkan Jumlah Penduduk Migrasi
Tahun 2011

No.	Sarana	Standar Penduduk Pendukung	Standar Luas Lahan m ²	Kebutuhan Unit	Kebutuhan Lahan m ²
1	Perpustakaan	1.000.000	1.000	1	1.000
2	Gedung Serba Guna	1.000.000	3.000	1	3.000
3	Gedung Bioskop	1.000.000	3.000	1	3.000
4	Gedung Kesenian	1.000.000	3.000	1	3.000
5	Stadion Olahraga (GBK)	-	2.791.000	1	2.791.000
6	Taman Nasional (MONAS)	-	800.000	1	800.000
7	Taman Nasional (TMII)	-	1.500.000	1	1.500.000
8	Taman Main	2.500	1.250	76	95.080
9	Taman Olahraga	30.000	9.000	6	57.048
10	Taman Olahraga	120.000	24.000	2	38.032
11	Taman Olahraga	480.000	144.000	1	144.000
12	Pemakaman Umum	120.000	36.000	2	57.048
Jumlah Keseluruhan		4.752.500	5.315.250	94	5.492.208

Sumber : Hasil Analisa

Dari hasil analisa fasilitas yang dilakukan antaralain fasilitas perkantoran, perumahan, perjas, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi olahraga dan ruang terbuka kebutuhan lahan keseluruhan adalah 2.841,3 Ha. Dengan kebutuhan lahan yang ada di Kota Palangkaraya maka masih dapat mampu menampung kegiatan Pusat Pemerintahan NKRI sedangkan untuk potensi pelayanan minimum secara keseluruhan belum memncukupi, maka dapat disimpulkan Kota Palangkaraya layak menjadi Pusat Pemerintahan NKRI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.40.

Tabel 5.40
Kebutuhan Luas Lahan Fasilitas Kegiatan Pusat Pemerintahan NKRI
Kota Palangkaraya

No	Jenis Fasilitas	Kebutuhan Lahan (Ha)
1	Fasilitas Perkantoran	779,1
2	Fasilitas Perumahan	1.083,9
3	Fasilitas Perjas	51,8
5	Fasilitas Pendidikan	75,5
4	Fasilitas Kesehatan	9,9
6	Fasilitas Peribadatan	14,1
7	Fasilitas Rekreasi, Olahraga dan Ruang Terbuka	817
Jumlah		2.841,3

Sumber : Hasil Analisa

H. Analisa Intensitas Bangunan

Analisa intensitas bangunan merupakan bagian dari analisa amplop ruang. Analisa intensitas bangunan pada wilayah Kota Palangkaraya dibagi atas :

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yaitu bilangan pokok atau prosentase atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yaitu bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
- Koefisien Dasar Hijau (KDH), yaitu angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah daerah perencanaan, 10 % dari RT.
- Tinggi Lantai Bangunan, yaitu jumlah lantai bangunan.

Rumus – rumus yang digunakan untuk menghitung intensitas bangunan antaralain :

$\frac{\text{Luas lantai dasar (LD)}}{\text{Luas Lahan (LH)}} \times 100\% = \text{KDB}$	$\frac{\text{Luas Lahan (LH)} - \text{Luas Lantai Dasar (LD)}}{\text{Luas Lahan (LH)}} \times 100\% = \text{RT}$ <p>Atau</p> $100\% - \text{KDB} = \text{RT}$
$\frac{\text{Luas Lantai Total}}{\text{Luas Lahan}} = \text{KLB}$	
<p>Pertimbangan tinggi bangunan Tinggi bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, risiko kebakaran, teknologi, estetika, dan prasarana.</p>	

Analisa intensitas bangunan yang dilakukan peneliti hanya dilakukan pada fasilitas perumahan bagi pegawai dan fasilitas umum dan sosial khususnya perkantoran. Hasil analisa intensitas bangunan antaralain KDB, KLB, KDH dan TLB diarahkan berdasarkan tiap jenis peruntukannya yaitu :

1. Permukiman

Intensitas bangunan jenis permukiman dibedakan atas :

- Rumah Kapling Besar dengan luas 600 m² dengan KDB 42 %, KLB 0,83, KDH 35 % dan TLB 1 – 2 lantai.
- Rumah Kapling Sedang dengan luas 350 m² dengan KDB 34 %, KLB 0,69, KDH 23 % dan TLB 1 – 2 lantai.
- Rumah Kapling Kecil dengan luas 150 m² dengan KDB 35 %, KLB 0,70, KDH 22,8 % dan TLB 1 – 2 lantai.

2. Fasilitas Umum dan Sosial

Jenis Intensitas Bangunan fasilitas umum dan sosial ini terdapat pada peruntukan bangunan untuk perkantoran yaitu: Perkantoran Pusat Pemerintah NKRI, Partai Politik, Lembaga asing yaitu dengan KDB terendah 36 %, tertinggi 42 %, KLB terendah 1,09 dan tertinggi 1,25, KDH paling rendah 0,005 % dan tertinggi 39,49 %, TLB 1- 3 lantai.

ketinggian lantai bangunan ditetapkan maksimum 3 lantai berdasarkan RTRK kawasan koridor Jalan G.Obos dan Adonis Samad dan Bandar Udara Tjilik Riwut tahun 2007. Ketinggian maksimum ini hanya direncanakan pada kawasan pendidikan dan kawasan komersial, sedangkan untuk guna lahan yang lain ditentukan maksimum 2 lantai. Sedangkan dari hasil pengamatan dilapangan, gedung yang tertinggi di Kota Palangkaraya yaitu Hotel Aquarius dengan jumlah lantai berkisar 8 lantai.

5.4.3. Analisa Utilitas

Analisa utilitas bertujuan untuk mengetahui potensi pelayanan serta jumlah utilitas yang dibutuhkan. Analisa utilitas di Kota Palangkaraya dihitung menggunakan standar PU. Utilitas yang akan dibahas dalam studi ini adalah air bersih, telepon, listrik, dan sampah.

A. Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan hidup yang paling urgen. Untuk air permukaan, saat ini sumber baku air bersih Kota Palangkaraya diolah dari aliran Sungai Kahayan, debit andalan dengan periode 1 dalam 20 tahun (durasi 7 hari)

Sungai Kahayan mencapai sekitar dalam 20 tahun (durasi 7 hari) Sungai Kahayan mencapai sekitar 68 m³/detik (1 hari), 100 m³/detik (7 hari) dan 117 m³/detik (30 hari), dengan kondisi tersebut maka kebutuhan bahan baku air dari Sungai Kahayan masih belum menjadi kendala secara fisik, namun yang perlu mendapatkan perhatian menyangkut tingkat kualitas akibat munculnya pencemaran yang terjadi di wilayah hulu. Sedangkan kondisi air tanah dalam memiliki potensi sebesar 60 liter/detik–125 liter/detik, dan memperlihatkan kondisi kualitas sebagai berikut :

1. Nilai pH umumnya rendah berkisar antara 5,4 hingga 6,5.
2. Kandungan khlor berkisar antara 8,9 hingga 102 mg/liter.
3. Kandungan besi relatif rendah hingga baik sekitar 0,05 hingga 1,0 mg/liter.
4. Kandungan mineral cukup rendah.

Kemudian untuk kondisi air tanah dangkal saat ini telah banyak digunakan oleh penduduk Kota Palangkaraya, berdasarkan data maka potensinya berkisar antara 50 liter/detik – 75 liter/detik, kondisi kualitasnya adalah sebagai berikut :

1. Nilai pH umumnya rendah berkisar antara 4,1 hingga 5,7
2. Kandungan khlor berkisar antara 2,3 hingga 23,6 mg/liter.
3. Kandungan besi relatif rendah hingga baik sekitar 0,03 hingga 0,34 mg/liter.

Dengan kondisi kandungan diatas, maka untuk air tanah dangkal secara fisik tidak cocok untuk penyediaan air minum oleh karena nilai pH yang sangat rendah. Hal itu terjadi karena tingginya kandungan humus tanah dalam alluvium. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan penduduk terhadap penyediaan air minum/bersih ini, maka digunakan standar PU sebagai berikut :

Air bersih kota atau lingkungan dengan ketentuan sambungan rumah dengan kapasitas minimum 110 liter/hari (SK.Menkes No.416 Tahun 1990), Dengan demikian kebutuhan penyediaan air bersih pada tahun 2008 adalah 34.382.520 liter/hari.

Standar kebutuhan air bersih suatu wilayah :

- a) Setiap penduduk membutuhkan 110 lt/orang/hr
- b) Fasilitas sosial dan perkantoran membutuhkan 15 % dari kebutuhan rumah tangga
- c) Fasilitas komersial sebesar 20 % dari kebutuhan rumah tangga
- d) Industri sebesar 10 % dari kebutuhan rumah tangga
- e) Cadangan kebocoran 10 % dari kebutuhan total

Sedangkan untuk PDAM Kota Palangkaraya secara umum mempunyai kapasitas pelayanan 3.603.002 m³ dengan jumlah pelanggan 15.437 jiwa pada tahun 2008, sedangkan sesuai standar kebutuhan yaitu 33.513.406 liter/hari (33.513 m³), ini menggambarkan bahwa di Kota Palangkaraya penggunaan PDAM sudah memenuhi standar pelayanan.

Hasil analisa kebutuhan air bersih Kota Palangkaraya penduduk migrasi sejumlah 190.160 jiwa maka kebutuhan air bersih Kota Palangkaraya menjadi 33.363.572 lt/hr (33.364 m³). Secara keseluruhan potensi pelayanan air bersih Kota Palangkaraya mencukupi bagi kegiatan Pusat Pemerintahan NKRI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.41.

B. Listrik

Energi listrik merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kota Palangkaraya memiliki pembangkit listrik tenaga disel (PLTD) dengan kapasitas 161.270.909 Kwh.

Untuk mengetahui kebutuhan tenaga listrik maka dibutuhkan analisa proyeksi kebutuhan listrik yaitu dengan standar seperti dibawah ini. Pembagian energi listrik untuk penerangan jalan, fasilitas sosial, perdagangan dan industri. Standar yang digunakan untuk menganalisa kebutuhan listrik di suatu wilayah adalah sebagai berikut :

- Diasumsikan 1 Keluarga : 5 Orang
- Rumah tangga (kapling besar) : 5.500 watt (PP.NO.8.Tahun 2001)

- Kebutuhan komersial (ekonomi) : 15 % dari kebutuhan rumah tangga
- Kebutuhan sosial : 10 % dari kebutuhan rumah tangga
- Kehilangan daya : 10 % dari kebutuhan rumah tangga
- Penerangan jalan : 10 % dari kebutuhan rumah tangga
- Cadangan : 10 % dari kebutuhan rumah tangga

Dari hasil analisa pelayanan potensi listrik, total kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik pada tahun 2008 (Asumsi 5.500 Watt) adalah 325.678.870 Watt/hari dan bila terjadi ada penduduk migrasi 190.160 jiwa maka kebutuhan listrik adalah 324.222.800 Watt/hari (324.233 Kwh), sedangkan kapasitas produksi listrik 161.270.909 Kwh/tahun atau 447.975 Watt/hari, maka dapat disimpulkan bahwa potensi pelayanan listrik Kota Palangkaraya masih kurang cukup memenuhi kebutuhan kegiatan sebagai Kota Pusat Pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.42.

C. Telepon

Pembangunan ekonomi harus didukung oleh pembangunan telekomunikasi yang baik. Di Kota Palangkaraya kapasitas sentral dan sambungan terus meningkat. Untuk kapasitas sentral pada tahun 2004 berjumlah 20.036 meningkat menjadi 22.250 pada tahun 2008.

Pembangunan perumahan dilengkapi dengan jaringan telepon umum berisolasi yang sumbernya diperoleh dari Telkom. Kebutuhan telepon di Kota Palangkaraya dapat diproyeksikan berdasarkan acuan : Dalam penyediaan telepon umum ini digunakan standar, yaitu setiap kelompok penduduk dengan jumlah 1.000 jiwa perlu disediakan 20 unit telepon, setiap 200 penduduk disediakan 1 unit telepon umum. Perkiraan kebutuhan sarana telekomunikasi ini disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2028.

Jumlah penduduk Kota Palangkaraya pada tahun 2011 berjumlah 197.534 jiwa Kota Palangkaraya maka dibutuhkan 3.280 sambungan telepon rumah dan 955 telepon umum, jika terjadi migrasi penduduk yaitu 190.160 jiwa maka total sambungan telepon rumah menjadi 3.803 sambungan dan untuk telepon umum 951

sambungan. Untuk potensi pelayanan jaringan telepon cukup baik tetapi bila terjadi penambahan penduduk diharapkan ada perencanaan penambahan kapasitas sambungan telepon sesuai kebutuhan penduduk. Untuk sambungan telekomunikasi lainnya yaitu BTS terdapat 60 buah dengan kapasitas pelayanan 2000 pelanggan persatu BTS, berarti kapasitas pelayanan mencapai 120.000 pelanggan, maka pelayanan jaringan telepon selular melebihi kapasitas jangkauan jaringan telepon menggunakan kabel. Untuk melihat kebutuhan jaringan telepon Kota Palangkaraya dapat dilihat pada Tabel 5.43.

D. Sampah

Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kota, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap kota itu sendiri. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi wilayah. Di Kota Palangkaraya masih memiliki 1 TPA. Untuk potensi pelayanan sampah untuk TPS mencukupi sedangkan untuk TPA belum mencukupi kebutuhan masyarakat karena kurang dari standar yang ditentukan yaitu 2 TPA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.34. Jika penduduk Kota Palangkaraya bertambah 190.160 jiwa maka kebutuhan TPA dan TPS meningkat menjadi 76 unit TPS dan 2 TPA dengan total kebutuhan lahan 3,1 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.44.

Permasalahan sebuah kota salah satunya adalah sampah, maka dari itu sampah perlu penataan yang lebih baik, berdasarkan paradigma lama, proses pengelolaan sampah yaitu dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, terakhir dibuang di TPA. Paradigma tersebut tidak sesuai lagi saat ini, adanya tuntutan lahan yang semakin berkurang, kondisi lingkungan yang tidak mendukung dan berdampak pada masyarakat yang bermukim disekitar lokasi TPA, sehingga paradigma tersebut harus dirubah. Kota Palangkaraya membutuhkan paradigma baru yaitu dari proses pewadahan, pengumpulan,

pemindahan, pengangkutan, buang di TPA terakhir didaur ulang atau disingkat dengan istilah 3R (Reduce/mengurangi/meminimalisir, Recycle/daur ulang melalui suatu proses, Reuse/upaya menggunakan sampah kembali secara langsung). Dengan adanya paradigma tersebut ini mengurangi tumpukan sampah, menjadikan sampah yang dapat bermanfaat dan secara ekonomi menguntungkan dengan proses daur ulang.

Secara keseluruhan potensi pelayanan utilitas yang ada di Kota Palangkaraya belum mencukupi kebutuhan masyarakat setempat, jika terjadi pemindahan pusat pemerintahan maka dibutuhkan pengembangan utilitas yang lebih baik.

5.4.4. Transportasi

Transportasi merupakan urat nadi yang menghubungkan kegiatan-kegiatan yang ada didalam sebuah kota. Analisa transportasi dibagi dalam 2 bagian yaitu transportasi darat dan transportasi udara.

A. Transportasi Darat

Analisa transportasi darat yang akan dibahas adalah analisa transportasi jalan raya.

1. Analisa Transportasi Jalan Raya

Analisa yang dilakukan untuk transportasi jalan raya antarlain, analisa kondisi perkerasan jalan, dan analisa terminal.

a. Analisa Kondisi Perkerasan Jalan

Dari hasil analisa kondisi perkerasan jalan yang dilakukan menyatakan bahwa untuk kondisi jalan di Kota Palangkaraya secara umum pada tahun 2008 dalam kondisi kurang baik ,kondisi jalan yang rusak dan rusak berat berjumlah 227,24 Km (26,45 %) dan 239,43 Km (27,87%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.45.

Tabel 5.41

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Palangkaraya

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air (Liter/Hari)					Total Kebutuhan (Liter/Hari)
			Perumahan	Fasilitas Komersial	Sosial dan Perkantoran	Industri	Cadangan dan Kebocoran	
1	2008	191,014.0	21,011,540	4,202,308	3,151,731	2,101,154	3,046,673	33,513,406
2	2013	202,058.3	22,226,416	4,445,283	3,333,962	2,222,642	3,222,830	35,451,133
3	2018	217,931.6	23,972,479	4,794,496	3,595,872	2,397,248	3,476,009	38,236,104
4	2023	227,277.0	25,000,470	5,000,094	3,750,071	2,500,047	3,625,068	39,875,750
5	2028	241,748.3	26,592,318	5,318,464	3,988,848	2,659,232	3,855,886	42,414,748
6	Migrasi	190,160.0	20,917,600	4,183,520	3,137,640	2,091,760	3,033,052	33,363,572

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 5.42

Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Palangkaraya

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Listrik (Watt)						Total Kebutuhan (Watt)	
			Perumahan	Fasilitas Komersial	Sosial dan Perkantoran	Kehilangan Daya	Penerangan Jalan	Cadangan	Watt	KWH
1	2008	191,014.0	210,115,400	31,517,310	21,011,540	21,011,540	21,011,540	21,011,540	325,678,870	32567.887
2	2013	202,058.3	222,264,159	33,339,624	22,226,416	22,226,416	22,226,416	22,226,415.94	344,509,447	34450.9447
3	2018	217,931.6	239,724,791	35,958,719	23,972,479	23,972,479	23,972,479	23,972,479.11	371,573,426	37157.34262
4	2023	227,277.0	250,004,701	37,500,705	25,000,470	25,000,470	25,000,470	25,000,470.09	387,507,286	38750.72864
5	2028	241,748.3	265,923,179	39,888,477	26,592,318	26,592,318	26,592,318	26,592,317.95	412,180,928	41218.09282
6	Migrasi	190,160.0	209,176,000	31,376,400	20,917,600	20,917,600	20,917,600	20,917,600	324,222,800	32422.28

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 5.43
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Telepon Kota Palangkaraya

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Sambungan	
			Telepon	Telepon Umum
1	2008	191.014	3.82	955
2	2011	197.534	3.951	988
3	2013	202.058	4.041	1.01
4	2018	217.932	4.359	1.09
5	2023	227.277	4.546	1.136
6	2028	241.748	4.835	1.209
7	Migrasi	190.18	3.803	951

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 5.44
Proyeksi Jumlah TPA dan TPS Sampah Kota Palangkaraya

No	Jenis Fasilitas	Standar Penduduk Pendukung (Jiwa)	Standar Lahan Pendukung (m ²)	Jumlah Eksisting	Kebutuhan Unit						Kebutuhan Lahan (m ²)					Penambahan Tahun 2028		
					2008	2013	2018	2023	2028	Penduduk Migrasi	2008	2013	2018	2023	2028	Penduduk Migrasi	Unit	Lahan (m ²)
1	TPS	2.500	200	177	76	81	87	91	97	76	15,200	16,200	17,400	18,200	19,400	15,200	-	-
2	TPA	120.000	10.000	1	2	2	2	2	2	2	20	20	20	20	20	20	1	10,000
Jumlah				178	78	83	89	93	99	78	15,220	16,220	17,420	18,220	19,420	15,220	1	10,000

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 5.45
Analisa Kondisi Perkerasan Jalan Kota Palangkaraya Tahun 2005-2008

Tahun	Kondisi Jalan						%	Jumlah	
	Baik	%	Sedang	%	Rusak	%			Rusak Berat
2005	83,871	10,12	178,97	21,60	299,15	36,11	266,43	32,16	828,43
2006	105,67	12,76	188,24	22,72	289,89	34,99	244,63	29,53	828,43
2007	167,81	20,26	211,52	25,53	333,67	40,28	115,43	13,93	828,43
2008	224,74	26,16	167,56	19,51	227,24	26,45	239,43	27,87	858,97

Sumber : Hasil Analisa

b. Analisa Terminal

Terminal angkutan umum yang ada di Kota Palangkaraya diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Berdasarkan lokasi terminal dan
- 2) Berdasarkan tipe terminal

Terminal penumpang angkutan umum yang berdasarkan lokasi dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu terminal permanen yang terdiri dari terminal Tjilik Riwut dan terminal Datah Manuah, yang dimaksud dengan terminal yang sifat lokasinya permanen disini adalah bahwa lokasi terminal tersebut sudah tetap. Sedangkan terminal yang sifat lokasinya sementara atau darurat adalah terminal Bundaran Burung dan terminal Mihing Manasa, yang dimaksud dengan terminal penumpang angkutan umum sementara atau darurat adalah terminal yang tempat atau lokasinya hanya bersifat sementara.

Sedangkan berdasarkan tipe terminal yang ada di Kota Palangkaraya terdapat 3 tipe yaitu tipe A, tipe terminal B dan terminal tipe C. Terminal Palangka Raya merupakan terminal tipe A, yang termasuk tipe terminal B adalah terminal Tjilik Riwut, terminal Bundaran Burung dengan masing-masing luas terminal 20.000 m², dan terminal Datah Manuah dengan luas 4.000 m². Untuk tipe terminal yang ada di Kota Palangkaraya dapat dilihat pada tabel 5.46.

Dari kondisi ril atau eksisting yang telah diuraikan diatas maka dapat dianalisis dengan menggunakan analisis kebutuhan ruang terminal. Yang menjadi landasan atau pedoman sebagai standart dalam penentuan kebutuhan ruang terminal dibagi menjadi 4 (empat) variabel yaitu ruang kendaraan, pemakai jasa,

operasional dan ruang luar. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel syarat kebutuhan luas terminal pada Tabel 5.47.

Dari standart atau syarat yang digunakan dalam penyusunan tataran transportasi lokal Kota Palangkaraya yang kemudian disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada maka dapat disimpulkan bahwa untuk terminal Palangka Raya merupakan terminal tipe A, terminal Tjilik Riwut dan terminal Bundaran Burung memiliki ukuran yang tergolong standart untuk terminal tipe B. Sedangkan terminal Datah Manuah memiliki luasan yang kurang dari standart yang telah ditentukan untuk terminal tipe C yaitu dengan luasan yang dimiliki seluas 4.000 m². Maka untuk terminal Datah Manuah lebih cenderung tergolong pada terminal tipe C.

Tabel 5.46
Tipe dan Ukuran Terminal Kota Palangkaraya

No	Nama Terminal	Tipe	Ukuran Terminal
1	Palangka Raya	A	200 x 200 M
2	Tjilik Riwut	B	100 X 200 M
3	Bundaran Burung	B	100 X 200 M
4	Datah Manuah	C	50 X 80 M
5	Mihing Manasa	C	60 X 70 M

Sumber : DISHUB Kota Palangkaraya Dan Dephub Dirjen Perhubdat 2008

Tabel 5.47
Syarat Kebutuhan Luas Terminal (M²)

No	Ruang	Luasan (M ²)		
		Tipe A	Tipe B	Tipe C
1	Kendaraan	10.065	7.510	3.800
2	Pemakai Jasa	5.394	4.620	1.038
3	Operasional	321	235	90
4	Ruang Luar	6.653	4.890	1.554
Total		23.494	17.255	5.463

Sumber : Tartalok Kota Palangkaraya Tahun 2005-2010

Untuk terminal Mihing Manasa yang secara eksisting masuk kedalam terminal tipe C, setelah dianalisa menggunakan standart luasan kebutuhan terminal, kedua terminal tersebut belum memenuhi syarat untuk terminal tipe C dimana masing-masing terminal memiliki luasan 4.200 m².

Secara keseluruhan kebutuhan terminal di Kota Palangkaraya cukup baik, bila direncanakan kedepan menjadi Pusat Pemerintahan NKRI maka diharapkan membangun sebuah terminal Tipe A untuk mendukung transportasi yang ada.

B. Transportasi Udara

Transportasi Udara merupakan salah satu transportasi yang digemari oleh masyarakat yang beraktifitas padat dan mengutamakan kenyamanan dalam perjalanan. Di Kota Palangkaraya sendiri terdapat Bandar Udara Tjilik Riwut yang melayani penerbangan skala regional dan nasional. Untuk penerbangan regional kalimantan hanya mampu melayani penerbangan antar wilayah internal kalimantan tengah sedangkan untuk penerbangan nasional hanya pada kota Surabaya, Jakarta dan Balikpapan.

Bandar Udara Tjilik Riwut berdasarkan standar Depertemen Perhububungan termasuk Bandar Udara kelas I dengan status pelayanan ADC dan mampu didarati oleh Boeng 737-400/500, luas lahan 230,2 Ha sedangkan untuk Bandar Udara Soekarno Hatta merupakan Kelas 1A, dengan luas lahan keseluruhan 1.740 Ha, lebar runway 3660 x 60 m yang dapat didarati oleh pesawat B-747, B-400, dan Air Bus 31 dan Air Bus 33.

Dari hasil analisa transportasi udara berdasarkan komperatif Bandar udara internasional Soekarno Hatta maka dapat dinyatakan bahwa Bandar Udara Tjilik Riwut belum memenuhi standar Bandar Udara Internasional yang dapat didarati oleh Pesawat berukuran B-737, B-400, Air Bus 31 dan Air Bus 33.

Secara keseluruhan sarana prsarana transportasi yang ada di Kota Palangkaraya masih belum mendukung kegiatan Kota Pusat Pemerintahan NKRI seperti kondisi jalan dan bandar udara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.48 dan 5.49.

Tabel 5.48

Spesifikasi Bandar Udara Tjilik Riwut Kota Palangkaraya

BANDAR UDARA TJILIK RIWUT	
Kode IATA / Kode ICAO	PKY / WAOP
Nama Bandara	TJILIK RIWUT
Kelas	Kelas I
Pengelola	UPT Ditjen Hubud
Jenis Pesawat Udara Terbesar	Boeing-737, 200, 300, 400, 500
Jarak dari Kota	15 Km
Fasilitas Sisi Udara)	
Landasan (Runway)	
Dimensi	2.500 m x 45 m
Azimuth	16-34
PCN	35 FCXT
Fasilitas Sisi Darat	
Terminal	7.688 m ²
Hanggar	391 m ²
Kargo	400 m ²
Operasional	2.180.466 m ²
Administrasi	873 m ²

Sumber : www.Dephub.Go.Id, 2011

Tabel 5.49

Spesifikasi Bandar Udara Soekarno Hatta

BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA	
Kode IATA / Kode ICAO	WIII/CGK
Nama Bandara	SUEKARNO HATTA
Kelas	Kelas I A
Pengelola	PT. Angkasa Pura II
Jenis Pesawat Udara Terbesar	Boeing-737, Boeing 400,A33,A31
Jarak dari Kota	20 Km
Fasilitas Sisi Udara)	
Landasan (Runway)	
Dimensi I	3,660 x 60 m ²
Dimensi II	3,660 x 61
PCN	120/DW/T
Fasilitas Sisi Darat	
Apron	876.522 m ²
Terminal	292,072 m ²
Kargo	48838 m ²
Parkir	115.459 m ²
Administrasi	873 m ²

Sumber : www.PT. Angkasa Pura.com, 2012

5.5. Rumusan Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan NKRI Ditinjau Dari Aspek Fisik

Dari hasil analisis penelitian mengenai studi Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan NKRI di Tinjau dari Aspek Fisik, diperoleh beberapa temuan yang menjadi rumusan kelayakan, sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian ini yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.50 dan 5.51, sehingga dapat memudahkan pembacaan karakter kelayakan pusat pemerintahan dan perbandingannya ibukota Negara lain dengan Kota Palangkaraya.

Perbandingan Ibukota Negara Di Dunia Dengan Kota Palangkaraya

NO	VARIABEL	SUB VARIABEL	PERBANDINGAN IBUKOTA NEGARA DI DUNIA					
			RRC	USA	INDONESIA	JERMAN	AUSTRALIA	INDONESIA
			Beijing	Washington D.C.	Jakarta	Berlin	Canberra	Palangkaraya
1	Aspek Fisik	Geografis <ul style="list-style-type: none"> Lokasi / letak Ketersediaan lahan luas kota Jarak Dengan Kota Terdekat 	Kawasan Pesisir Pantai	Tepi Sungai Potomach	Tepi Sungai Ciliwung	Tepi Sungai Rhine	Tepi Sungai Molonglo	Diwilayah Tepi Sugai
			1.680 KM ²	177 KM ²	740 KM ²	892KM ²	814 KM ²	2.678,51 Km ²
			897 - Nanjing	592 - Kentucky	21 - Bekasi	70 - Poland	286 - Sydney	191 Km - Banjarmasin
2	Aspek Kependudukan	Demografi <p>Populasi penduduk</p> <p>Kepadatan Penduduk</p>	22 juta Jiwa (Tahun 2010)	601.723 Jiwa (Tahun 2010)	9.588.198 Jiwa (Tahun 2010)	3.450,889 Jiwa (Tahun 2010)	358.222 jiwa (Tahun 2011)	191.014 jiwa
			13.100/km ²	3.784.4 / km ²	12.951,8/km ²	3,869.4 / km ²	428.6/km ²	71 jiwa/Km ²
3	Aspek Transportasi	Transportasi Darat : <ul style="list-style-type: none"> Kereta Api Bus Kota Transportasi Udara: <ul style="list-style-type: none"> Bandar Udara Skala Internasional 	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada	Ada Ada	- -
			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tipe A (skla Nasional)

Sumber : Hasil Analisa

			KOTA LANGKARAYA
1	<p>ASPEK FISIK</p> <p>A.FISIK DASAR</p>	<p>Daerah Rawan Bencana Prioritas Rawan Bencana Dalam Hal Ini Adalah Bencana Alam Dengan Stadium Yang Menyebabkan Kerusakan Fisik Yang Tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukan merupakan wilayah gunung berapi atau aman dari jangkauan efek radius gunung berapi • Bukan merupakan wilayah gempa bumi/episentrum gunung berapi • Bukan merupakan wilayah jangkauan tsunami atau efek radius pencapaian bahaya tsunami • Bukan merupakan wilayah banjir dalam skala besar/banjir bandan yang bias merusak dalam skala besar • Memiliki gerakan tanah yang rendah sehingga meminimalisasi bencana longsor • Bukan merupakan wilayah titik api/hot spot sehingga sedikit mengalami bencana kebakaran hutan <p>Luas Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luas Wilayah Keseluruhan yang cukup untuk mendukung kegiatan pusat pemerintahan minimal 1.200 Km² (120.000 Ha) • Luas Wilayah Layak Bangunya memenuhi kebutuhan kegiatan fisik, sosial, ekonomi untuk pusat pemerintahan minimal 840 Km² (84.000 Ha) • Luas wilayah Lindung Minimal 30 % dari Total keseluruhan Wilayah dengan luas lahan 360 km² (36.000 Ha) • Daya tampung memenuhi kegiatan penduduk/pegawai/sdm pemerintahan minimal 1 juta jiwa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aman dari jangkauan gunung berapi • Aman dari jangkauan dari bencana gempa bumi (rendah) • Aman dari jangkauan bencana tsunami • Aman dari bencana banjir dalam skala besar • Aman dari bencana gerakan tanah • Memiliki titik hot spot/api dalam skala sedang <ul style="list-style-type: none"> • Luas wilayah keseluruhan 2.678,51 Km² • Luas lahan layak bangun 2.331,61 Km² • Luas wilayah lindung 264,85 • Daya tampung maksimum 13.233.445 jiwa • Lahan yang tidak produktif

	<p>B. FISIK BINAAN</p>	<p>Rentang Kendali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarak darat yang jauh dan sulit dijangkau lewat transportasi darat Minimal 150 Km dari Kota Pelabuhan • Waktu tempuh udara yang cepat maksimal 5 Jam dari tiap Propinsi, Waktu tempuh darat yang lambat <p>Berlokasi Disekitar Tepi Sungai Dan Jauh Dari Laut Serta Bukan Merupakan Wilayah Yang Cocok Untuk Kegiatan Pertanian Lokasi Ditepi Sungai Yang Berada Disebuah Pedalaman Wilayah Sehingga Dapat Menghambat Pertumbuhan Penduduk Dan Ekonomi Sehingga Dapat Mempertegas Tugas Dan Fungsi Ibukota Negara.</p> <p>Krietria UU 29 Tahun 2007 Tentang Ibukota Negara RI Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 4 Dan Pasal 5 Menyatakan Bahwa Propinsi Jakarta Adalah Daerah Khusus Yang Berfungsi Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Sekaligus Sebagai Daerah Otonom Pada Tingkat Propinsi Yang Memiliki Kekhususan Tugas, Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Sebagai Tempat Kedudukan Perwakilan Asing, Serta Pusat/ Perwakilan Lembaga Internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu tempuh darat dengan kota pelabuhan terdekat dengan Jarak ke Kota Sampit (227 Km/4 Jam) dan Banjarmasin (191 Km/3 jam) • Waktu tempuh udara Jakarta-Palangka Raya 1,15 jam Surabaya-Palangka raya 1,04 jam • Merupakan wilayah yang di aliri Sungai Kahayan Panjang 526 Km yang dapat dilayari 500 Km Lebar rata-rata 450 Meter Kedalaman sungai 7-8 Meter • Merupakan wilayah terbilang pedalaman Propinsi Kalteng
--	-------------------------------	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fisik Binaan • Pola Ruang ❖ Fasilitas <p>Fasilitas Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan standar komperatif fasilitas perkantoran pemerintahan di Kota Jakarta • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU untuk Gedung Negara Negara No.45 Tahun 2007 <p>Fasilitas Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU Standar Rumah Sehat Kaplun Ideal : 600 m² : 1 Kaplun sedang : 350 m² : 3 Kaplun Kecil : 100 m² : 6 <p>Fasilitas Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk. <p>Fasilitas Perdagangan Dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan masih sangat mendukung untuk berbagai macam pembangunan perkantoran pemerintah NKRI • Luas lahan masih sangat mendukung untuk berbagai macam pembangunan permukiman • Luas lahan masih sangat mendukung untuk berbagai macam pembangunan fasilitas pendidikan • Untuk potensi pelayanannya masih sangat kurang • Luas lahan masih sangat mendukung untuk berbagai macam pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa • Untuk potensi pelayanannya masih sangat kurang
--	--	---	---

		<p>Fasilitas Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk <p>Fasilitas Media Masa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk dan lahan Berdasarkan standar PU untuk Gedung Negara Negara No.45 Tahun 2007 <p>❖ Utilitas</p> <p>Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk <p>Listrik (Energi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk <p>Telepon (Telekomunikasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lahan masih sangat mendukung untuk berbagai macam pembangunan fasilitas kesehatan • Untuk potensi pelayanannya masih sangat kurang • Luas lahan masih sangat mendukung untuk berbagai macam pembangunan fasilitas media masa pemerintahan • Kualitas air bersih rendah • Untuk potensi pelayanan air bersih cukup • Untuk potensi pelayanan energi listrik terbilang masih kurang cukup • Untuk potensi pelayanan telekomunikasi masih terbilang cukup, diharapkan kedepan ada pengembangan jaringan telekomunikasi yang lebih baik.
--	--	---	---

		<p>Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan kebutuhan standar pendukung penduduk Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk • Sarana Prasarana Transportasi <ul style="list-style-type: none"> ❖ Transportasi Darat <p>Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jaringan jalan, perkerasan Sesuai dengan kebutuhan standar Berdasarkan standar PU SPM Minimal sesuai standar kebutuhan Penduduk. <p>Terminal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Terminal Tipe A Memiliki Terminal Tipe B Kondisi Terminal Layak 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk potensi pelayanan sampah masih sangat kurang • Luas lahan masih mencukupi • Untuk potensi pelayanan jalan masih kurang, masih memiliki presentase rusak yang lebih dari 50 %. • Untuk potensi pelayanan terminal cukup baik karena memiliki 1 terminal tipe A Diharapkan kedepan ditambah 1 terminal tipe A.
--	--	--	---

2	ASPEK KEPENDUDUKAN	<p style="text-align: center;">❖ Transportasi Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status Bandara Udara Internasional Kelas : 1 A Tipe Pesawat Yang Didarati minimal : B-739 dan B-747 Volume masuk keluar pesawat terus meningkat (banyak) <p style="text-align: center;">❖ Kependudukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk Maksimal 2 juta jiwa Kepadatan penduduk Maksimal 1500 jiwa/ Km² 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk potensi pelayanan transportasi udara masih kurang karena hanya memiliki bandar udara tipe A yang hanya dapat didarati oleh pesawat B-737 • Jumlah penduduk 191.014 jiwa (2008), proyeksi jumlah penduduk tahun 2028 yaitu 241.748 jiwa • Kepadatan penduduk tahun 2008 71 /Km², pada tahun 2028 90/Km²
---	--------------------	---	--

Sumber : Hasil Analisa

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab ini, menjelaskan tentang kesimpulan dari proses kegiatan penelitian sesuai dengan sasaran yang dicapai dan memuat usulan menyangkut tema studi berikutnya yang berkaitan dengan perencanaan pusat pemerintahan NKRI kedepannya.

6.1. Kesimpulan

Dari hasil tahapan analisa yang telah dilakukan tentang Studi Kota Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintahan NKRI ditinjau dari aspek fisik, terdapat temuan-temuan analisa yang akan dipaparkan dibawah ini.

- 1 Rentang kendali Kota Palangkaraya cukup jauh dari kota pelabuhan yang menghambat perkembangan ekonomi dan jarak kota-kota lain di Indonesia terbilang cukup dekat sehingga memudahkan efektifitas dan efisiensi menuju Pusat Pemerintahan kedepan. Kemudian untuk daerah rawan bencana, secara umum Pulau Kalimantan dan Kota Palangkaraya masih aman dari bencana alam, maka dapat disimpulkan Kota Palangkaraya layak dikembangkan menjadi Kota pusat Pemerintahan NKRI dilihat dari kajian regional.
- 2 Luas kawasan budidaya/lahan layak bangun Kota Palangkaraya seluas 2.331,61 Km². Untuk kelerengan optimum kawasan potensi pengembangan perkotaan yang terdapat di wilayah penelitian meliputi sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, sedangkan untuk daya tampung maksimum Kota Palangkaraya sebesar 13.233.445 jiwa, maka dapat disimpulkan berdasarkan aspek fisik dasar Kota Palangkaraya Layak dikembangkan menjadi Kota Pusat Pemerintahan NKRI.
- 3 Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Palangkaraya yaitu 0,012 %/tahun dengan jumlah dan kepadatan penduduk proyeksi pada tahun 2028 yaitu 241.748 Jiwa dengan tingkat kepadatan 90 jiwa/Km. Sedangkan Jumlah

Penduduk keseluruhan dari lembaga – lembaga yang bermigrasi yaitu 190.160 jiwa. Maka dapat disimpulkan bahwa Kota Palangkaraya memiliki pertumbuhan penduduk yang kecil dan kepadatan yang rendah, apabila terjadi migrasi penduduk, maka Kota Palangkaraya dapat menampung jumlah penduduk migrasi tersebut.

- 4 Penggunaan lahan Kota Palangkaraya secara umum didominasi oleh hutan lahan basah sekunder yang kedepannya masih bisa dikembangkan untuk pembangunan perkotaan.

Sedangkan untuk kecenderungan penggunaan lahan (arah perkembangan kota) yang ada di Kota Palangkaraya yaitu terdapatnya tiga titik pusat dominan antarlain pusat satu terletak pada Kecamatan Pahandut yang memiliki kegiatan ekonomi dan sosial budaya yang paling maju. Pusat dua yaitu Kecamatan Bukit Batu merupakan wilayah yang didominasi oleh kegiatan pariwisata, dan Kecamatan Rakumpit merupakan pusat tiga yang merupakan wilayah yang paling tertinggal.

- 5 Kebutuhan lahan keseluruhan untuk pembangunan fasilitas adalah 2.821,7 Ha sedangkan untuk potensi pelayanannya masih sangat kurang. Dengan kebutuhan lahan yang ada di Kota Palangkaraya masih mampu menampung kegiatan pemerintahan, maka dapat disimpulkan Kota Palangkaraya layak menjadi Pusat Pemerintahan NKRI. Sedangkan untuk kebutuhan lahan untuk utilitas 3,1 Ha untuk tempat pengolahan sampah, untuk potensi pelayanan utilitas yang ada di Kota Palangkaraya belum mencukupi kebutuhan sebagai Kota Pusat Pemerintahan NKRI.
- 6 Kota Palangkaraya memiliki presentase kondisi jalan yang rusak lebih dari 50 % jalan keseluruhan, untuk terminal terdapat satu terminal Tipe A, sedangkan untuk bandar udara merupakan bandar udara kelas I skala nasional diperlukan penambahan lahan 1.509,8Ha. Maka dapat disimpulkan secara keseluruhan sarana prasarana transportasi yang ada di Kota Palangkaraya masih belum mendukung kegiatan Kota Pusat Pemerintahan NKRI seperti kondisi jalan dan bandar udara.

Setelah dilakukan beberapa hasil analisa oleh peneliti seperti kajian regional, fisik dan kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Palangkaraya layak dikembangkan menjadi Kota Pusat Pemerintahan NKRI kedepan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini dari Studi Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Pusat Pemerintahan NKRI di Tinjau Dari Aspek Fisik, maka ada beberapa rekomendasi/usulan yang diharapkan dapat digunakan dalam studi berikutnya. Rekomendasi/usulan tersebut merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya pusat pemerintahan yang ideal, di mana rekomendasi/usulan tersebut antarlain :

1. Pemerintah

Berdasarkan hasil analisa Kota Palangkaraya layak sebagai Pusat Pemerintahan NKRI maka dari itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat seperti melakukan kajian dan studi yang lebih mendalam tentang Kota Palangkaraya sebagai Pusat Pemerintah NKRI dari berbagai aspek, sedangkan untuk pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan fisik binaan seperti fasilitas, utilitas dan transportasi yang mendukung kegiatan kota pusat pemerintahan NKRI.

2. Masyarakat

Kepada rakyat Propinsi Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya harus lebih progresif memberikan ide atau gagasan yang tepat terhadap pusat pemerintahan NKRI, sehingga lebih cerdas mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB) yang mendukung kegiatan Pusat Pemerintahan NKRI.

3. Akademisi

Studi kelayakan Pusat Pemerintahan NKRI di Kota Palangkaraya masih ditinjau dari aspek fisik, diharapkan kedepan teman-teman akademisi melanjutkan studi Pusat Pemerintahan NKRI yang ditinjau dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga kita mendapatkan sebuah Kota Pusat Pemerintahan NKRI yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Arthur B. Gallion, FAIA Simon Eisner, APA, AICP.1992, Pengantar Perancangan Kota, edisi kelima jilid 1, Erlangga, Jakarta

Arthur B. Gallion, FAIA Simon Eisner, APA, AICP.1994, Pengantar Perancangan Kota, edisi kelima jilid 2, Erlangga, Jakarta

Hans-Dieter Evers dan Rudiger Korff.2002, Urbanisme di Asia Tenggara, makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Wijanarka. 2006, Sukarno dan Design Rencana Ibukota RI di Palangkaraya Ombak, Yogyakarta

Internet :

[http://BKPM.org/Profil kalimantan Tengah](http://BKPM.org/Profil%20kalimantan%20Tengah), 12 Juli 2011

[http://Batavia Air.com/ Palangka Raya](http://Batavia%20Air.com/Palangka%20Raya), Surabaya, Jakarta 24 Juni 2011

[http://Info jarak Tempuh.org/Banjarmasin](http://Info%20jarak%20Tempuh.org/Banjarmasin), 12 Juli 2011

<http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing>, 16 Maret 2010

[http://en.wikipedia.org/wiki/Washington, DC](http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,%20DC), 1 Desember 2010

<http://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta>, 16 Maret 2010

<http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin>, 1 Desember 2010

<http://en.wikipedia.org/wiki/Canberra>, 16 Maret 2010

[www://BNPB.go.Id/Peta Rawan Bencana](http://www.BNPB.go.Id/Peta%20Rawan%20Bencana), 27 Maret 2011

[www.Dirjen Perhubungan Udara.go.Id/DEPHUB](http://www.Dirjen%20Perhubungan%20Udara.go.Id/DEPHUB), Profil Bandar Udara, 26 Februari 2011

[www. Kal Star.com](http://www.Kal%20Star.com), Nunukan ke Tarakan, 11 Februari 2012

www.KPU.go.Id, Profil Partai Politik Peserta Pemilu 2009, 3 Juli 2011

www.wikipedia.com Sutikno Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Bencana 2010

www.wikipedia.com Istana Negara, 9 Maret 2011

www.wikipedia.com Istana Negara, 9 Maret 2011

www.wikipedia.com Komplek Parlemen, 9 Maret 2011

www.wikipedia.com Kementerian Indonesia, 22 Juni 2011

www.wikipedia.com Hotel Indonesia, 16 Oktober 2011

www.wikipedia.com Duta Besar, daftar Kantor Diplomatik 14 Juli 2011

www.wikipedia.com Monumen Nasional, 23 Oktober 2011

www.wikipedia.com Taman Mini Indonesia Indah, 16 Oktober 2011

www.wikipedia.com Stadion Utama Gelora Bung Karno, 16 Oktober 2011

www.wikipedia.com, Badan Intelejen Negara, 23 Juni 2011

www.Tempointeraktif.com, Jumlah Anggota Paspampres disusutkan seribu Orang 23 Juni 2011

www.Mesjid Istiqlal.com, Hutan Kota Mesjid Istiqlal, 16 Oktober 2011

Www.Partai Demokrat.com, Dewan Pembina dan Dewan Pengurus 2010-2015, 6 Juli 2011

www.TVRI.Co.Id, Dewan Direksi LPP TVRI Tahun 2010-2011, 3 Juli 2011

Laporan Tahunan Lembaga Negara :

Laporan Tahunan KPK Tahun 2008, Optimalisasi Pelayanan Publik, 24 Juni 2010

Laporan Tahunan MK Tahun 2010, 24 Juni 2010, Membangun Demokrasi Substantif Meneguhkan Integritas Institusi`

Laporan Tahunan MA Tahun 2010, 22 Juni 2011

Laporan Akhir Periode KY Tahun 2005 – 2010, 22 Juni 2011

Rekapitulasi Jumlah Eselon Lembaga Kementerian, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, 22 Agustus 2011

LAMPIRAN



PENYEMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PERANGI MALANG
MANGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

LEMBAR PERSETUJUAN LAYAK SIDANG KOMPREHENSIF

Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : HALIM MANSYUR

NIM : 04.24.040

Judul Tugas Akhir :

**STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI IBUKOTA
NEGARA NKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK**

Tgl Seminar : 24 AGUSTUS 2011

Kelayakan : **Layak / Tidak Layak**

Tugas Akhirnya dijadikan 'Buku Hitam' (Syarat Mengikuti Sidang
Komprensif) dengan catatan sebagai berikut :

catatan :

- Materi kurang layak
- Metodologi kurang sesuai
- Apabila dirasa perlu, dapat menggunakan kertas terpisah.

Pembimbing I

(R. A. NURUL HIDAYATI, MTP)

Pembimbing II

(IR. WAHYU HIDAYAT, MM, MBA)



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAYAK JILID BUKU HITAM**

Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : HALIM MANSYUR

NIM : 04.24.040

Judul Tugas Akhir :

***STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI PUSAT
PEMERINTAHAN NKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK***

Hari/ Tgl Seminar : SENIN, 30 JANUARI 2012

Dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Untuk Tugas Akhirnya dijadikan 'Buku Hitam' (Syarat Mengikuti Sidang

Komprehensif) dengan catatan sebagai berikut :

Contoh :

- Materi kurang layak
- Metodologi kurang sesuai
- Apabila dirasa perlu, dapat menggunakan kertas terpisah.

Pembimbing I

(IR. A. NURUL HIDAYATI, MTP)

Pembimbing II

(IR. WAHYU HIDAYAT MM, MBA)



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

MALANG

Jln. Bend. Sigura-Gura No.2

LEMBAR ASISTENSI

Nama : Hafim Mansyur

N.LM : 09.24.040

Jurusan : T. Perencanaan Wilayah dan Kota

Pembimbing : Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP

No	Tanggal	Keterangan	T. Tangan
1.	08/11/2010	• buat konsep kring • tugas ² us hrs ada di smk. ikr kota kgru → Polteksubuhanka	AK
2.	14/12/10	• lengkapi wewara & metodologi	M
3.	16/12/10	• • tugas ² us rba ... de • apersepsi penelitian auid.	M
4.	21/12/10	• buat design survey. • acc disubmis pembimbing Acc Pbb I Bu Nurul I Pok Wahyu	M
5.	7/6/11	• Buat Dp Grg • Buat proy. mistraas	M
6.	30/6/11	• Selesaikan → konsep & buat DLUY - dasar perenc. / kelayakan.	M
7.	11/7/11	• acc lengkapi laporan • acc seminar keel.	AK

konsep ibukota rgr abd ?



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

Jl. Bendungan Sigura-Gura No.2

LEMBAR ASISTENSI
TUGAS AKHIR (TA)

Nama : HALIM MANSYUR
N.L.M : 0424040
Judul : STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA
SERAGAI RUKOANEGARA DI
Jurusan : T. PLANOLOGI
Pembimbing : IF Wahyu Hidayat, MM

No	Tanggal	Keterangan	T.Tangan
1	10/02/11	kegiatan pskin	— K
2	01/03/11	kec. KEMINTAN propinsi	— K
3	11/06/11	- data ke WDAI TEN- TANG <u>KERINTAN</u> propinsi REMININTAN R.I. - kegiatan pskin & kegiatan di RIT & pskin & ke - DATA 3 PRASANA & PERMINTAN ke dj. ke propinsi - KIRAN OKE & KIR KIR - data ke WDAI TEN- TANG	— K
4	10/07/11	- data ke WDAI TEN- TANG	— K
5	20/07/11	- data ke WDAI TEN- TANG	— K



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



MALANG

Jl. Bendungan Sigura-Gura No.2

LEMBAR ASISTENSI

TUGAS AKHIR (TA)

Nama : HALIM MANSYUR
N.I.M : 0424040
Judul : STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI
IBUKOTA NEGARA MKRI
Pembimbing : Ir. WAHYU HIDAYAT, M.M

No	Tanggal	Keterangan	T.Tangan
1.	19/08/11	- Analisis kondisi lokasi. Perencanaan dgn. kelayakan monev kota LOK. → & fungsinya! ⇒ perencanaan kelayakan DATA? Mg - KONSEPSI PERENCANAAN RING I.	
2.	26/08/11	- B.A. HAKS SEMINAR & TRAK x & KONSEP KELAN Dg PENGOJI KALAN KOT, Kelayakan SEMINTA	



SK. DIKNAS: 421.9/1722/420.304/2002

PRAÇASTA Education and Training Center
Computer - Programming - Design - English - Accounting - Taxation

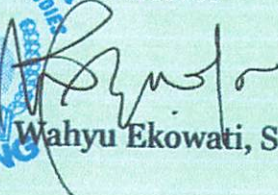
English Language Program
No. 132/PRAÇ - VII/2010

This is to certify **HALIM MANSYUR**, having completed a course of English Language Program to perform TOEFL test, obtained TOEFL equivalent score of 450. The materials test include:

- Listening Comprehension
- Structure
- Reading Comprehension
- Writing



Malang, July 20, 2010
Director


Wahyu Ekowati, SE

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

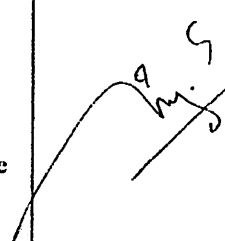
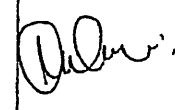


NAMA : Halim Mansyur

NIM : 04. 24. 040

JUDUL : STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA RI

NO	PENGUJI	PERTANYAAN/MASUKAN	TTD
1	DR.IR.Ibnu Sasongko,MT	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana cara menentukan kriteria layak dan tidak layak Palangka Raya menjadi Ibukota Negara RI.2. Jika Kantor pemerintahan dipindahkan semua ke Palangka Raya, multi palayer effect yang ditimbulkan seperti apa ?3. Jika dipindahkan semua fungsi kenegaraan, apakah Kota Palangka Raya mampu menampung kebutuhan fasilitas dan utilitas, serta bagaimana cara menghitungnya ?4. Standar PU belum memadai untuk untuk standar Ibukota Negara RI ?5. Menghitung daya tampung ruang khususnya (Tanah Gambut) terhadap beban lantai serta pengelolaan sumber daya airnya?	

2	Arief Setijawan, ST, MT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mungkinkah Kota Palangka Raya dapat menjadi Ibukota Negara yang hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan saja, tanpa fungsi CBD, Jelaskan dengan cara yang bisa dibuktikan ? 2. Standar Ibukota Negara ? 3. Refrensi tentang kemampuan lahan dalam menampung beban 30 lantai) 4. Kelayakan Lahan tidak cukup dengan SK Mentan dan Kepres 5. Usulan tema lebih difokuskan ke Civic Center sebagai persiapan menjadi Ibukota Negara RI ? 6. Etika dan aturan menulis, sumber harus dikeluarkan, serta tata pemberlakuan paragraf. 	
3	Fanita Cahyaning Arie, ST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokuskan kepada salah satu aspek saja (misalnya aspek fisik) 2. Fokuskan kepada fungsi pemerintahan dengan aspek utama menilai kelayakan fisik 3. Tambahkan refrensi dari teknik sipil 4. Konsepkan tentang fokus pemerintahan. 	

BERITA ACARA SEMINAR HASIL



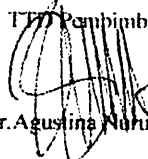
NAMA : Halim Mansyur

NIM : 04. 24. 040

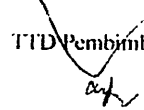
JUDUL : Studi Kelayakan Kota Palangka Raya Sebagai Pusat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

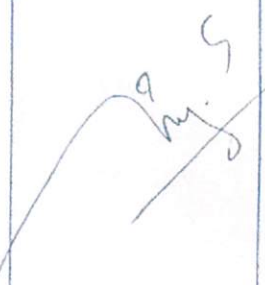

NO	PENGUJI	PERTANYAAN/MASUKAN	TTD
1	DR.IR.Ibnu Sasongko,MT	<ol style="list-style-type: none">1. Hitungan Penduduk2. Hitungan Fasilitas Multiplayer Efek (KDB/KLB)3. Memperhalus Analisa	
2	Maria Crishina E.ST,MIUEM	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu tidak perbandingan waktu tempuh wilayah regional yang lain ? padahal judul TA mau menganalisa kelayakan kota Palangka Raya dari aspek fisiknya ? lalu jarak tempuhnya kemana ?2. Penulisan Abstrak si, spasi 1 banyak kesalahan ketik, masukan nara sumber dari sumber materi3. Pusat pemerintahan yang disebut sebagai pusat pemerintahan itu seperti apa ? pusatnya saja ? seberapa besar ? atau identitas dan karakter ?4. Analisa kesesuaian lahan pakai analisa apa ? bagaimana caranya ?5. Sasaran yang hendak dicapai apa ?	

TTD Pembimbing I


(Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP)

TTD Pembimbing II


(Ir. Wahyu Hidayat, MM)

2	Arief Setijawan, ST, MT	<ol style="list-style-type: none">1. Mungkinkah Kota Palangka Raya dapat menjadi Ibukota Negara yang hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan saja, tanpa fungsi CBD, Jelaskan dengan cara yang bisa dibuktikan ?2. Standar Ibukota Negara ?3. Refrensi tentang kemampuan lahan dalam menampung beban 30 lantai)4. Kelayakan Lahan tidak cukup dengan SK Mentan dan Kepres5. Usulan tema lebih difokuskan ke Civic Center sebagai persiapan menjadi Ibukota Negara RI ?6. Etika dan aturan menulis, sumber harus dikeluarkan, serta tata pemberlakuan paragraf.	
3	Fanita Cahyaning Arie, ST	<ol style="list-style-type: none">1. Fokuskan kepada salah satu aspek saja (misalnya aspek fisik)2. Fokuskan kepada fungsi pemerintahan dengan aspek utama menilai kelayakan fisik3. Tambahkan refrensi dari teknik sipil4. Konsepkan tentang fokus pemerintahan.	



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

Jl. Bendungan Sigura-Gura No.2

LEMBAR ASISTENSI

TUGAS AKHIR (TA)

Nama : HALIM MANSYUR
N.I.M : 0424040
Judul : T.PLANOLOG/STUDI KELAYAKAN KOTA DALANGKA RAYA
SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN NEGERI DITINJAU
Jurusan : T.PLANOLOGI
Pembimbing : IR. AGUSTIHA MURUL HIDAYATI, M.T.P

No	Tanggal	Keterangan	T.Tangan
1.	26/11/11	ada seminar konsep	



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG

Jl. Bendungan Sigura-Gura No.2

LEMBAR ASISTENSI
TUGAS AKHIR (TA)

Nama : HALIM MAMSYUR
N.I.M : 0424040
Judul : STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI PUSAT
PEMERINTAHAN NKRI DARI ASPEK FISIK
Jurusan : T PLANOLOGI
Pembimbing : IR. WAHYU HIDAYAT, MM

No	Tanggal	Keterangan	T.Tangan
1	06/01/12	- USU. DESA KAS, JOMBANG - GUNAKAN METODE NTA - GUNAKAN TEORI KAWALAN KELOMPOK - KEE KEMUKA KONGRE	



PT BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN – 520/I.TA/4/2011 17 Januari 2011
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth : **Bapak. Ir. Wahyu Hidayat, MM.**
Dosen Institut Teknologi Nasional

Di –
MALANG.

Dengan Hormat,

Kami dari Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang sedang mengembangkan perencanaan dari semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu / Bapak untuk membimbing Mahasiswa kami :

Nama : *Halim Mansyur*

NIM : *04.24.040.*

Semester :

Judul TA : *" Studi Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai
Ibukota Negara Republik Indonesia"*

Sejak Tanggal :2011 s/d 2011

(Maksimum 6 bulan). Dalam masa pembimbingan tersebut, Ibu / Bapak didampingi oleh Pembimbing I dari Jurusan kami, yaitu :

Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP. untuk memudahkan penyamanan persepsi dalam penyusunan materi TA tersebut.

Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

a.n. Dekan
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Ub. Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota

DR. Ir. Ibnu Sasongko, MTA.
NIP. Y. 1018 800 178.



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN -519/I.TA/4/2011 17 Januari 2011
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth : **Ibu . Ir. Agustina Nurul Hidayati, MTP.**
Dosen Institut Teknologi Nasional

Di -
M A L A N G.

Dengan Hormat,

Kami dari Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang sedang mengembangkan perencanaan dari semua aspek, tidak hanya dari sisi pandang teknis, tetapi juga dari aspek lain, seperti : perilaku, budaya, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu / Bapak untuk membimbing Mahasiswa kami :

Nama : **Halim Mansyur**

NIM : **04.24. 040.**

Semester :

Judul TA : **" Studi Kelayakan Kota palangkaraya Sebagai Ibukota
Negara Republik Indonesia ."**

Sejak Tanggal : 2011 s/d 2011

(Maksimum 6 bulan). Dalam masa pembimbingan tersebut, Ibu / Bapak didampingi oleh Pembimbing II dari Jurusan kami, yaitu :

Ir. Wahyu Hidayat,MM. untuk memudahkan penyamanan persepsi dalam penyusunan materi TA tersebut.

Besar harapan, Bapak / Ibu dapat menerima permohonan kami. Atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

a.n. D e k a n
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Ub. Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota

DR.Ir. Ibnu Sasongko, MTA.
NIP.Y. 1018 800 178.



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Berdungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

Nomor : ITN – 523/III.TA/4/2011

18 Januari 2011

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Data
Dan Ijin Survey.**

Kepada Yth : **Kepala BAPPEDA
Kota Palangkaraya**

Di –

PALANGKARAYA

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mohon kebijaksanaan Saudara/i, agar mahasiswa/i kami Jurusan Planologi (PWK), Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan. Institut Teknologi Nasional Malang dapat diijinkan untuk :

“ Survey dan Penelitian di Bappeda Kota Palangkaraya .”

Guna Keperluan menyusun Laporan Tugas Akhir / Skripsi.

Judul Skripsi :

” Studi Kelayakan Kota Palangkaraya Sebagai Ibukota Negara R I . ”

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Halim Mansyur

NIM : 04.24.040.

Demikian atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

a.n. REKTOR

Dekan

Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang



BERITA ACARA SEMINAR HASIL



NAMA : Halim Mansyur

NIM : 04. 24. 040

JUDUL : Studi Kelayakan Kota Palangka Raya Sebagai Pusat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

NO	PENGUJI	PERTANYAAN/MASUKAN	TTD
1	DR.IR.Ibnu Sasongko,MT	<ol style="list-style-type: none">1. Hitungan Penduduk2. Hitungan Fasilitas Multiplayer Efek (KDB/KLB)3. Memperhalus Analisa	
2	Maria Cristhina E.,ST,MIUEM	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu tidak perbandingan waktu tempuh wilayah regional yang lain ? padahal judul TA mau menganalisa kelayakan kota Palangka Raya dari aspek fisiknya ? lalu jarak tempuhnya kemana ?2. Penulisan Abstraksi, spasi 1 banyak kesalahan ketik, masukan nara sumber dari sumber materi3. Pusat pemerintahan yang disebut sebagai pusat pemerintahan itu seperti apa ? pusatnya saja ? seberapa besar ? atau identitas dan karakter ?4. Analisa kesesuaian lahan pakai analisa apa ? bagaimana caranya ?5. Sasaran yang hendak dicapai apa ?	

TTD Pembimbing I

(Ir.Agustina Nurul Hidayati,MTP)

TTD Pembimbing II

(Ir.Wahyu Hidayat, MM)



PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam Seminar Komprehensif tingkat Sarjana Jurusan Teknik Planologi
/ Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 30 JANUARI 2012

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : HALIM MANSYUR

NIM : 04.24.040

Perbaikan tersebut meliputi :

- Tata tulis

- Ketepatan materi dgn pembahasan.

- Urutan : kegiatan

pendahuluan
fasilitas

kebunang

- Pembagian 14 layer (→) kebunang

- Kesimpulan - rekomendasi → senawi, det danulsa.

Dosen Penguji

DR. IR. IBNU SASONGKO, MT



PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam **Seminar Komprehensif** tingkat Sarjana Jurusan Teknik Planologi
/ Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 30 JANUARI 2012

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : HALIM MANSYUR

NIM : 04.24.040

Perbaikan tersebut meliputi :

- Standart Vs Miqas Vs Sapa Existing → %
- Argumen → Ibukota Neg lain
→ Bencana Alam
- Redaksional → Kabupaten kebalik

Dosen Penguji

ARIEF SETIYAWAN, ST, MT



PERBAIKAN TUGAS AKHIR

Dalam **Seminar Komprehensif** tingkat Sarjana Jurusan Teknik Planologi / Perencanaan Wilayah & Kota yang diadakan pada :

Hari : **SENIN**

Tanggal : **30 JANUARI 2012**

Perlu adanya perbaikan pada Tugas Akhir untuk :

Saudara : **HALIM MANSYUR**

NIM : **04.24.040**

Perbaikan tersebut meliputi :

- # **Aspek Fisik**
 - Fisik apa jelaskan terlebih dahulu, fisik seperti apa yang merupakan pembahasan disini ?
 - Coba dikurangi data ? yang tidak diperlukan !
 - Gunakan data yang mendukung aspek fisik
 - ↳ Keluarannya bagaimana ? Aspek fisik yang dimaksud apa ? Lokasinya ? Luasannya ? Atau apanya ? Sasaran yg dicapai belum jelas ! → fokuskan !
- # Ada 3 pilihan → ?
- # **Kebutuhan ruang, kantor, perumahan** → analogi yang dipakai ex LT B - tinggi bangunan kantor 1-2 lantai
↓
asumsi dari mana ? Alasannya ? Apa benar ?
- # **Jarak tempuh** → mewakili yang terluar saja ?
- # **Ibukota** → jika pindah apa yg sebenarnya dipindahkan !
→ sbg pusat pemerintahan ?

Dosen Penguji

MARIA ENDARWATI, ST, MIUM

DAFTAR ABSENSI MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI / PWK



Nama Mahasiswa : HALIM MAMSTUR
 NIM : 04 24 040

NO.	NAMA MAHASISWA & NIM	JUDUL SKRIPSI	TID PENGUJI
1.	RIZA HERFANI	KAJIAN PEMBERHENTIAN SEHENTARA ANGGRAH UMUM DI SEKITAR TERMINAL LANJUNGSARI	1 2. <i>San</i> 3. <i>[Signature]</i>
2.	AVIK YAHANI	PENENTUAN LOKASI SPBU PERTAMINA KANGMENG AKOMODIR DI TANJUNG SEIOR	1 2 3. <i>[Signature]</i>
3.	ALVIN DATU	ARAHAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH MELAYAN DESA WAKA KABUPATEN ENDE	1 <i>[Signature]</i> 2 3 <i>[Signature]</i>
4.	GEDE DENY SUTRISNA	PENGUJULAN Sampah Berdasarkan KANJAR	1. <i>San</i> 2. <i>[Signature]</i> 3. <i>[Signature]</i>
5.	Collective Memory Bentuk dan Struktur perkotaan ngimbang Pada wara kolonial	ISWAMORO 03.24.064	1. <i>As.</i> 2. <i>San</i> 3. <i>[Signature]</i>

Mengetahui
 Sekretaris Jurusan

[Signature]
 Arief Setiyawan, ST, MTP

DAFTAR ABSENSI MENGIKUTI
SEMINAR HASIL SKRIPSI
 JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI / PWK



Nama Mahasiswa : HALIM MAHSYUR
 NIM : 0424040

NO.	NAMA MAHASISWA & NIM	JUDUL SKRIPSI	TTD PENGUJI
1.	TATANG FEBRIANTO 😊	KONSEP PENGEMBANGAN SENTERI INDUSTRI MEBEL.....	1. 2. 3.
2.	CITRA FITRIATY	KONSEP POLA RUANG KAMPUS ARAB	1. 2. 3.
3.	FANDI AHMAD	Pengaruh karakter permukiman terhadap tingkat kesehatan penghuninya	1. 2. 3.
4.	RIKKA B ADAS	STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAH WISATA PANTAI UJUNG PANDARAN UNTUK PEMINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	1. 2. 3.
5.	MUHAMMAD ALI	IDENTIFIKASI POLA RUANG BERUMUM SUKSES SUMBAHA BERDASARKAN KEPERLUAN MASYARAKAT Kab. Sumba Timur	1. 2. 3.

Mengetahui
 Sekretaris Jurusan

Arief Setyawan, ST, MTP

DAFTAR ABSENSI MENGIKUTI
UJIAN SKRIPSI / SIDANG KOMPREHENSIF
 JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI / PWK



Nama Mahasiswa : HALIM MANSUR
 NIM : 04 24 040

NO.	NAMA MAHASISWA & NIM	JUDUL SKRIPSI	TTD PENGUJ
1.	TAJFIE M. KARIM	Pengembangan wisata Budaya Di Pulau Hiri Kota Ternate	1. 2. 3.
2.	DICKY F. TALLO	Konsep perencanaan sirkuit Busap Babec	1. 2. 3.
3.	IDENY MUHAMMAD ALI	IDENTIFIKASI pola ruang Bermukiman suku sumba berdasarkan kepercayaan Marapu	1. 2. 3.
4.	WIBBERTUS H DL BEO	Arahni Hta berdasar untuk penanggulangan BANTAR DESA SITIATTO	1. 2. 3.
5.	AKHAD	STUDI ALAMAT PEMATAAN REKAMER LUAR RUANG RENDAH KAN Karakter JALAN	1. 2. 3.

Mengetahui
 Sekretaris Jurusan

Arief Setiyawan, ST, MTP

LEMBAR PERSEMBAHAN

TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

STUDI KELAYAKAN KOTA PALANGKARAYA SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN NKRI DITINJAU DARI ASPEK FISIK

Disusun oleh :

Nama : HALIM MANSYUR

NIM. : 04.24.040

Terimakasih Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemimpin Besar Revolusi Sekalian Alam, Pemimpin Besar Revolusi Nusantara, Pemimpin Besar di Rumahku tercinta, Guru-guruku serta seluruh aparaturnya di Jurusan Planologi ITN Malang, Bumi Pertiwiku, sukses selalu. Alangkah syukurnya setelah sekian lama kurang lebih 7,5 tahun saya secara individu maupun sosial kolektif berebut sebuah kemerdekaan (gelar sabetan) yang bernama Sarjan Teknik Perencana Wilayah dan Kota (ST) pada awal tahun 2012, dimana tahun tersebut diramalkan bangsa barat akan terjadi kiamat besar, tapi itu tidak menggetarkan saya untuk menyusun laporan Tugas Akhir selama tiga tahun terakhir.

Kota Palangkaraya terus memanggilku untuk mengerjakan yang harus kukerjakan, terimakasih pada pemerintah dan rakyatnya yang telah memberikan dukungan data, materi maupun semangat serta doa untuk menyelesaikan tugas besar ini. Bukan merupakan suatu omong kosong belaka pekerjaan perencana Kota ini, seperti yang dikatakan oleh ahli penemu bola lampu Thomas Alva Edison, dia berkata bahwa dari 1 kesuksesan atau mujizat ada 9.999 kegagalan dan kerja keras, disitulah ada sebuah dialetika perjuangan manusia untuk berusaha sekemampuannya dan hasil akhirnya ada di tangan yang Maha Kuasa.

Salam hangat buat teman-teman PL4-NER Indonesia semua atas dukungannya, Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita semua, Tuhan terus memberikan kita yang terbaik berusaha...berusahalah...berusahalah..... Manusia,

INAMAL USRI YUSRA, FA INAMAL USRI YUSRA